

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuian dengan perkembangan keadaan, perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Peraturan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

(1) Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 terdiri atas:

a. BAB I PENDAHULUAN
b. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025
c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
f. BAB VI PENUTUP

(2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijadikan:

a. dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025 NOMOR 51006

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009

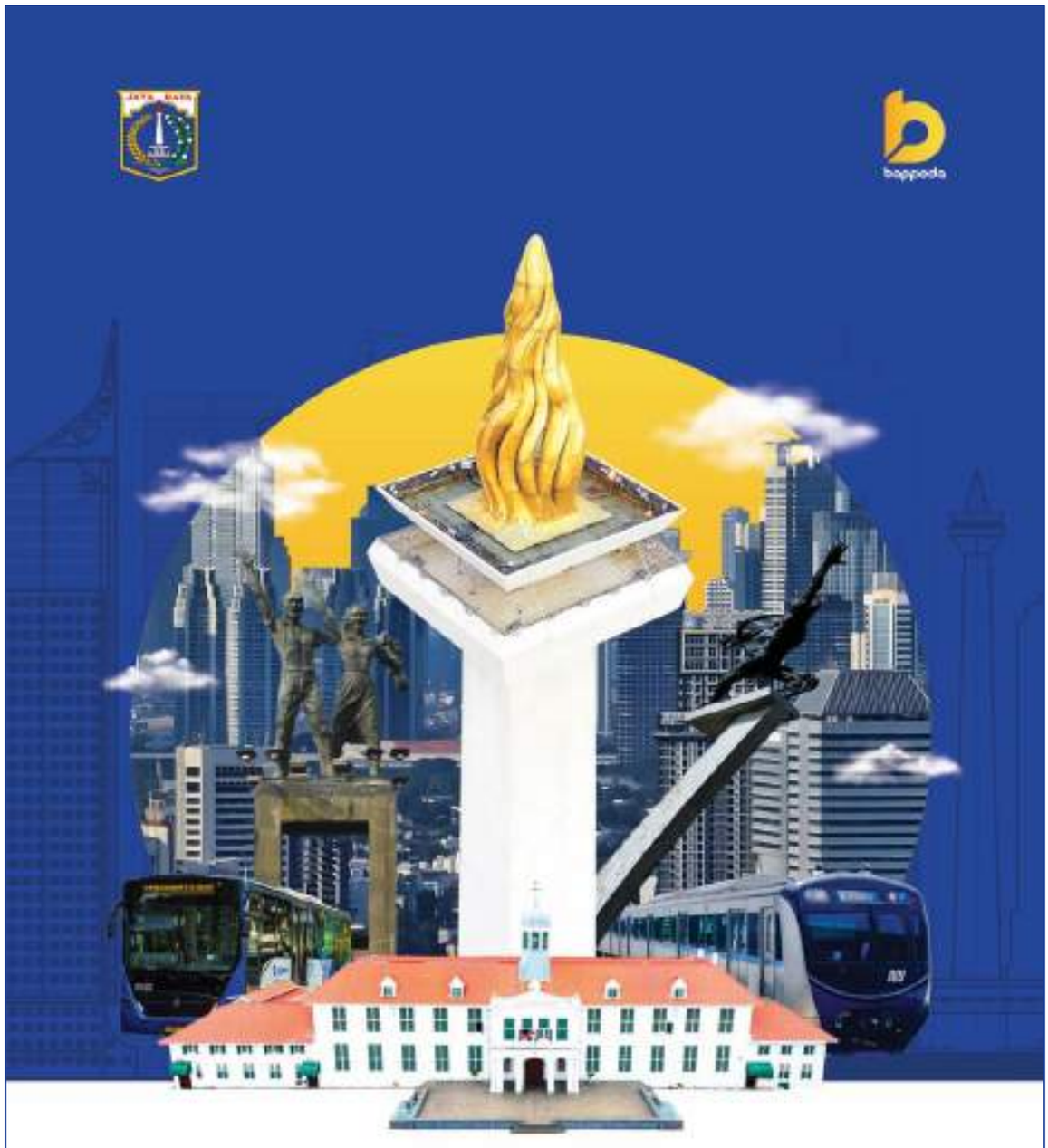
LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025



BUKU 1

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i-2
DAFTAR TABEL i-4
DAFTAR GAMBAR i-6
DAFTAR GRAFIK i-7
DAFTAR SINGKATAN i-8

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-2
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-7
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-11
1.4 Maksud dan Tujuan I-13
1.5 Sistematika Penulisan I-14

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025 ..... II-1
2.1 Evaluasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Triwulan I Tahun 2025 ..... II-3
2.1.1 Tujuan dan Sasaran I II-3
2.1.2 Tujuan dan Sasaran II II-6
2.1.3 Tujuan dan Sasaran III II-8
2.1.4 Tujuan dan Sasaran IV II-10
2.2 Evaluasi Kinerja Program Pembangunan Daerah Triwulan I Tahun 2025 ..... II-13
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II-46
2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajin Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-46
2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-48
2.3.3 Urusan Pemerintah Pilihan II-51
2.3.4 Penunjang Urusan Pemerintahan II-53

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-2
3.1.1 Kinerja dan Prospek Perekonomian Global III-2
3.1.2 Kinerja dan Prospek Perekonomian Nasional III-6
3.1.3 Kinerja, Prospek dan Arah Kebijakan Perekonomian Daerah III-13
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-21
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-22
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-29
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-31

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan IV-3
4.1.1 Arah Kebijakan Nasional Tahun 2025 ..... IV-4
4.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... IV-9
4.2 Jakarta dalam Konteks Kota Global IV-16
4.3 Jakarta Rendah Karbon untuk Ketahanan Iklim IV-23
4.4 Tantangan dan Isu Strategis Pembangunan Tahun 2025 ..... IV-27
4.4.1 Tantangan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 ..... IV-28

4.4.2 Isu Strategis Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... IV-31
4.4.3 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV-53
4.5 Prioritas Pembangunan Tahun 2025 ..... IV-56
4.5.1 Prioritas Pembangunan Wilayah dalam RKP Tahun 2025 ..... IV-56
4.5.2 Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025..... IV-60
4.5.3 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerah Tahun 2025..... IV-92
4.6 Prioritas Pembangunan Kewilayahan IV-134

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1 Kebijakan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah V-2
5.2 Penyesuaian Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah V-3
5.3 Penyesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah.....V-32

BAB VI PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Tujuan dan Sasaran I Pembangunan Daerah Tahun 2025 ..... II-5

Tabel 2.2 Capaian Tujuan dan Sasaran II Pembangunan Daerah Tahun 2025 ..... II-7

Tabel 2.3 Capaian Tujuan dan Sasaran III Pembangunan Daerah Tahun 2025 ..... II-9

Tabel 2.4 Capaian Tujuan dan Sasaran IV Pembangunan Daerah Tahun 2025 ..... II-12

Tabel 2.5 Skala Nilai Peringkat Kerja II-13

Tabel 2.6 Capaian Program Pembangunan Daerah Tahun 2025 ..... II-14

Tabel 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Global III-3

Tabel 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sisi Pengeluaran III-7

Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sisi Lapangan Usaha III-7

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional III-11

Tabel 3.5 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta Sisi Pengeluaran III-13

Tabel 3.6 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta Sisi Lapangan Usaha III-15

Tabel 3.7 Perubahan Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 III-28

Tabel 3.8 Perubahan Target Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... III-30

Tabel 3.9 Perubahan Target Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 III-33

Tabel 3.10 Ringkasan Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... III-34

Tabel 4.1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 ..... IV-5

Tabel 4.2 Sasaran Pembangunan dan Strategi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... IV-11

Tabel 4.3 Peringkat DKI Jakarta dalam Indeks Kota Global IV-17

Tabel 4.4 Karakteristik Kota Global yang Berdaya Saing IV-17

Tabel 4.5 *Gap* Kondisi Jakarta dan Kota Global IV-18

Tabel 4.6 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang DKI Jakarta Tahun 2025-2045 ..... IV-22

Tabel 4.7 Target Indikator Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon Tahun 2025 ..... IV-27

Tabel 4.8 Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... IV-33

Tabel 4.9 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta IV-53

Tabel 4.10 Kebijakan Umum yang Mendukung Implementasi Prioritas Nasional Tahun 2025 ..... IV-56

Tabel 4.11 *Highlight* Indikasi Intervensi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... IV-58

Tabel 4.12 Rumusan Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... IV-61

Tabel 4.13 Keterkaitan Dimensi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... IV-63

Tabel 4.14 Sasaran dan Strategi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ... IV-83

Tabel 4.15 Keterkaitan Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2025 dengan Sasaran RPD Tahun 2023-2026 Provinsi DKI Jakarta IV-92

Tabel 4.16 Keterkaitan Antara Prioritas Nasional Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... IV-98

Tabel 4.17 Keterkaitan antara Prioritas Nasional Tahun 2025, Parameter Kota Global, dengan Dimensi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Prioritas, dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... IV-100

Tabel 4.18 Sandingan Program Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Arah Kebijakan Pengarusutamaan (*Mainstreaming*) Pembangunan Nasional Tahun 2025 ..... IV-121

Tabel 5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Program Prioritas Tahun 2025 .....V-4

Tabel 5.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ..... V-33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran..... I-12
Gambar 3.1 Peta Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Triwulan IV 2024 .....III-9
Gambar 3.2 Peta Inflasi Daerah Tahun 2024..... III-10
Gambar 4.1 Pendekatan Perencanaan Pembangunan IV-2
Gambar 4.2 Kerangka Pikir Perencanaan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025..... IV-3
Gambar 4.3 Skema Tujuan dan Sasaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 ..... IV-9
Gambar 4.4 Strategi Pengendalian Pencemaran Udara Provinsi DKI Jakarta IV-25
Gambar 4.5 Kasus Tuberkulosis di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023..... IV-49
Gambar 4.6 Keterhubungan Ruang Lingkup SPBE dengan Ruang Lingkup SDI IV-52

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Inflasi Global..... III-5
Grafik 3.2 Inflasi Nasional III-10
Grafik 3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi DKI Jakarta III-13
Grafik 3.4 Inflasi Nasional dan Provinsi DKI Jakarta..... III-16

DAFTAR SINGKATAN

A

ABK	:	Analisis Beban Kerja
Adm.	:	Administrasi
AHH	:	Angka Harapan Hidup
AKI	:	Angka Kematian Ibu
AKIP	:	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
AMPK	:	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
AVG	:	*Average*

B

Bakesbangpol	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Bapenda	:	Badan Pendapatan Daerah
Bappeda	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Biro Dikmental	:	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Biro Kesos	:	Biro Kesejahteraan Sosial
Biro KSD	:	Biro Kerja Sama Daerah
Biro ORB	:	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Biro Perkeu	:	Biro Perekonomian dan Keuangan
Biro PLH	:	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Biro Umum dan ASD	:	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah
BKD	:	Badan Kepegawaian Daerah
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BMD	:	Barang Milik Daerah
BPAD	:	Badan Pengelolaan Aset Daerah
BPBD	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPBUMD	:	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
BPK	:	Badan Pemeriksaan Keuangan
BPKD	:	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
BPPBJ	:	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPSDM	:	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BRIN	:	Badan Riset dan Inovasi Nasional
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
B3	:	Bahan Berbahaya dan Beracun

C

CHSE	:	*Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability*
COVID-19	:	*Coronavirus Disease 2019*

D

DAS	:	Daerah Aliran Sungai
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DBM	:	Dinas Bina Marga
Dinas CKTRP	:	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Dinas Dukcapil	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Gulkarmat	:	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Dinas KPKP	:	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Dinas Parekraf	:	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Dinas PMPTSP	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas PPAPP	:	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Dinas PPKUKM	:	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Dinas PRKP	:	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Dinas SDA	:	Dinas Sumber Daya Air
Dinas TKTE	:	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Disbud	:	Dinas Kebudayaan
Dishub	:	Dinas Perhubungan
Diskominfotik	:	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Dispora	:	Dinas Pemuda dan Olahraga
Dispusip	:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Distamhut	:	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
DLH	:	Dinas Lingkungan Hidup
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

G

GNPIP	:	Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
GRK	:	Gas Rumah Kaca

H

HAM	:	Hak Asasi Manusia
HKI	:	Hak Kekayaan Intelektual
HLS	:	Harapan Lama Sekolah

I

IDP	:	Indeks Dimensi Pendidikan
IDSD	:	Indeks Daya Saing Daerah
IKLH	:	Indeks Kota Layak Huni
IKLH	:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKM	:	Indeks Kepuasan Masyarakat
IKN	:	Ibu Kota Negara
IKS	:	Indeks Keluarga Sehat
IKU	:	Indikator Kinerja Utama
Inmendagri	:	Instruksi Menteri Dalam Negeri
IPG	:	Indeks Pembangunan Gender
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
IRB	:	Indeks Risiko Bencana
IRB	:	Indeks Reformasi Birokrasi

J

JCC	:	*Jakarta Convention Centre*
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
JSDP	:	Jakarta *Sewerage Development Project*
JSS	:	Jakarta *Sewerage System*

K

Kab.	:	Kabupaten
KASN	:	Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara
KB	:	Keluarga Berencana

Kehati	:	Keanekaragaman Hayati
Kep.	:	Kepulauan
Kepgub	:	Keputusan Gubernur
Kepmendagri	:	Keputusan Menteri Dalam Negeri
KIA	:	Kartu Indentitas Anak
KJP	:	Kartu Jakarta Pintar
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
KS	:	Keluarga Sejahtera
KTP	:	Kartu Tanda Penduduk
KSPN	:	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
KUA	:	Kebijakan Umum Anggaran
K/L	:	Kementerian/Lembaga

L

LLAJ	:	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
LNPRT	:	Lembaga Non-Profit Rumah Tangga
LPE	:	Laju Pertumbuhan Ekonomi
LPP	:	Laju Pertumbuhan Penduduk
LRT	:	*Light Rail Transit*
LU	:	Lapangan Usaha

M

MICE	:	*Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions*
Monev	:	Monitoring Evaluasi
MRT	:	*Mass Rapid Transit*
Musrenbang	:	Musyawarah Perencanaan Pembangunan

N

NaTaRu	:	Natal dan Tahun Baru
NCICD	:	*National Capital Integrated Coastal Development*

O

OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
OSS	:	*Online Single Submission*

P

PBI	:	Penerima Bantuan Iuran
PD	:	Perangkat Daerah
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
PDB	:	Pendapatan Domestik Bruto
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemilu	:	Pemilihan Umum
Perda	:	Peraturan Daerah
Pergub	:	Peraturan Gubernur
Perkada	:	Peraturan Kepala Daerah
Permen	:	Peraturan Menteri
Permendagri	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perpres	:	Peraturan Presiden
Pilkada	:	Pemilihan Kepala Daerah
PLTS	:	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PKT	:	Pengembangan Kewirausahaan Terpadu
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMKS	:	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PPAS	:	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
PPKS	:	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
PPLH	:	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPH	:	Pola Pangan Harapan

PPP	:	*Purchasing Power Parity*
PSU	:	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
PUSPA	:	Pusat Pelayanan Keluarga

R

RAD	:	Rencana Aksi Daerah
Rakortekrenbang	:	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
RAN	:	Rencana Aksi Nasional
RAPBD	:	Rancangan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah
Raperda	:	Rancangan Peraturan Daerah
RBA	:	*Risk Based Approached*
RDTR	:	Rencana Detail Tata Ruang
Renja	:	Rencana Kerja
Renstra	:	Rencana Strategis
RKA	:	Rencana Kerja dan Anggaran
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RLS	:	Rata-Rata Lama Sekolah
RPD	:	Rencana Pembangunan Daerah
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPRKD	:	Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah
RPTRA	:	Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
RT	:	Rumah Tangga
RTB	:	Ruang Terbuka Biru
RTH	:	Ruang Terbuka Hijau
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah

S

SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintah
Satpol PP	:	Satuan Polisi Pamong Praja
SDGs	:	*Sustainable Development Goals*
SDA	:	Sumber Daya Alam
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SIPD	:	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SI-RPD	:	Sistem Informasi Rencana Pembangunan Daerah
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMART-C	:	*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bounded,* dan *Challenging*
SPAM	:	Sistem Penyediaan Air Minum
SPB	:	*Smart Planning Budgeting*
SPBE	:	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
SPPN	:	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
STBM	:	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

T

TDM	:	*Transportation Demand Management*
THIS	:	Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial

TIK	:	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TKD	:	Transfer ke Daerah
TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPB	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPA	:	Tempat Pemrosesan Akhir
TPS	:	Tempat Penampungan Sementara
TPST	:	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
TW	:	Triwulan

U

UKPD	:	Unit Kerja Perangkat Daerah
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UU	:	Undang-Undang

W

WHO	:	*World Health Organization*
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 1
PENDAHULUAN



Pada bagian ini dijelaskan mengenai **gambaran umum penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025** yang terdiri atas latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD, serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan tidak dapat tercapai tanpa perencanaan yang baik. Perencanaan pembangunan merupakan usaha terencana dan sistematis oleh pemerintah, sesuai dengan aspirasi masyarakat untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan secara menyeluruh, baik langsung maupun tidak langsung. Perencanaan pembangunan yang baik adalah perencanaan yang telah melalui berbagai proses pemikiran dan pertimbangan serta penentuan menyeluruh untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan pembangunan itu sendiri terbagi ke dalam 3 (tiga) periodisasi waktu, yaitu jangka panjang, menengah, dan tahunan. Perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, maupun tahunan di Indonesia terlihat dari adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 5 tahun, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk periode 1 tahun. Indonesia melalui pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dalam 2 (dua) dekade terakhir, telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang pembangunan di tengah dinamika global dan domestik yang begitu tinggi. Berbagai kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional telah membawa Indonesia menjadi *upper middle income country* di tahun 2019 yang ditandai dengan pesatnya peningkatan pendapatan per kapita, yaitu naik menjadi ±6,5x lipat.

Capaian pembangunan nasional yang semakin mengalami perbaikan tersebut, terus berlanjut sampai dengan saat ini. Hal ini terlihat dari adanya perbaikan kinerja di berbagai indikator pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 4,87% (*yoy*) pada triwulan I tahun 2025 dan inflasi yang tetap terkendali di angka 2,40% (*yoy*) pada Mei 2025. Disamping berbagai capaian pembangunan tersebut, dalam implementasinya, perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kompleksitas baik dalam lingkup global, nasional, maupun regional. Sebagaimana diketahui, untuk menjadi negara *high income*, menjadi negara yang masuk ke dalam 5 (lima) besar untuk ranking Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia, serta menjadi negara maju di tahun 2045, masih cukup banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Tiga tantangan utama yang perlu menjadi perhatian, yaitu kondisi geopolitik, akselerasi teknologi dan informasi, serta perubahan iklim. Kondisi geopolitik yang dalam hal ini terlihat dari adanya ketidakstabilan global masih terus berlanjut, terutama konflik berkepanjangan Rusia–Ukraina, ketegangan Palestina-Israel, serta eskalasi krisis di kawasan Timur Tengah. Di sisi lain, ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok juga memengaruhi penurunan volume perdagangan dunia, sehingga memperburuk prospek pemulihan ekonomi global.

Hasil pemilihan umum di Amerika Serikat pada akhir tahun 2024 turut membawa perubahan signifikan terhadap arah kebijakan perdagangan, aliansi strategis, dan investasi global yang berdampak pada dinamika geopolitik dan stabilitas kawasan. Selain itu, ketegangan geopolitik global juga memicu disrupsi pada rantai pasok, mendorong lonjakan harga energi dan pangan, serta meningkatkan volatilitas di sektor keuangan. Perubahan iklim juga memperparah gangguan pasokan, sehingga menyulitkan upaya *bank* sentral dalam mencapai target inflasi. Di saat yang sama, dunia juga tengah menghadapi ancaman yang dikenal sebagai *triple planetary crisis*, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, serta meningkatnya limbah dan polusi. Berbagai dinamika tersebut berimplikasi terhadap pencapaian target pembangunan nasional maupun daerah, baik langsung maupun tidak langsung. Di sisi lain, risiko transisi dari kebijakan pro-ekonomi hijau, seperti penerapan *carbon tax*, berpotensi menambah tekanan terhadap harga komoditas dan barang konsumsi. Namun demikian, di tengah dinamika global yang belum stabil, perekonomian Indonesia diproyeksikan tetap kuat pada tahun 2025 dengan pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 4,8-5,6% (*yoy*), seiring dengan pemulihan konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, dan penguatan ekspor nonmigas.

Disamping pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan akan tetap kuat, inflasi juga diproyeksikan akan tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1 pada 2025 dan 2026. Proyeksi tersebut diperkirakan akan didorong oleh keberlanjutan kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten, serta penguatan implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Selanjutnya, akselerasi teknologi dan informasi dalam ekonomi dan keuangan digital diproyeksikan terus meningkat, ditandai dengan pertumbuhan yang signifikan pada transaksi *e-commerce*, layanan perbankan digital, dan penggunaan uang elektronik sepanjang tahun 2025. Perkembangan tersebut didorong oleh hadirnya *fintech* (*financial technology*) yang memberikan akses lebih luas bagi pelaku ekonomi terhadap sumber pembiayaan. Meskipun demikian, pesatnya inovasi digital juga menghadirkan risiko asimetris, terutama terkait kemampuan pengelolaan risiko yang belum sejalan, sehingga dapat mengancam stabilitas sistem keuangan dan keberlanjutan industri. Dalam rangka memperkuat ekosistem pembayaran digital yang inklusif dan efisien, pemerintah meluncurkan *QRIS TAP* yang diharapkan dapat meningkatkan kecepatan, kenyamanan, dan keandalan transaksi *online* bagi masyarakat.

Sejalan dengan kondisi nasional, kinerja perekonomian Provinsi DKI Jakarta juga terus menunjukkan resiliensi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sebagaimana hasil evaluasi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 15 tahun terakhir terlaksana dengan baik, dengan tingkat keberhasilan pebangunan mencapai 94% atau predikat sangat tinggi. Hal tersebut didukung oleh berbagai data yang menunjukkan bahwa capaian indikator makro pembangunan terus mengalami perbaikan, terutama pertumbuhan ekonomi yang konsisten tumbuh di atas rata-rata nasional, PDRB per kapita tumbuh pesat, peningkatan kualitas SDM (kesehatan dan pendidikan), serta penurunan angka pengangguran. Kondisi tersebut terus terlihat sampai dengan tahun 2025, dimana ekonomi terus mengalami pertumbuhan, yaitu mencapai 4,95% pada triwulan I tahun 2025. Ketahanan ini tercermin dari tetap berputarnya roda perekonomian di Provinsi DKI Jakarta, terutama di sektor perdagangan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Adapun, pada tahun 2025, perekonomian Provinsi DKI Jakarta diperkirakan tumbuh sebesar 4,6–5,4%, dengan tetap memperhatikan penguatan sektor-sektor prioritas untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tengah agenda transformasi Jakarta sebagai kota global.

Di samping capaian positif dalam aspek pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, Provinsi DKI Jakarta masih dihadapkan pada berbagai faktor risiko yang berpotensi menghambat laju pembangunan serta menahan akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Berbagai dinamika tersebut mencerminkan adanya tekanan struktural dan tantangan adaptif yang perlu segera diantisipasi secara holistik dan terintegrasi. Faktor risiko tersebut di antaranya:

a. Implikasi perpindahan Ibu Kota Negara Baru
   Perubahan kedudukan hukum Provinsi DKI Jakarta pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Ibu Kota Negara, yang menempatkan Jakarta sebagai kota global sekaligus pusat kegiatan ekonomi nasional. Transisi ini membutuhkan adaptasi kelembagaan, infrastruktur, dan tata kelola yang jauh lebih dinamis.

b. Arus Urbanisasi
   Provinsi DKI Jakarta tercatat sebagai salah satu dari 70 (tujuh puluh) kota dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Fenomena ini tidak terlepas dari tingginya daya tarik Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi dan bisnis. Namun, dalam dua tahun terakhir, tren arus urbanisasi ke DKI Jakarta menunjukkan perlambatan. Setelah mencatat peningkatan jumlah pendatang hingga mencapai 151.752 orang pada tahun 2022, jumlah pendatang baru setelah Lebaran di tahun 2024 dan 2025 menunjukkan penurunan signifikan, yaitu menjadi 16.207 orang pada tahun 2024 dan diperkirakan hanya 10.000–15.000 orang pada tahun 2025. Penurunan ini dipengaruhi oleh meningkatnya biaya hidup, pengetatan administrasi kependudukan,

serta berkembangnya sistem kerja fleksibel yang mengurangi keharusan tinggal di kota besar. Meskipun demikian, tekanan terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar masih tetap terasa sebagai dampak dari akumulasi pertumbuhan penduduk sebelumnya.

c. Aglomerasi
Aglomerasi megapolitan Jabodetabekpunjur yang terus berkembang menciptakan tekanan terhadap mobilitas, penyediaan infrastruktur dasar, serta tata ruang dan lingkungan. Aglomerasi megalopolis Banten-Jakarta-Jawa Barat diperkirakan akan mencapai 100 juta penduduk di tahun 2045, dan Provinsi DKI Jakarta akan menjadi pusat aglomerasi megapolitan Jakarta-Bandung.

d. Disrupsi teknologi
Perkembangan teknologi yang semakin disruptif, khususnya dalam bidang digital, kecerdasan buatan, dan otomasi, membawa dampak transformasional yang signifikan. Munculnya teknologi baru saat ini cenderung menciptakan perubahan yang bersifat masif, dan berdampak langsung terhadap pola hidup masyarakat, dinamika pasar tenaga kerja, serta sistem pelayanan publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk mampu beradaptasi secara cepat, responsif, dan strategis untuk mengantisipasi risiko serta memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi tersebut.

e. Daya Saing
Sebagai bagian dari jajaran kota global, Provinsi DKI Jakarta diharapkan mampu menciptakan nilai tambah (*high value added*) yang tinggi dalam berbagai sektor strategis, serta memperkuat daya saing ekonominya baik di tingkat nasional maupun internasional. Peran Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan menuntut peningkatan kualitas ekosistem bisnis yang inovatif dan kompetitif. Namun demikian, dibandingkan dengan kota-kota besar lain di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Kuala Lumpur, dan Bangkok, iklim investasi dan daya tarik Jakarta bagi perusahaan multinasional dinilai masih kurang optimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh tantangan dalam kemudahan berusaha, kepastian regulasi, kualitas infrastruktur pendukung, serta stabilitas tata kelola yang inklusif dan responsif.

f. Perubahan Iklim
Peningkatan intensitas banjir rob di kawasan pesisir, penurunan muka tanah, serta memburuknya kualitas udara merupakan gejala nyata dari tekanan lingkungan yang semakin kompleks. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta juga menghadapi risiko ekologis lainnya seperti kekeringan musiman, peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), serta potensi kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim global.

Berbagai keberhasilan pembangunan dalam merespons berbagai disrupsi yang terjadi di tingkat global, maupun faktor risiko yang berpotensi menghambat laju pembangunan sebagaimana penjabaran di atas, tidak terlepas dari peran strategis implementasi kebijakan yang terintegrasi dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya dijalankan secara langsung oleh pemerintah pusat maupun daerah, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat sebagai bagian dari upaya kolaboratif untuk mencapai tujuan pembangunan.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2025-2029 telah membawa cita-cita baru bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” merupakan visi Indonesia periode 2025–2029 yang akan dicapai melalui 8 (delapan) misi yang dituangkan dalam 8 (delapan) Asta Cita. Dalam pelaksanaannya, kedelapan Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat. Adapun kemudian, tingkat keberhasilan visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud tidak akan lepas dari dukungan yang diberikan oleh setiap daerah melalui perencanaan kebijakan di setiap periodenya (Panjang, Menengah, Tahunan). Oleh karena itu, perencanaan untuk tahun 2025 perlu untuk dilakukan penyesuaian agar tetap selaras dengan visi, misi, serta kebijakan pembangunan Presiden dan Wakil Presiden selama periode kepemimpinannya, yaitu tahun 2025-2029. Selain itu, melihat

perkembangan kondisi pada tahun berjalan (2025) serta hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RKPD 2025 hingga triwulan I 2025 yang menunjukkan masih adanya sejumlah dinamika baik dari sisi capaian kinerja maupun tantangan implementasi program di lapangan, menjadi faktor lainnya bahwa perencanaan untuk tahun 2025 di Provinsi DKI Jakarta perlu untuk segera dilakukan penyesuaian kebijakan melalui Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

Dilakukannya Perubahan RKPD di Provinsi DKI Jakarta dengan latar belakang kondisi sebagaimana di atas, apabila merujuk pada dasar hukum yang berlaku dapat dikatakan telah sesuai dikarenakan Pasal 343 Ayat (1) dan Ayat (4) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa:

(1) *Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:*
   a. *Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau*
   b. *Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.*

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Pada hakekatnya, perubahan RKPD ini dijadikan sebagai bentuk respons strategis terhadap perkembangan yang ada, termasuk untuk menjamin efektivitas penggunaan anggaran dan optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan nantinya dalam perumusan kebijakan perubahan, akan dilakukan upaya akselerasi pencapaian target kinerja tahunan agar dapat selaras dengan arah pembangunan jangka menengah, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mampu menjawab tantangan aktual yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada tahapan dan proses penyusunan RKPD sebagaimana diamanatkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Secara khusus, Pasal 9 Ayat (2) Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 mengamanatkan bahwa "*Perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS*".

Selain dua dasar hukum utama sebagaimana tersebut, Perubahan RKPD Tahun 2025 juga mengacu pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kemendagri, yaitu SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/64/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pada Poin 2 (dua) dan Poin 3 (tiga) SE Mendagri sebagaimana dimaksud, diamanatkan bahwa "*Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025*" serta "*Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional*". Isu pembangunan sebagaimana dimaksud di antaranya:

a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan.
b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem.
d. Pengendalian inflasi di daerah.

e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.
f. Dukungan swasembada pangan.
g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Oleh karenanya, dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, Provinsi DKI Jakarta perlu memperhatikan kebijakan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan nasional terbaru.

Sebagaimana diketahui, pelantikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo dan Wakil Gubernur, Rano Karno untuk periode tahun 2025-2030 menjadi gambaran bahwa saat ini Provinsi DKI Jakarta telah memiliki Kepala Daerah setelah menjalani masa transisi selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Pasca pelantikan tersebut, visi dan misi Gubernur terpilih secara langsung dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan jangka menengah (5 tahun) Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini tertuang dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, mempertimbangkan amanat beberapa dasar hukum sebelumnya (Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 serta SE Mendagri Nomor 900.1.1/64/SJ), rumusan perencanaan untuk Perubahan RKPD Tahun 2025 akan mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029. Namun demikian, mempertimbangkan bahwa sampai dengan saat ini dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan, maka Perubahan RKPD Tahun 2025 masih mempertimbangkan beberapa substansi yang ada di dalam dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Adapun kemudian, selain mengacu dan mempertimbangkan berbagai dokumen perencanaan pada tingkat daerah, penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 juga memerhatikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, serta kebijakan nasional lainnya di tahun 2025.

Dalam pelaksanaannya, rumusan kebijakan dalam Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 dilakukan dengan mengadopsi 2 (dua) bentuk pendekatan sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu perencanaan yang berorientasi pada substansi dan perencanaan yang berorientasi pada proses. Empat pendekatan yang digunakan Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berorientasi pada proses, yaitu Teknokratik, Partisipatif, Politis, serta Atas-Bawah dan Bawah-Atas. Selain berorientasi pada proses, perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta juga dilaksanakan dengan menggunakan 4 (empat) pendekatan yang berorientasi pada substansi, yaitu Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Adapun kemudian, Perubahan RKPD Tahun 2025 ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan. Selain itu, Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 juga dilakukan untuk memastikan arah pembangunan Provinsi DKI Jakarta tetap relevan, adaptif, dan selaras dengan dinamika nasional maupun tantangan aktual di lapangan. Proses ini tidak hanya mencerminkan respons daerah terhadap perkembangan kebijakan nasional, tetapi juga menunjukkan komitmen daerah dalam menjaga efektivitas perencanaan dan penganggaran.

Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 diarahkan untuk keberlanjutan pelaksanaan tema pembangunan dalam RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 yaitu

"**Mewujudkan Jakarta Kota Global yang Berketahanan, Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan**"

Proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 mencakup 3 (tiga) tahapan utama yaitu: (a) penyusunan rancangan perubahan RKPD; (b) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan (c) penetapan perubahan RKPD melalui Peraturan Kepala Daerah. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 akan menjadi dasar bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), menjadi acuan dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA), serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2025. Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2025 juga akan mengedepankan efisiensi belanja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam

Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Sebagai bentuk respons terhadap Instruksi Presiden tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 yang menegaskan komitmen daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil. Adapun kemudian, untuk menjalankan seluruh proses perencanaan pembangunan di atas, beberapa metode pelaksanaan juga dirancang untuk dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

a. Penerapan *Dynamic Government* sebagai inovasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
b. Pendekatan spasial dan aspasial melalui 5 Kota dan 1 Kabupaten Administrasi.
c. Kolaborasi pemangku kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan *pentahelix,* berupa pelibatan secara aktif 5 (lima) *stakeholders* utama, yaitu masyarakat, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan media.
d. Kolaborasi pendanaan pembangunan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun sumber pendanaan lain yang sah.
e. Sinkronisasi aplikasi dan interkoneksi data dengan Pemerintah Pusat:
    1) Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) **https://krisna.systems/**
    2) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) **https://sipd-ri.kemendagri.go.id/**
f. Digitalisasi sistem perencanaan meliputi:
    1) *Smart Planning Budgeting* (SPB) DKI Jakarta **https://apbd.jakarta.go.id/**
    2) e-Musrenbang **https://musrenbang.jakarta.go.id/**

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomr 141);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Nomor 187);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara RI Tahun 2021 Nomor 31);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembar Negara Nomor 6881);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
26. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
27. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
28. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
29. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 72);
31. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 180);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
34. Instruksi Pesiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
35. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
44. Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/64/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
47. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27);
48. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201);
49. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205);
50. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201);
51. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 103);
52. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 104);
53. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 62038);

54. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 12031;
55. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 53012);
56. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51013);
57. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 Nomor 63003);
58. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Perlindungan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71020);
59. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71005);
60. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
61. Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Efisiensi dan Penyesuaian Belanja Tahun Anggaran 2025.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 258 dan 260 mengamanatkan bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing Daerah yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai bagian dari SPPN. Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN juga mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. SPPN dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan. Konsep SPPN yang hadir dalam perencanaan pembangunan dituntut untuk dapat:

a. Mengalokasikan sumberdaya pembangunan kedalam kegiatan melalui kelembagaan;
b. Fleksibel dengan horizon perencanaan yang ditetapkan, sehingga tidak terlalu kaku dengan penerapan konsep pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang;
c. Memperluas dan mendiseminasikan kemampuan perencanaan ke seluruh masyarakat.

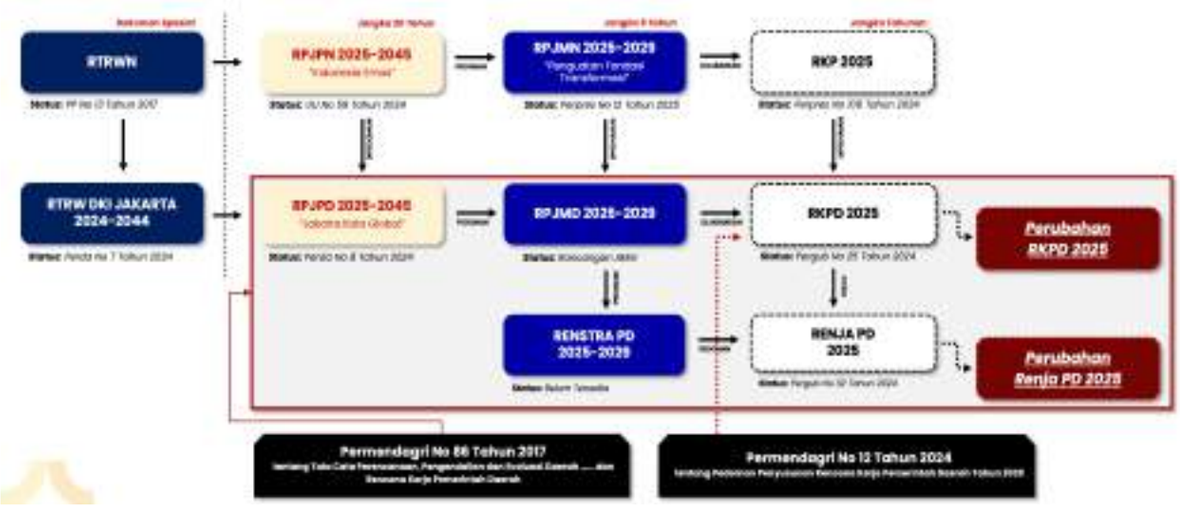
Pada pelaksanaannya, konsep SPPN berjalan beriringan dengan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (*sustainable*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Oleh karena itu, Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan membutuhkan proses koordinasi dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi antar dokumen. Proses harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

a. Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yakni 20 tahun.
b. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yakni 5 (lima) tahun.
c. Dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan dari adanya keselarasan antar dokumen tersebut, yaitu: (1) terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar dokumen perencanaan di tingkat pusat dan daerah; dan (2) menjamin hadirnya dukungan perencanaan daerah terhadap sasaran, program dan target pembangunan nasional.

Dari berbagai landasan hukum sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, 3 (tiga) ketentuan yang menjadi dasar hukum utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Proses sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 di bawah dilakukan secara spasial dan aspasial.

Gambar 1.1
Hubungan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, 2024 (diolah)

Secara a-spasial, keterkaitan antar dokumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut:

a. RKP
Dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan Daerah mengacu serta diserasikan dengan RKP yang merupakan penjabaran dari RPJMN. Substansi RKP yang menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD meliputi tema, agenda pembangunan, dan sasaran pengembangan wilayah dalam dokumen RKP

b. RPJPD Provinsi DKI Jakarta
Dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan Daerah berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) terutama terkait visi dan misi Kepala Daerah, arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, serta kinerja/indikator pembangunan daerah. Kinerja/indikator sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kewenangan, karakteristik, inovasi dan pengembangan Provinsi DKI Jakarta guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

c. RPJMD Provinsi DKI Jakarta
Dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan Daerah merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang merupakan penghubung visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pada RPJPD. Substansi RPJMD yang menjadi

perhatian dalam penyusunan RKPD meliputi sasaran, arah kebijakan, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah.

d. Renstra Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
   Dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan Daerah mengacu pada dokumen Renstra Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD untuk kurun waktu 5 tahun. Adapun selanjutnya dokumen RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (RAPBD) sebelum menjadi APBD.

Keterkaitan antar dokumen tersebut bermakna bahwa dalam mencapai target pembangunan secara nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen RKP, RPJMN, serta RPJPN, dukungan dari daerah menjadi hal yang penting. Target-target pembangunan nasional menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun target pembangunan daerah, sehingga target pembangunan nasional dan target pembangunan daerah dapat selaras. Dukungan dari daerah terhadap target-target pembangunan nasional ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan tingkat daerah, mulai dari RPJPD, RPJMD atau RPD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, hingga Renja Perangkat Daerah.

Selain itu, dokumen-dokumen a-spasial tersebut juga perlu disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial yang berhubungan dengan penataan ruang dan wilayah, antara lain dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta kebijakan dan prioritas pembangunan. Penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 berpedoman, serta dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW Provinsi Derah Khusus Jakarta Tahun 2024-2044. Substansi RKPD yang dipedomani dan perlu diperhatikan dari RTRW adalah terkait arah pengembangan wilayah dalam wujud tujuan, sasaran, serta strategi. Selanjutnya, dalam hal keberlanjutan proses perencanaan menuju proses penganggaran, RKPD juga memiliki peran penting lainnya, yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS, RAPBD, serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, yang mana penyusunan KUA-PPAS harus mengacu pada RKPD yang telah ditetapkan. Adapun pada akhir prosesnya, RAPBD akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi DKI Jakarta.

1.4 Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, yang disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dimaksudkan sebagai:

a. Arah pembangunan tahunan Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025;
b. Pedoman bagi para pemangku kepentingan untuk menyesuaikan perencanaan pembangunan tahun 2025 dengan perkembangan kondisi pada tahun 2025;
c. Acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah bagi Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing- masing berdasarkan perkembangan kondisi pada tahun 2025;
d. Instrumen dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD sebagai kendali penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
e. Pedoman dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah di tahun 2025.

Adapun penyusunan dokumen Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, memiliki tujuan untuk:

a. Menyediakan arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan tahun 2025 disesuaikan dengan perkembangan kondisi pada tahun 2025;
b. Menjadi landasan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

c. Menyediakan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah pada masa transisi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2025 disesuaikan dengan perkembangan kondisi pada tahun 2025;

d. Menyediakan acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2025.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan Pasal 349 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Hubungan Antar Dokumen
1.4 Maksud dan Tujuan
1.5 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Triwulan I Tahun 2025
2.2 Evaluasi Kinerja Program Pembangunan Daerah Triwulan I Tahun 2025
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Arah Kebijakan Pembangunan
4.2 Jakarta dalam Konteks Kota Global
4.3 Jakarta Rendah Karbon untuk Ketahanan Iklim
4.4 Tantangan dan Isu Strategis Pembangunan Tahun 2025
4.5 Prioritas Pembangunan Tahun 2025
4.6 Prioritas Pembangunan Kewilayahan

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kebijakan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
5.2 Penyesuaian Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
5.3 Penyesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah

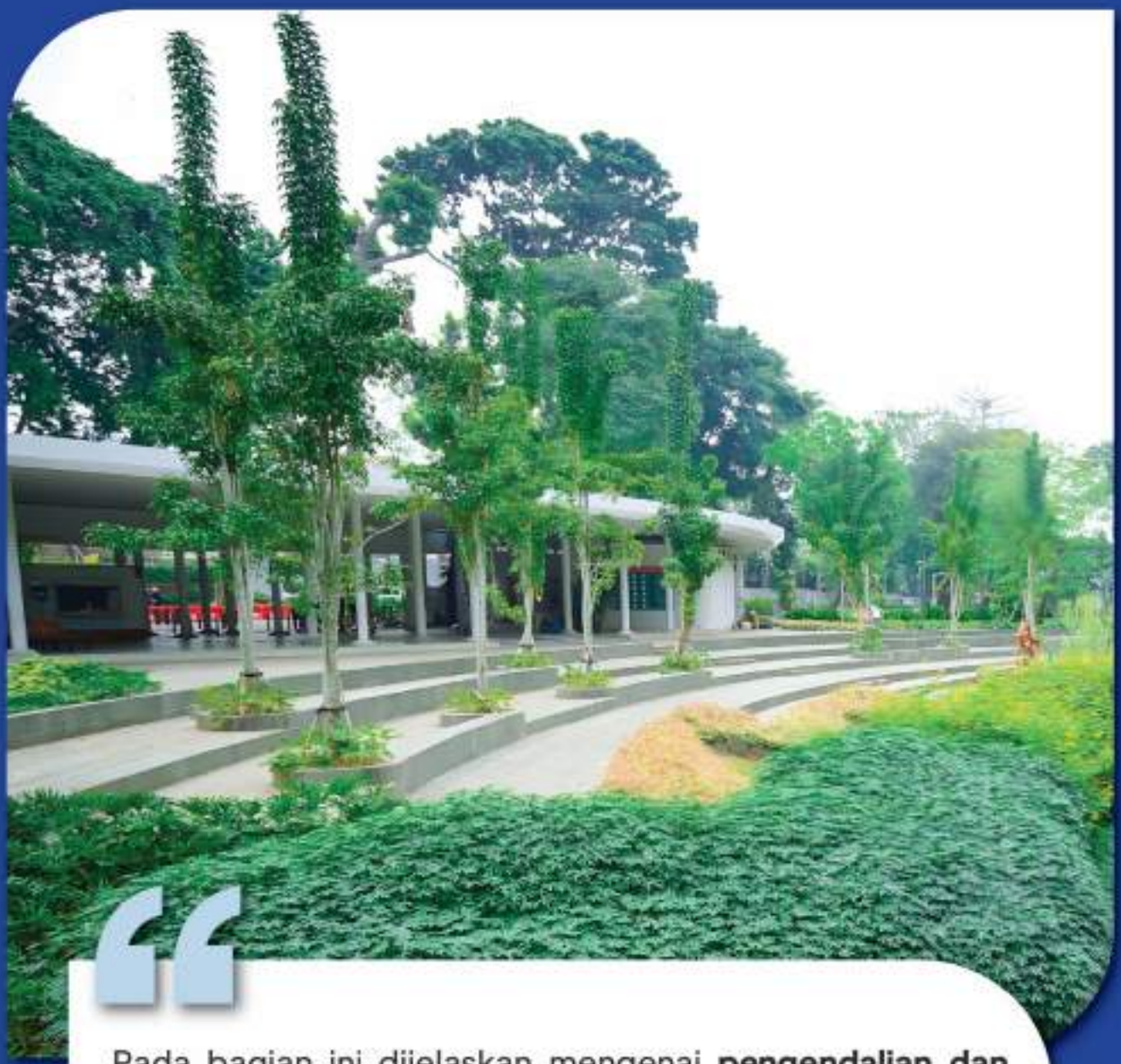
BAB VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 2

EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025



Pada bagian ini dijelaskan mengenai **pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD Tahun 2025** yang meliputi evaluasi kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025, evaluasi kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025.

Pada tahap penyusunan Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, telah dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD tahun berkenaan. Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam proses perencanaan pembangunan yang hasilnya akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Lebih lanjut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi yang merupakan proses pemantauan serta supervisi dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan pembangunan untuk memastikan target kinerja dan keuangan dapat tercapai secara efektif, efisien, serta ekonomis.

Secara umum, evaluasi RKPD Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permen PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2017, sehingga pengendalian dan evaluasi dalam konteks RKPD dijelaskan ke dalam 3 (tiga) tahapan:

a. Tahap I: Memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RKP dan RPJMD provinsi yang dimulai sejak tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD provinsi ditetapkan dengan peraturan Gubernur.
b. Tahap II: Menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD Provinsi yang dimulai sejak tahap penyusunan RKA PD dan Raperda APBD sampai dengan penetapan Perda/Pergub APBD.
c. Tahap III: Memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional yang dilaksanakan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Dalam pelaksanaan evaluasi dimaksud, Bappeda Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan data pengukuran kinerja dan anggaran yang ada pada aplikasi sistem informasi monitoring evaluasi (monev) kinerja, dimana Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta secara berkala melakukan penginputan data realisasi kinerja dan anggaran pada aplikasi sistem informasi monitoring evaluasi (monev) kinerja.

Kebenaran data pada data yang diinput dan/atau divalidasi pada sistem informasi monitoring evaluasi (monev) kinerja merupakan tanggung jawab mutlak dari Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah bersangkutan. Aplikasi tersebut dikelola oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta.

Data yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2025 merupakan data yang bersumber dari sistem informasi monitoring evaluasi (monev) kinerja berdasarkan capaian triwulan I tahun 2025. Mengingat sistem informasi monev kinerja juga digunakan untuk pengelolaan data perjanjian kinerja dan pada target kinerja perjanjian kinerja dapat berbeda dengan target pada dokumen rencana pembangunan. Hal ini dikarenakan adanya Pergub 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa indikator kinerja utama harus memiliki prinsip SMART-C.

2.1 Evaluasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Triwulan I Tahun 2025

Pada hakekatnya, tujuan dan sasaran digunakan untuk menjabarkan indikasi kinerja pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan sebagaimana terdapat pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selain itu, dalam peraturan yang sama disebutkan juga bahwa tujuan dan sasaran jangka menengah daerah digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan Perangkat Daerah.

RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 merupakan RKPD tahun ketiga dari pelaksanaan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. RPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 dirumuskan dengan mempertimbangkan 6 (enam) Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025, 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, 5 (lima) Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 dan 6 (enam) isu-isu strategis 2023-2026 yang kemudian dirumuskan ke dalam 4 (empat) dimensi fokus perencanaan yaitu *built environment* (lingkungan bangun), *economic* (dimensi perekonomian), *human* (dimensi manusia) dan *governance* (dimensi pemerintahan). Ke-empat fokus perencanaan tersebut kemudian dijabarkan menjadi 4 (empat) tujuan dan 17 sasaran.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran I

Tujuan Pertama: Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan dengan indikator Indeks Kota Layak Huni (*Most Livable City Index*). Studi *Most Livable City Index* (MLCI) dikeluarkan oleh Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia dengan mengukur persepsi warga tentang prinsip-prinsip Kota Layak Huni yaitu:

a. Ketersediaan sarana kebutuhan dasar (perumahan, air, listrik);
b. Ketersediaan fasilitas publik (transportasi, taman-taman kota, fasilitas beribadah, kesehatan, pendidikan);
c. Ketersediaan ruang publik dan tempat berinteraksi bagi masyarakat;
d. Keamanan;
e. Dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya di kota; dan
f. Sanitasi.

Pengukuran MLCI yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Perencana (IAP) yang menghasilkan dokumen MLCI 2009, 2011, 2014, 2017 dan 2022. Mulai pada tahun 2017, DKI Jakarta berada dalam kelompok *top tier city* (kota dengan nilai *index livability* di atas rata-rata).

Tujuan pertama dijabarkan kepada 4 (empat) sasaran, yaitu:

a. Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas

   Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut di atas, adalah pemenuhan layanan dasar perkotaan merupakan pengukuran terhadap capaian 3 (tiga) sub indikator layanan dasar perkotaan yaitu:

   1. Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau menurut Provinsi;
   2. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Sumber Air Minum Layak; serta
   3. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak.

   Adapun Data persentase indikator pemenuhan layanan dasar perkotaan dirilis oleh BPS.

b. Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut di atas, adalah Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik. *Public transportation mode share* adalah indikator yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar prevalensi warga untuk menggunakan transportasi umum dalam bermobilisasi yang diukur melalui perbandingan antara jumlah perjalanan penduduk dengan angkutan umum (12 moda) dibandingkan dengan total jumlah perjalanan dalam periode waktu tertentu. Data ini dirilis oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

c. Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut di atas terdapat 2 (dua), yaitu:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan suatu nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup. Penghitungan IKLH dilakukan melalui agregasi terhadap empat komponen pembentuk indeks (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut) yang telah dibobot. Bobot dari masing-masing komponen ditentukan dengan menggunakan metode Analisis Hierarki Proses (AHP) berdasarkan penilaian pakar. Data indikator ini dirilis oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
2. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Nilai persentase yang menggambarkan penurunan emisi GRK dari nilai *baseline*-nya setelah dilakukan perhitungan emisi GRK dari aksi mitigasi pada sektor Energi, Limbah, AFOLU (*Agriculture, Forestry and Other Land Use*), dan IPPU (*Industrial Processes and Product Use*). Data indikator ini dirilis oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

d. Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota

Indikator untuk mengukur sasaran tersebut di atas adalah Indeks Risiko Bencana (IRB). Pengkajian risiko bencana merupakan pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada. Potensi dampak negatif tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan. Potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana. Hasil pengukuran IRB diterbitkan oleh BNPB.

Berikut ini disajikan evaluasi capaian tujuan dan sasaran I pembangunan daerah pada triwulan I tahun 2025 sebagaimana disampaikan pada Tabel di bawah.

Tabel 2.1
Capaian Tujuan dan Sasaran I Pembangunan Daerah Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi 2024	2025				Keterangan
						Target Indikator	Target TW I	Realisasi Indikator TW I	Capaian Indikator Tujuan/ Sasaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	**Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan**	**Indeks Kota Layak Huni**	**Indeks**	**62,6 (2017)**	**N/A**	**71**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Target bukan pada triwulan I**
1.1	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan	Persen	68,76 (2021)	77,66	77,25	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada triwulan I
1.2	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	Persen	14,76 (2021)	22,19	23,01	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada triwulan I
1.3	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	54,43 (2021)	56,39	56,4	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada triwulan I
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumas Kaca	Persen	18,5 (2022)	25,9	25,9	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada triwulan I
1.4	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Indeks Risiko Bencana	Indeks	60,43 (2021)	59,29	59,16	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada triwulan I

Sumber: Sistem informasi monitoring evaluasi (monev) kinerja, 2025 (diolah)

2.1.2 Tujuan dan Sasaran II

Tujuan Kedua: Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak, dan Pemerataan Kesejahteraan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan tersebut di atas adalah Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) yang merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan. Indeks pembangunan ekonomi inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Hasil pengukuran indeks ini diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Tujuan kedua dijabarkan kepada 4 (empat) sasaran, yaitu:

a. Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
   Indikator yang digunakan dalam mengukur sasaran di atas adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). LPE memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa. Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi dirilis oleh BPS.

b. Meningkatnya Kesempatan dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
   Indikator yang digunakan dalam mengukur sasaran di atas adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja - 15 tahun ke atas). TPT dirilis oleh BPS.

c. Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial
   Indikator yang digunakan dalam mengukur sasaran di atas terdapat 3 (tiga) indikator, yaitu sebagai berikut:
   1. Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dengan nilai berkisar antara 0 - 1. Koefisien Gini bernilai 0 (null) menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama, dan bernilai 1 (satu), saat 1 (satu) individu memiliki seluruh pendapatan sedangkan sisa penduduk tidak memiliki apa-apa. Rasio Gini yang dijadikan acuan adalah yang diterbitkan oleh BPS pada bulan September.
   2. Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Data yang digunakan adalah yang diterbitkan oleh BPS pada bulan September.
   3. Tingkat kemiskinan ekstrem merupakan proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan internasional dengan pendapatan kurang dari USD $1,9 pada PPP (*Purchasing Power Parity*). Data ini diterbitkan oleh BPS.

d. Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi
   Indikator yang digunakan dalam mengukur sasaran tersebut adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). IDSD merupakan refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Indeks ini menggunakan 4 (empat) aspek utama yaitu lingkungan penguat, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi; 12 pilar yaitu Kelembagaan, Infrastruktur, Perekonomian Daerah, Kesehatan, Pendidikan, Efisiensi Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan, Ukuran Pasar, Adopsi Teknologi, Dinamika Bisnis, Kapasitas Inovasi, dengan 23 Dimensi dan 90 indikator. IDSD diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Berikut ini disajikan evaluasi capaian tujuan dan sasaran II pembangunan daerah pada triwulan I tahun 2025 sebagaimana disampaikan pada Tabel di bawah.

Tabel 2.2
Capaian Tujuan dan Sasaran II Pembangunan Daerah Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi 2024	2025				Keterangan
						Target Indikator	Target TW I	Realisasi Indikator TW I	Capaian Indikator Tujuan/ Sasaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	**Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan**	**Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif**	**Indeks**	**7,18 (2020)**	**N/A**	**8,2**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Target bukan pada triwulan I**
2.1	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,56 (2021)	4,9	5,6-6,4	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada triwulan I
2.2	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,51 (2021)	6,21	6,1	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada triwulan I
2.3	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Rasio Gini	Koefisien	0,411 (2021)	0,431	0,41	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada triwulan I
		Tingkat Kemiskinan	Persen	4,67 (2021)	4,14	3,25	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada triwulan I
		Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persen	1,37 (2021)	0,35	0,35	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada triwulan I
2.4	Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,962 (2021)	4,09	4,01	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada triwulan I

Sumber: Sistem informasi monitoring evaluasi (monev) kinerja, 2025 (diolah)

2.1.3 Tujuan dan Sasaran III

Tujuan Ketiga: Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia, yang terdiri dari 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (diwakili indikator Angka Harapan Hidup), pengetahuan (diwakili indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan standar hidup layak (diwakili indikator pengeluaran per kapita). Pengukuran IPM dilakukan dan dirilis oleh BPS.

Tujuan ketiga dijabarkan kepada 4 (empat) sasaran, yaitu:

a. Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat
   Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut di atas adalah Indeks Dimensi Pendidikan (IDP). Indeks ini merupakan hasil perhitungan rata-rata dari dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Dua data tersebut dirilis oleh BPS.

b. Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan
   Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut di atas, terdapat 2 (dua), yaitu sebagai berikut:
   1. Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan lama hidup yang dapat dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Angka ini mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat dan dirilis oleh BPS.
   2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita. Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan standar WHO. Prevalensi stunting diukur pada anak umur 0 sampai 59 bulan, dengan mengkonversi data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) ke dalam nilai terstandar(*Z-score*) menggunakan baku antropometri anak balita. Data ini dirilis melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) atau survei lain yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

c. Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender
   Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut di atas adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia. Nilai IPG merupakan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Hasil indeks ini diterbitkan BPS setiap tahun.

d. Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat
   Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah Indeks Demokrasi. Indeks Demokrasi adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di provinsi. Hasil indeks adalah angka dengan skala 1-100 yang tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi. Hasil indeks ini diterbitkan oleh BPS setiap tahun.

Berikut ini disajikan evaluasi capaian tujuan dan sasaran III pembangunan daerah pada triwulan I tahun 2025 sebagaimana disampaikan pada Tabel di bawah.

Tabel 2.3
Capaian Tujuan dan Sasaran III Pembangunan Daerah Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi 2024	2025				Keterangan
						Target Indikator	Target TW I	Realisasi Indikator TW I	Capaian Indikator Tujuan/ Sasaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.	**Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Indeks**	**81,11 (2021)**	**84,15**	**84,15**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Target bukan pada triwulan I**
3.1	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	12,12 (2021)	12,5	12,52	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada triwulan I
3.2	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,01 (2021)	75,99	75,99	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada triwulan I
		Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	16,8 (2021)	17,2	15,8	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada triwulan I
3.3	Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,84 (2021)	96,50	96,4	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada triwulan I
3.4	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	Indeks Demokrasi	Indeks	76,07 (2020)	84,57	84,57	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada triwulan I

Sumber: Sistem informasi monitoring evaluasi (monev) kinerja, 2025 (diolah)

2.1.4 Tujuan dan Sasaran IV

Tujuan Keempat: Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik Dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan tersebut di atas adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). IRB adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu:

a. Manajemen Perubahan;
b. Penguatan pengawasan;
c. Penguatan akuntabilitas;
d. Penataan Organisasi;
e. Penataan tatalaksana;
f. Penataan manajemen SDM;
g. Deregulasi Kebijakan;
h. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian IRB ini dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB).

Tujuan keempat dijabarkan kepada 4 (empat) sasaran, yaitu:

a. Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat
   Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, IKM adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang melakukan pengukuran IKM Provinsi DKI Jakarta.
b. Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas
   Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut di atas adalah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indeks SPBE merupakan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Pusat dan Daerah yang terdiri atas 3 (tiga) domain, 7 (tujuh) aspek, dan 35 indikator sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 5 Tahun 2018. Hasil pengukuran indeks ini diterbitkan ataupun melalui pendampingan oleh Kementerian PAN-RB.
c. Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah
   Terdapat 2 (dua) Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut, yaitu:
   1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Besaran hasil penilaian tingkat akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran ini diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB.
   2. Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI). Survei Penilaian Integritas (SPI) bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/PD). Pedoman dan hasil pengukuran SPI diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
d. Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel
   Indikator yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut di atas adalah Opini Laporan Keuangan Daerah. Opini ini merupakan pernyataan profesional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi

pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan.

e. Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur

Indikator yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut di atas adalah Indeks Sistem Merit. Indeks sistem merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada Instansi Pemerintah dengan dasar hukum yaitu:

a) Permen PAN dan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN.
b) Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berikut ini disajikan evaluasi capaian tujuan dan sasaran IV pembangunan daerah pada triwulan I tahun 2025 sebagaimana disampaikan pada Tabel di bawah.

Tabel 2.4
Capaian Tujuan dan Sasaran IV Pembangunan Daerah Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi 2024	2025				Keterangan
						Target Indikator	Target TW I	Realisasi Indikator TW I	Capaian Indikator Tujuan/ Sasaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	**Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**76,54 (2020)**	**93,72**	**84**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Target bukan pada triwulan I**
4.1	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,5 (2021)	93,36	93,36	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada triwulan I
4.2	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,47 (2021)	4,46	4,46	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada triwulan I
4.3	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	80,10 (A) (2021)	81,66	87	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada triwulan I
		Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	68,70	72,5	80	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada triwulan I
4.4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP (2020)	WTP	WTP	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada triwulan I
4.5	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Indeks Sistem Merit	Indeks	310,5 (2021)	350,5	350,5	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada triwulan I

Sumber: Sistem informasi monitoring evaluasi (monev) kinerja, 2025 (diolah)

2.2 Evaluasi Kinerja Program Pembangunan Daerah Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, evaluasi RKPD lingkup provinsi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang dilakukan setiap triwulan. Penilaian hasil pelaksanaan RKPD provinsi meliputi:

a. Realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; dan
b. Realisasi penyerapan anggaran program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

Dalam melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi, digunakan formulir E.19 dan kriteria Tabel T-E.1. untuk menentukan predikat kinerja. Untuk indikator program yang memiliki target pada triwulan I namun realisasi sebesar 0 (nol) maka dianggap tidak ada realisasi. Sedangkan indikator program yang tidak memiliki target pada triwulan I maka capaiannya tidak diperhitungkan.

Tabel 2.5
Skala Nilai Peringkat Kerja

No	Interval Capaian	Kategori Capaian
(1)	(2)	(3)
1	>120,00%	Melampaui target
2	100,00% ≤ x ≤120,00%	Mencapai Target
3	91% ≤ x < 100%	Sangat Tinggi
4	76,00% ≤ x ≤ 90,00%	Tinggi
5	66,00% ≤ x ≤ 75,00%	Sedang
6	51,00% ≤ x ≤ 65,00%	Rendah
7	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Tabel T-E.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

Evaluasi capaian pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta pada triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Capaian Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta sampai Triwulan I Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		PD
													I				II				III				IV													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)					(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6) x100%		(16)
				Indikator	satuan	Konsolidasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	konsolidasi	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	**Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan**			**Indeks Kota Layak Huni**	**Indeks**	**TLK**	**68**		**71**		**71**		**-**	**-**			**-**	**-**			**-**	**-**			**-**	**-**			**TLK**	**-**	**-**			**71**		**104,41%**		
1.1.	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas			Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan	%	TLK	70,1		77,45		77,25		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			77,45		110,49%		
		1	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																																		
		1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																																		
	Penyediaan dan Peningkatan akses pelayanan air minum	1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah kapasitas pengolahan air minum yang beroperasi	liter/detik	TLK	25.232	1.267.216.219.655	21216,61	43.118.364.486	24285	38.405.891.243	-	-	1.408.648.297	267,49%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	1.408.648.297	3,67%	21216,61	44.527.012.783	84,09%	3,51%	Dinas SDA
	Penyediaan dan Peningkatan akses pelayanan air limbah	1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah debit air limbah yang terolah	m3/hari	Sum	5.636,7	4.077.009.666.933	4434,8	866.585.133.155	2800	778.628.637.953	-	-	6.360.803.648	208,55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	6.360.803.648	0,82%	4434,8	872.945.936.803	78,68%	21,41%	Dinas SDA
		1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																																		
	Terbangunnya Unit Hunian Layak	1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	% Unit Hunian Layak yang Terbangun	%	TLK	1,95	11.720.001.482.309	1,33	774.496.270.215	1,35	669.265.211.493	-	-	2.327.929.560	402,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	2.327.929.560	0,35%	1,33	776.824.199.775	68,21%	6,63%	Dinas PRKP
	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Terselenggara	1.04.03	Program Kawasan Permukiman	% Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Terselenggara	%	TLK	84,88	1.000.000.000	81,175	*	84,04	7.851.552.493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	0	0,00%	81,175	0	95,64%	0,00%	Dinas PRKP
	Meningkatnya PSU Kawasan Permukiman	1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	% PSU Kawasan Permukiman yang ditingkatkan	%	TLK	14,19	3.285.252.066.650	8,6085	1.000.410.562.679	12,38	417.061.559.225	-	-	1.008.743.684	220,55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	1.008.743.684	0,24%	8,6085	1.001.419.306.363	60,67%	30,48%	Dinas PRKP
		2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan																																		

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		PD
													I				II				III				IV												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)					(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6) x100%		(16)
				Indikator	satuan	Konsolidasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	konsolidasi	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pelayanan Dasar Terkait Pelayanan Dasar																																		
		2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan																																		
	Meningkatnya bidang tanah milik masyarakat yang terinventarisasi dan terfasilitasi dalam rangka perencanaan penggunaan tanah untuk mendukung peningkatan sertifikasi di kawasan permukiman	2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase bidang tanah milik masyarakat yang terinventarisasi dan terfasilitasi dalam rangka perencanaan penggunaan tanah untuk mendukung peningkatan sertifikasi di kawasan pemukiman	%	Sum	100	12.800.000.000	30	5.071.987.500	20	1.565.359.343	2	100,00%	406.438.000	99,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	2	10,00%	406.438.000	25,96%	32	5.478.425.500	32,00%	42,80%	Dinas CKTRP
		2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																																		
	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Peningkatan kapasitas sistem penanganan persampahan	ton/hari	TLK	7.262	9.806.191.559.491	3214,5	4.929.791.513.064	3209	2.414.214.683.171	-	-	355.776.882.642	192,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	355.776.882.642	14,74%	3214,5	5.285.568.395.706	44,26%	53,90%	DLH
				Persentase rumah tangga yang melakukan pemilahan	%	TLK	13		9,79		11		10,59	105,90%			-	-			-	-			-	-			TLK	10,59	96,27%			10,0567		77,36%		
1.2	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit			Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	Persen	TLK	23,01		20,525		23,01		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			20,525		89,20%		
		1	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																																		
		1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																																		

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		PD
													I				II				III				IV											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)					(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6) x100%		(16)
				Indikator	satuan	Konsolidasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	konsolidasi	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan	1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan	Indeks	TLK	4	12.078.133.565.695	4	3.433.601.239.440	4	2.866.743.834.960	-	-	7.392.720	(Serapan mendahului rencana SPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	7.392.720	0,0003%	4	3.433.608.632.160	100,00%	28,43%	DBM
	Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan Lingkup Kabupaten Administrasi	Indeks	TLK	4	73.768.205.803	4	32.930.066.057	4	3.566.043.954	-	-	223.219.325	206,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	-	-	223.219.325	6,26%	4	33.153.285.382	100,00%	44,94%	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
	Indeks Kepuasan Pelayanan laboratorium di bidang Ke Bina Margaan	1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Indeks Kepuasan Pelayanan laboratorium di bidang Ke Bina Margaan	Indeks	TLK	4	1.773.136.627	4	856.717.724	4	1.047.848.775	-	-	1.500.000	(Serapan mendahului rencana SPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	1.500.000	0,14%	4	858.217.724	100,00%	48,40%	DBM
	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang pada kawasan berorientasi transit	1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian panduan rancang kota sistem pusat pelayanan dengan pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit	%	TLK	90	369.038.329.755	91,6	224.475.817.635	92	115.063.234.693	-	-	13.102.213.492	133,91%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	13.102.213.492	11,39%	91,6	237.578.031.127	101,78%	64,38%	Dinas CKTRP
				Persentase pelanggaran penyelenggaraan ruang dan bangunan yang terselesaikan tepat waktu	%	Average	90		93,75		97,5		97,5	100,00%			-	-			-	-			-	-			AVG	97,5	100,00%			95		105,56%		
		2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Terkait Pelayanan Dasar																																	
		2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																																	
	Terlaksananya program penyelenggaraan Lalu	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari	Penumpang per hari	TLK	4.386.163	48.206.427.176.620	4294103,5	10.935.270.544.153	4150860	6.046.893.062.692	-	-	108.411.373.547	179,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	108.411.373.547	1,79%	4294103,5	11.043.681.917.700	97,90%	22,91%	Dishub

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		PD
													I				II				III				IV													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)					(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6) x100%		(16)
				Indikator	satuan	Konsolidasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	konsolidasi	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
	Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			Indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum per tahun	Indeks	TLK	1,3		0		1,37		0	200,00%			-	-			-	-			-	-			AVG	0	200,00%			0		200,00%		
				Kecepatan rata-rata di ruas jalan yang dikenakan kebijakan pembatasan lalu lintas pada jam sibuk	km/jam	TLK	29		26,735		28		26,01	95,45%			-	-			-	-			-	-			TLK	26,01	92,89%			26,493		91,36%		
	Terlaksananya program pengelolaan pelayaran	2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima	Pelabuhan	TLK	11	766.537.504.072	6	258.677.166.080	9	194.972.469.411	-	-	4.304.462.966	128,40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	4.304.462.966	2,21%	6	262.981.629.046	54,55%	34,31%	Dishub
				Persentase badan usaha angkutan perairan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	TLK	70,47		44,76		60,95		52,38	100,00%			-	-			-	-			-	-			TLK	52,38	85,94%			47,3		67,12%		
	Terlaksananya program pengelolaan perkeretaapian	2.15.05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan perkeretaapian provinsi	Rekomendasi	Sum	8	8.088.674.633.538	4	6.693.534.845	2	4.292.551.050	-	-	276.190.131	193,14%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SUM	-	-	276.190.131	6,43%	4	6.969.724.976	50,00%	0,09%	Dishub
1.3	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	TLK	56,43		55,48		56,4		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			55,48		98,32%		
				Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	TLK	22,3		25,65		25,9		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			25,65		115,02%		
		1	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																																		
		1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																																		
	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan	1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi	%	TLK	99	4.400.734.000.000	98,5	545.825.393.766	100	537.424.853.239	-	-	4.948.444.803	131,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	4.948.444.803	0,92%	98,5	550.773.838.569	99,49%	12,52%	Dinas CKTRP

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		PD
													I				II				III				IV													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)					(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6) x100%		(16)
				Indikator	satuan	Konsolidasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	konsolidasi	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
	bangunan gedung pemda yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan			standar teknis keselamatan bangunan																																	
		2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Terkait Pelayanan Dasar																																		
		2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																																		
	Terlaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup	2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen pelaporan pengelolaan lingkungan hidup yang disampaikan ke Pemerintah Pusat dengan tepat waktu	%	Average	100	13.219.823.723	100	3.763.443.542	100	3.122.749.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	-	-	0	0,00%	100	3.763.443.542	100,00%	28,47%	DLH
	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase parameter yang memenuhi baku mutu	%	TLK	77,5	150.395.440.889	74,475	149.945.795.531	77	71.748.641.032	-	-	716.728.227	167,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	716.728.227	1,00%	74,475	150.662.523.758	96,10%	100,18%	DLH
	Terselenggaranya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	%	TLK	100	7.540.604.806.363	100	1.811.378.490.032	100	1.095.490.933.739	100	100,00%	200.783.479.154	216,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	100	100,00%	200.783.479.154	18,33%	100	2.012.161.969.186	100,00%	26,68%	Distamhut
	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Lingkup Kabupaten Administrasi	2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kabupaten Administrasi	%	TLK	100	113.428.673.158	100	21.170.785.770	100	25.606.145.945	100	100,00%	803.589.572	234,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	100	100,00%	803.589.572	3,14%	100	21.974.375.342	100,00%	19,37%	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		PD
													I				II				III				IV													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)					(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6) x100%		(16)
				Indikator	satuan	Konsolidasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	konsolidasi	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kepulauan Seribu																																					
	Terlaksananya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Limbah B3 Rumah Tangga yang dikelola	ton	TLK	74	19.229.089.840	87,5475	4.819.902.661	72	4.530.968.830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SUM	-	-	0	0,00%	87,5475	4.819.902.661	118,31%	25,07%	DLH
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	%	TLK	13,5	12.794.166.291	24,57	4.998.008.466	15	6.224.840.976	-	-	153.455.000	66,70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	153.455.000	2,47%	24,57	5.151.463.466	182,00%	40,26%	DLH
	Tercapainya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional	Lokasi	TLK	58	16.045.597.993	69,5	9.189.911.643	54	15.393.914.669	-	-	366.064.861	159,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	366.064.861	2,38%	69,5	9.555.976.504	119,83%	59,56%	DLH
	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan	%	Average	100	942.038.029	100	704.108.780	100	521.843.685	100	100,00%	780.000	3,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	100	100,00%	780.000	0,15%	100	704.888.780	100,00%	74,83%	DLH
		3	Urusan Pilihan																																		
		3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan																																		
	Bertambahnya luas ekosistem pesisir dan laut yang dikonserv	3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Kawasan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir yang sesuai	%	TLK	18,53	66.431.887.405	18,495	9.829.228.964	18,52	6.242.280.819	-	-	171.800.850	131,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	171.800.850	2,75%	18,495	10.001.029.814	99,81%	15,05%	Dinas KPKP

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		PD
													I				II				III				IV													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)					(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6) x100%		(16)
				Indikator	satuan	Konsolidasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	konsolidasi	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
	asi dan direhabilitasi serta tercapainya masyarakat peduli ekosistem pesisir dan laut			dengan Dokumen Perencanaan Ruang Laut																																	
	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	TLK	124.960	344.735.292.111	186011,825	35.771.213.718	181352	30.792.003.005	52962,06	126,83%	961.798.092	90,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SUM	52962,06	29,20%	961.798.092	3,12%	141661,9033	36.733.011.810	113,37%	10,66%	Dinas KPKP
	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	TLK	4.588	48.391.623.500	5070,895	17.972.614.233	4983	12.116.404.446	1279,17	104,85%	2.804.331.163	113,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SUM	1279,17	25,67%	2.804.331.163	23,14%	3806,9867	20.776.945.396	82,98%	42,94%	Dinas KPKP
	Meningkatnya tingkat kepatuhan pada pengguna sumber daya kelautan dan perikanan	3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	TLK	73	13.850.000.000	86,155	1.761.733.847	75	1.604.671.035	-	-	177.277.308	(Serapan mendahului rencana SPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	177.277.308	11,05%	86,155	1.939.011.155	118,02%	14,00%	Dinas KPKP
	Tercapainya Produk Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan serta Angka Konsumsi Ikan	3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi dan pemasaran produk olahan hasil perikanan	Ton	TLK	16.265,54	70.127.435.041	24081,24	15.980.696.347	24839	11.004.683.259	6816,09	106,22%	512.991.068	117,61%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SUM	6816,09	27,44%	512.991.068	4,66%	18326,19	16.493.687.415	112,67%	23,52%	Dinas KPKP
				Angka konsumsi ikan	Kg/Kapita/Tahun	TLK	47,3		48,625		48,61		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			48,625		102,80%		
		3.28	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan																																		
	Terselenggaranya Pengelolaan Hutan	3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	Persentase luas hutan yang dikelola	%	TLK	100	193.795.050.539	100	72.324.911.985	100	43.284.231.559	100	100,00%	7.551.160.324	230,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	100	100,00%	7.551.160.324	17,45%	100	79.876.072.309	100,00%	41,22%	Distamhut
	Terselenggaranya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	3.28.06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Jumlah DAS di Provinsi DKI Jakarta yang telah dikelola sesuai standar	Lokasi	TLK	4	2.000.000.000	1,5	802.447.375	3	400.345.978	3	100,00%	5.150.000	(Serapan mendahului rencana SPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	3	100,00%	5.150.000	1,29%	2	807.597.375	50,00%	40,38%	Distamhut
		3.29	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral																																		
	Tercapainya	3.29.05	Program Pengelolaan	Jumlah pengurangan	Ton CO2	TLK	1.431	190.230.686.000	466,4436	22.711.463.078	1400	27.780.519.751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	0	0,00%	466,4436	22.711.463.078	32,59%	11,94%	Dinas TKTE

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		PD
													I				II				III				IV													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)					(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6) x100%		(16)
				Indikator	satuan	Konsolidasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	konsolidasi	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengurangan Emisi sebagai Dampak dari Pembangunan PLTS		Energi Terbarukan	emisi sebagai dampak dari pembangunan PLTS																																	
	Meningkatnya Akses dan Infrastruktur Ketenagalistrikan	3.29.06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi di Kepulauan Seribu	%	Average	100	34.149.261.500	100	6.616.691.483	100	22.699.728.101	100	100,00%	943.430.734	446,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	100	100,00%	943.430.734	4,16%	100	7.560.122.217	100,00%	22,14%	Dinas TKTE
				Persentase Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik	%	TLK	100		36,75		30		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			36,75		36,75%		
				Presentase pembangkit dan instalasi ketenagalistrikan yang izinnya dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta yang memiliki Sertifikat Laik Operasi	%	Average	60		113		107		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			113		188,33%		
1.4	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota			Indeks Risiko Bencana	Skor	TLK	58,72		60,3		59,16		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			60,3		97,31%		
		1	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																																		
		1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																																		
	Pengurangan dampak banjir melalui peningkatan tampungan, penataan kali/sungai serta pembangunan tanggul pantai	1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan kapasitas tampungan air	m3	Sum	2.783.100	8.359.926.916.139	685592,99	3.307.225.479.144	1683600	3.270.499.161.977	-	-	47.069.682.413	219,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	47.069.682.413	1,44%	685592,99	3.354.295.161.557	24,63%	40,12%	Dinas SDA
				Persentase luas kawasan/sistem polder yang tertangani	%	Sum	12,12		10,34		10,87		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			10,34		85,31%		
				Persentase Pantai di Kepulauan Seribu yang bebas dari abrasi	%	TLK	56,8		65,43		65		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			65,43		115,19%		
				Persentase pembangunan tanggul kritis di muara kali dan pantai Jakarta	%	TLK	75		70,805		93		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			70,805		94,41%		

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		PD
													I				II				III				IV												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)					(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6) x100%		(16)
				Indikator	satuan	Konsolidasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	konsolidasi	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengurangan genangan melalui peningkatan kapasitas dan pembangunan saluran drainase	1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam	%	TLK	89	1.940.849.455.480	86,445	1.697.464.821.936	88	1.032.723.349.554	-	-	93.233.968.201	203,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	-	-	93.233.968.201	9,03%	86,445	1.790.698.790.137	97,13%	92,26%	Dinas SDA
		1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat																																	
	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi DKI Jakarta	1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	Average	94,75	1.384.537.388.954	94,76	545.844.652.479	95	236.873.899.362	95,41	100,43%	63.696.901.038	149,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	95,41	100,43%	63.696.901.038	26,89%	94,9767	609.541.553.517	100,24%	44,02%	Satpol PP
	Menguranggi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan kolaborasi	1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	%	TLK	1,08	198.321.750.235	0,926	135.526.540.332	1	150.100.573.164	-	-	7.548.509.304	176,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SUM	-	-	7.548.509.304	5,03%	0,926	143.075.049.636	85,74%	72,14%	BPBD
				Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	%	Average	100		100		100		100	100,00%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	100	100,00%			100		100,00%		
				Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam	%	Average	100		100		100		100	100,00%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	100	100,00%			100		100,00%		
	Meningkatnya keberhasilan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan	1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Berhasil	%	TLK	60	1.941.282.705.126	60,91	826.408.757.801	62	503.882.350.755	59,88	98,65%	46.711.263.325	149,34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	59,88	96,58%	46.711.263.325	9,27%	60,567	873.120.021.126	100,94%	44,98%	Dinas Gulkarmat
		3	Urusan Pilihan																																	
		3.29	Urusan Pemerintahan																																	

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		PD
													I				II				III				IV													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)					(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6) x100%		(16)
				Indikator	satuan	Konsolidasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	konsolidasi	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
			Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral																																		
	Pengawasan dan pemantauan pemanfaatan air tanah dalam upaya pengendalian penurunan Muka Tanah	3.29.02	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase pemantauan pemanfaatan air tanah	%	Average	100	63.768.000.000	100	30.421.217.842	100	37.599.968.442	100	100,00%	155.140.000	172,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	100	100,00%	155.140.000	0,41%	100	30.576.357.842	100,00%	47,95%	Dinas SDA
2.	**Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan**		**Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif**	**Indeks**	**TLK**	**8,04**		**8,2**		**8,2**		**-**	**-**			**-**	**-**			-	-			**-**	**-**			**TLK**	**-**	**-**			**8,2**		**101,99%**		
2.1	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	TLK	5,60-6,40		4,93		5,6-6,4		-	-			-	**-**			-	**-**			-	-			TLK	**-**	**-**			4,93		88,04%		
		3	Urusan Pilihan																																		
		3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata																																		
	Meningkatnya minat kunjungan wisatawan ke Jakarta	3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang memiliki perizinan	Usaha pariwisata	TLK	19.345	391.507.149.851	19808,5	169.920.167.293	18735	166.846.987.905	21665	115,64%	1.565.883.476	70,58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	21665	115,64%	1.565.883.476	0,94%	20427,33	171.486.050.769	105,59%	43,80%	Dinas Parekraf
				Jumlah pengunjung event	Orang	Sum	1.365.074		8146703		6830166		46024	1150,60%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SUM	46024	0,67%			8192727		600,17%		
				Nilai kepuasan pengunjung objek wisata	Nilai	TLK	85		86,12		85,65		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			86,12		101,32%		
	Meningkatnya Jumlah Wisatawan melalui Penyelenggaraan Event MICE yang Berkualitas dan Penyebaran Informasi Pariwisata yang Tepat Sasaran	3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah pengunjung e-tourism	Pengunjung website dan medsos	Sum	13.064.317	543.410.120.595	42687546	138.084.440.709	8810929	112.697.705.458	9742410	442,29%	2.613.776.073	75,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SUM	9742410	110,57%	2.613.776.073	2,32%	52429956	140.698.216.782	401,32%	25,89%	Dinas Parekraf
				Nilai ketertarikan masyarakat terhadap pariwisata DKI Jakarta	Nilai	TLK	85		90,54		93,3		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			90,54		106,52%		
	Meningkatnya Usaha Kreatif melalui Pemanfaatan dan	3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak	Jumlah produk/jasa ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan	produk	TLK	850	162.826.829.879	374,5	96.790.895.588	650	81.393.983.603	528	100,00%	382.713.668	31,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	528	81,23%	382.713.668	0,47%	425,67	97.173.609.256	50,08%	59,68%	Dinas Parekraf

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		PD
													I				II				III				IV													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)					(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6) x100%		(16)
				Indikator	satuan	Konsolidasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	konsolidasi	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		Kekayaan Intelektual	intelektualnya																																	
	Meningkatnya Usaha Kreatif melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi	orang	TLK	7.088	47.138.840.596	5088	12.128.247.821	6288	6.131.135.602	5568	100,00%	450.446.214	80,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	5568	88,55%	450.446.214	7,35%	5248	12.578.694.035	74,04%	26,68%	Dinas Parekraf
		3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																																		
	Tercapainya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan sarana pertanian	%	Average	50	25.206.517.545	72,47125	19.128.163.225	69,2	10.968.178.372	-	-	3.291.731.612	194,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	-	-	3.291.731.612	30,01%	72,47125	22.419.894.837	144,94%	88,94%	Dinas KPKP
	Tercapainya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana perternakan dalam kondisi baik	%	TLK	65	561.437.620.828	58,33	27.861.379.195	60	24.038.089.956	-	-	958.261.261	97,16%	-	-			-	-			-	-			TLK	-	-	958.261.261	3,99%	58,33	28.819.640.456	89,74%	5,13%	Dinas KPKP
				Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	%	TLK	80		90,16		90		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			90,16		112,70%		
	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (rabies)	%	Average	100	28.134.931.349	100	17.198.529.667	100	9.405.736.580	-	-	1.564.310.141	128,41%	-	-			-	-			-	-			AVG	-	-	1.564.310.141	16,63%	100	18.762.839.808	100,00%	66,69%	Dinas KPKP
				Persentase pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	%	TLK	75		85,515		88,6		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			85,515		114,02%		
				Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	TLK	5		17,14		14,2		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			17,14		342,80%		
	Meningkatnya Produksi dan Pemasaran Produk Pertanian dan Peternakan	3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan produksi dan pemasaran produk pertanian dan peternakan	%	TLK	2,5	28.773.363.640	4,23	20.408.289.156	3,35	10.727.976.305	-	-	1.835.550.844	154,93%	-	-			-	-			-	-			TLK	-	-	1.835.550.844	17,11%	4,23	22.243.840.000	169,20%	77,31%	Dinas KPKP
				Persentase sumber daya manusia pertanian yang	%	Average	80		100		100		-	-			-	-			-	-			-	-			AVG	-	-			100		125,00%		

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		PD
													I				II				III				IV													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)					(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6) x100%		(16)
				Indikator	satuan	Konsolidasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	konsolidasi	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
				meningkat kapasitasnya																																		
		3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan																																		
	Terciptanya stabilitas harga barang kebutuhan pokok	3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Nilai	TLK	14	130.000.000	9,75	221.154.300	14	243.619.989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	0	0,00%	9,75	221.154.300	69,64%	170,12%	Dinas PPKUKM
	Meningkatnya nilai ekspor non migas DKI Jakarta	3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor non migas DKI Jakarta	USD	TLK	11.774.067.998	31.121.256.730	12335355000	12.366.549.609	12085560000	11.904.094.269	-	-	105.300.000	508,75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	105.300.000	0,88%	12335355000	12.471.849.609	104,77%	40,08%	Dinas PPKUKM
	Meningkatnya Keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti	3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti	%	TLK	100	86.822.384.942	100	14.407.850.200	100	23.962.376.657	100	100,00%	1.643.068.004	110,89%	-	-			-	-			-	-			AVG	100	100,00%	1.643.068.004	6,86%	100	16.050.918.204	100,00%	18,49%	Dinas PPKUKM
				Persentase produk hasil uji yang sesuai syarat mutu SNI atau syarat teknis lainnya	%	TLK	83		95,36625		95,24		97,29	102,15%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	97,29	102,15%			96,0075		115,67%		
				Persentase alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	%	Average	100		100		100		100	100,00%			-	-			-	-			-	-			AVG	100	100,00%			100		100,00%		
	Meningkatnya pelaku usaha terfasilitasi dalam pemasaran produk dalam negeri yang meningkat omsetnya	3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha terfasilitasi dalam pemasaran produk dalam negeri yang meningkat omsetnya	%	TLK	50	158.967.030.231	43	70.073.160.648	56	51.515.501.188	-	-	1.016.682.400	158,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	1.016.682.400	1,97%	43	71.089.843.048	86,00%	44,72%	Dinas PPKUKM
		3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian																																		
	Meningkatnya Omzet Industri Kecil dan Menengah	3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan omzet industri kecil dan menengah	%	TLK	5	529.019.915.536	23,0065	165.498.676.050	9,503	86.411.251.877	-	-	4.829.711.875	126,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	4.829.711.875	5,59%	23,0065	170.328.387.925	460,13%	32,20%	Dinas PPKUKM
				Persentase pelaku usaha	%	TLK	65		90,41		83,72		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			90,41		139,09%		

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		PD
													I				II				III				IV												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)					(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6) x100%		(16)
				Indikator	satuan	Konsolidasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	konsolidasi	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
				IKM yang meningkat kapasitasnya																																	
2.2	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja			Tingkat Penganggura n Terbuka (Agustus)	Persen	TLK	7,31		6,37		6,53		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			6,37		112,86%		
		2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Terkait Pelayanan Dasar																																		
		2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja																																		
	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	%	Average	80	617.189.280.321	91,955	201.480.190.537	90,92	177.977.007.928	-	-	14.512.188.681	719,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	-	-	14.512.188.681	8,15%	91,955	215.992.379.218	114,94%	35,00%	Dinas TKTE
				Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rupiah	TLK	411.825.849		409504721		407748366		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			409504721		99,44%		
	Tercapainya Penempatan Tenaga Kerja Formal dan Mandiri	2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja formal yang ditempatkan	%	Average	91,5	174.471.787.850	88,96875	69.682.278.098	93	43.867.355.551	93	100,00%	4.000.460.535	213,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	93	100,00%	4.000.460.535	9,12%	90,3125	73.682.738.633	98,70%	42,23%	Dinas TKTE
				Presentase tenaga kerja mandiri yang berwira usaha, berdaya saing dan berkelanjutan.	%	Average	90		91,033		90		-	-			-	-			-	-			-	-			AVG	-	-			91,033		101,15%		
		2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah																																		
	Meningkatnya kompetensi, pemahaman dan pengetahuan di bidang perkoperasian bagi pengurus/ pengelola koperasi yang keanggotaannya di Provinsi DKI Jakarta	2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM koperasi yang meningkat kapasitasnya	%	TLK	70	4.098.015.017	72,64	944.391.907	80	817.661.917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	0	0,00%	72,64	944.391.907	103,77%	23,05%	Dinas PPKUKM

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		PD
													I				II				III				IV												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)					(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6) x100%		(16)
				Indikator	satuan	Konsolidasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	konsolidasi	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya persentase volume usaha/ omset koperasi	2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	%	TLK	2	1.300.000.000	4,62	310.463.400	4,62	787.883.278	-	-	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	0	0,00%	4,62	310.463.400	231,00%	23,88%	Dinas PPKUKM
				Persentase koperasi konvensional yang bertransformasi digital (modern)	%	TLK	0,5		0,5505		0,595		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-			0,5505		110,10%		
	Meningkatnya jumlah pelaku wirausaha baru yang tangguh dan mandiri melalui proses pembinaan kewirausahaan terpadu	2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase wirausaha baru yang tangguh dan mandiri	%	TLK	4	365.438.667.878	3,165	104.226.122.339	3,5	101.096.695.522	-	-	10.812.131.296	145,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	10.812.131.296	10,69%	3,165	115.038.253.635	79,13%	31,48%	Dinas PPKUKM
2.3	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial			Tingkat Kemiskinan	Persen	TLK	2,91		4,29	-	3,25		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			4,29		52,58%		
				Rasio Gini	Koefisien	TLK	0,409		0,431	-	0,41		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			0,431		94,62%		
				Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persen	TLK	0,68		0,46		0,35		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			0,46		132,35%		
		1	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																																		
		1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial																																		
	Terlaksananya Program Rehabilitasi Sosial	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Indeks pencapaian SPM rehabilitasi sosial	Indeks	TLK	100	1.343.709.857.425	99,75375	558.221.888.413	100	310.821.577.164	99,91	99,91%	61.422.290.981	114,40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	99,91	99,91%	61.422.290.981	19,76%	99,80583	619.644.179.394	99,81%	46,11%	Dinsos
	Terlaksananya Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial penerima layanan perlindungan dan jaminan sosial yang tepat sasaran	%	TLK	100	4.443.284.258.338	98,39	1.640.269.600.499	100	861.577.472.023	40	40,00%	154.525.687.667	1682,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	40	40,00%	154.525.687.667	17,94%	78,9267	1.794.795.288.166	78,93%	40,39%	Dinsos
	Terlaksananya Program Penanganan Bencana	1.06.06	Program Penanganan Bencana	Indeks pencapaian SPM penanganan bencana	Indeks	TLK	100	402.713.937.964	99,86	64.278.881.262	100	41.700.038.097	99,97	99,97%	4.981.427.041	235,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	99,97	99,97%	4.981.427.041	11,95%	99,8967	69.260.308.303	99,90%	17,20%	Dinsos
	Meningkatnya Layanan	1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Pemenuhan Kebutuhan	%	Average	95	7.328.899.872	100	275.189.600	100	212.011.545	100	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	100	100,00%	0	0,00%	100	275.189.600	105,26%	3,75%	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		PD
													I				II				III				IV													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)					(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6) x100%		(16)
				Indikator	satuan	Konsolidasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	konsolidasi	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penanganan Bencana Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu			Dasar Korban Bencana Lingkup Kabupaten Administrasi																																	
		2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Terkait Pelayanan Dasar																																		
		2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan																																		
	Tersedianya Stok Kebutuhan Pangan	2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan	%	Average	100	4.183.828.667.563	100	1.841.134.761.660	100	826.866.257.018	-	-	82.832.768.346	126,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	82.832.768.346	10,02%	100	1.923.967.530.006	100,00%	45,99%	Dinas KPKP
	Terawasinya Pangan Segar yang Bebas Bahan Berbahaya	2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan yang Bebas Bahan Berbahaya	%	Average	99,8	14.106.121.144	99,9675	5.736.481.650	99,8	2.445.299.554	100	100,20%	281.282.820	134,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	100	100,20%	281.282.820	11,50%	99,9783	6.017.764.470	100,18%	42,66%	Dinas KPKP
		2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																																		
	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	TLK	97,41	2.171.116.081.149	94,449	931.574.984.503	95,5	481.179.200.370	-	-	77.852.391.708	109,75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	77.852.391.708	16,18%	94,449	1.009.427.376.211	96,96%	46,49%	Dinas PPAPP
2.4	Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi			Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	TLK	4,03		4,03		4,01		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			4,03		100,00%		
		2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Terkait Pelayanan Dasar																																		
		2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal																																		
	Terwujudnya Pengemba	2.18.02	Program Pengembangan	Nilai kemudahan investasi	Nilai	TLK	80,1	7.476.999.222	74,06	3.228.572.400	77,5	5.911.798.530	-	-	124.390.000	219,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	124.390.000	2,10%	74,06	3.352.962.400	92,46%	44,84%	Dinas PMPTSP

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		PD
													I				II				III				IV														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)					(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6) x100%		(16)
				Indikator	satuan	Konsolidasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	konsolidasi	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
	ngan Iklim Penanaman Modal untuk Memberikan Kemudahan Investasi		Iklim Penanaman Modal																																		
	Terlaksananya Penguatan Kegiatan Promosi Penanaman Modal DKI Jakarta	2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD, dan Swasta	100	Average	100	39.983.856.857	100	14.501.535.335	100	11.377.966.967	100	100,00%	661.396.819	221,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	100	100,00%	661.396.819	5,81%	100	15.162.932.154	100,00%	37,92%	Dinas PMPTSP
				Persentase penguatan kegiatan promosi penanaman modal DKI Jakarta	%	Average	100		100		100		100	100,00%			-	-			-	-			-	-			AVG	100	100,00%			100		100,00%		
	'Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	50	TLK	90	7.749.897.902	117,5	4.072.671.862	85	4.798.771.652	-	-	122.600.000	178,59%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	122.600.000	2,55%	117,5	4.195.271.862	130,56%	54,13%	Dinas PMPTSP
		2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																																		
	Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Karya Budaya yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Benda dan Tak Benda (WBTB) yang merupakan Intagible Culture Assets menurut UNESCO	%	TLK	9,89	1.012.603.736.233	9,205	249.641.896.448	9,43	142.088.501.836	-	-	4.542.527.196	158,70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	4.542.527.196	3,20%	9,205	254.184.423.644	93,07%	25,10%	Disbud
	Meningkatnya jumlah objek cagar budaya yang telah ditetapkan dibandingkan jumlah seluruh	2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Objek diduga Cagar Budaya yang ditetapkan menjadi Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta	%	TLK	46,11	362.720.138.549	46,3	26.293.178.429	47,6	5.844.025.168	-	-	583.520.000	(Serapan mendahului rencana SPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	583.520.000	9,98%	46,3	26.876.698.429	100,41%	7,41%	Disbud

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		PD
													I				II				III				IV													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)					(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6) x100%		(16)
				Indikator	satuan	Konsolidasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	konsolidasi	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
	objek diduga cagar budaya yang ada di DKI Jakarta																																				
	Meningkatkan Partisipasi penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan bersejarah dan museum lainnya	2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan museum lainnya	%	TLK	25	163.806.739.047	27,925	129.049.979.222	24,99	92.207.276.145	-	-	135.675.000	146,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	135.675.000	0,15%	27,925	129.185.654.222	111,70%	78,86%	Disbud
		2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan							-																											
	Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	TLK	25,5	363.565.765.112	32,255	174.867.707.895	34,8	89.364.107.092	7,51	100,13%	5.788.844.176	101,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	7,51	21,58%	5.788.844.176	6,48%	24,0067	180.656.552.071	94,14%	49,69%	Dispusip
				Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	TLK	0,0714		0,06195		0,067		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			0,06195		86,76%		
				Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Rasio	TLK	0,0006		0,000484		0,001		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-			0,000484		80,67%		
				Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar	%	TLK	14,9		9,77		12,4		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			9,77		65,57%		
				Nilai tingkat kegemaran membaca	Nilai	TLK	73,51		72,805		73,21		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			72,805		99,04%		
	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Kemanfaatan Perpustakaan Lingkup Kabupaten Administrasi	%	TLK	15	6.688.769.283	15,485	2.511.929.733	16,84	1.623.995.571	4	100,00%	333.517.590	133,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	4	23,75%	333.517.590	20,54%	11,6567	2.845.447.323	77,71%	42,54%	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
3.	**Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan**			**Indeks Pembangunan Manusia**	Indeks	**TLK**	**82,11**		**83,85**		**84,15**		**-**	**-**			**-**	**-**			-	-			**-**	**-**			**TLK**	**-**	**-**			**83,85**		**102,12%**		

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		PD
													I				II				III				IV													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)					(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6) x100%		(16)
				Indikator	satuan	Konsolidasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	konsolidasi	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
3.1	Meratanya Kesempatan Pendidikan untuk Semua dan Edukasi terkait Pembelajaran Sepanjang Hayat			Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	TLK	12,2		12,445		12,52		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			12,445		102,01%		
		1	Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																																		
		1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan																																		
	Meningkatnya akses pelayanan pendidikan	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Persentase	TLK	55	43.569.025.310.912	88,215	15.228.933.738.068	92,46	9.491.791.691.322	53,87	107,74%	1.547.434.455.891	1162,77%	-	-			-	-			-	-			TLK	53,87	58,26%	1.547.434.455.891	16,30%	76,767	16.776.368.193.959	139,58%	38,51%	Dinas Pendidikan
				Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persentase	TLK	100		73,675		100		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			73,675		73,68%		
				Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	TLK	100		98,82		100		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			98,82		98,82%		
				Persentase guru profesional	Persentase	TLK	90,7		89,48		89,6		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			89,48		98,65%		
				Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A	Persentase	TLK	72,94		77,71		84,04		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			77,71		106,54%		
				Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Nilai	TLK	72,25		83,92		82,98		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-			83,92		116,15%		
				Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Nilai	TLK	64,83		71,715		66,27		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			71,715		110,62%		
				Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	Persentase	TLK	100		76,225		100		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			76,225		76,23%		
				Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang	Persentase	TLK	100		83,435		100		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			83,435		83,44%		

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		PD
													I				II				III				IV													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)					(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6) x100%		(16)
				Indikator	satuan	Konsolidasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	konsolidasi	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
				berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)																																		
				Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)**	Persentase	**	**		53,69		100		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			53,69		**		
3.2	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan			Angka Harapan Hidup	Tahun	TLK	73,53		75,9		75,99		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			75,9		103,22%		
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	TLK	12,2		17,4	-	15,8		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			17,4		57,38%		
		1	Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																																		
		1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																																		
	Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	%	TLK	100	18.555.396.508.290	100	5.564.515.884.662	100	2.926.491.287.514	25	100,00%	38.119.337.686	92,66%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	25	25,00%	38.119.337.686	1,30%	75	5.602.635.222.348	75,00%	30,19%	Dinkes
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar	%	TLK	100		67		100		100	100,00%			-	-			-	-			-	-			TLK	100	100,00%			78		78,00%		
				Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	TLK	100		100		100		100	161,29%			-	-			-	-			-	-			TLK	100	100,00%			100		100,00%		
				Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks	TLK	0,64		0,62		0,61		0,65	106,56%			-	-			-	-			-	-			TLK	0,65	106,56%			0,63		98,44%		
				Angka Kematian Ibu (AKI)	Rate	TLK	70		40,71		43,56		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			40,71		141,84%		

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		PD
													I				II				III				IV										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)					(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6) x100%		(16)
				Indikator	satuan	Konsolidasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	konsolidasi	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
				Angka Kematian Neonatal (AKN)	Rate	TLK	1,28		2,265		1,29		0,57	136,67%			-	-			-	-			-	-			TLK	0,57	155,81%			1,7		67,19%		
				Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	%	TLK	100		100		100		100	100,00%			-	-			-	-			-	-			TLK	100	100,00%			100		100,00%		
				Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan	%	TLK	100		104,875		100		100,5	100,50%			-	-			-	-			-	-			AVG	100,5	100,50%			103,4167		103,42%		
				Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)	%	TLK	80		96,315		96,33		96,33	100,00%			-	-			-	-			-	-			TLK	96,33	100,00%			96,32		120,40%		
				Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya	%	TLK	100		94,8		100		95,07	101,14%			-	-			-	-			-	-			TLK	95,07	95,07%			94,89		94,89%		
				Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	TLK	98		98,45		98,56		99,57	101,60%			-	-			-	-			-	-			TLK	99,57	101,02%			98,823		100,84%		
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase implementasi hospitality dalam pelayanan	%	TLK	100	6.699.605.998.797	100	2.717.765.549.664	100	1.619.647.659.833	32,3	129,20%	367.395.421.582	135,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	32,3	32,30%	367.395.421.582	22,68%	77,433	3.085.160.971.246	77,43%	46,05%	Dinkes
				Rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit	%	TLK	65		79,32		82,84		75,8	108,29%			-	-			-	-			-	-			TLK	75,8	91,50%			78,1467		120,23%		

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		PD
													I				II				III				IV											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)					(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6) x100%		(16)
				Indikator	satuan	Konsolidasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	konsolidasi	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
				Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)																																	
				Persentase pemenuhan jumlah dan jenis tenaga kesehatan sesuai standar di Puskesmas Kecamatan	%	TLK	100		98,105		100		98,74	110,94%			-	-			-	-			-	-			TLK	98,74	98,74%			98,3167		98,32%		
				Persentase pemenuhan kriteria penyelenggara pelatihan bidang kesehatan berskala nasional	%	TLK	100		68,75		70		75,66	108,09%			-	-			-	-			-	-			TLK	75,66	108,09%			71,0533		71,05%		
	Terpenuhinya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian yang memenuhi standar	%	TLK	55	2.547.347.676	42,5	516.507.000	50	274.163.454	13,22	105,76%	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	13,22	26,44%	0	0,00%	32,74	516.507.000	59,53%	20,28%	Dinkes
				Persentase sarana alat kesehatan yang memenuhi ketentuan cara pengelolaan dan distribusi alat kesehatan yang balk	%	TLK	55		65,505		50		17	113,33%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	17	34,00%			49,3367		89,70%		
				Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	%	TLK	73		82,05		80,3		21,4	118,89%			-	-			-	-			-	-			TLK	21,4	26,65%			61,833		84,70%		
	Terlaksanany a Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) aktif	%	TLK	67	903.530.994	95,21	984.957.000	94,88	4.743.860.916	91,61	130,87%	143.975.000	30,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	91,61	96,55%	143.975.000	3,03%	94,01	1.128.932.000	140,31%	124,95%	Dinkes
				Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) melaksanakan revitalisasi pelayanan	Unit	TLK	176		190		132		393	297,73%			-	-			-	-			-	-			TLK	393	297,73%			257,667		146,40%		

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		PD
													I				II				III				IV													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)					(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6) x100%		(16)
				Indikator	satuan	Konsolidasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	konsolidasi	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
		2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Terkait Pelayanan Dasar																																		
		2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																																		
	Meningkatnya kesertaan keluarga dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase masyarakat (keluarga) yang memperoleh informasi program Bangga Kencana dengan cara memperoleh/ mendengar/ melihat pesan/informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui media dan petugas.	%	TLK	63,6	44.725.904.539	69,595	15.626.651.404	61,1	15.984.994.263	-	-	553.029.789	179,01%			-	-			-	-			-	-		TLK	-	-	553.029.789	3,46%	69,595	16.179.681.193	109,43%	36,18%	Dinas PPAPP
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	TLK	12,8		13,65		11,4		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			13,65		93,36%		
				Angka prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	TLK	60,32		50,75		61,1		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			50,75		84,13%		
				Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	TLK	19,85		5,4		12		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			5,4		172,80%		
	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	tahun	TLK	23,2	12.117.750.000	24,25	4.181.456.289	22,9	4.407.115.274	-	-	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	0	0,00%	24,25	4.181.456.289	104,53%	34,51%	Dinas PPAPP
		2.19	Urusan Pemerintahan Bidang																																		

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		PD
													I				II				III				IV													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)					(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6) x100%		(16)
				Indikator	satuan	Konsolidasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	konsolidasi	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kepemudaan dan Olahraga																																			
	Meningkatnya Partisipasi aktif dan Kapasitas Pemuda	2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda hasil binaan yang berprestasi dalam bidang yang ditentukan	%	TLK	50	185.005.524.518	53,5	38.492.273.068	50	31.698.001.646	-	-	705.254.500	(Serapan mendahului rencana SPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	705.254.500	2,22%	53,5	39.197.527.568	107,00%	21,19%	Dispora
	Meningkatnya Prestasi melalui Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi, Penyelenggaraan Event Olahraga dan Pemenuhan Prasarana dan Sarana	2.19.03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	%	TLK	96	8.894.206.966.786	97,025	1.862.649.686.693	91	864.248.505.137	-	-	77.383.616.187	857,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	77.383.616.187	8,95%	97,025	1.940.033.302.880	101,07%	21,81%	Dispora
	Meningkatnya Daya Saing Keolahragaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	2.19.03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi Lingkup Kabupaten Administrasi	%	TLK	90	11.868.711.113	90	803.669.972	85	1.000.505.299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	0	0,00%	90	803.669.972	100,00%	6,77%	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
3.3	Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender			Indeks Pembangunan Gender	Indeks	TLK	95,34		96,45		96,4		-	-			-	-			-	-			-	-			**TLK**	-	-			96,45		101,16%		
3.4	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat			Indeks Demokrasi	Indeks	TLK	77,57		83,35		84,57		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			83,35		107,45%		
		4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																																		
		4.02	Sekretariat DPRD																																		
	Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	Indeks	Average	4	1.907.765.114.409	4	914.552.853.467	4	538.285.439.803	4	100,00%	165.365.523.982	134,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	4	100,00%	165.365.523.982	30,72%	4	1.079.918.377.449	100,00%	56,61%	Sekretariat DPRD
		8	Unsur Pemerintahan Umum																																		
		8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik																																		

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		PD
													I				II				III				IV													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)					(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6) x100%		(16)
				Indikator	satuan	Konsolidasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	konsolidasi	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase tingkat pemahaman masyarakat terkait ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	TLK	52	94.971.312.902	56,25	23.313.983.081	51,5	21.638.657.333	-	-	1.303.458.610	67,58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	-	-	1.303.458.610	6,02%	56,25	24.617.441.691	108,17%	25,92%	Bakesbangpol
	Meningkatnya Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik	8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase tingkat pemahaman masyarakat terkait pendidikan politik, etika dan budaya politik serta peningkatan peran partai politik	%	TLK	52	256.184.249.262	56,825	1.269.881.086.823	51,5	48.484.238.828	-	-	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	-	-	0	0,00%	56,825	1.269.881.086.823	109,28%	495,69%	Bakesbangpol
	Meningkatnya Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase tingkat pemahaman masyarakat terkait ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	TLK	52	20.568.119.689	56,825	3.416.699.924	51,5	19.787.411.162	-	-	11.000.000	1,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	-	-	11.000.000	0,06%	56,825	3.427.699.924	109,28%	16,67%	Bakesbangpol
	Meningkatnya Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing	8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase tingkat pemahaman masyarakat terkait kewaspadaan dini, penanganan konflik, dan pemantauan orang asing	%	TLK	52	130.022.623.874	50,75	804.537.827.166	51,5	675.964.781.294	-	-	509.000.000	73,47%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	-	-	509.000.000	0,08%	50,75	805.046.827.166	97,60%	619,16%	Bakesbangpol
4.	**Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas**			**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**TLK**	**85**		**88,095**		**84**		**-**	**-**			**-**	**-**			**-**	**-**			**-**	**-**			**TLK**	**-**	**-**			**88,095**		**103,64%**		
4.1	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	TLK	90		92,53		93,36		-	-			-	**-**			-	**-**			-	-			TLK	**-**	**-**			92,53		102,81%		
		2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan																																		

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		PD
													I				II				III				IV													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)					(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6) x100%		(16)
				Indikator	satuan	Konsolidasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	konsolidasi	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pelayanan Dasar Terkait Pelayanan Dasar																																			
		2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																																			
	Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	TLK	99	174.413.336.068	99,935	124.180.957.682	99	84.965.883.862	99,12	100,12%	19.774.301.468	165,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	99,12	100,12%	19.774.301.468	23,27%	99,6633	143.955.259.150	100,67%	82,54%	Dinas Dukcapil
	Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	TLK	99,88	22.588.546.991	99,985	9.455.537.151	99,8	6.680.701.913	99,92	100,12%	1.014.476.363	154,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	99,92	100,12%	1.014.476.363	15,19%	99,9633	10.470.013.514	100,08%	46,35%	Dinas Dukcapil
		2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal																																			
	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penerbitan izin tepat waktu	%	Average	100	833.530.672.487	100	290.556.230.400	100	145.472.044.258	100	100,00%	41.565.148.468	230,94%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	100	100,00%	41.565.148.468	28,57%	100	332.121.378.868	100,00%	39,85%	Dinas PMPTSP
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan berbasis Digital	2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Indeks kepuasan layanan pengelolaan sarana prasarana teknologi informasi serta sistem data dan informasi perizinan dan nonperizinan	Indeks	TLK	90	73.679.200.881	92,89875	29.732.544.022	92,29	21.560.243.207	93,8	106,59%	1.232.060.000	212,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	93,8	101,64%	1.232.060.000	5,71%	93,199167	30.964.604.022	103,55%	42,03%	Dinas PMPTSP
4.2	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	TLK	3,57		4,335		4,46		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			4,335		121,43%		
		2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Terkait Pelayanan Dasar																																			

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		PD
													I				II				III				IV												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)					(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6) x100%		(16)
				Indikator	satuan	Konsolidasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	konsolidasi	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika																																	
	Peningkatan Kualitas Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik	%	Average	100	231.402.160.533	100	110.398.691.410	100	74.760.216.154	100	100,00%	12.480.702.732	233,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	100	100,00%	12.480.702.732	16,69%	100	122.879.394.142	100,00%	53,10%	Diskominfotik
	Peningkatan Kualitas Pemenuhan Layanan Teknologi Informatika dan Komunikasi	2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah pemenuhan layanan teknologi informatika dan komunikasi	Perangkat Daerah	Average	51	2.642.120.812.914	51	943.565.166.957	51	859.074.150.747	20	100,00%	31.428.825.765	134,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	20	39,22%	31.428.825.765	3,66%	40,667	974.993.992.722	79,74%	36,90%	Diskominfotik
4.3	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah			Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	TLK	90,5 (AA)		81,36		87		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			81,36		89,85%		
				Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	TLK	85		74,73		80		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			74,73		87,92%		
		4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																																	
		4.01	Sekretariat Daerah																																	
	Peningkatan Kualitas Layanan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	4.01.02	Program Penataan Organisasi	Persentase Kerjasama Luar Negeri yang Terimplementasi	Persentase	TLK	60	22.326.829.970	100	50.363.245.209	100	36.628.475.897	100	100,00%	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	100	100,00%	0	0,00%	100	50.363.245.209	166,67%	225,57%	Biro KSD
	Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Keuangan Perjalanan Dinas dan Peningkatan Kualitas Implementasi Kerjasama Dalam Negeri	4.01.03	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi dan Keuangan Perjalanan Dinas	Indeks	TLK	4	464.856.044.121	4	128.549.592.597	4	70.100.001.327	4	100,00%	788.621.708	38,47%	-	-			-	-			-	-			AVG	4	100,00%	788.621.708	1,12%	4	129.338.214.305	100,00%	27,82%	Biro KSD
				Persentase Kerjasama Dalam Negeri yang Terimplementasi	Persentase	TLK	60		100		100		100	100,00%			-	-			-	-			-	-			AVG	100	100,00%			100		166,67%		

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		PD
													I				II				III				IV													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)					(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6) x100%		(16)
				Indikator	satuan	Konsolidasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	konsolidasi	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
		5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																																		
		5.01	Perencanaan																																		
	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan lingkup provinsi	5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai komponen perencanaan pembangunan lingkup provinsi pada indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai	TLK	90	146.098.966.000	95,845	37.378.730.823	97,22	20.508.823.571	-	-	3.487.623.500	208,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	3.487.623.500	17,01%	95,845	40.866.354.323	106,49%	27,97%	Bappeda
				Nilai komponen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan pada indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai	TLK	90		90,53		88,46		-	-			-	-			-	-			-	-			-	-	TLK	-	-			90,53		100,59%		
		6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan																																		
		6.01	Inspektorat Daerah																																		
	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian TL LHP internal dan eksternal	%	TLK	95	348.200.596.774	91,5	33.489.808.780	93	173.246.454.328	-	-	7.903.085.000	6399,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	7.903.085.000	4,56%	91,5	41.392.893.780	96,32%	11,89%	Inspektorat
4.4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel			Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	TLK	3		3		3		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			3		100,00%		
		4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																																		
		4.01	Sekretariat Daerah																																		
	Meningkatnya kualitas kinerja BUMD dan PT Patungan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta	4.01.06	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rata-rata nilai ROE	Nilai	TLK	10	27.869.884.400	10,05	5.645.795.000	9	8.932.036.741	-	-	39.390.000	9,61%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	39.390.000	0,44%	10,05	5.685.185.000	100,50%	20,40%	BPBUMD
				Pertumbuhan Laba Bersih	Persen	TLK	15		20,005		14		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			20,005		133,37%		
				Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Persen	TLK	13		170		12		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			170		1307,69%		
	Terlaksananya Perbaikan Kualitas	4.01.07	Program Kebijakan dan Pelayanan	Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu	%	TLK	90	20.776.460.915	92,445	6.423.753.580	90	6.824.072.978	86,81	102,73%	199.441.000	119,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	86,81	96,46%	199.441.000	2,92%	90,567	6.623.194.580	100,63%	31,88%	BPPBJ

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		PD
													I				II				III				IV												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)					(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6) x100%		(16)
				Indikator	satuan	Konsolidasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	konsolidasi	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
	Standar Layanan Pengadaan Barang dan Jasa		Pengadaan Barang dan Jasa																																		
		5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																																		
		5.02	Keuangan																																		
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku	5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase akurasi dan penyelesaian dokumen APBD	%	TLK	100	15.989.942.352.329	100	1.261.723.107.508	100	2.614.464.262.128	-	-	46.450.340.283	90,79%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	-	-	46.450.340.283	1,78%	100	1.308.173.447.791	100,00%	8,18%	BPKD
				Persentase pengelolaan pelaksanaan APBD	%	TLK	100		100		100		100	100,00%			-	-			-	-			-	-			AVG	100	100,00%			100		100,00%		
				Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan tepat waktu	%	TLK	100		100		100		100	100,00%			-	-			-	-			-	-			AVG	100	100,00%			100		100,00%		
	Terselesaikannya Penyusunan Standar Belanja tepat waktu	5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyelesaian penyusunan standar harga tepat waktu	%	TLK	100	6.428.418.497	100	3.469.428.800	100	2.293.895.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVG	-	-	0	0,00%	100	3.469.428.800	100,00%	53,97%	BPKD
	Terlaksananya Pengelolaan BMD Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pemanfaatan BMD	%	TLK	25	331.947.585.316	75,54	192.761.964.389	29,84	115.345.832.243	70,63	4708,67%	6.757.616.711	128,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SUM	70,63	236,70%	6.757.616.711	5,86%	73,9033	199.519.581.100	295,61%	60,11%	BPAD
				Indeks kepatuhan tertib aset	Indeks	TLK	4		4		4		4	100,00%			-	-			-	-			-	-			AVG	4	100,00%			4		100,00%		
				Persentase aset daerah yang teridentifikasi dan tercatat dalam e-aset	%	TLK	100		100		100		-	-			-	-			-	-			-	-			AVG	-	-			100		100,00%		
	Meningkatnya Pengelolaan dan Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	%	Average	100	415.713.775.380	99,97	573.630.999.959	100	431.205.169.877	16,14	129,12%	13.637.769.056	393,23%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	16,14	16,14%	13.637.769.056	3,16%	72,0267	587.268.769.015	72,03%	141,27%	Bapenda
				Persentase realisasi penerimaan retribusi daerah	%	Average	100		103,095		100		22,71	181,68%			-	-			-	-			-	-			TLK	22,71	22,71%			76,3		76,30%		
4.5	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur			Indeks Sistem Merit	Indeks	TLK	345,5		343		350,5		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			343		99,28%		
		5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																																		
		5.03	Kepegawaian																																		
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan	5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Nilai aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, sistem	Nilai	TLK	110	135.204.377.494	110	44.150.726.205	110	43.362.844.755	-	-	1.594.381.625	115,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	1.594.381.625	3,68%	110	45.745.107.830	100,00%	33,83%	BKD

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025 (%)		PD
													I				II				III				IV												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)					(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6) x100%		(16)
				Indikator	satuan	Konsolidasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	konsolidasi	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kepegawaian Berbasis Sistem Merit			informasi serta perlindungan dan pelayanan pada indeks sistem merit																																	
				Nilai aspek promosi dan mutasi pada indeks sistem merit	Nilai	TLK	25		38,75		37,5		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			38,75		155,00%		
				Nilai aspek pengembangan karir pada indeks sistem merit	Nilai	TLK	69,53		56,25		59,53		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			56,25		80,90%		
				Nilai aspek manajemen kinerja serta penggajian, penghargaan dan disiplin pada indeks sistem merit	Nilai	TLK	110		111,25		112,5		-	-			-	-			-	-			-	-			TLK	-	-			111,25		101,14%		
Rata-rata capaian kinerja (%)														99,12%	3.803.980 .135.779	260,07%																				
Predikat Kinerja														SANGAT TINGGI		SANGAT TINGGI																				

Sumber: Sistem informasi monitoring evaluasi (monev) kinerja 2025, sistem informasi RPD 2023-2026, (diolah)

Keterangan: * Program tidak menggunakan APBD

** Sesuai dengan surat nomor 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 perihal Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, adanya penambahan Indikator Kinerja Urusan Bidang Pendidikan merujuk pada indikator prioritas Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Berdasarkan Tabel 2.6, dapat diperoleh data dan informasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2025, khususnya untuk program prioritas, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian kinerja program prioritas Provinsi DKI Jakarta untuk triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025, yang terdiri dari 103 program Perangkat Daerah, sebesar 99,12% dengan predikat kinerja organisasi sangat tinggi.
2. Terdapat 35 indikator program prioritas dengan capaian kinerja triwulan 1 tahun 2025 di atas 100% dengan capaian terbesar adalah indikator Persentase pemanfaatan BMD pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian kinerja sebesar 4708,67%.
3. Terdapat 5 indikator program prioritas dengan capaian kinerja triwulan 1 tahun 2025 tidak mencapai 100% dengan capaian kinerja terendah adalah indikator Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial penerima layanan perlindungan dan jaminan sosial yang tepat sasaran pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan capaian kinerja hanya 40%.
4. Terdapat 5 indikator program prioritas dengan capaian kinerja sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 dibandingkan dengan target akumulasi akhir periode 2026 yang memiliki capaian kinerja di bawah 50%.
5. Terdapat 6 indikator program prioritas dengan capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 yang memiliki capaian kinerja di bawah 25%
6. Realisasi serapan anggaran belanja daerah berdasarkan program prioritas dimaksud, pada triwulan 1 tahun 2025, telah mencapai Rp. 3.803.980.135.779,- atau 260,07% dibandingkan target Triwulan I sebesar Rp. 1.462.698.841.374,-. Tingginya realisasi tersebut membuat realisasi serapan anggaran belanja daerah berdasarkan program prioritas pada triwulan I tahun 2025 masuk kategori sangat tinggi.
7. Terdapat 66 program prioritas dengan realisasi anggaran triwulan 1 tahun 2025 di atas 100% dengan realisasi serapan terbesar adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan realisasi serapan anggaran sebesar 6399,26%.
8. Terdapat 22 program prioritas dengan realisasi anggaran triwulan 1 tahun 2025 kurang dari 100% dengan realisasi serapan terendah adalah Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dan Program Penataan Organisasi dengan realisasi serapan anggaran hanya 0%.

Indikator program prioritas dengan capaian kinerja sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 yang masih rendah dengan gap cukup jauh dari target kinerja akhir periode 2026 sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dan upaya ekstra. Beberapa indikator program dimaksud yaitu:

1. Persentase bidang tanah milik masyarakat yang terinventarisasi dan terfasilitasi dalam rangka perencanaan penggunaan tanah untuk mendukung peningkatan sertifikasi di kawasan pemukiman pada Program Penatagunaan Tanah dengan capaian kinerja sebesar 32,00%.
2. Peningkatan kapasitas sistem penanganan persampahan pada Program Pengelolaan Persampahan dengan capaian kinerja sebesar 44,26%.
3. Jumlah pengurangan emisi sebagai dampak dari pembangunan PLTS pada Program Pengelolaan Energi Terbarukan dengan capaian kinerja sebesar 32,59%.
4. Persentase Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik pada Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dengan capaian kinerja sebesar 36,75%.

5. Peningkatan kapasitas tampungan air pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan capaian kinerja sebesar 24,63%.

Indikator program prioritas dengan capaian kinerja pada triwulan 1 tahun 2025 yang masih rendah dengan gap cukup jauh dari target kinerja akhir tahun 2025 sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dan upaya ekstra. Beberapa indikator program dimaksud yaitu:

1. Indikator Persentase bidang tanah milik masyarakat yang terinventarisasi dan terfasilitasi dalam rangka perencanaan penggunaan tanah untuk mendukung peningkatan sertifikasi di kawasan pemukiman pada Program Penatagunaan Tanah dengan capaian kinerja sebesar 10%.
2. Indikator Jumlah pengunjung event pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan capaian kinerja sebesar 0,67%.
3. Indikator Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat pada Program Pembinaan Perpustakaan dengan capaian kinerja sebesar 21,58%.
4. Indikator Persentase Peningkatan Kemanfaatan Perpustakaan Lingkup Kabupaten Administrasi pada Program Pembinaan Perpustakaan dengan capaian kinerja sebesar 23,75%.
5. Indikator Persentase realisasi penerimaan pajak daerah pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan capaian kinerja sebesar 16,14%.
6. Indikator Persentase realisasi penerimaan retribusi daerah pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan capaian kinerja sebesar 22,71%.

Capaian pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta triwulan I tahun 2025 yang realisasinya melampaui target terjadi karena adanya beberapa faktor pendorong antara lain:

1. Pendampingan, pembinaan, dan sosialisasi oleh perangkat daerah terkait, antara lain pada program:
   a. Program Pengelolaan Persampahan yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup
   b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat serta Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang diampu oleh Dinas Kesehatan
   c. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang diampu oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
   d. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang diampu oleh Dinas Perhubungan
2. Pemutakhiran kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mempengaruhi mekanisme pelaksanaan kegiatan, antara lain pada program:
   a. Program Pengelolaan Persampahan yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup
   b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang diampu oleh Dinas Kesehatan
   c. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang diampu oleh Dinas Kesehatan
3. Adanya sistem informasi/ pelaporan yang dapat memantau dan memverifikasi hasil pelaporan pelaksanaan kegiatan, antara lain pada program:
   a. Program Pengelolaan Persampahan yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup
   b. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang diampu oleh Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
   c. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang diampu oleh Dinas Kesehatan
4. Kolaborasi dan koordinasi yang efektif dan produktif antara *stakeholder*, antara lain pada program:

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diampu oleh Satuan Polisi Pramong Paja
b. Program Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Dinas Pendidikan
c. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang diampu oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
d. Program Pembinaan Perpustakaan yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

5. Percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas daerah yang terdapat dalam Program Percepatan 100 Hari Pertama Gubernur dan Wagub (*Quick Wins*), antara lain pada program:
   a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang diampu oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
   b. Program Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Dinas Pendidikan
6. Peningkatan kualitas pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik dan tren masyarakat terkini, antara lain pada program:
   a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang diampu oleh Dinas Kesehatan
   b. Program Pembinaan Perpustakaan yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
   c. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang diampu oleh Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Capaian program prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta triwulan I tahun 2025 yang realisasinya belum mencapai 100% disebabkan oleh beberapa faktor penghambat antara lain:

1. Kurangnya jumlah SDM dengan kompetensi tertentu yang sesuai standar, antara lain pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran yang diampu oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
2. Pemutakhiran data yang belum selesai mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, antara lain pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang diampu oleh Dinas Sosial.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan I tahun 2025, diperoleh beberapa rekomendasi untuk perbaikan ke depan, antara lain:

1. Penentuan trajektori target kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada setiap triwulan sebaiknya mempertimbangkan tren realisasi kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan setiap triwulan pada periode tahun sebelumnya.
2. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja organisasi, maka penentuan trajektori sebaiknya didistribusikan pada setiap triwulan. Adapun target kinerja yang tidak dapat didistribusikan setiap triwulan sebaiknya dilengkapi dengan rencana aksi untuk capaian setiap triwulan. Hal ini dikarenakan agar pemantauan pelaporan realisasi kinerjanya dapat direkam dan dipantau secara rutin dan berkala.
3. Pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan, disediakan standar operasional baik teknis maupun non teknis untuk mempercepat pencapaian target yang telah ditetapkan.
4. Perlunya penguatan dan percepatan proses pemutakhiran data yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan/ kebijakan dalam penanganan isu dan permasalahan perencanaan pembangunan.
5. Dalam memenuhi kebutuhan SDM perlu analisis kebutuhan riil SDM berdasarkan beban kerja, bukan hanya berdasarkan jumlah jabatan kosong serta pemetaan dan redistribusi pegawai antar unit/daerah untuk mengisi kekosongan di unit strategis.

6. Perlu kolaborasi antar stakeholder terkait untuk percepatan penyelesaian proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah
7. Perlunya percepatan jadwal pengadaan kebutuhan barang terkait kebencanaan jika kondisi sangat mendesak dan didukung dengan justifikasi teknis.
8. Perlu upaya yang lebih keras oleh perangkat daerah untuk mencapai target akhir 2025 pada program prioritas RKPD 2025 yang memiliki capaian kinerja di bawah 25% sampai dengan triwulan I tahun 2025.
9. *Gap* yang besar antara capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 (capaian kinerja kurang dari 25%) dan target akumulasi akhir periode 2026 (capaian kinerja kurang dari 50%) dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan fokus prioritas pembangunan daerah tahun berikutnya.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajin Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

Permasalahan pembangunan Urusan Pendidikan di DKI Jakarta yaitu:

a. Belum optimal dan memadainya utilisasi dan modernisasi TIK untuk mendukung penguatan sistem dan proses pembelajaran jarak jauh di setiap satuan pendidikan serta pengembangan fitur-fitur pembelajaran daring yang menarik minat dan mudah dicerna oleh para siswa dari setiap mata pelajaran yang diajarkan.
b. Masih belum terpenuhinya sebagian sarana prasarana pendidikan khususnya untuk sekolah-sekolah pinggiran.
c. Belum meratanya ketersediaan sarana prasarana pendidikan (bangunan sekolah dan ruang kelas), serta sarana prasarana penunjang lainnya untuk pendidikan formal.
d. Belum meratanya ketersediaan sarana prasarana pendidikan informal yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan karakter dan anak usia dini, seperti pondok pesantren, MDTA, RA, TK, PAUD.
e. Belum optimalnya ketersediaan, distribusi, dan kualitas tenaga pendidik (guru).
f. Masih rendahnya persentase guru bersertifikasi (perbandingan antara jumlah guru bersertifikasi dengan jumlah guru seluruhnya pada suatu jenjang pendidikan).
g. Belum merata dan memadainya Guru Pendamping Khusus (GPK) untuk siswa disabilitas.
h. Belum optimalnya pelaksanaan program *based learning* (cara pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengalami, mencari tahu, dan menemukan sendiri).
i. Belum efektifnya pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.

2.3.1.2 Kesehatan

Permasalahan pembangunan Urusan Kesehatan di DKI Jakarta yaitu:

a. Belum optimalnya tingkat kemandirian alat kesehatan dan farmasi.
b. Masih terdapat kelurahan yang belum memiliki Puskesmas mandiri (status kepemilikannya masih kontrak).
c. Masih ditemukan kasus 'permasalahan gizi' pada balita.
d. Masih minimnya total kelurahan yang mendeklarasikan sebagai kelurahan *Open Defecation Free* (ODF).
e. Belum optimalnya penyediaan fasilitas ramah disabilitas (trotoar, transportasi publik, rumah ibadah, pertokoan, fasilitas kesehatan).

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di DKI Jakarta yaitu:

a. Banjir yang disebabkan oleh alih fungsi lahan, penyempitan, pendangkalan saluran pembuangan air, serta dampak dari perubahan iklim.
b. Masih tingginya angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
c. Masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan tata ruang (RTRW dan RDTR) dengan pemanfaatan ruang di Provinsi DKI Jakarta.
d. Masih rendahnya cakupan layanan air limbah dan tingginya pencemaran lingkungan.
e. Masih belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar perkotaan.
f. Berkurangnya daerah resapan dan area dengan tingkat resapan tinggi dan kurangnya sistem jaringan drainase permukiman.
g. Masih rendahnya persentase panjang jalan yang memiliki trotoar.
h. Sebagian besar tanah di DKI Jakarta sudah menjadi hak milik perseorangan, sehingga mempersulit penataan kota dalam membangun infrastruktur pengendali banjir, drainase kota, maupun pembangunan sumur resapan.
i. Masih rendahnya angka Indeks Kualitas Air (IKA).

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di DKI Jakarta yaitu:

a. Rendahnya akses Rumah Tangga hunian layak di Jakarta yang sebesar 39% (BPS, 2024) disebabkan oleh masih maraknya penggunaan material asbes sebagai atap pada hunian yang merupakan komponen utama pemenuhan standar, jika tidak terpenuhi maka hunian dianggap tidak layak.
b. Padatnya permukiman penduduk, tingginya harga lahan, serta terbatasnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) yang tidak bisa mengintervensi aset privat.

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pembangunan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di DKI Jakarta yaitu:

a. Belum efektifnya pelaksanaan giat penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) pada lokasi yang strategis dalam mencegah PKL tersebut membuka lapak kembali di lokasi yang ditertibkan.
b. Masih tingginya potensi pelanggaran hukum terkait ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh masyarakat umum dan Dunia Usaha. Beberapa hal yang sering ditemukan meliputi pelanggaran lalu lintas, pelanggaran keabsahan perizinan bangunan, temuan narkoba dan porstitusi pada lokasi usaha, maupun penyelenggaraan reklame yang tidak berizin.
c. Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah terkait ketenteraman dan ketertiban umum yang berlaku. Beberapa contoh meliputi pemanfaatan trotoar yang tidak sesuai peruntukannya, membuang sampah tidak pada tempatnya, merokok pada Kawasan Dilarang merokok, maupun mendirikan bangunan pada lokasi yang dilarang.
d. Masih tingginya frekuensi kejadian kebakaran terutama pada pemukiman padat penduduk.
e. Masih rendahnya kecepatan pemberian layanan terhadap pengungsi.
f. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi, pengawasan dan penegakan Perda.
g. Belum optimalnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana daerah.
h. Penyelesaian kasus pelanggaran terhadap Perda/Perkada belum seluruhnya dituntaskan sampai keluarnya putusan Pengadilan.

2.3.1.6 Sosial

Permasalahan pembangunan Urusan Sosial di DKI Jakarta yaitu:

a. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) cukup tinggi sebesar 5.998 sepanjang tahun 2024 meliputi gelandangan, orang terlantar, penyandang disabilitas mental, dan pengamen sehingga berdampak pada permasalahan sosial.
b. Peningkatan kapasitas panti masih terhambat karena keterbatasan anggaran khususnya panti anak terlantar dan panti lanjut usia, serta panti ODGJ terlantar.
c. Pemenuhan SPM di dalam panti masyarakat belum terpenuhi secara baik, kolaborasi dengan masyarakat dan dunia usaha perlu ditingkatkan.
d. Belum optimalnya tahap verifikasi dan validasi data DTKS, khususnya dalam hal pemberian bantuan sosial.
e. Belum optimalnya pengintegrasian data untuk program kependudukan.

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Permasalahan pembangunan Urusan Tenaga Kerja di DKI Jakarta yaitu:

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2024 sudah mengalami penurunan, yaitu menjadi 6,21. Walaupun demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian TPT DKI Jakarta sebelum Pandemi COVID-19.
b. Masih ditemukan tenaga kerja dengan tingkat produktivitas yang rendah, yang mana kualitas kompetensi yang dimiliki tenaga kerja belum mampu memenuhi kebutuhan pasar yang tersedia.
c. Proporsi penduduk bekerja yang tergolong "pekerja rentan/*vulnerable employment*" masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja diatas 35 jam/minggu.

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di DKI Jakarta yaitu:

a. Masih kurangnya pemahaman pemangku kebijakan mengenai konsep dan isu gender serta manfaat pengarusutamaan gender dalam pembangunan sehingga berdampak pada rendahnya penganggaran pembangunan yang responsif gender.
b. Masih maraknya atau tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
c. Belum optimalnya atau masih rendahnya penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Perangkat Daerah sesuai ketentuan yg berlaku.

2.3.2.3 Pangan

Permasalahan pembangunan Urusan Pangan di DKI Jakarta yaitu:

a. Tingginya ketergantungan konsumsi masyarakat pada satu jenis bahan pangan pokok yaitu beras.
b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pola makan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Skor PPH DKI Jakarta Tahun 2024 (91,31) masih di bawah Skor PPH nasional, yaitu 93,48.
c. Fluktuasi harga pangan strategis menyebabkan menurunnya akses keterjangkauan terhadap pangan.
d. Belum optimalnya kerjasama antar daerah terkait ketersediaan pangan strategis.

2.3.2.4 Pertanahan

Permasalahan pembangunan Urusan Pertanahan di DKI Jakarta yaitu:

a. Masih terdapat tanah masyarakat yang belum bersertifikat.
b. Belum optimalnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait lainya.

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan Urusan Lingkungan Hidup di DKI Jakarta yaitu:

a. Menurunnya kualitas udara ambien akibat emisi sektor transportasi, pembangkit listrik, aktvitas industri manufaktur, produksi limbah padat/sampah, dan kegiatan rumah tangga. Beberapa partikulat seperti sulfur dioksida, nitrogen dioksida, karbon monoksida, dan ozon adalah beberapa polutan yang berkontribusi terhadap pencemaran udara yang dapat menyebabkan masalah kesehatan serius bagi manusia.
b. Perilaku masyarakat membuang sampah sembarang serta masih minimnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah atau *Reuse, Reduce* dan *Recycle* (3R).
c. Pembangunan infrastruktur dan urbanisasi yang cepat telah menyebabkan kerusakan habitat alami di sekitar Jakarta dan mengancam keberadaan berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Kehilangan keanekaragaman hayati memiliki dampak negatif yang luas pada ekosistem lokal dan keseimbangan lingkungan.
d. Permasalahan daerah rawan banjir diakibatkan kombinasi antara curah hujan yang tinggi, sistem drainase yang buruk, dan penurunan permukaan tanah akibat ekstraksi air tanah yang berlebihan.
e. Minimnya ketersediaan luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) dan distribusi RTH yang belum merata di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, rasio RTH hingga tahun 2024 sebesar 5,357% sesuai data resmi yang dirilis melalui laman Jakarta Satu.
f. Meningkatnya konstruksi bangunan gedung yang berdampak pada penurunan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
g. Jumlah limbah yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat.
h. Berdasarkan Pergub Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga, telah diamanatkan pemilahan sampah di masyarakat melalui pembentukan Bidang Pengelolaan Sampah RW (BPSRW) di 2.742 RW yang masih perlu dioptimalkan implementasinya.

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di DKI Jakarta yaitu:

a. Banyaknya penduduk dengan NIK yang belum terupdate di lembaga pengguna (BPJS, Vaksin, Bansos, dll) sehingga perlu dilakukan konsolidasi secara manual oleh Disdukcapil setempat.
b. Masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki data kependudukan.
c. Proses pelaksanaan inventarisasi data kependudukan yang tidak sesuai dengan domisili.
d. Dengan disahkannya UU Daerah Khusus Jakarta, berpotensi adanya penggantian KTP seluruh warga DKJ.

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di DKI Jakarta yaitu:

a. Belum optimalnya kolaborasi lintas sektor dengan Lembaga Kemasyarakatan PKK sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Belum optimalnya tingkat keaktifan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Posyantek Kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut dalam program pemberdayaan masyarakat.
c. Belum adanya pembaharuan kebijakan yang mengatur pola pemberdayaan masyarakat DKI Jakarta yang melibatkan berbagai sektor.

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Permasalahan pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga di DKI Jakarta yaitu:

a. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga yang belum optimal sehingga masih terjadi perkawinan usia anak yang berdampak pada tingginya prevalensi *stunting*.
b. Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan peserta KB aktif di DKI Jakarta melalui sistem terintegrasi.
c. Belum maksimalnya sosialisasi dan edukasi terkait seks dan reproduksi dalam pembelajaran di semua jenjang pendidikan.
d. Rendahnya pemahaman mengenai fungsi keluarga sehingga masih banyak keluarga yang belum memenuhi unsur kebahagiaan, kesejahteraan dan kemandirian atau masih banyak keluarga yang kurang berkualitas.
e. Penduduk DKI memasuki ageing population sehingga perlu konvergensi program lansia agar lansia DKI tetap produktif.

2.3.2.9 Perhubungan

Permasalahan pembangunan Urusan Perhubungan di DKI Jakarta yaitu:

a. Minimnya penggunaan transportasi publik (Moda share 2024: 12,28%).
b. Belum optimalnya perkembangan penyediaan sistem angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan dan rel yang terintegrasi antar moda angkutan.
c. Penguatan dan branding penggunaan transportasi massal yang masih kurang.
d. Belum optimalnya pengembangan Kawasan Berorientasi Transit pada simpul-simpul integrasi antarmoda.

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika di DKI Jakarta yaitu:

a. Kurang optimalnya pemanfaatan Internet Gratis (JakWIFI) yang seringkali disalahgunakan oleh masyarakat.
b. Perlunya peningkatan terhadap *Urban Digital Connectivity* terutama dalam mencapai kecepatan *download* dan upload internet rata-rata di wilayah Jakarta.

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan pembangunan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di DKI Jakarta yaitu:

a. Kurang memadainya keberadaan sentra ekonomi UKM dan industri kreatif baik secara *offline* maupun *online*.
b. Masih kurangnya akses perluasan pasar dan masih banyaknya Koperasi serta UMKM yang belum optimal dalam memanfaatkan teknologi digital pengembangan usahanya.
c. Masih rendahnya literasi keuangan bagi pelaku UMKM.

2.3.2.12 Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan Urusan Penanaman Modal di DKI Jakarta yaitu:

a. Penyesuaian regulasi sebagai dampak dari ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat terhadap kepastian perubahan regulasi seperti PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
b. Masih timpangnya persebaran realisasi investasi antar wilayah di DKI Jakarta.
c. Masih minimnya pelaku usaha yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), walaupun DPMPTSP rutin memberikan sosialisasi serta bimbingan teknis.

d. Masih minimnya kesepakatan investasi yang dihasilkan dari kegiatan promosi penanaman modal atas proyek-proyek prioritas DKI Jakarta kepada berbagai *stakeholder*.

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di DKI Jakarta yaitu:

a. Masih rendahnya partisipasi pemuda yang ikut serta secara aktif dalam kegiatan kewargaan, sosial kemasyarakatan, dan politik.
b. Diskriminasi gender, beban ganda, dan belum optimalnya akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan menyebabkan kesenjangan TPAK antara perempuan dan laki-laki di DKI Jakarta.
c. Dekadensi moral pada pemuda Jakarta disebabkan oleh lemahnya nilai-nilai moral dan pengaruh negatif globalisasi.

2.3.2.14 Statistik

Permasalahan pembangunan Urusan Statistik di DKI Jakarta yaitu belum optimalnya integrasi sistem/aplikasi maupun berbagi pakai data yang dimiliki antar OPD.

2.3.2.15 Persandian

Permasalahan pembangunan Urusan Persandian di DKI Jakarta yaitu:

a. Masih adanya OPD yang belum menerapkan persandian dalam rangka menjaga dokumen rahasia maupun arsip penting.
b. Masih kurangnya kesadaran aparatur maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (*security awareness*).
c. Belum memadainya sarana dan prasarana Persandian.
d. Belum meratanya kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi.

2.3.2.16 Kebudayaan

Permasalahan pembangunan Urusan Kebudayaan di DKI Jakarta yaitu:

a. Perubahan nilai-nilai budaya akibat pengaruh globalisasi.
b. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana kebudayaan yang bertaraf internasional.
c. Belum optimalnya peran budaya dalam proses perencanaan pembangunan.

2.3.2.17 Perpustakaan

Permasalahan pembangunan Urusan Perpustakaan di DKI Jakarta yaitu:

a. Masih minimnya minat masyarakat terhadap perpustakaan.
b. Perlunya peningkatan literasi dengan menambah dan memperbaharui buku-buku bacaan di sekolah-sekolah baik SMA/SMK termasuk bantuan untuk perpustakaan.

2.3.2.18 Kearsipan

Permasalahan pembangunan Urusan Kearsipan di DKI Jakarta yaitu:

a. Belum optimalnya pengelolaan kearsipan di perangkat daerah.
b. Transformasi pengelolaan arsip konvensional menjadi arsip dengan format digital belum didukung dengan infrastruktur yang efektif.
c. Belum optimalnya tingkat pengawasan pengelolaan arsip di daerah.

2.3.3 Urusan Pemerintah Pilihan

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan di DKI Jakarta yaitu:

a. Belum optimalnya hasil olahan sumber daya laut.
b. Belum optimalnya Pengembangan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan.

c. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan perikanan dan kelautan. Pada tahun 2024, Provinsi DKI Jakarta memperoleh Indeks Kesehatan Laut Jakarta sebesar 69,65, meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 68,77.
d. Pemasaran hasil kelautan dan perikanan belum terintegrasi.
e. Terbatasnya teknologi penangkapan yang dimiliki oleh nelayan.

2.3.3.2 Pariwisata

Permasalahan pembangunan Urusan Pariwisata di DKI Jakarta yaitu:

a. Kurangnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas dan pelaku industri pariwisata.
b. Belum optimalnya pengembangan wisata konvensi di DKI Jakarta.
c. Kurangnya publikasi dan informasi mengenai destinasi wisata maupun event-event di Jakarta.
d. Belum optimalnya sistem pemasaran pariwisata yang terpadu.

2.3.3.3 Pertanian

Permasalahan pembangunan Urusan Pertanian di DKI Jakarta yaitu:

a. Tingginya anggaran dikeluarkan untuk impor bahan pangan (beras, gandum, daging).
b. Kenaikan harga bahan pangan strategis yang dapat berdampak pada tingkat inflasi.
c. Menurunnya Produksi beras di Jakarta untuk konsumsi pangan penduduk, pada tahun 2024 produksi beras di Jakarta sebesar 1.453,78 ton, mengalami penurunan 122,59 ton (7,78 %).
d. Ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai sumber makanan pokok.
e. Banyaknya alih fungsi lahan di DKI Jakarta.
f. Belum optimalnya penggunaan teknologi pada sektor pertanian.
g. Adanya potensial terkena DPI (kekeringan/ kebanjiran).
h. Terlalu rendahnya penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat petani.

2.3.3.4 Kehutanan

Permasalahan pembangunan Urusan Kehutanan di DKI Jakarta yaitu:

a. Masih terbatasnya SDM Bidang kehutanan terkait kapasitas dan kebutuhan personil untuk pengelolaan dan perlindungan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta.
b. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan, penataan, pemeliharaan, dan perencanaan RTH hutan.
c. Perlunya pengaturan kembali sektor kehutanan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta.
d. Tingkat degradasi hutan dan lahan masih tinggi pada Daerah Aliran Sungai (DAS).
e. Meningkatnya jumlah gangguan fungsi ekosistem hutan.
f. Rendahnya teknologi pemanfaatan sumber daya hutan.

2.3.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di DKI Jakarta yaitu:

a. Rendahnya kesadaran para pelaku pengambil air tanah untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin, seperti membuat sumur imbuhan.
b. Ketersediaan lahan untuk instalasi biogas yang terbatas.

2.3.3.6 Perdagangan

Permasalahan pembangunan Urusan Perdagangan di DKI Jakarta yaitu:

a. Stagnasi hasil produksi UMKM.
b. Belum optimal dan memadainya dukungan pasar baik *offline* maupun *online*.
c. Perlambatan ekonomi global berdampak pada menurunnya permintaan ekspor.
d. Dominasi barang impor.
e. Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok.

f. Promosi produk industri lokal (asal DKI Jakarta) masih dirasa kurang.
g. Adanya persaingan antara pasar tradisional dengan pasar modern.
h. Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.
i. Belum Optimalnya akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan bagi pelaku usaha/IKM.

2.3.3.7 Perindustrian

Permasalahan pembangunan Urusan Perindustrian di DKI Jakarta yaitu:

a. Penurunan nilai tambah dari sektor perindustrian.
b. Produk industri berdaya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi) sehingga mengakibatkan pertumbuhan sektor industri melambat.
c. Produk industri belum seluruhnya menjadi bagian dalam rantai pasok nasional maupun global.
d. Belum optimalnya kemitraan antara industri besar dan industri kecil menengah.
e. Rendahnya kualitas produk industri yang belum sesuai dengan Standar Mutu Produk sehingga kurang berdaya saing.
f. Aktivitas kegiatan produksi dan distribusi hasil produk industri belum berjalan normal pasca pandemi COVID-19.

2.3.4 Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.4.1 Perencanaan

Permasalahan pembangunan Urusan Perencanaan di DKI Jakarta yaitu:

a. Masih terdapat indikator kinerja di beberapa bidang/urusan yang belum selaras dan mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan standar (SPM/ SDGs/ Standar Nasional/ target tahunan di dalam RPJMD/ capaian tahun sebelumnya atau tren).
b. Belum optimalnya pelibatan *stakeholder* non pemerintah dalam mendukung proses perencanaan pembangunan.

2.3.4.2 Keuangan

Permasalahan pembangunan Urusan Keuangan di DKI Jakarta yaitu:

a. Belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber alternatif pembiayaan lain salah satunya melalui mekanisme pendanaan dan investasi.
b. Belum terdapat ukuran penetapan belanja operasional per pendapatan sebagai hasil kinerja operasional terhadap kebutuhan belanja unit penghasil.
c. Realisasi PAD terhadap pendapatan daerah masih berfluktuatif dikarenakan sebagian besar masih berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Variabilitas dalam penerimaan pajak dan retribusi menjadi tantangan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif.
d. DKI Jakarta memiliki beban utang yang relatif besar, di mana pembayaran bunga serta cicilan utang menjadi beban tambahan bagi anggaran daerah dan semakin memperketat kapasistas fiskal daerah.

2.3.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pembangunan Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan di DKI Jakarta yaitu:

a. Masih terdapat ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai jaminan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.
b. Adanya tuntutan regulasi tentang aparatur yang memenuhi standar kompetensi manajerial, sosial kultural dan teknis serta pemerintahan yang mendukung Provinsi DKJ Menuju Kota Global.

c. Dengan disahkannya UU Daerah Khusus Jakarta, dibutuhkan *Grand Design* Kelembagaan serta Dukungan Kepegawaian dan Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah Provinsi DKJ Menuju Kota Global.
d. Adanya tuntutan akan aparatur yang profesional dan mampu mendukung pelayanan Kota Global.

2.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pembangunan Urusan Penelitian dan Pengembangan di DKI Jakarta yaitu:

a. Belum optimalnya pelaksanaan kajian dan penelitian dalam sisi perencanaan.
b. Masih kurangnya inisiatif dan peran serta Perangkat Daerah untuk terlibat dalam penelitian dan riset daerah.
c. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan riset dalam perencanaan dan pembangunan daerah.

Hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sampai saat ini belum memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan dan masyarakat

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 3

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH



Foto: Ibnu Nur Diwiyanto-Diskominfotik

Pada bagian ini dijelaskan mengenai **kerangka ekonomi dan keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta** yang terdiri atas kondisi serta proyeksi perekonomian global dan nasional, arah kebijakan ekonomi daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kinerja dan Prospek Perekonomian Global

Pada tahun 2025, momentum pemulihan ekonomi global kembali menghadapi dinamika dan kompleksitas yang tinggi seiring meningkatnya fragmentasi geopolitik dan kebijakan perdagangan yang semakin proteksionis. Meskipun pada tahun 2024 mencatatkan stabilisasi pasca-pandemi dengan pertumbuhan yang lebih merata di berbagai kawasan dunia, rentetan eskalasi geopolitik tersebut berpotensi menahan laju pertumbuhan output secara global. Disrupsi geopolitik juga meningkatkan volatilitas pasar keuangan dan menurunkan sentimen investor, mendorong arus modal ke aset aman (*safe haven*), serta melemahkan mata uang di negara-negara berkembang. Hal ini turut memperberat upaya negara berkembang dan negara berpenghasilan menengah untuk menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk dalam menjaga nilai tukar dan arus modal. Tingkat ketidakpastian yang tinggi pada tahun 2025 membatasi kapasitas proyeksi ekonomi jangka menengah serta mendorong respons kebijakan yang lebih berhati-hati dan adaptif.

Gejolak geopolitik dan ekonomi akibat konflik yang berkepanjangan seperti Rusia–Ukraina dan Palestina–Israel, ditambah dengan ketegangan di Timur Tengah mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk meninjau ulang strategi kebijakan ekonomi dan moneter. Peran krusial Rusia sebagai salah satu pemasok energi terbesar di dunia, dengan pasokan gas alam mencapai 16% dan minyak 11%, menciptakan tekanan bagi negara-negara yang sangat bergantung pada impor energi dan pangan sehingga menyebabkan ketidakseimbangan perdagangan global. Sementara itu, Ukraina menduduki posisi sebagai pemasok gandum terbesar bagi beberapa negara. Besarnya peran kedua negara tersebut secara langsung mempengaruhi lonjakan harga energi dan pangan global serta dan gangguan pada mata rantai pasok perdagangan dunia. Dalam jangka panjang, situasi ini memicu perubahan struktural dalam kebijakan ekonomi global, termasuk diversifikasi sumber energi dan pangan serta penguatan ketahanan ekonomi domestik.

Perubahan struktural tersebut juga tercermin dalam dinamika perdagangan internasional, di mana ketidakpastian global semakin dipicu oleh kebijakan tarif impor baru dari Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah komoditas strategis, termasuk logam dan produk teknologi, yang memicu peningkatan ketegangan dagang secara global. Negara-negara mitra, terutama Tiongkok, telah memberikan respons berupa tarif balasan (*reciprocal tariff*) serta meninjau ulang perjanjian dagang bilateral dan regional. Meskipun ketegangan ini mereda setelah AS dan Tiongkok sepakat menurunkan tarif impor selama 90 hari, sejumlah negara tetap menerapkan kebijakan yang mengarah kepada pergeseran arus perdagangan (*trade diversion*) ke kawasan dengan tarif yang lebih rendah serta *reshoring* atau *nearshoring* untuk mengurangi eksposur terhadap risiko tarif impor. Selain itu, negara produsen utama seperti Tiongkok, AS, Jerman dan Jepang telah mempercepat upaya diversifikasi rantai pasok guna meningkatkan resiliensi industri domestik dan menghindari ketergantungan terhadap satu mitra dagang. Dinamika ini menyebabkan perdagangan global yang semakin terfragmentasi, dengan risiko jangka menengah berupa penurunan efisiensi, peningkatan biaya produksi, dan pelemahan ekspor global.

Kompleksitas tersebut semakin meningkat seiring dengan pergantian kepemimpinan di berbagai negara, yang berdampak pada arah kebijakan perdagangan, aliansi strategis, dan investasi lintas negara. Perubahan kebijakan ini menyebabkan volatilitas pasar dan pergeseran persepsi risiko terhadap *emerging markets*. Negara-negara *emerging*, terutama Indonesia, berpotensi mengalami dampak lebih rentan terhadap perubahan sentimen global dan pembalikan arus modal, mengingat ketergantungan yang masih tinggi terhadap aliran portofolio asing sebagai katalisator pembangunan ekonomi. Arus modal ke *emerging markets* mengalami fluktuasi tajam setelah pengumuman kebijakan tarif impor oleh AS, disertai dengan peningkatan permintaan terhadap aset berdenominasi dolar AS. Kebijakan tersebut juga telah mendorong apresiasi dolar AS secara *broad-based*, akibat pergeseran portofolio global menuju aset *safe haven*, yang pada akhirnya menekan nilai tukar di negara-

negara berkembang. Otoritas moneter di negara-negara berkembang dituntut mempertahankan kebijakan moneter ketat untuk mengendalikan tekanan nilai tukar, menjaga stabilitas harga, dan mencegah *capital outflow* lebih lanjut, yang berisiko memperburuk defisit transaksi berjalan.

Di saat yang sama, dunia tengah menghadapi ancaman yang dikenal sebagai *triple planetary crisis*, yakni perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, serta meningkatnya limbah dan polusi lingkungan. Ketiga krisis ini tidak hanya berdampak ekologis, tetapi merupakan ancaman sistemik yang memperburuk ketidakpastian ekonomi global dan mengganggu stabilitas jangka menengah. Intensitas dan frekuensi bencana alam terus meningkat mencapai dua kali lipat dalam 20 tahun terakhir, menyebabkan kerusakan infrastruktur dan gangguan ekonomi terutama di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Negara-negara berkembang khususnya Afrika dan Asia Selatan terdampak signifikan, terutama dalam bentuk gangguan panen di sektor pertanian dan pasokan pangan, akibat kekeringan, banjir ekstrem, dan lonjakan suhu. Kerugian ekonomi akibat bencana iklim di negara berkembang diperkirakan mencapai 2–4% dari PDB tahunan, menunjukkan kapasitas fiskal yang rendah untuk pemulihan bencana.

Di sisi lain, lonjakan permintaan energi akibat ekspansi sektor teknologi berbasis *artificial intelligence* (AI) juga berpotensi mendorong emisi karbon yang lebih tinggi. Tanpa kebijakan iklim yang tegas, emisi karbon dari sektor digital global dapat meningkat dua kali lipat dalam satu dekade, sebagian besar dari *data center* dan perangkat keras AI yang bergantung pada energi berbasis fosil. Ketergantungan pada energi fosil menaikkan biaya produksi secara global, terutama di sektor manufaktur dan logistik, sehingga memperparah tekanan inflasi. Negara-negara dengan bauran energi yang masih didominasi bahan bakar fosil menghadapi inflasi biaya yang lebih tinggi. Penerapan kebijakan transisi menuju ekonomi hijau seperti *carbon tax* dan pengurangan subsidi energi di beberapa negara (termasuk Jerman, Kanada, dan beberapa negara berkembang), telah menyebabkan kenaikan harga energi sebesar 10–15% dalam jangka pendek yang kemudian menciptakan efek rambatan ke harga pangan dan transportasi karena meningkatnya biaya distribusi dan input produksi.

Di tengah tekanan struktural tersebut, dinamika kependudukan turut mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi global melalui tantangan fiskal dan pasar tenaga kerja yang tidak merata antar negara. Di negara-negara maju dan beberapa negara berkembang seperti Tiongkok, menghadapi peningkatan tajam dalam pembiayaan pensiun dan kesehatan sebagai proporsi dari PDB, dipicu oleh penduduk usia lanjut (*aging population*) yang terus tumbuh. Di beberapa negara Eropa dan Asia Timur, pengeluaran untuk pensiun diperkirakan akan naik lebih dari 3 poin persentase PDB dalam dua dekade ke depan. Meskipun demikian, kelompok lansia yang sehat dan tetap produktif dapat membuka peluang strategis dalam bentuk *silver economy* untuk mengurangi beban fiskal dan menciptakan nilai tambah baru. Selain itu, sebagian negara seperti Jepang dan Korea telah mereformasi sistem pensiun dan memperpanjang usia pensiun untuk mendorong partisipasi lansia di pasar kerja. Penerapan kebijakan sistem kesehatan berbasis pencegahan dan efisiensi biaya juga dinilai lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.

Sementara negara-negara dengan *aging population* dihadapkan pada tekanan fiskal, dinamika yang berbeda justru terjadi di sebagian negara berkembang yang masih berada dalam fase bonus demografi. Jumlah kalangan usia produktif semakin meningkat, namun ketersediaan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, yang menyebabkan tingkat pengangguran tetap tinggi. Ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh lulusan muda dengan kebutuhan dunia usaha atau industri (*skill mismatch*) menjadi hambatan struktural yang signifikan dan berdampak pada risiko *underemployment* dan pelemahan kontribusi bonus demografi terhadap produktivitas ekonomi. Investasi dalam pendidikan vokasional, pelatihan berbasis industri (*work-based learning*), serta kemitraan antara sektor pendidikan dan sektor swasta dapat menjadi langkah strategis untuk mengatasi *mismatch* ini.

Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Global

Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)	**2023**	**2024**	**Proyeksi**	
			2025	**2026**
(1)	(3)	(4)	(6)	(7)
Dunia	**3,3**	**3,3**	**2,8**	**3,0**
Negara Maju	**1,7**	**1,8**	**1,4**	**1,5**
Amerika Serikat	2,9	2,8	1,8	1,7
Kawasan Euro	0,4	0,9	0,8	1,2
Kanada	1,5	1,5	1,4	1,6
Jepang	1,7	0,1	0,6	0,6
Inggris Raya	0,3	1,1	1,1	1,4
Negara Berkembang	**4,4**	**4,3**	**3,7**	**3,9**
ASEAN-5	4,0	4,6	4,0	3,9
Tiongkok	5,2	5,0	4,0	4,0
India	8,2	6,5	6,2	6,3
Amerika Latin	2,2	2,4	2,0	2,4
Negara Berkembang Eropa	3,3	3,4	2,1	2,1
Timur Tengah dan Asia Tengah	2,1	2,4	3,0	3,5
Sub-Sahara Afrika	3,6	4,0	3,8	4,2

Sumber: IMF "*World Economic Outlook* (WEO), April 2025", 2025

Perpaduan seluruh faktor geopolitik, kebijakan perdagangan yang semakin proteksionis, perubahan iklim, dinamika demografi, dan ketidakseimbangan pasar tenaga kerja tersebut tercermin dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan mengalami perlambatan dari 3,3% (*yoy*) pada tahun 2024 menjadi 2,8% (*yoy*) di tahun 2025, dan kembali membaik mencapai 3,0% (*yoy*) pada 2026 (Tabel 3.1). Untuk negara-negara maju, proyeksi pertumbuhan ekonomi menurun dari capaian tahun 2024 yaitu 1,8% (*yoy*) menjadi 1,4% (*yoy*) pada tahun 2025 dan 1,5% (*yoy*) pada tahun 2026. Untuk AS, pertumbuhan diperkirakan menurun secara signifikan pada tahun 2025 menjadi 1,8% (*yoy*) dan pada tahun 2026 menjadi 1,7% (*yoy*). Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya ketidakpastian kebijakan, ketegangan perdagangan internasional, dan prospek permintaan yang lemah akibat berkurangnnya konsumsi yang lebih lambat. Tarif perdagangan juga diperkirakan tetap membebani pertumbuhan pada tahun 2026 di tengah konsumsi sektor swasta yang moderat.

Berbeda dengan AS, pertumbuhan ekonomi di Kawasan Euro diperkirakan tetap lambat dari 0,9% (*yoy*) pada tahun 2024 menjadi 0,8% (*yoy*) pada tahun 2025, sebelum naik menjadi 1,2% (*yoy*) pada tahun 2026. Proyeksi ini didorong oleh aktivitas rekonstruksi pasca banjir bandang di Spanyol yang memicu peningkatan belanja publik dan investasi. Selain itu, Kanada juga mengalami perlambatan tipis dari capaian tahun 2024 sebesar 1,5% (*yoy*) menjadi 1,4% (*yoy*) pada tahun 2025, sebelum naik menjadi 1,6% (*yoy*) pada tahun 2026. Sementara itu, Jepang mencatat pertumbuhan yang sangat rendah sebesar 0,1% (*yoy*) pada tahun 2024 akibat lemahnya permintaan domestik dan tekanan inflasi dari depresiasi yen, namun diprediksi membaik menjadi 0,6% (*yoy*) pada tahun 2025 dan 0,8% (*yoy*) pada tahun 2026. Lain halnya dengan Inggris Raya yang stabil sebesar 1,1% (*yoy*) pada tahun 2025, kemudian meningkat pada tahun 2026 menjadi 1,4% (*yoy*). Hal ini mencerminkan efek *carryover* performa tahun 2024 yang kecil, dampak tarif impor oleh AS, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah (*gilt yields*), serta konsumsi swasta yang lebih lemah akibat inflasi yang tinggi sebagai hasil dari kebijakan harga dan biaya energi.

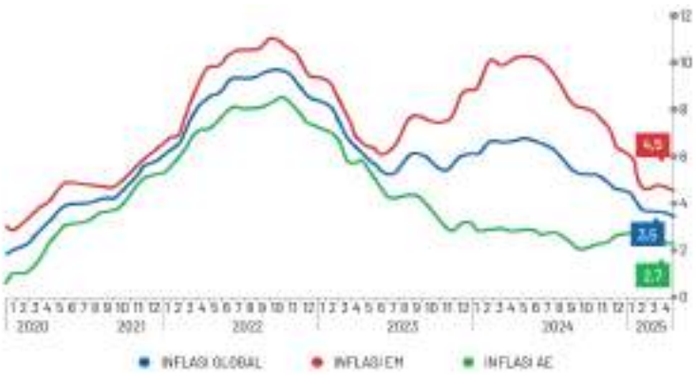
Dampak tarif impor oleh AS juga dirasakan oleh negara berkembang, dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan menurun menjadi 3,7% (*yoy*) pada tahun 2025 dan 3,9% (*yoy*) pada tahun 2026, setelah sebelumnya mencapai 4,3% (*yoy*) pada tahun 2024. Pertumbuhan ASEAN-5 khususnya mengalami penurunan dari capaian tahun 2024 sebesar 4,6% (*yoy*) menjadi 4,0% (*yoy*) pada tahun 2025 dan terus melambat pada tahun

2026 sebesar 3,9% (*yoy*). Untuk Tiongkok, pertumbuhan ekonomi tetap kuat terutama dengan adanya ekspansi belanja fiskal dengan capaian 5,0% (*yoy*) pada tahun 2024, namun dengan adanya tarif impor AS serta penurunan kinerja sektor real estate dan perumahan diproyeksikan sedikit turun sebesar 4,0% (*yoy*) pada tahun 2025 dan 2026. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi India relatif kuat dengan capaian 6,5% (*yoy*) pada tahun 2024, dan tetap stabil sebesar 6,2% (*yoy*) di tahun 2025 dan 6,3% (*yoy*) tahun 2026, didukung oleh konsumsi swasta, terutama di wilayah pedesaan.

Di kawasan Amerika Latin, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan melambat dari 2,4% (*yoy*) pada tahun 2024 menjadi 2,0% (*yoy*) pada tahun 2025, sebelum kembali meningkat menjadi 2,4% (*yoy*) pada tahun 2026. Pelemahan ini dipengaruhi oleh pengetatan keuangan dan rendahnya harga komoditas ekspor, dengan Meksiko turut terdampak akibat suku bunga tinggi dan lemahnya konsumsi domestik. Sementara itu, negara berkembang di Eropa diperkirakan turun signifikan dari dari 3,4% (*yoy*) pada tahun 2024 menjadi 2,1% (*yoy*) pada tahun 2025 dan 2026, terutama karena melemahnya konsumsi dan investasi di Rusia akibat konflik berkepanjangan dan sanksi internasional, yang turut mendorong kenaikan biaya energi dan gangguan rantai pasok. Selain itu, keketatan pasar tenaga kerja juga menekan pertumbuhan upah dan konsumsi rumah tangga.

Berbeda halnya dengan Timur Tengah dan Asia Tengah, pertumbuhan ekonomi menunjukkan pemulihan selama beberapa tahun terakhir, dengan capaian tahun 2024 sebesar 2,4% (*yoy*) dan diproyeksikan terus meningkat menjadi 3,0% (*yoy*) pada tahun 2025 dan 3,5% (*yoy*) pada tahun 2026. Peningkatan ini didorong oleh berkurangnya gangguan produksi dan pengiriman minyak, serta adanya pemulihan bertahap dari ketidakstabilan politik dan konflik di beberapa negara kawasan. Untuk Sub-Sahara Afrika, pertumbuhan diperkirakan sedikit menurun dari 4% (*yoy*) pada tahun 2024 menjadi 3,8% (*yoy*) pada tahun 2025, dan kemudian pulih pada tahun 2026 menjadi 4,2% (*yoy*). Perlambatan pada 2025 utamanya disebabkan oleh penurunan harga minyak, yang berdampak besar pada negara-negara eksportir seperti Nigeria, yang sangat bergantung pada sektor energi sebagai penggerak utama ekonominya.

Grafik 3.1
Inflasi Global



Sumber: Bloomberg dan IMF, dalam Bank Indonesia "Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Mei 2025", 2025

Sejalan dengan tren perlambatan pertumbuhan ekonomi global tersebut, tekanan inflasi juga menunjukkan arah penyesuaian meskipun belum sepenuhnya kembali ke pola pra-pandemi. Sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik 3.1, tekanan inflasi di beberapa negara masih cukup tinggi meskipun telah mengalami penurunan. Inflasi global turun menjadi 3,5% (*yoy*) pada April 2025, setelah sebelumnya mencapai level tertinggi 9,7% (*yoy*) pada triwulan II 2022. Di negara maju, inflasi pada Maret 2025 tercatat 2,7% (*yoy*), menurun dari angka tertinggi 8,4% (*yoy*) pada tahun 2022. Sementara itu, inflasi di negara berkembang masih relatif tinggi, mencapai 4,5% (*yoy*), meskipun telah berangsur turun dari puncaknya yang mencapai 11% (*yoy*) pada tahun 2022. Perbedaan ini mencerminkan adanya ketimpangan pengendalian inflasi, negara maju lebih sigap melalui kebijakan moneter ketat, sementara negara berkembang masih tertekan oleh nilai tukar dan harga komoditas global.

Meskipun tekanan inflasi global mulai mereda, ketidakseimbangan pemulihan antar negara dan lemahnya prospek produktivitas menunjukkan bahwa tantangan struktural jangka menengah belum sepenuhnya teratasi. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2028 hanya mencapai 3,1% (*yoy*) atau lebih rendah dari proyeksi 3,6% (*yoy*) sebelum Covid-19 tahun 2020, dan dari proyeksi 4,9% (*yoy*) sebelum krisis keuangan global tahun 2008 (Grafik 3.2A). Penurunan dimaksud utamanya disebabkan oleh melemahnya pertumbuhan pendapatan per kapita serta produktivitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja. Selain itu, perubahan struktur ekonomi akibat digitalisasi yang berkembang pesat juga menggeser pola investasi dan permintaan tenaga kerja, sehingga menciptakan tantangan baru bagi pemulihan ekonomi global.

Akar permasalahan tersebut bervariasi antar kelompok negara, tergantung pada dinamika demografi, kapasitas teknologi, serta kesiapan struktur ekonomi dalam menghadapi transformasi global. Di negara maju, sekitar sepertiga dari penurunan pendapatan juga didorong oleh perlambatan partisipasi tenaga kerja akibat *aging population*. Sementara di negara berkembang, penurunan pendapatan per kapita memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan ekonomi dibandingkan dengan negara maju. Ketimpangan akses terhadap teknologi dan infrastruktur juga menjadi hambatan bagi negara berkembang dalam meningkatkan daya saing dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketidakpastian kebijakan dan meningkatnya fragmentasi ekonomi global turut memperlambat pertumbuhan, khususnya melalui gangguan terhadap perdagangan dan investasi antarnegara. Jika kondisi ini berlanjut, upaya pemulihan ekonomi akan semakin kompleks dan membutuhkan koordinasi kebijakan yang lebih solid di tingkat global untuk menciptakan stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Selain tantangan pertumbuhan jangka menengah, tekanan inflasi yang belum sepenuhnya terkendali turut menambah kompleksitas prospek pemulihan global, khususnya di tengah ketidakpastian geopolitik dan kebijakan perdagangan yang terus berkembang. (Grafik 3.2B). Pada tahun 2024, inflasi masih di atas target di lebih dari setengah negara di dunia, dan diperkirakan baru akan kembali stabil pada tahun 2025–2026. IMF memperkirakan inflasi global secara keseluruhan menurun menjadi 4,3% (*yoy*) pada tahun 2025 dan 3,6% (*yoy*) pada tahun 2026. Inflasi di negara-negara maju diproyeksikan mencapai 2,2% (*yoy*) pada tahun 2026, sementara inflasi di negara-negara berkembang diperkirakan turun menjadi 4,6% (*yoy*) dalam periode yang sama. Dampak tarif impor AS terhadap inflasi global dalam jangka menengah sangat bergantung pada persepsi terhadap durasi kebijakan tarif, strategi penyesuaian margin oleh pelaku usaha, serta denominasi mata uang dalam transaksi impor. Dalam mengantisipasi hal tersebut, perlu penguatan kebijakan serta penguatan kerja sama internasional, baik multilateral maupun regional, untuk memitigasi risiko sedini mungkin dampak pada ketahanan perekonomian dan memperkuat pemulihan ekonomi, baik global maupun domestik, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

3.1.2 Kinerja dan Prospek Perekonomian Nasional

Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, perekonomian Indonesia pada triwulan I 2025 menunjukkan kinerja yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 tercatat 4,87% (*yoy*), lebih rendah dari triwulan IV 2024 sebesar 5,02% (*yoy*) (Tabel 3.2). Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, seiring dengan meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat selama libur Tahun Baru dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), yang pada akhirnya meningkatkan subkomponen transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel. Pengeluaran pemerintah, termasuk pemberian THR, bantuan sosial, dan insentif lainnya, turut memperkuat konsumsi rumah tangga. Selain itu, komponen investasi tumbuh sejalan dengan meningkatnya realisasi penanaman modal yang tumbuh sebesar 15,87% (*yoy*). Sementara itu, ekspor juga mencatatkan pertumbuhan, didukung oleh ekspor nonmigas ke kawasan ASEAN terutama komoditas manufaktur seperti mesin dan produk besi-baja, serta komoditas lemak dan minyak nabati.

Tabel 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sisi Pengeluaran

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024					2025
					TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan	TW I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Konsumsi Rumah Tangga	-2,63	2,01	4,94	4,82	4,91	4,93	4,91	4,98	4,94	4,89
Konsumsi LNPRT	-4,21	1,62	5,66	9,83	24,13	9,79	11,46	6,06	12,48	3,07
Konsumsi Pemerintah	2,12	4,25	-4,47	2,95	20,44	2,03	4,62	4,17	6,61	-1,38
Investasi (PMTDB)	-4,96	3,8	3,87	4,40	3,78	4,42	5,16	5,03	4,61	2,12
Ekspor	-8,42	17,99	16,23	1,32	1,48	8,13	8,79	7,63	6,51	6,78
Impor	-17,6	24,86	15	-1,65	1,5	7,79	11,92	10,36	7,95	3,96
PDB	**-2,07**	**3,7**	**5,31**	**5,05**	**5,11**	**5,05**	**4,95**	**5,02**	**5,03**	**4,87**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), sebagian besar sektor mengalami pertumbuhan positif pada triwulan 1 2025, kecuali LU Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi sebesar 1,23% (*yoy*). Sektor dengan kontribusi positif terbesar terhadap pertumbuhan yaitu LU Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertanian, dan Konstruksi, sedangkan LU Pertambangan menunjukkan pertumbuhan negatif. Sebagaimana pada Tabel 3.3, LU yang mengalami pertumbuhan tinggi di antaranya yaitu LU Jasa Lainnya dengan capaian 9,84% (*yoy*), ditopang oleh peningkatan jumlah perjalanan wisatawan nusantara sebesar 12,71% (*yoy*) dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 7,83% (*yoy*). Selain itu, LU Jasa Perusahaan juga mencapai pertumbuhan tinggi sebesar 9,27% (*yoy*), didorong oleh peningkatan aktivitas persewaan dan agen perjalanan wisata. LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami capaian tertinggi sebesar 10,52% (*yoy*), yang didorong oleh panen raya tanaman padi dan jagung, masing-masing tumbuh sebesar 51,45% (*yoy*) dan 39,02% (*yoy*), serta peningkatan pada sektor peternakan sejalan dengan peningkatan permintaan domestik daging dan telur saat Ramadan dan Idulfitri.

Tabel 3.3
Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sisi Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024					2025
					TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan	TW I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,77	1,87	2,25	1,30	-3,54	3,25	1,69	0,71	0,67	10,52
Pertambangan dan Penggalian	-1,95	4	4,38	6,12	9,31	3,17	3,46	3,95	4,9	-1,23
Industri Pengolahan	-2,93	3,39	4,89	4,64	4,13	3,95	4,72	4,89	4,43	4,55
Pengadaan Listrik dan Gas	-2,34	5,55	6,61	4,91	5,35	5,39	5,02	3,42	4,77	5,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,94	4,97	3,23	4,90	4,44	0,84	0,03	1,06	1,56	0,18
Konstruksi	-3,26	2,81	2,01	4,91	7,59	7,29	7,48	5,81	7,02	2,18
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,79	4,63	5,53	4,85	4,58	4,85	4,82	5,19	4,86	5,03

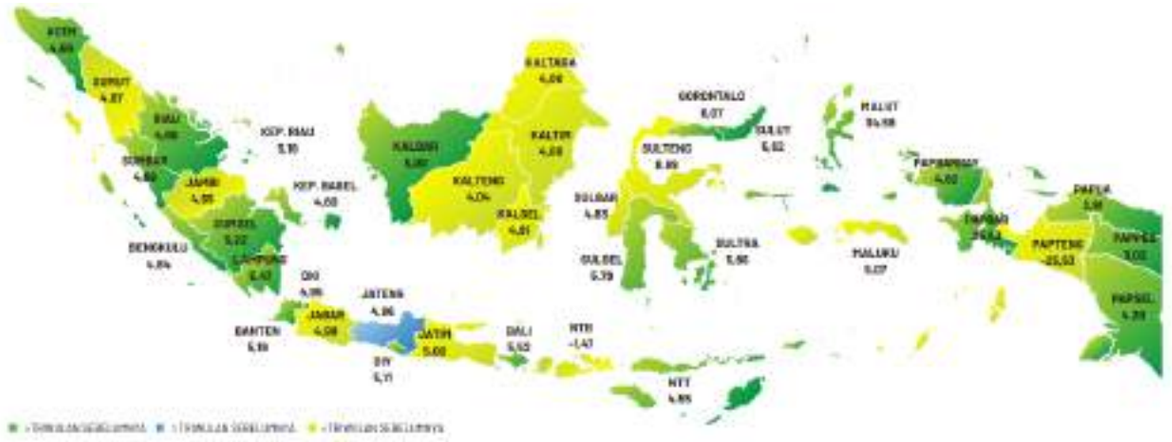
Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024					2025
					TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan	TW I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Transportasi dan Pergudangan	-15,05	3,24	19,87	13,96	8,66	9,56	8,64	7,92	8,69	9,01
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,26	3,88	11,94	10,01	9,34	10,15	8,32	6,61	8,56	5,75
Informasi dan Komunikasi	1,61	6,82	7,73	7,59	8,41	7,66	6,82	7,45	7,57	7,72
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,25	1,56	1,93	4,77	3,93	7,9	5,49	1,74	4,74	3,98
Real Estate	2,32	2,78	1,72	1,43	2,54	2,16	2,32	2,97	2,5	2,94
Jasa Perusahaan	-5,44	0,73	8,77	8,24	9,63	7,96	7,93	8,08	8,38	9,27
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,03	-1,29	2,51	1,50	18,89	2,81	3,94	1,16	6,4	4,78
Jasa Pendidikan	2,61	-1,41	0,57	1,78	7,43	2,44	2,56	2,95	3,75	5,03
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,56	4,52	2,75	4,66	11,65	8,57	7,65	5,2	8,11	5,78
Jasa Lainnya	-4,1	8,25	9,47	10,52	8,92	8,85	9,95	11,36	9,8	9,84
PDB	**-2,07**	**3,7**	**5,31**	**5,05**	**5,11**	**5,05**	**4,95**	**5,02**	**5,03**	**4,87**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Peningkatan permintaan domestik juga berdampak positif terhadap LU Industri Pengolahan dan LU Transportasi dan Pergudangan. Pada LU Industri Pengolahan, sektor industri makanan dan minuman meningkat 6,04%, ditopang oleh permintaan selama Ramadan dan Idulfitri serta peningkatan aktivitas industri penggilingan padi dan penyosohan beras. Sektor industri logam dasar juga mengalami pertumbuhan sebesar 14,47% sejalan dengan peningkatan permintaan luar negeri untuk logam dasar, khususnya besi dan baja. Selain itu, sektor industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki meningkat sebesar 6,95% yang juga didorong oleh peningkatan peningkatan permintaan domestik pada momen Ramadan dan Idulfitri, serta peningkatan ekspor. Pada LU Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan seiring dengan peningkatan mobilitas selama libur Tahun Baru serta libur HKBN. Peningkatan aktivitas pengangkutan dan pengiriman barang melalui jasa ekspedisi dan kurir juga telah mendorong peningkatan pada LU Transportasi dan Pergudangan. Di sisi lain, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh melambat akibat menurunnya kinerja sektor akomodasi.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi berbagai wilayah Indonesia tercatat mengalami penguatan di tengah ketidakpastian ekonomi global (Gambar 3.1). Pada triwulan I 2025, pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di seluruh daerah terutama ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan kinerja LU Perdagangan saat perayaan Idulfitri 1446 H, khususnya di daerah-daerah tujuan utama arus mudik di Jawa dan Sumatera. Aktivitas industri juga menunjukkan prospek penguatan untuk memenuhi permintaan dalam negeri, baik selama periode HBKN maupun untuk kebutuhan ekspor. Performa industri tertinggi terjadi di wilayah Bali, Nusa Tenggara (Balinusra) seiring dimulainya operasional *smelter* tembaga pada awal tahun 2025 dan aktivitas pariwisata yang tetap tumbuh tinggi. Sementara itu, investasi mengalami perlambatan di sebagian besar wilayah, kecuali Sumatera, akibat terbatasnya pelaksanaan proyek pemerintah pada awal tahun meskipun minat investasi swasta masih tinggi di banyak daerah. Peningkatan ekspor terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera, meskipun ekspor pada komoditas pertambangan di wilayah timur Indonesia menunjukkan tren perlambatan. Dari sisi LU, perbaikan ekonomi di mayoritas wilayah didukung oleh pertanian karena panen raya komoditas tanaman bahan makanan (tabama) dan perdagangan ritel sejalan meningkatnya mobilitas menjelang perayaan Idulfitri 1446 H.

Gambar 3.1
Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan I 2025



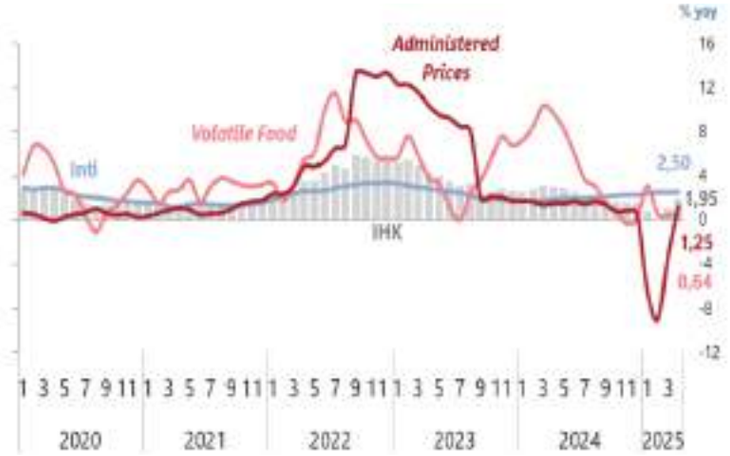
Sumber: Bank Indonesia "Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Mei 2025", 2025

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2025 tetap dalam kondisi stabil. Konsumsi swasta tetap kuat untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan, yang didorong oleh tingginya harga komoditas ekspor berbasis sumber daya alam. Selain itu, investasi pada LU Industri di Jawa berpotensi meningkatkan serapan tenaga kerja. Peningkatan investasi juga mendorong perbaikan ekonomi di Sumatera sejalan dengan harga komoditas sumber daya alam yang tetap tinggi, di tengah konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga. Bagi wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), investasi akan mendorong pertumbuhan terutama pada sektor pertambangan dan migas serta kinerja industri logam dasar yang tumbuh tinggi. Sementara itu, penambahan kapasitas *smelter* mineral juga turut menjaga ekonomi Kalimantan tetap tumbuh kuat, di tengah terbatasnya proyek-proyek pemerintah dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya pembangunan IKN di Kalimantan. Kemudian, ekspor maupun LU berbasis perdagangan yang berorientasi ekspor diproyeksikan tetap positif, terutama oleh kelanjutan program hilirisasi mineral di Balinusra, Sulampua, dan Jawa.

Potensi risiko dari kebijakan tarif impor AS perlu diantisipasi secara cermat karena berpengaruh terhadap prospek pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya negara mitra dagang utama, yang pada akhirnya berdampak pada prospek ekonomi di berbagai wilayah secar domestik. Kebijakan fiskal pemerintah melalui realokasi anggaran ke program-program prioritas diharapkan mampu menjaga ketahanan permintaan domestik secara merata di berbagai wilayah. Selain itu, respons kebijakan yang tepat dan terkoordinasi dengan baik juga diharapakan akan memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Dalam konteks tersebut, upaya menjaga stabilitas ekonomi tidak hanya bergantung pada ketahanan sektor riil, tetapi juga tercermin dari terjaganya stabilitas harga, yang ditunjukkan oleh inflasi yang tetap sesuai.

Sejalan dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi, inflasi nasional tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1% dan mendukung stabilitas perekonomian. Dari Grafik 3.2, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2025 tercatat sebesar 1,95% (*yoy*), meningkat dari bulan sebelumnya yang inflasi sebesar 1,03% (*yoy*). Komoditas yang menjadi penyumbang utama pada inflasi secara keseluruhan yaitu kopi bubuk, minyak goreng, cabai rawit dan sigaret kretek mesin (SKM). Peningkatan inflasi April 2025 terutama disumbang oleh kelompok inti dan kelompok pada kelompok harga diatur pemerintah (*Administered prices*/AP). Inflasi inti tetap terjaga di level 2,50% (*yoy*), meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 2,48% (*yoy*), sejalan dengan kebijakan suku bunga Bank Indonesia (BI-*Rate*) yang konsisten dalam menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali. Komoditas yang memberi kontribusi pada capaian inflasi tersebut di antaranya adalah emas perhiasan, kopi bubuk, minyak goreng, nasi dengan lauk dan sewa rumah.

Grafik 3.2
Inflasi Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik, dalam Bank Indonesia "Tinjauan Kebijakan Moneter Mei 2025", 2025

Sementara itu, inflasi pada kelompok AP mencapai 1,25% (*yoy*), meningkat setelah mencatat deflasi sebesar 3,16% (*yoy*) pada Maret 2025, terutama disebabkan oleh berakhirnya kebijakan pemberian diskon tarif listrik bagi rumah tangga dengan daya listrik di bawah 2.200 VA. Komoditas yang memberikan andil pada inflasi AP adalah tarif air minum PAM, sigaret kretek mesin, dan sigaret kretek tangan. Inflasi pada kelompok barang bergejolak (*Volatile food*/VF) tercatat sebesar 0,64% (*yoy*), meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 0,37% (*yoy*), didukung oleh ketersediaan pasokan pangan pokok yang memadai dan penguatan sinergi pengendalian inflasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi VF yaitu cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan kelapa.

Gambar 3.2
Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah April 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, dalam Bank Indonesia "Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Mei 2025", 2025

Secara spasial, laju inflasi IHK pada April 2025 menunjukkan tren penurunan di sebagian besar wilayah provinsi di Indonesia. Jika dirinci berdasarkan wilayah administratif, terdapat sebanyak 27 provinsi yang mencatat inflasi dalam kisaran target nasional, yakni 2,5% ± 1%. Sementara itu, terdapat 3 (tiga) provinsi yang mencatat inflasi di atas sasaran inflasi nasional, dan 8 (delapan) provinsi lainnya mengalami inflasi yang berada di bawah sasaran inflasi nasional. Inflasi tertinggi tercatat di Papua Pegunungan mencapai 5,96% (*yoy*), disusul oleh Papua Tengah sebesar 3,71% (*yoy*) dan Papua Selatan sebesar 3,57% (*yoy*). Peningkatan inflasi di ketiga wilayah tersebut terutama didorong oleh kenaikan harga komoditas emas perhiasan, yang dipengaruhi oleh tren kenaikan harga emas global, serta oleh komoditas sigaret kretek mesin yang terdampak penyesuaian bertahap harga jual eceran rokok sesuai kebijakan fiskal yang telah ditetapkan. Di sisi lain,

inflasi tahunan terendah tercatat di Provinsi Papua Barat dengan capaian 0,15% (*yoy*), diikuti oleh Papua Barat Daya sebesar 0,41% (*yoy*), dan Provinsi Bengkulu sebesar 0,96% (*yoy*). Capaian inflasi yang relatif rendah di provinsi-provinsi tersebut mencerminkan tekanan harga yang lebih terkendali, baik dari sisi permintaan maupun pasokan, serta efektivitas pengendalian inflasi daerah yang dilakukan oleh otoritas terkait.

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional

Indikator	2023	2024	Proyeksi	
			2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,05	5,03	4,6 - 5,4	4,9 - 5,7
Inflasi (%)	2,61	1,57	2,5 ± 1	2,5 ± 1

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Proyeksi Bank Indonesia, 2025

Melihat tren perbaikan kinerja perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan 2024 tercapai di angka 5,03% (*yoy*). Berdasarkan perkembangan terakhir dan realisasi PDB triwulan I 2025, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 berada pada kisaran 4,6–5,4% (*yoy*), sedikit lebih rendah dari prakiraan sebelumnya (Tabel 3.4). Proyeksi ini tidak lepas dari tantangan eksternal, termasuk meningkatnya ketidakpastian global akibat kebijakan perdagangan internasional yang semakin proteksionis yang memengaruhi kinerja ekspor barang. Penurunan permintaan dari mitra dagang utama, terutama Tiongkok, memperlemah ekspor Indonesia khususnya di sektor komoditas, sejalan dengan penurunan harga dan volume perdagangan global. Kinerja impor pada tahun 2025 masih akan tumbuh positif dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tetap positifnya kinerja impor ditopang oleh impor bahan baku yang sejalan dengan meningkatnya kinerja industri pengolahan, didukung oleh implementasi program hilirisasi. Impor barang modal juga diperkirakan meningkat, seiring dengan berlanjutnya berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sudah berjalan.

Di sisi lain, pertumbuhan nasional tetap didorong oleh pertumbuhan investasi, terutama investasi nonbangunan. Investasi swasta, serta berlanjutnya berbagai penyelesaian PSN, diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan investasi. Lebih lanjut, masuknya investasi asing untuk mendorong proyek *green investment* juga diperkirakan akan mendorong kinerja investasi. Selain itu, kinerja investasi juga didukung oleh belanja modal perusahaan serta volume produksi dan pesanan seperti tercermin pada indeks *Prompt Manufacturing Index* (PMI) Bank Indonesia. Sementara itu, permintaan domestik perlu diperkuat untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga yang masih lemah akibat ekspektasi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja yang belum membaik secara signifikan. Dalam waktu yang bersamaan, pelaksanaan berbagai insentif dari Pemerintah serta proyeksi inflasi yang tetap terkendali diperkirakan akan berkontribusi positif terhadap stabilitas daya beli masyarakat.

Dari sisi LU, pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh kontribusi positif dari berbagai sektor utama, antara lain industri pengolahan, informasi dan komunikasi, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi. Sektor pertanian juga diperkirakan mengalami pertumbuhan yang solid, seiring dengan implementasi berbagai program Pemerintah dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional. Sektor industri tumbuh sejalan dengan keberlanjutan program hilirisasi yang mendorong peningkatan nilai tambah produk dalam negeri. Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian, serta konstruksi turut mendapatkan dorongan dari berlanjutnya pelaksanaan berbagai PSN yang tersebar di sejumlah wilayah. Secara spasial, perekonomian di seluruh wilayah Indonesia diperkirakan tumbuh positif, didorong oleh pemerataan proyek pembangunan, investasi, dan peningkatan daya saing. Penguatan sinergi kebijakan, infrastruktur, dan kualitas SDM tetap diperlukan untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan prospek ekonomi nasional.

Dalam merespons dinamika ekonomi global yang terus berkembang, penguatan kebijakan secara komprehensif menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan makroprudensial guna menjaga stabilitas dan memperluas ruang pertumbuhan. Selain itu, percepatan digitalisasi sistem pembayaran dan penguatan koordinasi lintas pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi bagian penting dari strategi memperkuat ketahanan dan efektivitas ekonomi nasional. Komitmen terhadap implementasi program prioritas dalam kerangka Asta Cita, seperti pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi hijau, dan reformasi birokrasi, juga menjadi fondasi utama dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional.

Menghadapi ketidakpastian eksternal akibat kebijakan perdagangan global yang semakin proteksionis, termasuk potensi perluasan tarif resiprokal dan retaliasi dari mitra dagang utama seperti Tiongkok, Indonesia perlu secara aktif memperkuat ketahanan sektor eksternal dan struktur ekspornya. Ketegangan perdagangan global berpotensi memberikan tekanan terhadap kinerja ekspor dan arus investasi jangka menengah, yang pada akhirnya dapat memengaruhi prospek pertumbuhan. Oleh karena itu, strategi nasional perlu diarahkan pada penguatan permintaan domestik, pembukaan pasar ekspor baru, serta percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam unggulan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekspor nasional sekaligus mendorong transformasi ekonomi menuju basis industri yang lebih tangguh dan kompetitif dalam menghadapi tekanan eksternal.

Selain menjaga ketahanan sektor eksternal dan mendorong transformasi ekonomi, stabilitas harga di dalam negeri juga menjadi faktor krusial yang perlu dijaga guna memastikan kesinambungan pemulihan ekonomi secara menyeluruh. Inflasi Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 1,57% (yoy), berada jauh di bawah titik tengah sasaran inflasi 2,5±1%. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas kebijakan pengendalian harga yang dilakukan secara sinergis antara pemerintah dan otoritas moneter, serta relatif stabilnya kondisi pasokan barang di tengah gejolak global. Kendati demikian, risiko tekanan inflasi masih tetap perlu diwaspadai, terutama yang bersumber dari faktor eksternal seperti kenaikan harga energi dan pangan dunia, serta fluktuasi nilai tukar rupiah yang dapat berdampak pada naiknya harga barang impor. Oleh karena itu, menjaga inflasi dalam rentang sasaran tetap menjadi prioritas utama kebijakan ke depan, khususnya dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.

Dalam kerangka pengendalian inflasi tahun 2025 dan 2026, Bank Indonesia memproyeksikan inflasi nasional tetap terkendali dalam kisaran target 2,5±1%. Proyeksi ini didukung oleh kapasitas perekonomian yang masih memadai dalam merespons permintaan domestik, *imported inflation* yang terkendali berkat stabilisasi nilai tukar Rupiah, serta dampak positif dari digitalisasi. Stabilitas harga juga ditopang oleh komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat efektivitas bauran kebijakan moneter, termasuk strategi operasi pasar terbuka yang adaptif dan pro-market. Selain itu, sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal, serta koordinasi antar kementerian, lembaga, dan pemda dalam kerangka TPIP/TPID menjadi kunci menjaga stabilitas harga pangan dan komoditas strategis. Dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan, Bank Indonesia juga mempertimbangkan pelonggaran suku bunga secara terukur untuk memperkuat kredit sektor riil dan menjaga stabilitas nilai tukar sesuai fundamental ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, prospek perekonomian Indonesia tetap positif meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan global yang kompleks. Upaya penguatan bauran kebijakan, stabilisasi harga, serta transformasi struktural menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu terus menjaga sinergi kebijakan guna merespons dinamika eksternal secara adaptif dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Stabilitas makroekonomi yang terjaga dan penguatan daya saing ekspor menjadi kunci dalam membangun ketahanan ekonomi jangka menengah dan panjang. Dengan langkah kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, Indonesia berada pada jalur yang konsisten menuju pencapaian visi Indonesia Maju.

3.1.3 Kinerja, Prospek dan Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, tekanan eksternal seperti kebijakan tarif impor baru AS turut memberikan dampak terhadap dinamika ekonomi domestik, termasuk Jakarta. Meskipun tekanan global menyebabkan pelemahan kinerja ekspor nasional, Jakarta mampu menjaga momentum pertumbuhan oleh struktur ekonominya yang lebih berbasis jasa dan konsumsi. Pada triwulan I 2025, ekonomi Jakarta tetap tumbuh kuat mencapai 4,95% (*yoy*), sedikit lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (*yoy*) (Grafik 3.3). Pertumbuhan ini lebih tinggi dari capaian nasional pada triwulan I 2025 sebesar 4,87% (*yoy*). Dalam hal ini, Jakarta berkontribusi terhadap capaian perekonomian nasional sebesar 16,85%, terbesar dibandingkan provinsi lainnya yang menandakan Jakarta tetap menjadi motor utama perekonomian Indonesia.

Grafik 3.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Seluruh komponen dari sisi pengeluaran pada triwulan I 2025 tumbuh positif (Tabel 3.5). Konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 5,36% (*yoy*), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 5,14% (*yoy*). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya konsumsi masyarakat pada kelompok restoran dan hotel serta transportasi dan komunikasi terutama karena adanya aktivitas masyarakat pada momen Ramadan dan Idulfitri 2025. Selain itu, penyaluran THR yang bertepatan dengan pemberian berbagai insentif Pemerintah, seperti diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan dengan daya hingga 2.200VA, insentif PPnDTP, serta berbagai bantuan pangan, turut memperkuat pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Komponen konsumsi pemerintah juga turut menopang pertumbuhan ekonomi Jakarta dengan capaian sebesar 9,22% (*yoy*) dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,20% (*yoy*). Kondisi didorong oleh penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) pada momen Ramadan dan Idulfitri 2025 yang menyerap 22,45% dari pagu belanja APBD DKI Jakarta 2025 atau meningkatkan Belanja Pegawai sebanyak 35,37% (*yoy*). Selain itu, kinerja konsumsi pemerintah turut terdorong oleh realisasi belanja bantuan sosial dan belanja subsidi, yang masing-masing telah mencapai 29,24% dan 26,15% dari total pagu belanja APBD DKI Jakarta 2025, seiring dengan penyaluran beragam insentif kepada masyarakat.

Tabel 3.5
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta Sisi Pengeluaran

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024					2025
					TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan	TW I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Konsumsi Rumah Tangga	-2,23	3,54	5,64	5,05	5,25	5,28	5,26	5,14	5,23	5,36
Konsumsi LNPRT	-4,06	0,10	6,25	9,84	19,70	9,69	11,99	6,84	11,82	3,45

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024					2025
					TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan	TW I
Konsumsi Pemerintah	14,05	9,77	-9,55	-3,86	31,01	-5,48	10,85	5,2	8,72	9,22
Investasi (PMTB)	-6,98	1,05	4,51	3,89	4,25	4,61	4,27	7,54	5,2	2,89
Ekspor	-9,70	11,26	12,60	7,67	3,23	7,06	13,4	14,66	9,64	17,59
Impor	-10,74	12,45	8,48	5,25	6,30	5,32	13,5	14,51	10,09	16,24
PDRB	**-2,39**	**3,55**	**5,25**	**4,96**	**4,78**	**4,90**	**4,93**	**5,01**	**4,90**	**4,95**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Perekonomian Jakarta pada triwulan I 2025 juga turut ditopang oleh kinerja pertumbuhan yang positif dari ekspor dan impor, di tengah perlambatan ekonomi global. Komponen ekspor barang dan jasa sebesar 17,59% (*yoy*), yang disebabkan oleh peningkatan ekspor alas kaki (terutama sepatu olahraga) yang memiliki pangsa pasar sebesar 20,90% terhadap total ekspor Jakarta. Selain itu, ekspor kendaraan dan bagiannya tumbuh 15,83% (*yoy*), tercermin dari ekspor *Completely Build Up* (CBU) yang meningkat 1,74% (*yoy*) pada triwulan I 2025. Selanjutnya, ekspor lemak dan minyak hewan/nabati yang juga merupakan salah satu komoditas utama ekspor Jakarta juga tumbuh 50,89% (*yoy*). Kinerja impor juga meningkat dari 16,24% (*yoy*) dari yang sebelumnya 14,51% (*yoy*), tercermin pula dari aktivitas bongkar dan muat di Tanjung Priok yang masing-masing tumbuh 3,03% (*yoy*) dan -2,22% (*yoy*), meningkat dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -13,08% (*yoy*) dan -4,06% (*yoy*). Berdasarkan jenisnya, kinerja impor didorong oleh impor barang modal yang tumbuh 22.91 (*yoy*) serta impor bahan baku dan barang konsumsi yang tumbuh sebesar 1,85% (*yoy*) dan 2,05% (*yoy*). Selain itu, pertumbuhan komponen LNPRT mencapai 3,45% (*yoy*), melambat jika dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,84% (*yoy*). Kondisi ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat di Jakarta.

Berbanding terbalik dengan komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang hanya mencatat pertumbuhan sebesar 2,89% (*yoy*), jauh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 7,54% (*yoy*). Perlambatan ini mencerminkan menurunnya optimisme dunia usaha, yang antara lain dipengaruhi oleh penurunan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jakarta. Kondisi ini tidak terlepas dari sikap *wait and see* para investor terhadap ketidakpastian arah kebijakan Pemerintah pasca transisi kepemimpinan nasional maupun regional, serta meningkatnya kehati-hatian pelaku usaha di tengah gejolak perekonomian global. Faktor eksternal seperti tekanan geopolitik, tren suku bunga global, dan prospek pertumbuhan ekonomi dunia juga turut membayangi iklim investasi domestik. Sinyal perlambatan kinerja investasi ini turut tercermin dari pertumbuhan kredit investasi yang sebesar 22,08% (*yoy*) pada triwulan I 2025, sedikit menurun dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mencapai 22,16% (*yoy*), menunjukkan bahwa meskipun kredit investasi masih tumbuh, laju pertumbuhannya mulai mengalami penurunan.

Dari sisi LU, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh LU penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,64% (*yoy*), yang didorong oleh kenaikan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel serta kenaikan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Jakarta. Pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah LU jasa lainnya sebesar 8,98% (*yoy*). Kondisi ini didorong dari jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang cenderung selalu tumbuh, sehingga membuat realisasi penerimaan pajak hiburan turut meningkat. Sementara itu, LU transportasi dan pergudangan mencapai sebesar 7,96% (*yoy*), di mana kondisi ini disebakan dari jumlah penumpang angkutan rel, angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara bandara Halim yang mengalami kenaikan, serta volume lalu lintas di jalan tol yang terus meningkat. Beberapa LU juga mengalami kontraksi, antara lain pengadaan listrik dan gas (-15,24%, *yoy*), pengadaan air (-4,93%, *yoy*); serta pertambangan dan penggalian (-3,55%, *yoy*).

Tabel 3.6
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta Sisi Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024					2025
					TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan	TW I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,49	4,14	2,59	-3,94	9,19	6,98	5,62	-0,43	5,17	0,57
Pertambangan dan Penggalian	-6,43	-4,06	-5,43	-12,75	-11,43	4,52	-6,26	-6,35	-5,27	-3,55
Industri Pengolahan	-10,36	11,05	5,88	1,86	-0,53	2,46	1,33	1,35	1,14	1,61
Pengadaan Listrik dan Gas	-10,95	-16,30	-2,31	-7,20	-15,17	-19,04	-16,57	-13,8	-16,32	-15,24
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2,68	4,07	0,51	6,33	5,22	0,59	0,28	-3,84	0,48	-4,93
Konstruksi	-5,55	0,09	1,69	2,50	6,27	6,55	5,65	9,39	6,99	2,61
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-7,04	5,46	7,78	4,52	5,46	6,87	7,99	7,26	6,87	4,35
Transportasi dan Pergudangan	-7,63	12,75	7,17	14,05	6,48	6,12	7,1	8,07	6,96	7,96
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-16,21	8,99	9,31	9,69	9,56	7,57	7,31	8,87	8,31	9,64
Informasi dan Komunikasi	11,05	4,65	6,96	7,45	6,38	4,19	4,27	4,36	4,8	5,93
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,38	0,12	1,23	5,39	2,02	10,99	6,09	2,6	5,36	5,84
Real Estate	1,57	1,77	2,04	0,74	1,31	1,35	1,64	1,76	1,51	1,97
Jasa Perusahaan	-2,07	-0,21	5,96	6,49	6,56	3,57	3,65	5,05	4,71	6,32
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-5,79	-2,82	2,35	0,04	14,16	-5,96	0,93	-2,53	1,25	4,64
Jasa Pendidikan	2,64	0,81	-0,12	1,20	3,69	0,96	6,97	5,52	4,26	7,19
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19,85	8,10	9,28	5,85	9,09	6,71	3,36	2,79	5,41	4,37
Jasa Lainnya	-4,08	-1,90	15,27	11,60	3,45	3,87	6,09	8,2	5,42	8,98
PDRB	**-2,39**	**3,55**	**5,25**	**4,96**	**4,78**	**4,90**	**4,93**	**5,01**	**4,90**	**4,95**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Sementara itu, dinamika inflasi di Jakarta menunjukkan variasi yang mencerminkan tantangan sekaligus peluang dalam menjaga stabilitas harga. Sebagaimana pada Grafik 3.5, pada Mei 2025, tingkat inflasi di Jakarta tercatat sebesar 2,07% (*yoy*), tetap terkendali dalam sasaran target inflasi 2,5 ± 1, serta lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 2,21% (*yoy*). Capaian tersebut juga lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 1,60% (*yoy*). Kondisi ini terjadi akibat hampir semua kelompok komoditas mengalami peningkatan harga kecuali kelompok transportasi dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa

keuangan. Relatif terkendalinya inflasi tidak terlepas dari upaya pengendalian inflasi sebagai hasil sinergi TPID melalui program pengendalian inflasi yang mengacu pada pedoman 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Meskipun proyeksi inflasi tetap dalam sasaran, berbagai risiko ke depan perlu terus diwaspadai dan direspons secara adaptif. Konsistensi kebijakan, respons cepat terhadap gejolak harga, serta penguatan sinergi lintas daerah menjadi kunci menjaga stabilitas inflasi Jakarta sepanjang tahun 2025.

Grafik 3.4
Inflasi Nasional dan Provinsi DKI Jakarta

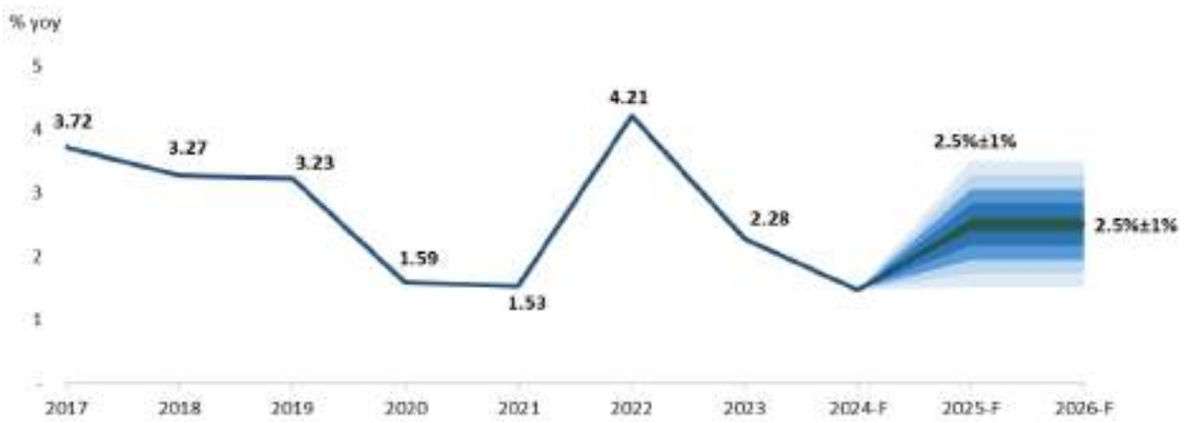


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Secara keseluruhan, tekanan inflasi Jakarta tahun 2025 diprakirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% (*yoy*) (Grafik 3.6). Proyeksi tersebut didukung oleh kondisi cuaca yang lebih kondusif, pelaksanaan berbagai kebijakan Pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan, serta penguatan koordinasi dan sinergi dalam TPID dengan tetap berfokus pada strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif), utamanya melalui pelaksanaan program GNPIP. Upaya pengendalian inflasi tersebut dilakukan melalui berbagai langkah konkret, antara lain:

a. penyaluran bantuan sosial seperti Program Pangan Bersubsidi berkolaborasi dengan BUMD Pangan;
b. pengendalian tarif transportasi dan layanan publik agar tidak mengalami kenaikan signifikan;
c. penyelenggaraan operasi pasar dan pasar murah untuk komoditas yang mengalami tekanan harga, bekerja sama dengan Bulog dan BUMD pangan; serta
d. penguatan kerja sama antar daerah (KAD) dengan daerah produsen potensial yang surplus serta memperkuat kerja sama dengan TPID Bodetabek yang mempunyai hubungan ekonomi kuat dengan Jakarta.

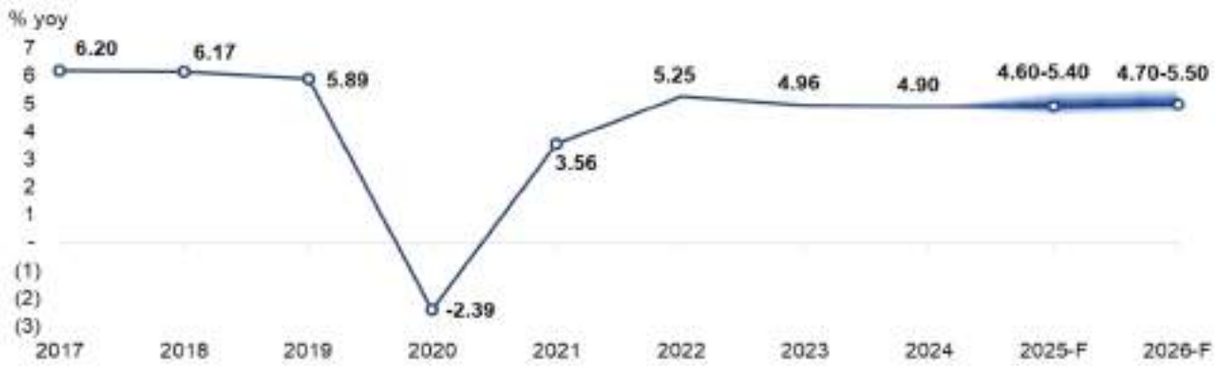
Grafik 3.5
Proyeksi Inflasi Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Proyeksi Bank Indonesia, 2025

Meskipun proyeksi inflasi Jakarta tahun 2025 masih dalam rentang sasaran, sejumlah tekanan tetap perlu diwaspadai. Tekanan tersebut antara lain bersumber dari tingginya harga pangan global, potensi La Nina, pembatasan impor komoditas strategis di tengah peningkatan permintaan, kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, tarif PAM di awal tahun, serta lonjakan harga emas seiring tren harga global. Selain itu, anomali cuaca yang menyebabkan pergeseran musim tanam dan panen berpotensi menurunkan produktivitas pertanian di daerah penyuplai, yang pada akhirnya dapat mendorong kenaikan harga pangan di Jakarta. Rencana kenaikan sejumlah tarif layanan publik juga diperkirakan memberikan tambahan tekanan terhadap inflasi, terutama pada inflasi AP. Ke depan, pengendalian inflasi diperkirakan akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat volatilitas harga komoditas global, khususnya energi dan pangan, yang dipicu oleh ketidakpastian geopolitik dan perubahan iklim. Kenaikan harga komoditas strategis seperti emas dan minyak sawit mentah (CPO) turut memperburuk tekanan inflasi, sementara kebijakan domestik terkait penyesuaian harga dan pembatasan impor dapat memicu lonjakan harga di pasar.

Grafik 3.6
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta dan Proyeksi Bank Indonesia, 2025

Sejalan dengan proyeksi inflasi, serta memperhatikan realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 dan dinamika perekonomian global dan domestik, perekonomian Jakarta tahun 2025 diprakirakan masih tumbuh pada kisaran 4,6–5,4% (*yoy*), meskipun berada cenderung sedikit di bawah titik tengah. Pertumbuhan pada tahun 2025 akan mengalami berbagai tantangan baik dari faktor eksternal maupun internal seperti:

a. dinamika global seperti eskalasi ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan akibat kebijakan tarif resiprokal AS, berpotensi menekan aktivitas perdagangan dan investasi di Jakarta;
b. dinamika domestik seperti efisiensi anggaran berdasarkan Inpres No 1 Tahun 2025 maupun faktor-faktor struktural seperti terbatasnya daya dukung wilayah Jakarta, antara lain keterbatasan lahan yang semakin sempit, tingginya biaya tenaga kerja akibat upah minimum yang relatif tinggi, keterbatasan akses terhadap air bersih, serta permasalahan klasik seperti kemacetan lalu lintas, ketimpangan sosial yang masih tinggi, dan polusi udara yang terus memburuk;
c. tertahannya daya beli akibat PHK dan *layoff* yang terjadi pada beberapa perusahaan;
d. sikap *wait and see* konsumen terhadap kondisi ekonomi yang disertai pergeseran perilaku konsumsi yang cenderung membeli barang-barang dengan harga murah/terjangkau; dan
e. normalisasi aktivitas pasca pemilu 2024.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun prospek pertumbuhan tetap positif, perekonomian Jakarta menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pemulihan. Pemerintah dituntut untuk merespons kebijakan yang adaptif dan terkoordinasi guna menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta secara berkelanjutan.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan Jakarta utamanya ditopang oleh meningkatnya investasi. Peningkatan tersebut didorong oleh berlanjutnya pembangunan proyek strategis pemerintah bersifat multitahun seperti NCICD (pelaksanaan proyek pada 2022-2028); MRT fase II, III, dan IV; LRT Jakarta; dan TOD. Perkiraan kinerja investasi yang meningkat juga tercermin dari persentase target investasi Jakarta oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 255 Triliun atau 13,38% dari target nasional, meningkat dibandingkan tahun lalu (12,00%) dan merupakan target tertinggi kedua secara nasional. Implementasi beberapa program prioritas Pemerintah juga diperkirakan akan mendorong investasi Jakarta yaitu (i) Program MBG diperkirakan akan mendorong investasi dan pengembangan usaha khususnya di sektor penyediaan makanan dan minuman; (ii) Pembentukan BPI Danantara memberikan potensi promosi proyek investasi di Jakarta; serta (iii) Kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Inpres No 1 Tahun 2025 diperkirakan akan mendorong optimalisasi skema pembiayaan alternatif berbasis Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU).

Kendati demikian, Jakarta masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam upaya mendorong pertumbuhan investasi, salah satunya ditunjukkan oleh nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang relatif tinggi. Pada tahun 2023, ICOR Jakarta tercatat sebesar 7,86, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 7,53 dan jauh di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 6,33. Tingginya nilai ICOR ini mencerminkan tingkat efisiensi investasi yang masih rendah, artinya dibutuhkan lebih banyak investasi untuk menghasilkan tambahan output yang setara. Kondisi ini menjadi indikasi bahwa investasi yang dilakukan belum sepenuhnya optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jakarta juga menghadapi tantangan struktural lainnya berupa menurunnya produktivitas tenaga kerja, yang menjadi cerminan dari inefisiensi ekonomi secara lebih luas. Penurunan produktivitas ini menghambat akselerasi pemulihan ekonomi pasca pandemi, serta membatasi potensi pertumbuhan jangka menengah.

Adapun pertumbuhan komponen pengeluaran lainnya cenderung tumbuh namun diprakirakan tidak setinggi tahun sebelumnya. Konsumsi rumah tangga didorong oleh kebijakan Pemerintah memberikan beberapa insentif fiskal antara lain berupa pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian perumahan, serta insentif penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% berupa paket stimulus sebesar Rp38,6 Triliun di antaranya bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan, diskon listrik 50% untuk pelanggan daya maksimal 2200 VA, dan insentif PPh final 0,5% untuk UMKM. Selain itu, kebijakan akses gratis bagi 15 kategori masyarakat dalam penggunaan transportasi umum seperti TransJakarta, MRT, dan LRT oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut mendorong pertumbuhan. Konsumsi rumah tangga di Jakarta yang banyak dipengaruhi oleh penyelenggaraan *event-event* skala international. *Event-event* yang telah diselenggarakan di Jakara di antaranya seperti Maroon 5, The Script, Green Day, Linkin Park, Boyz II Men, Cigarette After Sex, INFINITE 15th *Anniversary Concert*: *Limited Edition*, Taeyang 2025 Tour dan *event* olahraga seperti Jakarta Running Festival dan BTN Jakarta International Marathon. Namun demikian, pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga akan menghadapi berbagai risiko seperti:

a. PHK dan *layoff* yg terjadi pada beberapa perusahaan sehingga berdampak pada tertahannya daya beli;
b. *wait and see* konsumen terhadap kondisi ekonomi yang disertai dengan pergeseran perilaku konsumsi yang cenderung membeli barangbarang dengan harga murah/terjangkau;
c. dinamika global yaitu fragmentasi perdagangan terkait kebijakan tarif resiprokal AS, berlanjutnya ketegangan geopolitik, dan pergeseran perilaku konsumsi ke arah aset investasi yang bersifat *safe haven* sebagai respons atas tingginya ketidakpastian ekonomi; serta
d. dinamika domestik yaitu efisiensi anggaran berdasarkan Inpres No 1 Tahun 2025 yang berlangsung pada triwulan I 2025 berdampak pada kinerja lapangan usaha sehingga mempengaruhi pendapatan masyarakat.

Pertumbuhan dari sisi konsumsi pemerintah di Jakarta diprakirakan melambat pada tahun 2025. Beberapa komponen belanja diperkirakan akan mengalami perlambatan setelah mengalami akselerasi selama periode Pemilu 2024, terutama pada pos belanja barang dan jasa serta bantuan sosial. Di sisi lain, belanja pegawai diproyeksikan tetap tumbuh positif. Belanja modal juga diperkirakan melanjutkan tren pertumbuhan, seiring dengan kelanjutan pembangunan proyek strategis Pemerintah yang bersifat jangka panjang. Selain itu, pelaksanaan berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), renovasi sekolah, pengembangan sekolah unggulan, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, serta program peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan, diperkirakan akan menahan laju perlambatan konsumsi Pemerintah lebih lanjut pada tahun 2025.

Pertumbuhan ekspor Jakarta juga berpotensi mengalami tekanan akibat tarif impor AS, namun tetap dapat tumbuh positif sejalan dengan diversifikasi negara tujuan ekspor Jakarta seperti ke Amerika Latin dan Timur Tengah serta meningkatnya permintaan komoditas utama Jakarta yaitu alas kaki dan perhiasan/permata. Sejalan dengan kinerja ekspor yang masih positif, kinerja impor DKI Jakarta pada tahun 2025 juga diprakirakan masih tetap tumbuh tinggi terutama bersumber dari meningkatnya impor barang modal sejalan dengan meningkatnya investasi. Pengenaan tarif resiprokal oleh AS juga berpotensi meningkatkan volume barang-barang impor ke Jakarta terutama yang berasal dari Tiongkok. Selama ini, Jakarta mengalami net impor atau defisit perdagangan luar negeri walaupun defisitnya mengecil pada triwulan I 2025. Meski demikian, kondisi ini tetap perlu diantisipasi mengingat adanya kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh AS terhadap Tiongkok, yang berpotensi memengaruhi perekonomian Jakarta melalui jalur transmisi perdagangan. Kebijakan tersebut dikhawatirkan akan memberikan tekanan tambahan terhadap neraca perdagangan Jakarta, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari sisi LU, perekonomian Jakarta pada 2025 masih akan ditopang oleh pertumbuhan positif lima sektor utama, yaitu perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, infokom, serta jasa keuangan. LU perdagangan diperkirakan tetap tumbuh positif, didorong oleh kuatnya konsumsi rumah tangga seiring peningkatan UMP dan berbagai insentif Pemerintah. Selain itu, kinerja sektor ini diperkuat oleh semakin intensifnya kegiatan MICE dan event internasional di Jakarta. Pertumbuhan LU konstruksi sejalan dengan meningkatnya investasi akibat berlanjutnya proyek-proyek multitahun seperti MRT, LRT, dan TOD. Proyek PSN baru pada 2025, seperti pengembangan kawasan wisata Kepulauan Seribu, TOD, residensial, hotel, apartemen, dan infrastruktur pesepeda, juga diperkirakan mendorong sektor ini. Selain itu, proyek seperti Pelabuhan Kalibaru, rumah sakit, dan bangunan kantor turut menopang kinerja konstruksi, yang sekaligus menciptakan *multiplier effect* bagi sektor perdagangan bahan bangunan, jasa logistik, dan penyerapan tenaga kerja.

LU industri pengolahan pada tahun 2025 diperkirakan tetap mengalami pertumbuhan positif, seiring dengan masih terjaganya kinerja ekspor yang memberikan kontribusi signifikan. Beberapa subsektor industri yang diproyeksikan mengalami peningkatan pertumbuhan antara lain industri makanan dan minuman, tekstil dan alas kaki, serta industri kimia. LU jasa keuangan juga diprakirakan meningkat seiring dengan intermediasi perbankan yang diperkirakan tetap kuat, didukung oleh tingginya penyaluran kredit dan penerapan kebijakan penyaluran kredit. Demikian pula LU infokom yang mencatatkan pertumbuhan tinggi didorong oleh produksi film dan permintaan di berbagai kanal (bioskop dan aplikasi mobile streaming), serta peningkatan penggunaan paket data. Pertumbuhan LU Infokom juga diperkuat oleh meningkatnya preferensi masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi digital sejalan dengan perkembangan digitalisasi yang terus berlangsung. LU lainnya seperti transportasi dan pergudangan juga terdorong oleh kinerja transportasi barang (*freight*) serta logistik dalam mendukung perdagangan online. LU penyediaan akomodasi dan makanan minuman juga diperkirakan tetap tumbuh, didukung oleh pelaksanaan event dan MICE skala internasional. Pertumbuhan positif juga terjadi pada LU jasa perusahaan seiring dengan pelaksanaan berbagai event yang mendorong kinerja event organizer/EO dan LU lainnya.

Beragam risiko yang diperkirakan muncul pada tahun 2025 mencakup perlambatan ekonomi global, ketegangan geopolitik yang terus berlanjut, serta meluasnya fragmentasi perdagangan sebagai imbas dari tarif impor AS. Kondisi tersebut berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Selain tantangan eksternal, terdapat pula faktor domestik yang perlu diwaspadai karena dapat memengaruhi perekonomian Jakarta, baik yang bersifat struktural maupun siklikal. Tantangan struktural mencakup keterbatasan daya dukung wilayah seperti minimnya ketersediaan lahan, tingginya upah minimum, keterbatasan pasokan air, serta persoalan lainnya seperti kemacetan, ketimpangan sosial, dan pencemaran udara. Adapun tantangan siklikal bersumber dari dinamika dalam negeri, antara lain melemahnya daya beli masyarakat dan meningkatnya kasus PHK.

Untuk memperkuat ketahanan ekonomi Jakarta di tengah berbagai tantangan, khususnya yang bersumber dari eksternal, serta meningkatkan daya saing Jakarta sebagai kota global, diperlukan penguatan sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui:

a. Mendorong kegiatan MICE dan *event* (musik, olahraga, dan lainnya) di Jakarta, serta urban tourism yang dibagi menjadi 8 kategori yaitu wisata rekreasi (Ancol, TMII), sejarah (Kampung Tugu, Kampung Marunda), belanja (Pasar Barang Antik di Jl. Surabaya), olahraga (Aquatic Centre, Jakarta Velodrome), religi (Masjid Istiqlal, Gereja Katedral), alam dan air (Muara Angke, Pulau Seribu), alam terbuka (Urban Forest Cipete), dan MICE (Balai Sidang Jakarta Convention Centre);
b. Mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan sektor potensial yaitu sektor perdagangan (*hub ecommerce*), sektor informasi komunikasi (ekosistem digital dan *start up*), sektor keuangan (*regional financial center*), sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (MICE dan Urban), sektor jasa pendidikan, serta sektor jasa kesehatan; termasuk UMKM go digital dan go ekspor;
c. Memperkuat koordinasi dengan daerah aglomerasi Bodetabek untuk pertumbuhan ekonomi Jakarta yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan sebagai kota global;
d. Mendorong berlanjutnya pelaksanaan proyek strategis sesuai rencana, perbaikan iklim investasi melalui optimalisasi sektor prioritas, serta promosi investasi;
e. Mendorong digitalisasi UMKM dalam sistem pembayaran dan akses pembiayaan untuk pembangunan ekonomi dan keuangan yang lebih inklusif;
f. Mendorong digitalisasi pemda dan masyarakat, melalui: (i) Inklusi dan resiliensi SP Non Tunai (terutama (RIS) terutama di beberapa sektor potensial (pariwisata, kesehatan dan pendidikan); Peningkatan literasi digital melalui edukasi publik dan kampanye ORIS al Jakarta Kreatif Festival, ORIS Fun Zumba dan ORIS Jelajah Indonesia: serta (iii) Optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPO) dalam mempertahankan status Pemda Digital dan peningkatan Indeks ETPD dengan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi melalui (RIS, akselerasi implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah serta Sinergi dan Kolaborasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Sementara itu terkait inflasi, dengan berbagai permasalahan struktural di Jakarta antara lain terkait dengan populasinya yang bertambah ketika siang hari dari daerah sekitar (bodetabek), serta karakteristik Jakarta yang bukan merupakan wilayah sentra produksi sehingga 99% pemenuhan komoditas pangan bersumber dari daerah penghasil maka diperlukan strategi khusus pengendalian inflasi daerah nonprodusen yaitu melalui penguatan strategi 4K dalam inflasi pangan, yaitu:

a. Menjaga ketersediaan pasokan melalui peningkatan produktivitas dengan program *urban farming* dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan daerah surplus;
b. Menjaga keterjangkauan harga melalui pelaksanaan Operasi Pasar Murah secara massif, integratif, dan berdampak luas;
c. Menjaga kelancaran distribusi melalui perluasan distribusi via kanal TPID-BUMD pangan; serta
d. Melaksanakan komunikasi efektif melalui penguatan koordinasi dan komunikasi dalam pengendalian ekspektasi inflasi.

Penguatan eksosistem digital juga perlu terus didorong, tidak hanya terkait dengan transaksi Pemerintah Daerah, digitalisasi transportasi, serta digitalisasi bantuan sosial, namun juga menyasar sektor ekonomi potensial seperti pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Pengembangan UMKM juga terus didorong dan diarahkan untuk menjadi pemasok sektor-sektor ekonomi yang produktif seperti industri dan pariwisata melalui pengembangan kapasitas dan pembiayaan. Di sisi lain, dalam rangka stabilisasi harga, UMKM dapat dikembangkan dengan fokus untuk mendukung kerja sama antar daerah dalam rangka menjaga pasokan bahan pangan. Inovasi juga perlu diperkuat dalam mengakselerasi perkembangan digitalisasi UMKM melalui program pengembangan UMKM digital dan UMKM ekspor. Lebih lanjut, inovasi kebijakan dan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah serta ekonomi dan keuangan hijau juga diperlukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan serta mendukung penguatan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalian dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berdasarkan fungsi:

a. Fungsi otorisasi memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
b. Fungsi perencanaan memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
c. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
e. Fungsi distribusi mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
f. Fungsi stabilisasi mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Selanjutnya, berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah, kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada sub bab sebelumnya, serta prakiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD DKI Jakarta Tahun 2025, baik pendapatan, belanja dan pembiayaan dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagaimana berikut.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta pendapatan transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Dengan melihat potensi pemulihan ekonomi global, Nasional maupun DKI Jakarta pada tahun 2025 serta melihat performa pendapatan daerah tahun sebelumnya, diharapkan pendapatan daerah akan mengalami peningkatan pada masa yang akan datang, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan pendapatan daerah sebagai berikut.

3.2.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD merupakan salah satu sumber pendanaan utama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Kebijakan PAD disusun untuk mengoptimalkan potensi dan pengelolaan PAD yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut.

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Realisasi pajak daerah pada semester I lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya (*y-o-y*), sehingga besaran penerimaan pajak daerah hingga akhir tahun dalam Kerangka APBD Perubahan 2025 tetap dipertahankan sesuai target.

Kebijakan pajak daerah di DKI Jakarta untuk tahun 2025 mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Implementasi Kebijakan Pajak Daerah perihal pemberian Insentif Pajak Daerah. Untuk itu, dirumuskan beberapa strategi untuk mendukung kebijakan pajak daerah sebagai berikut:

1. Intensifikasi
    a. Pengembangan digitalisasi dan integrasi sistem pelayanan pemungutan pajak daerah;
    b. Pemutakhiran dan penyempurnaan data subjek dan objek pajak daerah;
    c. Pemeriksaan terhadap wajib pajak *self-asessment*;
    d. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum/ *law enforcement* dalam proses penagihan piutang dan *cleansing* data piutang pajak daerah;
    e. Pemberdayaan juru sita, PPNS, intelijen pajak daerah dalam upaya penegakan hukum;
    f. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dan Nilai Jual Alat Berat (NJAB) mendekati harga pasar yang wajar;
    g. Meningkatkan kapasitas aparatur pajak daerah yang adaptif dan memahami peraturan, teknologi dan dunia digital dengan baik;
    h. Peningkatan koordinasi kelembagaan dalam proses pemungutan pajak daerah (pertukaran data informasi, *tax clearance*, *law enforcement*, sosialisasi, dan pendataan);
    i. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan edukasi dan sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat;
    j. Penyederhanaan prosedur pembayaran pajak daerah untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya; dan
    k. Memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Ekstensifikasi
    a. Pertumbuhan kendaraan bermotor baru (Kbm baru) baik kendaraan bermotor roda 4 (empat) maupun kendaraan bermotor roda 2 (dua);
    b. Pertumbuhan penjualan properti meningkat;
    c. Pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan pendataan dan pemetaan, terutama objek pajak baru sebagai implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
    d. Sosialisasi kepada pelaku usaha baru untuk menjangkau wajib pajak potensial;
    e. Pemanfaatan teknologi GIS (*Geographic Information System*) untuk pemetaan objek pajak yang membantu pelaksanaan sensus pajak daerah dalam rangka mendata aset dan usaha yang belum terdaftar;
    f. Penyesuaian kebijakan pajak daerah terhadap perkembangan ekonomi digital;
    g. Pemanfaatan data dan informasi dari instansi pemerintah pusat untuk sinkronisasi data wajib pajak daerah dan penguatan basis data pajak daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Penerimaan retribusi daerah hingga akhir tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp1.389.976.917.783. Retribusi jasa umum diproyeksikan turun sebesar Rp 50 Miliar menjadi Rp 417.727.278.077, retribusi jasa usaha diproyeksikan naik sebesar Rp 12 Miliar menjadi Rp 688.054.639.706, sedangkan retribusi perizinan tertentu diproyeksikan turun sebesar Rp 20,9 Miliar menjadi Rp 284.195.000.000.

Berikut beberapa strategi untuk mendukung kebijakan retribusi daerah:

a. Pengembangan dan penyempurnaan Retribusi Online Sistem (ROS) sebagai sarana pemungutan retribusi;
b. Penggunaan sistem *e-ticketing* dalam pelayanan retribusi yang masih menggunakan karcis;
c. Peningkatan pelayanan yang berdaya saing kepada masyarakat atas objek retribusi;

d. Penyesuaian tarif retribusi secara berkala yang menyesuaikan harga pasar;
e. Penerbitan petunjuk pelaksana terkait tata cara pemungutan retribusi;
f. Pengintegrasian sistem pendukung pemungutan retribusi yang dimiliki oleh SKPD Pemungut Retribusi ke dalam ROS;
g. Perluasan kanal pembayaran retribusi; dan
h. Melakukan pendataan retribusi untuk perluasan objek retribusi baru.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari bagi hasil laba (dividen) Perusahaan Daerah dan Perusahaan Patungan atas investasi modal yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Secara umum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 14 BUMD dan 9 PT Patungan. Namun, dari total 23 perusahaan tersebut, terdapat 2 perusahaan, yaitu PT Ratax Armada dan PT Grahasahari Suryajaya, yang sudah tidak beroperasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diamanatkan bahwa atas perolehan laba dapat dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain oleh RUPS. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap tahunnya BUMD dan PT Patungan yang memperoleh laba dan tidak memiliki akumulasi saldo laba negatif diwajibkan menyetorkan dividen kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang saham.

Setoran dividen tahun berjalan merupakan hasil kinerja perusahaan pada tahun buku sebelumnya. Pada periode 2017-2020, pendapatan daerah yang berasal dari dividen BUMD dan PT Patungan tumbuh dengan rata-rata 11,3% setiap tahunnya. Pertumbuhan ini didukung oleh kebijakan pembinaan dan pengembangan BUMD yang mendorong perusahaan menjadi lebih efektif, efisien, dan berkembang. Selepas dampak COVID-19 pada tahun 2020, dalam periode 2021 hingga 2024, kondisi perekonomian DKI Jakarta kembali dalam tren positif. Selanjutnya pada kinerja BUMD mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan laporan kinerja audited tahun buku 2023, total pendapatan usaha BUMD mencapai Rp37,9 triliun, naik 9,21% dari tahun 2022.

Pada tahun 2025, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (dividen) BUMD ditargetkan sebesar Rp774 miliar. Target ini merupakan angka optimis yang ditetapkan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Jakarta berkisar antara 4,9-5,7%. Hasil evaluasi pelaksanaan audit terhadap laporan keuangan BUMD tahun 2024 sampai dengan triwulan I tahun 2025 menunjukan terdapat beberapa target indikator keuangan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan serta terdapat BUMD yang mengalami fluktuasi laba. Hal ini turut berdampak pada naik-turunnya proyeksi setoran dividen yang bersumber dari BUMD dan Perusahaan Patungan.

Secara umum dengan memperhatikan hasil evaluasi atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, beberapa langkah kebijakan strategis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan rasio kesehatan serta tata kelola dan risiko BUMD;
2. Menempatkan pengurus yang unggul dan profesional;
3. Menerapkan strategi bisnis yang tepat serta meningkatkan sinergi antar BUMD;
4. Optimalisasi produktivitas aset melalui kerja sama dengan BUMD lain, BUMN, dan pihak swasta;
5. Meningkatkan inovasi melalui transformasi digital agar lebih berdaya saing; dan
6. Memperkuat struktur permodalan BUMD melalui berbagai instrumen pendanaan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah (LLPAD) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil

penjualan barang milik daerah dan penerimaan jasa giro. Secara total, LLPAD diproyeksikan naik menjadi sebesar Rp 4.005.102.049.268 hingga akhir tahun 2025. Kontribusi kenaikan LLPAD paling tinggi bersumber pada proyeksi naiknya pendapatan BLUD sesuai dengan realisasi hingga saat ini. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan diproyeksikan naik sebesar Rp 26 Miliar yang bersumber pada penerimaan dari penjualan alat angkut dan alat kantor. Selain itu, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan, Pedapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir juga diproyeksikan mengalami kenaikan dengan mempertimbangkan realisasi hinga April 2025.

Dalam hal meningkatkan kinerja LLPAD, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Pembuatan regulasi terkait pemungutan LLPAD dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam hal optimalisasi penerimaan LLPAD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Pengembangan sistem monitoring LLPAD guna mempermudah proses monitoring dan evaluasi serta rekonsiliasi penerimaan LLPAD;
3. Membuat analisa terkait pendataan potensi LLPAD atas pemanfaatan aset BMD;
4. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah pemungut LLPAD dan Perangkat Daerah terkait lainnya dalam proses pemungutan LLPAD; dan
5. Inventarisasi potensi penerimaan denda retribusi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah pemungut retribusi.

Dalam mewujudkan kebijakan tersebut, diperlukan strategi dalam hal optimalisai pemanfaatan aset, pelayanan rekomendasi Hak Guna Bangunan diatas HPL Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur telekomunikasi, serta pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur reklame, yang dilakukan melalui langkah-langkah berikut.

1. Optimalisasi pemanfaatan aset
   Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan pemanfaatan aset yang optimal adalah meningkatnya manfaat finansial dan/atau non finansial bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemanfaatan dan/atau pendayagunaan tanah dan/atau bangunan adalah:
   a. Melakukan identifikasi konsep dan skema pemanfaatan dan pendayagunaan tanah dan/atau bangunan;
   b. Membuat kajian *Highest Best And Used* atas aset non kelolaan yang dapat dioptimalisasi melalui mekanisme pemanfaatan;
   c. Menyusun daftar prioritas pemanfaatan dan pendayagunaan tanah dan/atau bangunan;
   d. Mengembangkan *database* dan sistem informasi pemanfaatan ruang untuk infrastruktur reklame;
   e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan ruang untuk infrastruktur reklame;
   f. Pengembangan layanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur reklame berbasis digital;
   g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan dan pendayagunaan tanah dan/atau bangunan;
   h. Melakukan pengembangan skema pemanfaatan dan pendayagunaan tanah dan/atau bangunan seiring dengan perkembangan ekonomi, bisnis dan perdagangan termasuk perluasan pengelolaan pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan dalam penguasaan Pengguna Barang; dan
   i. Pengembangan layanan pemanfaatan dan pendayagunaan tanah dan/atau bangunan berbasis digital.

2. Optimalisasi pelayanan rekomendasi Hak Guna Bangunan diatas HPL Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tanah Kota Praja dan Eks Desa
   Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan pelayanan rekomendasi Hak Guna Bangunan diatas HPL Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tanah Kota Praja dan Eks Desa yang optimal adalah:
   a. Melakukan identifikasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Tanah HPL meliputi dokumen kepemilikan, perjanjian kerja sama diatas HPL, dan dokumen lainnya yang sejenis;
   b. Mengembangkan *database* HPL;
   c. Mengintegrasikan data HPL dengan BPN, Jakartasatu, dan data pajak;
   d. Melakukan identifikasi bidang tanah HPL secara geospasial pada peta jakartasatu;
   e. Melakukan komunikasi dengan para pihak yang bekerja sama di atas HPL;
   f. Melakukan penyelesaian permasalahan hukum di atas tanah HPL;
   g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan dan pendayagunaan tanah HPL; dan
   h. Pengembangan layanan rekomendasi Hak Guna Bangunan di atas HPL berbasis digital.
3. Optimalisasi pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur telekomunikasi
   Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur telekomunikasi seperti Menara Telekomunikasi, Jaringan Mikro Seluler dan Serat Optik yang optimal adalah:
   a. Melakukan identifikasi dan rekonsiliasi data infrastruktur telekomunikasi;
   b. Melakukan komunikasi dengan *provider* infrastruktur telekomunikasi;
   c. Mengembangkan tarif layanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur telekomunikasi;
   d. Mengembangkan database dan sistem informasi pemanfaatan ruang untuk infrastruktur telekomunikasi;
   e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan ruang untuk infrastruktur telekomunikasi; dan
   f. Pengembangan layanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur telekomunikasi berbasis digital.
4. Optimalisasi pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur reklame
   Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur reklame sebagai media informasi dan publikasi yang optimal adalah:
   a. Menyusun regulasi terkait pemanfataan ruang, infrastruktur reklame;
   b. Melakukan komunikasi dengan *provider* infrastruktur reklame;
   c. Mengembangkan tarif layanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur reklame.
5. Optimalisasi penerimaan penjualan Barang Milik Daerah
   Strategi yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Dipisahkan adalah dengan memproses usulan penghapusan dari Perangkat Daerah Pengguna Barang yang mengajukan penghapusan atas aset rusak berat yang tercatat pada KIB masing-maisng Pengguna Barang.

3.2.1.2. Arah Kebijakan Pendapatan Transfer

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Pendapatan Transfer terdiri atas transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada optimalisasi pengelolaan Pendapatan Transfer yaitu untuk memenuhi aspek kepatuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan laporan, sinergi serta koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Keuangan agar pengelolaan pendapatan transfer sesuai dengan ketentuan yg ditetapkan, antara lain:

1. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penyaluran Fasilitas *Treasury Desposit Facility* (TDF) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara nontunai melalui Fasilitas *Treasury Desposit Facility* (TDF).
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2025 Tentang Penarikan Dana *Treasury Depocit Facility* (TDF) Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sisa dana *Treasury Desposit Facility* (TDF) 2023 dan 2024 yang belum dilakukan penarikan akan seluruhnya disalurkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hingga akhir tahun 2025, proyeksi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi sebesar Rp 26.330.617.720.361,-.

3.2.1.3. Arah Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan hibah yang dilakukan dengan Pemerintah, Pihak Ketiga dan SKPD/UKPD terkait *Memorandum of Understanding* penarikan/pencairan, penggunaan dan pelaporan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pada Tahun 2025, terdapat pemutakhiran rencana kerja dan rencana tahunan MRT koridor utara selatan fase 2 dan koridor timur barat fase 1 tahap 1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat untuk Pembangunan MRT diproyeksikan menjadi sebesar Rp 511.975.000.000,-.

Berdasarkan penjelasan di atas, perubahan target pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7
Perubahan Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Kode	Uraian	RKPD Tahun 2025*	Penetapan APBD Tahun 2025**	Pergeseran II APBD Tahun 2025***	Perubahan RKPD Tahun 2025****
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**54.083.756.505.175**	**54.187.749.526.824**	**54.187.749.526.824**	**54.169.078.967.051**
4.1.01.	Pajak Daerah	47.900.000.000.000	48.000.000.000.000	48.000.000.000.000	48.000.000.000.000
4.1.02.	Retribusi Daerah	970.550.610.545	1.449.458.173.488	1.449.458.173.488	1.389.976.917.783
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	774.000.000.000	774.000.000.000	774.000.000.000	774.000.000.000
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	4.439.205.894.630	3.964.291.353.336	3.964.291.353.336	4.005.102.049.268
4.2.	**Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan**	**19.326.007.889.000**	**26.137.337.366.000**	**26.137.805.024.000**	**30.082.649.167.361**
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	19.326.007.889.000	26.137.337.366.000	26.137.805.024.000	30.082.649.167.361
4.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**1.460.929.059.707**	**1.409.277.868.000**	**1.409.277.868.000**	**524.094.868.000**
4.3.01.	Pendapatan Hibah	1.460.929.059.707	1.409.277.868.000	1.409.277.868.000	524.094.868.000
TOTAL PENDAPATAN DAERAH		**74.870.693.453.882**	**81.734.364.760.824**	**81.734.832.418.824**	**84.775.823.002.412**

Sumber *) *Pergub DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025*
**) *Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025*
***) *Pergub DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025*
****) *Perubahan RKPD Tahun 2025*

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal dirinci atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud. Selanjutnya, Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan, Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci menjadi Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Dalam hal kebijakan belanja daerah tahun 2025 sebagaimana berikut.

1. Mendorong peran Jakarta sebagai Kota Bisnis berskala Global dengan melakukan perbaikan terhadap permasalahan fundamental melalui prioritas perbaikan pada isu Ketahanan Bencana, Perumahan, Mobilitas, Emisi dan Polusi, Penanganan Sampah, serta Akses Air Bersih dan Limbah;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, peluang karir dan pekerjaan, peluang bisnis, serta penyediaan ruang publik;
3. Menciptakan ekosistem inklusif dan berkembang dalam rangka meningkatkan daya saing industri, inovasi, inklusifitas dan kesetaraan, identitas budaya dan sejarah, transparansi dan akuntabilitas, serta tata kelola yang cerdas;
4. Selain itu pemberian bantuan dilakukan dalam bentuk.
    a. Subsidi diberikan untuk meningkatkan akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan publik tanpa membebani biaya hidup;
    b. Hibah diberikan dengan ketentuan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
    c. Bantuan sosial diberikan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang pemberiannya dilakukan secara selektif;
    d. Bantuan keuangan untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya khususnya wilayah Jabodetabekjur dalam rangka kerjasama/komitmen antar pemerintah daerah.
5. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, perubahan target belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8
Perubahan Target Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Kode	Uraian	RKPD Tahun 2025*	Penetapan APBD Tahun 2025**	Pergeseran II APBD Tahun 2025***	Perubahan RKPD Tahun 2025****
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.1.	**Belanja Operasi**	**60.456.389.001.698**	**64.956.846.181.128**	**65.777.425.093.348**	**67.784.280.560.997**
5.1.01.	Belanja Pegawai	20.349.294.894.974	22.316.492.000.507	22.316.492.000.507	21.659.966.088.537
5.1.02.	Belanja Barang/Jasa	28.837.589.431.809	30.367.892.521.018	29.871.303.272.822	31.509.805.245.832
5.1.03.	Belanja Bunga	158.000.000.000	158.000.000.000	158.000.000.000	158.000.000.000
5.1.04.	Belanja Subsidi	5.603.712.087.924	5.937.791.495.540	5.996.926.356.540	6.998.977.365.514
5.1.05.	Belanja Hibah	2.249.586.751.060	2.912.497.861.652	2.905.557.261.652	2.905.575.731.652
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	3.258.205.835.931	3.264.172.302.411	4.529.146.201.827	4.551.956.129.462
5.2.	**Belanja Modal**	**13.490.217.631.860**	**15.288.810.704.442**	**14.350.080.542.078**	**14.985.139.414.988**
5.3.	**Belanja Tidak Terduga**	**1.199.777.588.143**	**2.049.506.060.694**	**2.168.124.968.838**	**2.811.708.565.523**
5.4.	**Belanja Transfer**	**367.899.671.520**	**367.899.671.520**	**367.899.671.520**	**367.899.671.520**
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	367.899.671.520	367.899.671.520	367.899.671.520	367.899.671.520
TOTAL BELANJA DAERAH		**75.514.283.893.221**	**82.663.062.617.784**	**82.663.530.275.784**	**85.949.028.213.028**

Sumber **) Pergub DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025*
***) Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025*
****) Pergub DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025*
*****) Perubahan RKPD Tahun 2025*

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, bahwa Pembiayaan Daerah adalah pembiayaan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Pada kebijakan pembiayaan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 terdiri atas beberapa unsur pembentukan berikut.

3.2.3.1. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Dalam penyertaan penganggaran daerah, Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, Penerimaan Pengembalian, Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan terdiri atas Sumber Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Adapun kebutuhan pendanaan yang bersumber dari Pinjaman Daerah digunakan untuk Pembangunan Proyek MRT Jakarta Koridor Utara-Selatan Fase 2 dan MRT Jakarta Metropolitan Koridor Timur-Barat Fase 1 Tahap I.

3.2.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali di masa yang akan datang, atau merupakan pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah atas penerimaan pembiayaan di masa lalu. Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas Penyertaan Modal/Investasi Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan kepada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta dengan cara penambahan, pengurangan, penjualan kepada pihak lain, dan pengalihan kepada BUMD sesuai peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Pemerintah daerah dapat memberikan Pemberian Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk pendirian BUMD, penambahan modal BUMD, dan pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain. Pemberian PMD kepada BUMD di lingkungan Provinsi DKI Jakarta diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Usaha Milik Daerah. Dalam rangka efektifitas pemberian PMD, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pembatasan atas pengusulan PMD melalui pemberian persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya mendukung program prioritas Pemprov DKI Jakarta, penyerapan PMD sebelumnya mencapai 75 persen, terdapat dalam rencana bisnis serta adanya persetujuan dari dewan pengawas/komisaris perusahaan. Pembatasan tersebut bertujuan agar setiap BUMD dapat lebih fokus dalam memanfaatkan dana PMD yang telah diberikan sebelumnya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta *good coorporate governance* (GCG).

Berdasarkan surat No. 046/BOD-FCM/UA.00.01 tanggal 21 Maret 2025 hal Penyampaian RKA Hibah TA 2025 serta Pemutakhiran RKRT Pembangunan Proyek MRT Jakarta Koridor Utara-Selatan Fase 2 dan MRT Jakarta Metropolitan Koridor Timur-Barat Fase 1 Tahap I dan evaluasi capaian proyek MRT sampai dengan Desember 2024, terdapat

rencana penyesuaian penerimaan hibah dan pinjaman pembangunan MRT Fase 2 dan Timur-Barat Fase 1 Tahap I. Sehingga PMD PT. MRT Jakarta yang pada mulanya sebesar Rp5.933.158.000.000,- menjadi Rp.3.135.043.000.000,-.

Secara umum dengan memperhatikan hasil evaluasi atas Penyertaan Modal Daerah, beberapa langkah kebijakan strategis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan rasio kesehatan serta tata kelola dan risiko BUMD;
2. Menempatkan pengurus yang unggul dan profesional;
3. Menerapkan strategi bisnis yang tepat serta meningkatkan sinergi antar BUMD;
4. Optimalisasi produktivitas aset melalui kerja sama dengan BUMD lain, BUMN, dan pihak swasta;
5. Meningkatkan inovasi melalui transformasi digital agar lebih berdaya saing; dan
6. Memperkuat struktur permodalan BUMD melalui berbagai instrumen pendanaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, perubahan target pembiayaan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9
Perubahan Target Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Kode	Uraian	RKPD Tahun 2025*	Penetapan APBD Tahun 2025**	Pergeseran II APBD Tahun 2025***	Perubahan RKPD Tahun 2025****
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**9.458.189.456.604**	**9.610.526.480.390**	**9.610.526.480.390**	**7.056.918.834.046**
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	4.961.070.254.476	5.074.526.480.390	5.074.526.480.390	4.433.850.834.046
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	4.497.119.202.128	4.536.000.000.000	4.536.000.000.000	2.623.068.000.000
6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**8.814.599.017.265**	**8.681.828.623.430**	**8.681.828.623.430**	**5.883.713.623.430**
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	6.712.928.393.835	6.700.158.000.000	6.700.158.000.000	3.902.043.000.000
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.101.670.623.430	1.981.670.623.430	1.981.670.623.430	1.981.670.623.430
PEMBIAYAAN NETTO		**643.590.439.339**	**928.697.856.960**	**928.697.856.960**	**1.173.205.210.616**

Sumber **) Pergub DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025*
***) Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025*
****) Pergub DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025*
*****) Perubahan RKPD Tahun 2025*

Ringkasan Penetapan APBD Tahun 2025 dan Ringkasan Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah beserta rinciannya secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10
Ringkasan Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Kode	Uraian	RKPD Tahun 2025*	Penetapan APBD Tahun 2025**	Pergeseran II APBD Tahun 2025***	Perubahan RKPD Tahun 2025****
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	**Pendapatan Daerah**	**74.870.693.453.882**	**81.734.364.760.824**	**81.734.832.418.824**	**84.775.823.002.412**
4.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**54.083.756.505.175**	**54.187.749.526.824**	**54.187.749.526.824**	**54.169.078.967.051**
4.1.01.	Pajak Daerah	47.900.000.000.000	48.000.000.000.000	48.000.000.000.000	48.000.000.000.000
4.1.02.	Retribusi Daerah	970.550.610.545	1.449.458.173.488	1.449.458.173.488	1.389.976.917.783
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	774.000.000.000	774.000.000.000	774.000.000.000	774.000.000.000
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	4.439.205.894.630	3.964.291.353.336	3.964.291.353.336	4.005.102.049.268
4.2.	**Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan**	**19.326.007.889.000**	**26.137.337.366.000**	**26.137.805.024.000**	**30.082.649.167.361**
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	19.326.007.889.000	26.137.337.366.000	26.137.805.024.000	30.082.649.167.361
4.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**1.460.929.059.707**	**1.409.277.868.000**	**1.409.277.868.000**	**524.094.868.000**
4.3.01.	Pendapatan Hibah	1.460.929.059.707	1.409.277.868.000	1.409.277.868.000	524.094.868.000
5.	**Belanja Daerah**	**75.514.283.893.221**	**82.663.062.617.784**	**82.663.530.275.784**	**85.949.028.213.028**
5.1.	**Belanja Operasi**	**60.456.389.001.698**	**64.956.846.181.128**	**65.777.425.093.348**	**67.784.280.560.997**
5.1.01.	Belanja Pegawai	20.349.294.894.974	22.316.492.000.507	22.316.492.000.507	21.659.966.088.537
5.1.02.	Belanja Barang/Jasa	28.837.589.431.809	30.367.892.521.018	29.871.303.272.822	31.509.805.245.832

Kode	Uraian	RKPD Tahun 2025*	Penetapan APBD Tahun 2025**	Pergeseran II APBD Tahun 2025***	Perubahan RKPD Tahun 2025****
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.1.03.	Belanja Bunga	158.000.000.000	158.000.000.000	158.000.000.000	158.000.000.000
5.1.04.	Belanja Subsidi	5.603.712.087.924	5.937.791.495.540	5.996.926.356.540	6.998.977.365.514
5.1.05.	Belanja Hibah	2.249.586.751.060	2.912.497.861.652	2.905.557.261.652	2.905.575.731.652
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	3.258.205.835.931	3.264.172.302.411	4.529.146.201.827	4.551.956.129.462
5.2.	**Belanja Modal**	**13.490.217.631.860**	**15.288.810.704.442**	**14.350.080.542.078**	**14.985.139.414.988**
5.3.	**Belanja Tidak Terduga**	**1.199.777.588.143**	**2.049.506.060.694**	**2.168.124.968.838**	**2.811.708.565.523**
5.4.	**Belanja Transfer**	**367.899.671.520**	**367.899.671.520**	**367.899.671.520**	**367.899.671.520**
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	367.899.671.520	367.899.671.520	367.899.671.520	367.899.671.520
	Total Surplus/(Defisit)	**(643.590.439.339)**	**(928.697.856.960)**	**(928.697.856.960)**	**(1.173.205.210.616)**
6.	**Pembiayaan Daerah**				
6.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**9.458.189.456.604**	**9.610.526.480.390**	**9.610.526.480.390**	**7.056.918.834.046**
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	4.961.070.254.476	5.074.526.480.390	5.074.526.480.390	4.433.850.834.046
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	4.497.119.202.128	4.536.000.000.000	4.536.000.000.000	2.623.068.000.000
6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**8.814.599.017.265**	**8.681.828.623.430**	**8.681.828.623.430**	**5.883.713.623.430**
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	6.712.928.393.835	6.700.158.000.000	6.700.158.000.000	3.902.043.000.000
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.101.670.623.430	1.981.670.623.430	1.981.670.623.430	1.981.670.623.430
	Pembiayaan Netto	**643.590.439.339**	**928.697.856.960**	**928.697.856.960**	**1.173.205.210.616**

Kode	Uraian	RKPD Tahun 2025*	Penetapan APBD Tahun 2025**	Pergeseran II APBD Tahun 2025***	Perubahan RKPD Tahun 2025****
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah Pendapatan Daerah + Penerimaan Pembiayaan	**84.328.882.910.486**	**91.344.891.241.214**	**91.345.358.899.214**	**91.832.741.836.458**
	Jumlah Belanja Daerah + Pengeluaran Pembiayaan	**84.328.882.910.486**	**91.344.891.241.214**	**91.345.358.899.214**	**91.832.741.836.458**

Sumber
**) Pergub DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025*
***) Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025*
****) Pergub DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025*
*****) Perubahan RKPD Tahun 2025*

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 4

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



Pada bagian ini dijelaskan mengenai **sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta** yang terdiri atas tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas pembangunan, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan DKI Jakarta.

Pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 merupakan tahapan ketiga dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, RPD tidak disusun berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan yang telah berakhir. Meskipun demikian, RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 tetap mempertimbangkan dan mengakomodasi 6 (enam) Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta 2005–2025, 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020–2024, 5 (lima) Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017–2022, dan 6 (enam) isu strategis tahun 2023-2026. Dalam pelaksanaannya, sebagaimana diamanatkan dalam diktum ke-2 Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022, RPD digunakan oleh Pj. Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 mengacu pada RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 disamping dasar hukum serta dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Gambar 4.1
Pendekatan Perencanaan Pembangunan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Selanjutnya, sebagaimana telah dijelaskan pada BAB I, perencanaan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), dengan:

a. Menjaga kesinambungan melalui penyesuaian terhadap 4 (empat) tujuan, 17 (tujuh belas) sasaran, dan 108 (seratus delapan) strategi utama pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026;
b. Menerapkan prioritas sesuai dengan arah kebijakan pembangunan, diantaranya yaitu pencapaian target indikator makro pembangunan yang belum terselesaikan pada tahun 2024, penyelesaian isu-isu komprehensif seperti kemiskinan dan *stunting*, dan penyelesaian isu strategis serta isu kewilayahan;
c. Memastikan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sasaran prioritas pembangunan provinsi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025;
d. Melibatkan secara aktif *stakeholders* di luar pemerintahan (lima *stakeholders* utama, yaitu masyarakat, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan media) dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan menerapkan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah;
e. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain APBN, APBD Provinsi, CSR, KPBU, hibah, maupun sumber pendanaan lain yang sah untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah; serta
f. Memaksimalkan penerapan sistem informasi baik yang terkoneksi dengan Pemerintah Pusat maupun milik internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Perencanaan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 juga mengacu dan memerhatikan:

a. Prioritas nasional dan pokok-pokok arah kebijakan nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2025;
b. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, isu, dan prioritas pembangunan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026;
c. Hasil evaluasi kinerja RKPD;
d. Tantangan global, nasional, maupun tantangan kewilayahan;
e. Dokumen RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011-2030;
f. Kerangka Ekonomi Daerah serta kerangka pendanaan pembangunan 2025;
g. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs); dan
h. Pembangunan Rendah Karbon.

Gambar 4.2
Kerangka Pikir Perencanaan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025



Sumber: Hasil Analisa Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2024

Pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran pembangunan DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam RPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026. Gambar 4.2 di atas, memperlihatkan bahwa beberapa dokumen perencanaan dan isu strategis yang dalam penentuannya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu hasil evaluasi, tantangan, capaian, dan kondisi kewilayahan termasuk implikasi dari disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi dasar dalam merumuskan Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2025. Kemudian, dalam rangka mencapai target setiap prioritas pembangunan, dirumuskan sejumlah sasaran (diindikasikan dengan indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah), kebijakan, strategi, program dan kegiatan perangkat daerah yang diharapkan dapat mendukung secara langsung ketercapaian setiap prioritas pembangunan daerah. Selain itu, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 juga dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah.

4.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Selain dijadikan sebagai salah satu alat dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi juga dapat menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat

(Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Dalam pelaksanaannya, strategi akan dijabarkan ke dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah, sehingga rumusan strategi perlu memperhatikan keterkaitannya dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan. Mempertimbangkan hal tersebut, dalam konteks pembangunan daerah strategi perlu dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, yang mana strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari para pemangku kepentingan. Adapun arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan daerah.

Arah kebijakan pembangunan daerah dijadikan sebagai panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan pada periode tertentu (jangka panjang, menengah, dan tahunan). Dalam penyusunannya, arah kebijakan pembangunan daerah harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

4.1.1 Arah Kebijakan Nasional Tahun 2025

Kemajuan di berbagai bidang pembangunan telah berhasil dicapai oleh Bangsa Indonesia. Namun demikian, Indonesia sampai dengan saat ini masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) yang diwarnai dengan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok pendapatan. Berbagai tantangan ke depan, seperti pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim perlu menjadi perhatian utama Bangsa Indonesia. Untuk merespon berbagai tantangan tersebut, diperlukan optimalisasi modal dasar yang dimiliki, antara lain bonus demografi, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim. Dengan demikian, cita-cita atau visi 100 tahun Indonesia merdeka atau Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi “Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” dapat terwujud.

Sebagaimana hasil Sidang Pleno Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2024, ditetapkan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode 2025-2029. Visi Indonesia 2045 di atas kemudian diselaraskan ke dalam visi Indonesia untuk periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi sebagaimana dimaksud akan dicapai melalui 8 (delapan) misi, 17 program prioritas, dan 8 (delapan) program hasil terbaik cepat. Mempertimbangkan fondasi ekonomi, sosial, dan politik, pembangunan Indonesia untuk periode 2025-2029 berfokus pada beberapa target utama, yaitu:

a. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju
b. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurangan;
c. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat;
d. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat; dan
e. Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Menurun Menuju *Net Zero Emmision*.

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan target di atas, arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 sebagai fokus utama pembangunan di tahun 2025 adalah:

"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Adapun sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi GRK dengan target sebagai berikut:

Tabel 4.1
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

No	Sasaran Pembangunan	Target 2025	No	Sasaran Pembangunan	Target 2025
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,6	5.	Rasio Gini (Nilai)	0,379 – 0,382
2.	TPT (%)	4,5 – 5,0	6.	Indeks Modal Manusia (Nilai)	0,56
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	7.	Penurunan Intensitas Emisi GRK	38,6
4.	Nilai Tukar Petani (Kumulatif)	113 – 115	8.	Nilai Tukar Nelayanan (Kumulatif)	104 – 105

Sumber: RKP Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan Prioritas Nasional yang merupakan Asta Cita (Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029) sebagai berikut.

a. **Prioritas Nasional 1:**
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

b. **Prioritas Nasional 2:**
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

c. **Prioritas Nasional 3:**
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

d. **Prioritas Nasional 4:**
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

e. **Prioritas Nasional 5:**
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

f. **Prioritas Nasional 6:**
Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

g. **Prioritas Nasional 7:**
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

h. **Prioritas Nasional 8:**
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Dalam pelaksanaannya, setiap Prioritas Nasional didukung oleh berbagai arah kebijakan untuk memastikan bahwa implementasi Prioritas Nasional berjalan terarah dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Arah kebijakan untuk masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

a. Prioritas Nasional 1

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada Prioritas Nasional 1 "*Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)*", dilaksanakan serangkaian arah kebijakan sebagai berikut:

1) penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional
2) penguatan komunikasu publik dan media
3) penguatan lembaga demokrasi
4) penguatan kesetaraan masyarakat sipil
5) pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia.

b. Prioritas Nasional 2

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada Prioritas Nasional 2 "*Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru*", dilaksanakan serangkaian arah kebijakan sebagai berikut:

1) Ekosistem ekonomi sirkular.
2) Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik.
3) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang.
4) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
5) Pembangunan rendah karbon.
6) Pekerjaan hijau/ *green jobs*.
7) Pengelolaan hutan lestari.

c. Prioritas Nasional 3

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada Prioritas Nasional 3 "*Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi*", dilaksanakan serangkaian arah kebijakan sebagai berikut:

1) Pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimedia.
2) Peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik.
3) Pendalaman sektor keuangan.
4) Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi.
5) Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
6) Penguatan ekosistem kreatif berbasis kekayaan intelektual.

d. Prioritas Nasional 4

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada Prioritas Nasional 4 "*Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas*", dilaksanakan serangkaian arah kebijakan sebagai berikut:

1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
2) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
3) Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas.
4) Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.
5) Penguatan sistem tata kelola pendidikan
6) Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematic* (STEAM).
7) Penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi.

8) Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat.
9) Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi.
10) Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat.
11) Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan.
12) Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola.
13) Peningkatan ketangguhan keluarga.
14) Peningkatan kualitas perlindungan anak.
15) Peningkatan kualitas pemuda.
16) Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan.
17) Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia.
18) Peningkatan kontribusi IPTEK dan inovasi dalam pembangunan nasional.
19) Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja.
20) Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN).
21) Peningkatan pembinaan prestasi olahraga.
22) Pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif.

e. Prioritas Nasional 5

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada Prioritas Nasional 5 "*Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri*", dilaksanakan serangkaian arah kebijakan sebagai berikut:

1) Percepatan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan serta penguatan industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, dan berorientasi ekspor.
2) Aglomerasi industri melalui peningkatan investasi di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dan mendukung percepatan hilirisasi.
3) Optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional.
4) Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global.
5) Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global.
6) optimalisasi investasi strategis negara.

f. Prioritas Nasional 6

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada Prioritas Nasional 6 "*Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan*", dilaksanakan serangkaian arah kebijakan sebagai berikut:

1) Sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi.
2) Perlindungan sosial adaptif dan inklusif.
3) Peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif.
4) Percepatan penyediaan perumahan dan permukiman.
5) Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan.
6) Pembangunan perkotaan berkelanjutan.
7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

g. Prioritas Nasional 7

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada Prioritas Nasional 7 "*Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan*", dilaksanakan serangkaian arah kebijakan sebagai berikut:

1) Reformasi politik dan tata kelola pemilu.
2) Reformasi hukum.
3) Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
4) Penguatan kelembagaan, pelayanan, dan penegakan hukum.
5) Transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal*.
6) Penerapan prinsip meritrokasi dan reformasi manajemen ASN.
7) Pemerintah digital.
8) Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan.
9) Penataan desentralisasi dan otonomi daerah.
10) Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia.
11) Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
12) Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
13) Optimalisasi pendapatan negara.
14) Optimalisasi belanja negara.
15) Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan.
16) Pengendalian inflasi.

h. Prioritas Nasional 8

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada Prioritas Nasional 8 "*Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur*", dilaksanakan serangkaian arah kebijakan sebagai berikut:

1) Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat.
2) Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan kerakter bangsa.
3) Pembangunan berketahanan iklim.
4) Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna.

Adapun kemudian, transisi estafet pembangunan perlu dilakukan secara akseleratif untuk menjaga kesinambungan kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada RKP Tahun 2025 disusun 18 program yang menjadi penekanan, termasuk di dalamnya 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat, yang memuat inisiatif untuk menghasilkan *output* signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan, yaitu sebagai berikut:

a. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
b. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
c. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
d. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
e. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
f. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI.
g. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
h. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

4.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Selama dua dekade terakhir, Provinsi DKI Jakarta telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek pembangunan. Perekonomian Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 15 tahun terakhir terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 5,4% setiap tahunnya, begitu pula dengan PDRB per kapita yang juga mengalami peningkatan signifikan dengan rata-rata pertumbuhan 11,14% setiap tahunnya. Kemudian, dari sisi sumber daya manusia, capaian IPM Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun terakhir telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Capaian tersebut kemudian diikuti dengan angka pengangguran yang terus menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, serta perbaikan tingkat pendidikan masyarakat. Keberhasilan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud, tidak lepas dari proses perencanaan pembangunan yang baik.

RKPD tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan jangka tahunan Provinsi DKI Jakarta yang juga menjadi dokumen perencanaan tahun ketiga dari pelaksanaan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Sebagaimana diketahui, konsep RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 adalah "Jakarta: Kota Untuk Semua" yang merupakan konsep kota yang seimbang dan mempromosikan inklusivitas dimana semua warga dapat merasakan manfaat dan mempunyai hak yang sama untuk tinggal di kota (*right to the city*) guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya, serta berpartisipasi langsung dalam pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dirumuskan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

a. 6 (enam) misi RPJPD DKI Jakarta Tahun 2005-2025;
b. 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024;
c. 5 (lima) misi RPJMD DKI Jakarta Tahun 2017-2022;
d. 6 (enam) isu-isu strategis Tahun 2023-2026.

Gambar 4.3
Skema Tujuan dan Sasaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026



Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Selanjutnya, berdasarkan 4 (empat) konsideran tersebut, teridentifikasi 4 (empat) dimensi:

1. **Lingkungan Bangun (*Built Environment*)**
   Dimensi perencanaan terkait ruang fisik kota yang dibangun dalam rangka menyediakan sarana bagi segala kegiatan manusia dalam bertinggal dan berusaha.
2. **Perekonomian (*Economic*)**
   Dimensi perencanaan yang menyentuh upaya-upaya manusia dalam meningkatkan derajat hidupnya melalui kegiatan-kegiatan bernilai ekonomi.

3. **Manusia (*Human*)**
   Dimensi perencanaan yang berkaitan dengan kualitas kehidupan dan interaksi manusia dengan sesama.
4. **Pemerintahan (*Governance*)**
   Dimensi perencanaan yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi hak-hak warga dalam bertinggal di kota dan menjamin akses serta kolaborasi pembangunan yang inklusif.

Masing-masing dimensi tersebut kemudian dielaborasi menjadi 4 (empat) tujuan dan 17 sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dijabarkan sebagai berikut:

a. Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan dengan 4 (empat) sasaran:
   1. Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas;
   2. Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon;
   3. Peningkatan Stabilitas dan Ketahanan Kota;
   4. Perbaikan Pola Aktivitas - Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit.

b. Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan, dengan 4 (empat) sasaran:
   1. Penguatan Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi;
   2. Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial;
   3. Peningkatan Kesempatan, Pemberdayaan, dan Adaptabilitas Tenaga Kerja;
   4. Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah.

c. Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan, dengan 4 (empat) sasaran:
   1. Pemerataan Kesempatan Pendidikan Untuk Semua dan Edukasi Terkait Pembelajaran Sepanjang Hayat;
   2. Penguatan Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat;
   3. Peningkatan Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan;
   4. Penurunan Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender.

d. Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas, dengan 5 (lima) sasaran:
   1. Akselerasi Transformasi Digital dan Pengembangan Manajemen Kota Cerdas;
   2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel;
   3. Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur;
   4. Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat;
   5. Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah.

Seluruh tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun selama periode RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Pencapaian 17 sasaran pembangunan tersebut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025 dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Administratif/Kabupaten Administratif, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan akademisi.

Dalam rangka memantapkan tujuan dan sasaran pembangunan DKI Jakarta tahun 2023-2026 perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta serta mendukung pembangunan nasional yang dalam hal ini berupa arah kebijakan pembangunan. Adapun arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam dokumen RPD untuk tahun 2025 adalah:

"Penguatan Ketahanan Kota Melalui Pembangunan yang Merata, Inklusif, dan Berkelanjutan"

Ketahanan kota itu sendiri didefinisikan sebagai kapasitas individu, masyarakat, institusi, bisnis, dan sistem dari sebuah kota untuk bisa bertahan, beradaptasi, dan tumbuh terhadap tekanan (*stress*). Fokus terhadap penguatan ketahanan kota inilah yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025.

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, strategi disusun sebagai langkah yang ditempuh oleh seluruh perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta yang berisi program indikasi untuk mewujudkan dimensi dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPD adalah "Terbangunnya Warga dan Ekosistem Warga Kota yang Setara, Sejahtera, dan Bahagia Dilandasi Semangat Gotong-Royong" dengan penjabaran sbb:

Tabel 4.2
Sasaran Pembangunan dan Strategi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

No	Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan
(1)	(2)	(3)
TUJUAN: Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan		
1.	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	a. Optimalisasi kapasitas sistem penanganan persampahan. b. Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan rencana induk ruang terbuka hijau. c. Evaluasi tata ruang dalam mencapai tertib pertanahan. d. Peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan permukiman yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan. e. Peningkatan dan pemeliharaan perumahan rakyat beserta sarana prasarananya. f. Penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air limbah. g. Penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air minum.
2.	Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	a. Pembangunan yang berorientasi pada pembangunan hijau dan ramah disabilitas. b. Pengintegrasian upaya pencegahan pencemaran lingkungan melalui kebijakan dan aturan. c. Penurunan beban pencemaran lingkungan. d. Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau. e. Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi. f. Peningkatan ketaatan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh kegiatan usaha. g. Peningkatan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. h. Peningkatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem laut, pesisir dan pulau pulau kecil serta peningkatan pemberdayaan masyarakat. i. Pengembangan perikanan budidaya dan tangkap. j. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penegakan aturan hukum terkait pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

No	Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan
(1)	(2)	(3)
		k. Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. l. Pembangunan/ Penataan / Penghijauan Hutan. m. Inventarisasi dan tindak lanjut laporan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. n. Pemberian pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan tentang kehutanan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan SDM Dinas. o. Inventarisasi dan koordinasi terkait standarisasi pengelolaan DAS. p. Pengembangan penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan. q. Peningkatan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota.
3.	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	a. Pengurangan dampak banjir. b. Pengurangan genangan air. c. Penegakan perda/perkada secara yustisial dan non yustisial. d. Pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam maupun non alam. e. Optimalisasi perangkat kebijakan di bidang penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. f. Pengawasan dan pemantauan pemanfaatan air tanah dalam upaya pengendalian penurunan muka tanah.
4.	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	a. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur bina marga. b. Peningkatan kualitas penataan ruang. c. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan pemberlakuan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. d. Peningkatan pelayanan terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) dan pengawasan badan usaha angkutan perairan. e. Perumusan kebijakan dan memberikan rekomendasi terkait penyelenggaraan perkeretaapian.
TUJUAN: Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan		
5.	Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial	a. Peningkatan kualitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia penyelenggara kesejahteraan sosial. b. Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). c. Pemberian Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tepat sasaran kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). d. Penanganan bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi korban bencana alam dan sosial.

No	Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan
(1)	(2)	(3)
		e. Peningkatan jumlah kecamatan yang tahan pangan. f. Pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/ pemasaran. g. Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan, hasil pertanian, perikanan dan peternakan. h. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan kewirausahaan terpadu (Jakpreneur).
6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	a. Peningkatan kualitas pengelolaan, pelayanan produk, dan daya tarik pariwisata. b. Peningkatan pemasaran dan informasi pariwisata secara sinergis, intensif, inovatif, dan interaktif. c. Peningkatan kerja sama kelembagaan secara profesional, efektif, efisien, produktif, serta pemberdayaan, penguatan dukungan, dan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif. d. Pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. e. Peningkatan produksi pertanian, peternakan,susu, daging, olahan hasil pertanian peternakan dan pelayanan kesehatan hewan serta pengembangan pertanian perkotaan/urban farming. f. Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan melalui *Online Single Submission Risk Based Approached* (OSS-RBA). g. Pelaksanaan operasi pasar, pemantauan dan pelaporan harga. h. Peningkatan ekspor dan pengendalian impor. i. Peningkatan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga. j. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. k. Peningkatan produktivitas industri dan IKM.
7.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	a. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja. b. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi. c. Penguatan SDM pengelola dan pengawas koperasi. d. Pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan dan kewirausahaan, pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
8.	Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	a. Pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal. b. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal. c. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal. d. Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif.

No	Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan
(1)	(2)	(3)
		e. Penguatan kerja sama dalam rangka pemanfaatan cagar budaya. f. Penguatan peran dan tata kelola permuseuman. g. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan budaya literasi. h. Pendataan, pengolahan, preservasi, pengalih mediaan, dan/atau akuisisi naskah kuno. i. Penguatan kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha. j. Penguatan tata kelola inovasi daerah.
TUJUAN: Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan		
9.	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	a. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang.
10.	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	a. Implementasi transformasi pelayanan kesehatan yang adaptif dan terintegrasi. b. Pemenuhan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan dan optimalisasi implementasi *hospitality*. c. Pemenuhan dan peningkatan kualitas produk sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta pengawasan keamanan makanan dan minuman. d. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk. e. Penyediaan dukungan sarana, prasarana, dan tenaga pelayanan keluarga berencana yang berkualitas dan memadai. f. Penguatan pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan masyarakat. g. Peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan. h. Peningkatan daya saing olahraga. i. Pembentukan anggota pramuka yang berjiwa patriotik, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup melalui peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan organisasi kepramukaan.
11.	Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	a. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. b. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk TPPO. c. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak. d. Peningkatan pengelolaan sistem data gender dan anak yang berkualitas, mutakhir dan terpadu. e. Peningkatan advokasi dan koordinasi tentang pemenuhan hak anak pada lembaga/ organisasi/ kelompok/ *stakeholder*. f. Peningkatan advokasi dan koordinasi tentang perlindungan bagi kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).
12.	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	a. Peningkatan kualitas layanan kepada anggota dewan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. b. Penguatan ideologi pancasila.

No	Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan
(1)	(2)	(3)
		c. Peningkatan kesadaran politik dan demokrasi. d. Peningkatan pemberdayaan ormas. e. Pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama. f. Peningkatan pemahaman masyarakat terkait pencegahan dan penanganan konflik sosial di masyarakat.
TUJUAN: Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas		
13.	Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	a. Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk peningkatan cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil. b. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan penyajian profil kependudukan. c. Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan.
14.	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	a. Peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan informasi dan komunikasi publik. b. Peningkatan kualitas layanan TIK. c. Peningkatan penggunaan data dalam proses perencanaan pembangunan di daerah. d. Peningkatan manajemen keamanan informasi.
15.	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	a. Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. b. Peningkatan kualitas dan efektivitas penataan Peraturan Perundang-Undangan dan advokasi hukum. c. % pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan. d. Percepatan penyelesaian rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal (BPK RI). e. Peningkatan kebijakan, pendampingan dan asistensi dalam mewujudkan kapabilitas APIP level 4.
16.	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	a. Pengembangan sistem informasi serta perbaikan standar pelayanan pengadaan barang/jasa. b. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. c. Peningkatan penyusunan dan pengelolaan standar harga satuan barang milik daerah. d. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.
17.	Tercapainya Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	a. Peningkatan kualitas sistem manajemen ASN. b. Peningkatan pengembangan SDM.

Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

Ke-17 sasaran dan 108 strategi pembangunan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam tabel 4.2 di atas akan dilaksanakan pada tahun 2025. Sasaran dan strategi pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 telah selaras dengan sasaran dan strategi pembangunan jangka menengah sebagaimana tercantum dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yang dalam pelaksanaannya akan didukung oleh berbagai program pembangunan, yang nantinya implementasi dari sasaran, strategi, dan program tersebut diharapkan dapat mendukung ketercapaian pembangunan tahun 2025 serta ketercapaian pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta.

4.2 Jakarta dalam Konteks Kota Global

Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi dasar hukum pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur. IKN diharapkan dapat menjadi "pusat gravitasi" ekonomi baru di Indonesia, termasuk di kawasan tengah dan timur Indonesia. Oleh karena itu, perpindahan IKN memberikan dampak bagi DKI Jakarta, yaitu perubahan status dan kedudukannya. Pasca pemindahan IKN, DKI Jakarta diarahkan menjadi pusat perekonomian nasional dan kota bisnis berskala global yang membuat DKI Jakarta akan berfungsi sebagai simpul utama dalam jaringan ekonomi dunia yang memiliki hubungan mengikat dengan kota-kota lain serta memiliki dampak langsung dan nyata pada urusan sosial ekonomi global. Maka, DKI Jakarta membutuhkan beberapa kekhususan yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang mengamanatkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan daerah otonom pada tingkat provinsi yang berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global. Dalam hal ini, Provinsi Daerah Khusus Jakarta berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global.

Amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tersebut sejalan dengan hasil evaluasi RPJPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2005-2025, yang mana dalam penyusunan dokumen RPJPD periode selanjutnya, DKI Jakarta perlu mempersiapkan target pembangunan jangka panjang yang dapat bersaing secara global. Diskursus tentang kota global pada hakekatnya telah banyak dilakukan oleh berbagai institusi, akademisi, maupun praktisi internasional. Menurut Saskia Sassen (2006), kota global merupakan simpul utama dari berbagai kota-kota di dunia dan memiliki hubungan yang mengikat dengan kota-kota lain, serta memiliki dampak langsung pada urusan sosio-ekonomi global. Menurut Derek Gregory et.al (2009), kota global adalah simpul utama dalam organisasi ekonomi dunia sebagai pusat-pusat kendali ekonomi, produksi dan perdagangan, perputaran informasi, dan transmisi budaya, serta kekuatan politik. Menurut Greg Clark (2016), Kota global dicirikan oleh beberapa kondisi, yaitu sebagai kota yang: (1) mendukung dan memiliki spesialisasi dari sektor yang diperdagangkan; (2) menarik dan mempertahankan wirausaha dengan populasi yang beragam; (3) mendorong inovasi untuk menciptakan pengaruh; (4) terdepan dalam penciptaan pasar, rute, produk, atau layanan baru; dan (5) memiliki keunggulan geopolitik. Berdasarkan definisi dari para pakar tersebut, maka kota global diarahkan kepada "sebuah kota yang memiliki peran penting dalam pengitegrasian ekonomi transnasional (menjadi *primary node* dalam jaringan ekonomi dunia) yang mampu menarik modal, barang, sumber daya manusia, gagasan, serta informasi secara global".

Berdasarkan definisi kota global di atas, dan melihat perkembangan serta capaian pembangunan DKI Jakarta, saat ini DKI Jakarta sudah menjadi bagian dari Kota Global. Walaupun demikian, DKI Jakarta belum dapat berdiri sejajar atau bersaing dengan kota-kota global lainnya di dunia. Hal tersebut terlihat dari posisi DKI Jakarta yang masih menduduki peringkat rendah berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan beberapa lembaga internasional dengan masing-masing pendekatan serta indikator penilaian yang berbeda. Beberapa indeks kota global yang diterbitkan antara lain: (1) *Global City Index* (GCI) oleh AT Kearney; (2) *Global Power City Index* (GPCI) oleh *The Mori Foundation*; (3) *Economic Intelligence* (EIU) *Livability Index* oleh EIU; dan (4) *Cities in Motion Index* (CIMI) oleh *Center for Globalization and Strategy* dan IESE *Business School*. Dari empat indeks kota global tersebut, posisi DKI Jakarta dibandingkan kota global lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3
Peringkat DKI Jakarta dalam Indeks Kota Global

Index	Variabel dan Indikator	Peringkat
(1)	(2)	(3)
Global City Indeks (GCI)	*Business Activity; Human Capital; Information Exchange; Cultural Experience; and Political Engagement* (total 29 indikator)	Tahun 2023 Jakarta peringkat 74 dari 156 kota
Global Power City Indeks (GPCI)	*Economy; Research and Development; Cultural Interaction; Livability; Environtment; and Accesibility* (total 68 indikator)	Tahun 2022 Jakarta peringkat 45 dari 48 kota
Economic Intellegence Unit (EIU) *Livability Index*	*Stability; Healthcare; Cultural and Environtment; Education; Infrastructure* (total 30 indikator)	Saat ini secara keseluruhan Jakarta berada di 139 dari 173 kota
Cities in Motion Index	*Economy; Social Cohesion; Environment; Human Capital; Governance; Mobility and Transportation; Urban Planning; International Profile; Technology* (total 103 indikator)	Tahun 2022 Jakarta peringkat 152 dari 183 kota

Sumber: RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, dapat terlihat bahwa dari masing-masing indeks, posisi DKI Jakarta saat ini masih belum cukup kompetitif. Oleh karena itu, dari definisi kota global beserta berbagai variabel dan indikator pembentuknya, dalam 20 tahun kedepan, DKI Jakarta diarahkan untuk menjadi kota global yang berdaya saing dan dapat berdiri sejajar dengan kota-kota global lain di dunia. Beberapa karakteristik yang berhasil dirumuskan untuk DKI Jakarta sebagai kota global adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4
Karakteristik Kota Global yang Berdaya Saing

Parameter	Karakteristik
(1)	(2)
Ekonomi yang Mapan dan Terkoneksi Secara Global	1. Memiliki skala ekonomi yang berdaya saing. 2. Memiliki potensi (iklim) pengembangan ekonomi yang baik. 3. Memiliki sumber daya tenaga kerja yang kompetitif, dan terhubung secara global (ditunjukkan dengan keberadaan perusahaan internasional skala besar).
Kapasitas Riset dan Inovasi yang Baik dan Menerus	1. Memiliki hasil riset dan inovasi dengan kuantitas dan kualitas yang mumpuni. 2. Memiliki iklim yang mendukung penciptaan riset dan inovasi, memiliki lembaga riset (termasuk universitas) yang kompetitif secara global.
Ruang yang Nyaman untuk Dihuni	1. Memiliki kelengkapan infrastruktur dasar perkotaan yang baik. 2. Kondisi keamanan dan konflik sosial yang terkendali. 3. Kemudahan dalam memenuhi penghidupan. 4. Biaya hidup terjangkau. 5. Kualitas sumber daya manusia yang baik (kesehatan dan pendidikan). 6. Kemudahan dalam mengakses informasi.
Pariwisata dan Interaksi Budaya yang Menarik untuk Wisatawan Berkunjung	1. Memiliki daya tarik wisata dan budaya. 2. Memiliki kualitas untuk menerima *event-event* internasional (konser, event olahraga). 3. Memiliki infrastruktur wisata (stadion, museum, teater).

Parameter	Karakteristik
(1)	(2)
	4. Memiliki fasilitas penunjang wisata yang memadai (hotel, restoran, hiburan malam, dll).
Lingkungan yang Bersih, Nyaman dan Berkelanjutan	1. Memiliki kualitas lingkungan yang baik, berketahanan terhadap perubahan iklim, dan mengarah pada keberlanjutan.
Aksesibilitas yang Terkoneksi Secara Intra dan Inter Kota	1. Memiliki kemudahan diakses oleh penduduk negara lain. 2. Memiliki kemudahan dan pilihan moda transportasi dalam kota, nyaman dan bebas hambatan bermobilitas di dalam kota.

Sumber: RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045

Karakteristik yang tertuang dalam enam parameter tersebut memiki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi serta dipengaruhi satu sama lain. Untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, perlu perencanaan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Namun, dengan kondisi DKI Jakarta saat ini dan karakteristik kota global yang ingin diwujudkan, masih terdapat *gap* yang perlu menjadi perhatian utama, yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.5
***Gap* Kondisi Jakarta dan Kota Global**

Variabel	Komponen	Data Dukung			
		Indikator	Jakarta	Kota Lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aksesibilitas yang terkoneksi secara inter dan intra kota	Rendahnya penggunaan transportasi publik	*Mode share* transportasi publik (%)	18,80%	Singapura	61%
				Tokyo	61,70%
				Shanghai	43,30%
		Pergerakan metropolitan menggunakan kendaraan pribadi (%)	90,30%	Greater London	42%
	Panjangnya waktu tempuh akibat kemacetan	Rata-rata jarak dan waktu tempuh perjalanan menuju sekolah/tempat kerja (km / menit)	17 km / 52 menit	Tokyo dan Singapura	14,5 km / 41 menit
				Bangkok	15,84 km / 45 menit
		Rata-rata waktu yang dihabiskan selama *rush hour* akibat kemacetan (jam)	169 jam	Tokyo	193 jam
				Bangkok	136 jam
				London	134 jam
				New York	114 jam
	Konektivitas menuju bandara belum optimal	Waktu tempuh dari bandara ke pusat kota dan *headway* kereta bandara (menit)	52 menit/ 30 menit	Bangkok	26 menit / 10-15 menit
				Singapura	34 menit / 7-12 menit
	Rendahnya konektivitas Jakarta terhadap kota- kota dunia lainnya	Jumlah penerbangan *direct* internasional ke dan dari Jakarta (kota)	37 Kota	Bangkok	83 kota
				Singapura	116 kota
				New York	126 kota
				London	365 kota
Kapasitas Riset dan Inovasi yang menerus	Kualitas pendidikan tinggi sebagai pintu gerbang riset dan inovasi belum berdaya saing	Jumlah universitas top 1000's dunia	1	London	> 15
				Bangkok	4
				Singapura	2 (rank 19 dan 32)
		Jumlah pelajar internasional di	5772 siswa	London	>100.000 siswa

Variabel	Komponen	Data Dukung			
		Indikator	Jakarta	Kota Lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		universitas top 1000's dunia (siswa)		Singapura	14.492 siswa
				Bangkok	3.079 siswa
	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya riset Jakarta	Jumlah tenaga riset / 1 juta penduduk	3.375/1 juta penduduk	Beijing	15.075/ 1 juta penduduk
				Seoul	15.483/1 juta penduduk
				London	13.104/ 1 juta penduduk
				Singapura	7.225/ 1 juta penduduk
		Skor h-index (*national level*)	8,12	London	39,02
				New York	16,12
				Seoul	14,07
	Iklim riset belum optimal dalam mendukung penciptaan inovasi dan pengembangan bisnis	Jumlah paten yang diberikan	9.970	Cina	798.347
				US	323.410
				Jepang	201.420
				Korea Selatan	135.180
				Jerman	23.592
		Jumlah *start-up*	377	New York	25.000
				Singapura	4.000
				Tokyo	1.200
				Shanghai	971
		Pengeluran riset (USD)	USD 50,8 juta	Seoul	USD 10,4 miliar
				Singapura	USD 6,6 miliar
Ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global	Produktivitas ekonomi di Jakarta belum cukup bersaing dengan kota-kota global lainnya di dunia	PDRB per kapita	USD 17.966	New York	USD 122.980
				Tokyo	USD 88.322
				Singapura	USD 59.828
		Tingkat Pengangguran Terbuka	7,18% (377 ribu jiwa)	Singapura	1,90%
				Tokyo	2,70%
				New York	5,30%
	Iklim usaha dan investasi di Jakarta belum kondusif dibandingkan dengan kota-kota global lainnya	*Ease of Doing Business score*	82,2	China	94,1
				Malaysia	92,4
				Thailand	83,3
		Top 500 *Company*	1	Tokyo	50
				New York	53
				Beijing	18
	Kualitas SDM yang masih rendah	*Global Talent Competitiveness*	Peringkat 13	Singapore	6
				New York	23

Variabel	Komponen	Data Dukung			
		Indikator	Jakarta	Kota Lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Index	dengan *score* 30,1	Seoul	68
Lingkungan yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan	Kualitas lingkungan hidup di wilayah Jakarta yang masih belum baik	Nilai AQI US	102 (per 5 Januari 2024)	Brusseis	27 (per 5 Januari 2024)
		Persentase luas RTH	5,21%	Tokyo	30%
				Shanghai	38,15%
				Singapura	46,50%
	Sistem pengelolaan sampah yang di Jakarta yang belum efisien untuk menopang pembangunan berkelanjutan	Persentase tingkat daur ulang sampah	26,11%	Brussei	39%
				Singapura	52%
				Beijing	87%
	Masih terdapat penduduk Jakarta yang tinggal di kawasan kumuh	Persentase penduduk tinggal di permukiman kumuh	23%	Seoul	0,02%
				Tokyo	2%
				Bangkok	20%
	Pengelolaan energi yang berkelanjutan belum maksimal	Bauran EBT	0,32%	Beijing	10,40%
				Tokyo	13,70%
				Paris	25,30%
	Sistem pengelolaan air bersih di Jakarta belum menyeluruh	Persentase cakupan layanan	66,73%	Singapura	100%
				London	99,82%
				Seoul	99,19
	Pengelolaan sanitasi dan pengelolaan air limbah masih terbatas	Persentase cakupan layanan	21,18%	Seoul	85%
				Tokyo	100%
				London	100%
Ruang yang Nyaman untuk dihuni	Tingginya tingkat kriminalitas serta belum ramah terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, dan disabilitas)	Jumlah Kriminalitas	8.112	Sydney	6.588
				Melbourne	5.536
				Tokyo	230
	Pembangunan dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah akibat *mismatch* keterampilan dan minimnya keahlian	Angka Harapan Hidup	73,22 tahun	Brussels	81,7 tahun
				Singapura	83 tahun
		Tingkat Pengangguran	7,18%	Singapura	2,76%
				Amsterdam	4,08%
		Indeks Pembangunan Manusia	81,65	Singapura	0,939
				Jepang	0,925

Variabel	Komponen	Data Dukung			
		Indikator	Jakarta	Kota Lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	berdaya saing global			Inggris	0,929
	Kualitas pendidikan yang tidak berdaya saing	Rata-rata Lama Sekolah	11,31 tahun	Singapura	13,9 tahun
				Tokyo	13 tahun
		Peringkat PISA	216	Sydney	64
				Singapura	1
				London	70
Budaya dan wisata yang menarik wisatawan untuk berkunjung	Minimnya daya tarik wisata dan budaya	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	1.963.059 wisatawan	Paris	36,9 juta wisatawan
				Bangkok	22,78 juta wisatawan
				Singapura	13,6 juta wisatawan
		Jumlah PDRB Pariwisata	143 triliun	Bangkok	152 triliun
				Singapura	143 triliun
	Belum optimalnya infrastruktur wisata	Jumlah Museum	63 museum	Seoul	130 museum
				New York	240 museum

Sumber: RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045

Sebagaimana tabel di atas, diketahui bahwa masih cukup banyak tantangan besar yang harus diselesaikan oleh DKI Jakarta untuk mencapai Jakarta sebagai Kota Global. Beberapa tantangan tersebut antara lain kepadatan penduduk, kurangnya tenaga kerja terampil, permukiman kumuh, kemacetan, polusi udara, pengelolaan persampahan, akses air bersih, pengelolaan limbah, tingginya risiko bencana alam (banjir, rob, dan penurunan tanah), serta tantangan perubahan iklim. Selain itu, sebagai kota global, Jakarta harus mampu bersaing untuk memiliki perekonomian yang kuat sehingga memungkinkan Jakarta untuk menjadi *primary node* dalam jaringan perekonomian dunia. Jakarta juga harus mampu menyediakan lingkungan yang nyaman untuk dihuni oleh warga lokal maupun internasional, serta mampu memperkenalkan budaya Jakarta di mata dunia. Hal tersebut dikarenakan dalam 20 tahun ke depan, Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat mampu berada di jajaran Top 10 Kota Global Dunia. Oleh karena itu, melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2025 – 2045, cita-cita untuk mencapai "Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan" akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Untuk mencapai cita-cita dan/atau visi tersebut, dirumuskan 8 (delapan) misi sebagai perwujudan visi Jakarta 2045, yaitu:

a. Transformasi Sosial: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jakarta yang Unggul, Produktif, dan Sejahtera;
b. Transformasi Ekonomi: Mewujudkan Ekonomi Jakarta yang Inklusif, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan;
c. Transformasi Tata Kelola: Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik Jakarta yang Berkualitas, Harmonis, Adaptif, dan Berintegritas;
d. Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi Makro, dan Pengaruh Jakarta di Kancah Global;
e. Mewujudkan Jakarta yang Layak Huni melalui Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis;
f. Mewujudkan Pembangunan Wilayah Jakarta yang Merata dan Berkeadilan;

g. Mewujudkan Infrastruktur Jakarta yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
h. Mewujudkan Pembangunan Jakarta yang Sinergis dan Berkesinambungan.

Selain itu, terdapat 4 (empat) tahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sebagai pedoman dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan. Adapun kesinambungan antara visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang DKI Jakarta adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang DKI Jakarta Tahun 2025-2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jakarta yang Unggul, Produktif, dan Sejahtera	Pemenuhan Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial	Penguatan Landasan Pembangunan menuju Sumber Daya Manusia Jakarta Berdaya Saing Global	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan Bertaraf Global	Perwujudan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Global
	Mewujudkan Ekonomi Jakarta yang Inklusif, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan	Penguatan Landasan Ekonomi Produktif berbasis Riset dan Inovasi yang Berkelanjutan	Akselerasi Pembangunan Ekosistem Ekonomi yang Berorientasi pada Daya Saing Global	Perluasan Peran Ekonomi Jakarta di Tingkat Global dan Transisi menuju Ekonomi Hijau	Perwujudan Ekonomi Jakarta yang Inklusif, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan berbasis Riset dan Inovasi
	Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik Jakarta yang Berkualitas, Harmonis, Adaptif, dan Berintegritas	Peningkatan Kapasitas dan Integritas Aparat Pemerintahan	Peningkatan Responsivitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi	Peningkatan Kualitas Regulasi dan Pelayanan Publik yang Mewadahi Kebutuhan Transisi menuju Kota Global	Perwujudan Regulasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik yang Berkualitas, Harmonis, Adaptif, dan Berintegritas
	Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi Makro, dan Pengaruh Jakarta di Kancah Global	Penguatan Keamanan Daerah, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi Makro, dan Pengaruh Jakarta	Pemantapan Keamanan Daerah, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi Makro, dan Pengaruh Jakarta	Pemeliharaan Keamanan Daerah, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi Makro, dan Pengaruh Jakarta	Perwujudan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi Makro, dan Pengaruh Jakarta di Kancah Global
	Mewujudkan Jakarta yang Layak Huni melalui Ketahanan	Penguatan Landasan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan Perlindungan Hak Dasar Sosial Budaya dan Pemulihan	Aktualisasi Jakarta Berketahanan Sosial dan Ekologi yang Mampu	Perwujudan Jakarta Kota Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Adaptif

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sosial Budaya dan Ekologis	sebagai Modal Dasar Pembangunan	Kualitas Lingkungan	Mewadahi Aktivitas Kota Global	terhadap Perubahan

Sumber: RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045

Selanjutnya, dari 5 (lima) misi tersebut akan dilaksanakan melalui 17 sasaran pokok pembangunan. Sasaran pokok pembangunan merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam mewujudkan Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan. Penjabaran untuk masing-masing sasaran pokok tersebut, yaitu:

a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jakarta yang Unggul, Produktif, dan Sejahtera
   (1) Terwujudnya Masyarakat Jakarta yang Sehat dan Menyeluruh
   (2) Terwujudnya Masyarakat Jakarta yang Berkeadilan Tinggi, Unggul, dan Bermartabat
   (3) Terwujudnya Masyarakat Jakarta Tangguh dan Terlindungi secara Sosial yang Inklusif serta Berkeadilan

b. Mewujudkan Ekonomi Jakarta yang Inklusif, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan
   (1) Terciptanya Produktivitas Ekonomi Jakarta yang Berdaya Saing Berbasis IPTEK dan Inovasi
   (2) Terwujudnya Ekonomi Jakarta yang Maju, Merata, dan Berkelanjutan
   (3) Terwujudnya Ekosistem Digital Jakarta yang Adaptif dan Berdaya Saing Global
   (4) Terwujudnya Ekonomi Jakarta yang Terintegrasi secara Domestik dan Global
   (5) Teruwjudnya Keberlanjutan Peran Jakarta sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

c. Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik Jakarta yang Berkualitas, Harmonis, Adaptif, dan Berintegritas
   (1) Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif

d. Mewujudkan Stabilitas Jakarta yang Tangguh dan Berpengaruh di Kancah Global
   (1) Terciptanya Jakarta yang Aman, Damai, dan Pastisipatif
   (2) Terciptanya Ekonomi Jakarta yang Stabil, Kuat, dan Mandiri
   (3) Terwujudnya Jakarta yang Berpengaruh di Kancah Global

e. Mewujudkan Jakarta yang Layak Huni melalui Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis
   (1) Terwujudnya Jakarta yang Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
   (2) Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Pemuda yang Produktif
   (3) Terwujudnya Lingkungan Jakarta yang Berkualitas dan Berkelanjutan
   (4) Terwujudnya Jakarta Berketahanan Energi, Air, dan Berkemandirian Pangan
   (5) Terwujudnya Jakarta yang Tangguh dan Berketahanan terhadap Bencana serta Perubahan Iklim.

4.3 Jakarta Rendah Karbon untuk Ketahanan Iklim

Pembangunan rendah karbon merupakan *platform* baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan dengan emisi gas rumah kaca rendah dan penggunaan sumber daya alam yang efisien. Pembangunan rendah karbon merupakan salah satu strategi transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai visi Indonesia maju 2045 dan mencapai nol emisi pada tahun 2060. Fokus perencanaan pembangunan rendah

karbon adalah keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penurunan emisi gas rumah kaca (karbon). Dalam konteks pembangunan di Indonesia, transformasi ekonomi menjadi ekonomi hijau dapat dijadikan sebagai salah satu strategi agar Indonesia dapat keluar dari "*middle income trap*", yang mana ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Oleh sebab itu kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, yang terdiri dari pemerintah, masyarakat sipil (CSO), dan warga lokal, sangat penting untuk mendorong suksesnya pembangunan rendah karbon.

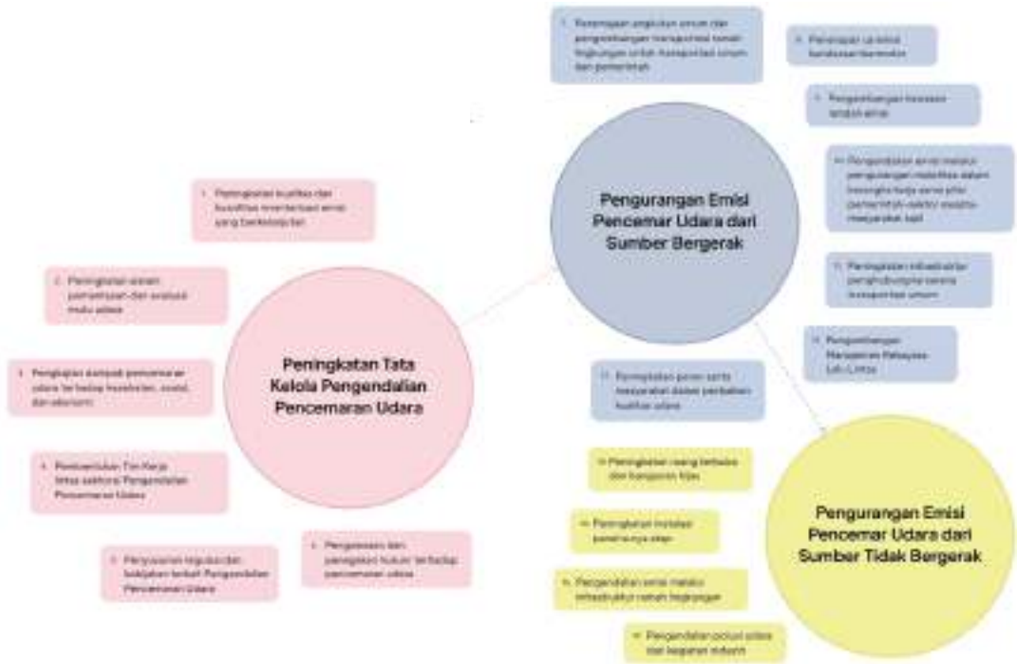
Pemerintah Pusat melalui Kementerian PPN/Bappenas telah menyiapkan 3 (tiga) strategi utama pembangunan rendah karbon sebagai bagian penting dari implementasi Ekonomi Hijau, yaitu: (1) Kebijakan *Net Zero Emissions* untuk menurunkan emisi gas rumah kaca; (2) Stimulus Hijau untuk pemulihan ekonomi; serta (3) Implementasi Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon untuk memenuhi target RPJMN. Selanjutnya, dalam implementasinya, pembangunan rendah karbon juga diharapkan dapat menjawab isu pada 3 (tiga) pilar TPB, yaitu: (1) lingkungan, melalui pengurangan emisi gas rumah kaca; (2) pertumbuhan ekonomi; dan (3) sosial melalui pengurangan kemiskinan. Dari 17 (tujuh belas) tujuan dalam TPB, setidaknya terdapat 11 (sebelas) tujuan yang terkait langsung dan diharapkan dapat dicapai melalui kebijakan pembangunan rendah karbon sebagai berikut:

a. **Tujuan 1**: Tanpa Kemiskinan, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
b. **Tujuan 2**: Tanpa Kelaparan, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
c. **Tujuan 6**: Air Bersih dan Sanitasi, yaitu menjamin ketersediaan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
d. **Tujuan 7**: Energi Bersih dan Terjangkau, yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua;
e. **Tujuan 8**: Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, yaitu meningkatkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
f. **Tujuan 9**: Industri, Inovasi dan Infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
g. **Tujuan 11**: Kota yang Berkelanjutan dan Komunitas, yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
h. **Tujuan 12**: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
i. **Tujuan 13**: Tindakan terhadap Iklim, yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
j. **Tujuan 14**: Kehidupan di Bawah Air, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan;
k. **Tujuan 15**: Kehidupan di Darat, yaitu melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pembangunan rendah karbon telah dituangkan melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Sebagai implikasi dari penetapan undang-undang tersebut, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 akan digantikan dengan Peraturan Presiden mengenai Pembangunan Rendah Karbon (PRK), sebagai transformasi dari kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca dimana di dalamnya telah memasukkan upaya untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan jumlah dan intensitas emisi gas rumah kaca, serta kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti Perpres tersebut melalui Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) yang Berketahanan Iklim, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 30% dan 50% dengan skenario ambisius pada tahun 2030 dan *nett zero emission* pada tahun 2050 pada sektor energi, limbah, IPPU (*Industrial Processes and Product Use*) dan AFOLU (*agriculture, forestry and other land use*). Selain itu DKI Jakarta telah menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 576 tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara yang berisi rencana aksi dan target pengendalian pencemaran udara hingga tahun 2030 berserta sektor pelaksananya.

Gambar 4.4
Strategi Pengendalian Pencemaran Udara Provinsi DKI Jakarta



Sumber: KepGub Nomor 576 tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara

Rencana Aksi Strategi Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 576 tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara, dijabarkan ke dalam 3 (tiga) Strategi Pengendalian Pencemaran Udara.

a. **Peningkatan Tata Kelola Pengendalian Pencemaran Udara**, dengan 6 (enam) program, yaitu:
   (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas inventarisasi emisi yang berkelanjutan.
   (2) Peningkatan sistem pemantauan dan evaluasi mutu udara.
   (3) Pengkajian dampak pencemaran udara terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi.
   (4) Pembentukan tim kerja lintas sektoral Pengendalian Pencemaran Udara.
   (5) Penyusunan regulasi dan kebijakan terkait Pengendalian Pencemaran Udara.
   (6) Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran udara.

b. **Penguran Emisi Pencemaran Udara dari Sumber Bergerak**, dengan 7 (tujuh) program, yaitu:
   (1) Peremajaan angkutan umum dan pengembangan transportasi ramah lingkungan untuk transportasi umum dan pemerintah.
   (2) Penerapan uji emisi kendaraan bermotor.
   (3) Pengembangan kawasan rendah emisi.
   (4) Pengendalian emisi melalui pengurangan mbilitas dalam kerangka kerja sama pilar pemerintah - sektor swasta - masyarakat sipil.
   (5) Peningkatan infrastruktur penghubung sarana transportasi umum.
   (6) Pengembangan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
   (7) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perbaikan kualitas udara.

c. **Pengurangan Emisi Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak**, dengan 3 (tiga) program, yaitu:
   (1) Peningkatan ruang terbuka dan bangunan hijau.
   (2) Peningkatan instalasi panel surya atap.
   (3) Pengendalian polusi udara dan kegiatan industri.

Provinsi DKI Jakarta melalui dokumen RPD Tahun 2023-2026 juga mencoba menuangkan kebijakan pengendalian pencemaran udara ke dalam salah satu sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu sasaran ke-3: "**Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon**" yang secara langsung mendukung tujuan pembangunan DKI Jakarta itu sendiri, yaitu Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan pada Dimensi *Built Environment*. Sasaran ini kemudian dicapai melalui 17 (tujuh belas) strategi dan 19 (sembilan belas) kegiatan prioritas.

Strategi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dalam Pencapaian Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon:

a. Membangun orientasi pembangunan bangunan gedung hijau dan ramah disabilitas seluruh pemangku kepentingan penyelenggara bangunan gedung.
b. Pengintegrasian upaya pencegahan pencemaran lingkungan melalui kebijakan.
c. Menurunkan Beban Pencemaran Lingkungan.
d. Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan rencana induk ruang terbuka hijau.
e. Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi.
f. Peningkatan ketaatan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh kegiatan usaha.
g. Peningkatan keterlibatan dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
h. Peningkatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem laut, pesisir dan pulau pulau kecil serta peningkatan pemberdayaan masyarakat.
i. Pengembangan perikanan budidaya dan tangkap.
j. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penegakan aturan hukum terkait pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
k. Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
l. Melakukan Pembangunan/ Penataan/ Penghijauan Hutan untuk meningkatkan kualitas Hutan Kota.
m. Pengembangan penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan.
n. Melaksanakan inventarisasi dan tindak lanjut laporan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
o. Melaksanakan diklat dan pemberdayaan tentang kehutanan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan SDM Dinas sesuai dengan perkembangan teknologi.
p. Melakukan inventarisasi dan koordinasi terkait standarisasi pengelolaan DAS di Provinsi DKI Jakarta.
q. Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota.

Kegiatan Prioritas Provinsi DKI Jakarta dalam Pencapaian Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon

a. Penataan Bangunan Gedung.
b. Perencanaan Lingkungan Hidup.
c. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
d. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
e. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
f. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

g. Pelaksanaan Diklat dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
h. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
i. Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
j. Pengelolaan Perikanan Tangkap.
k. Pengelolaan Perikanan Budidaya.
l. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
m. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
n. Pengelolaan Hutan.
o. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
p. Dilat, Penyuluhan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.
q. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
r. Pengelolaan Energi Terbarukan dan Ketenagalistrikan.

Untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran ke-3: "Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon" dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada kegiatan prioritas di atas, dirumuskan dua indikator di tahun 2025, yaitu:

Tabel 4.7
Target Indikator Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon Tahun 2025

Visi	Satuan	Target 2025	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	55,93	Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024
Persentase Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase	14,65	

Sumber: BA Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024

Target indikator tersebut akan dilaksanakan pada aksi mititgasi perubahan iklim yang terdiri dari 5 (lima) sektor yaitu (1) Energi; (2) AFOLU; (3) Limbah; (4) IPPU; (5) lainnya (diplomasi perubahan iklim dan aksi adaptasi perubahan iklim yang terdiri dari 6 (enam) sektor, yaitu: (1) Kesehatan; (2) Sumber Daya Air; (3) Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (4) Energi; (5) Ketahanan Pangan; (6) Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun untuk kegiatan yang tidak termasuk dalam keenam sektor tersebut dibuat pengembangan dengan menambahkan 10 bidang tambahan yaitu: (1) Infrastruktur Transportasi; (2) Limbah; (3) Tata Guna Lahan; (4) Pertanian; (5) Kehutanan; (6) Keamanan; (7) Pariwisata; (8) ITK serta Sosial; dan (9) Komunitas; dan (10) Budaya sebagaimana tertera di dalam pasal 9 ayat 2 Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim.

4.4 Tantangan dan Isu Strategis Pembangunan Tahun 2025

Pembangunan sangat berkaitan erat dengan upaya penyelesaian suatu masalah. Serangkaian tindakan yang diatur dalam rangka penyelesaian masalah tersebut akan berhasil dengan baik jika ditunjang oleh suatu proses perencanaan pembangunan yang matang. Salah satu prasyarat proses pembangunan akan mencapai sasarannya ialah dengan mengetahui apakah isu dan permasalahan utama di suatu wilayah dapat dikenali dan dirumuskan dengan baik atau tidak. Dalam implementasinya, isu dan permasalahan sering dianggap sebagai dua hal yang sama, walaupun sebenarnya berbeda. Permasalahan merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil

saat perencanaan dibuat (perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya). Sementara, isu merupakan permasalahan-permasalahan yang dipertimbangkan. Berdasarkan kerangka waktunya, isu dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu isu saat ini (isu yang telah ada dan sedang eksis), serta isu yang akan datang (isu yang perlu untuk diantisipasi karena dikhawatirkan akan terjadi di masa yang akan datang atau dalam waktu dekat).

Selanjutnya, untuk mencapai tujuan pembangunan yang ideal, setiap pelaku pembangunan harus mampu melihat suatu permasalahan maupun isu sebagai sebuah tantangan. Hal tersebut dikarenakan tantangan itu sendiri merupakan hal atau objek yang dapat menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi suatu permasalahan maupun isu. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan, permasalahan atau isu harus sangat diperhatikan dan dijadikan sebagai sebuah tantangan dikarenakan dampaknya yang signifikan di masa mendatang. Adapun untuk menentukan data atau informasi yang akan dijadikan sebagai suatu permasalahan ataupun isu strategis dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut:

a. Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan;
b. Merupakan tugas dan tanggung jawab, baik untuk Pemerintah Pusat atau Daerah;
c. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik;
d. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan;
e. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
f. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

4.4.1 Tantangan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

Indonesia telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi akan menghadapi berbagai perubahan strategis yang sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yang meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Oleh karenanya, berbagai tantangan tersebut perlu menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan ke depan. Adapun beberapa tantangan nasional sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Rendahnya Produktivitas

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan Asian *Productivity Organization* (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tercermin dari Total *Factor Productivity* selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010-2015 (-0,9% ke -0,3%). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971-1995 dan Tiongkok sebesar 2,12 selama kurun waktu 2005-2022. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonom yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan *daycare* berkualitas yang terjangkau. Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Selama tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7%. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang melambat menjadi rata-rata 4,7% selama tahun 2010-2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0% selama tahun 2015-2019 dan 5,05% pada tahun 2023. Selain itu, produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi

potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0%.

b. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Asian *Productivity Organization* (2024), produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari PDB per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US$28.600 per pekerja. Angka tersebut masih tertinggal jauh di bawah Amerika Serikat US$149.100 per pekerja dan di bawah rata-rata kawasan *Association of Southheast Asian Nations* sebesar US$30.200 per pekerja. Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas SDM yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai *Programme for Internasional Student Assessment* siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara *The Organization for Economic Co-Operation and Development* sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan 52,32% penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan 34,82% penduduk lulusan pendidikan menengah (sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan sederajat), dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi hanya 12,86%. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada serapan tenaga kerja di pasar kerja, dimana hanya 41,23% pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi.

c. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2% dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33% dari total populasi (BPS, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja, pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68% pada Agustus 2024 menjadi 1,40% pada September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

d. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data BPS (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

e. Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (*triple planetry crisis*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Sekitar 50-75% dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (*Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2022). Kerugian ekonomi akibat risiko bencana diprakirakan sebesar Rp22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024).

Sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan. Sementara itu, polusi udara merupakan penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di dunia, serta menyebabkan hingga 4,2 juta kematian setiap tahun (*United Nations Framework Convention on Climate Change*, 2022). Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi *particulate matter* 2,5 (*World Health Organization*, 2021). Sekitar 70% dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar (BPS, 2022). Pada tahun 2020, sebanyak 40,3% timbulan sampah merupakan sampah makanan dan diproyeksikan akan menghasilkan 344 kg/kapita/tahun pada tahun 2045 (Proyeksi *Business-As-Usual, Report, Food and Loss Waste in* Indonesia, 2021). Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam.

Ekstraksi sumber daya alam di dunia meningkat tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir dengan pertumbuhan lebih dari 2,3% per tahun. Indonesia sebagai negara dengan tingkat ekstraksi pertambangan terbesar ke-8 di dunia (UNEP, 2023), turut berkontribusi dalam krisis tersebut. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 menunjukkan masih terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

f. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan menjadi tantangan bagi setiap negara. Perkembangan risiko geopolitik berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang Rusia-Ukraina meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik di kawasan lainnya, seperti di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara, sehingga memungkinkan terjadinya konflik di masa depan. Persaingan geopolitik, terutama di kawasan Indo-Pasifik, yang dekat dengan Indonesia, semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia telah menarik perhatian banyak pihak. Hal tersebut berdampak pada penciptaan persiangan pengaruh antarnegara, baik yang berada di dalam maupun luar kawasan.

Selanjutnya, ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh pada 3,2% selama 2024 dan 2025 (*Internasional Monetary Fund*, 2024). Sementara itu, inflasi global diprakirakan menurun secara bertahap dari 6,8%

pada 2023 menjadi 5,9% pada 2024 dan 4,5% pada 2025 (*Internasional Monetary Fund*, 2024). Di sisi lain, prospek perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan, tercermin dari tingginya tingkat suku bunga global serta ketidakpastian akibat gejolak geopolitik.

Dalam jangka menengah, situasi suku bunga global yang relatif tinggi diperkirakan akan tetap berlanjut terlepas dari pemangkasan yang dilakukan oleh *The Federal Reserve*. Peningkatan laju inflasi mendorong bank sentral di seluruh dunia untuk menaikkan suku bunga acuan secara bersamaan sejak semester kedua tahun 2023, seperti *Bank of England* dan *The Federal Reserve*. Kenaikan suku bunga acuan tersebut juga dilakukan di negara-negara anggota G20, seperti Brasil, India, dan Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan secara bersamaan oleh *bank-bank* sentral di seluruh dunia akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memicu resesi ekonomi global.

Faktor gejolak geopolitik, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global pada tahun 2023 dan menjadi tantangan berikutnya. Hal ini tercermin dari penurunan *Baltic Dry Indeks level* menjadi rata-rata indeks sebesar 1.393,56 dibandingkan rata-rata indeks 1.930,86 di tahun 2022.

g. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi pasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/*Corruption Perception Indeks* Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Adapun pada indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren perbaikan pada periode 2019-2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

4.4.2 Isu Strategis Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Perumusan isu strategis Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 disusun dengan memperhatikan kriteria sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya serta isu strategis yang tercantum dalam dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Untuk jangka waktu lima tahun, DKI Jakarta memiliki enam isu strategis, yaitu:

a. Ketahanan Terhadap Bencana.
b. Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik.
c. Ketahanan Ekonomi Inklusif.
d. Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas.
e. Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara.
f. Pemerataan Pembangunan.

Isu strategis tersebut selanjutnya akan dilakukan pemfokusan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Dinamika tantangan maupun isu strategis global, nasional, dan kewilayahan;
b. Perpindahan Ibu Kota Nusantara ke Kalimantan;

c. Kondisi kewilayahan Provinsi DKI Jakarta; dan
d. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Memperhatikan dinamika permasalahan maupun isu strategis global dan nasional bertujuan agar rumusan isu strategis pembangunan Provinsi DKI Jakarta memiliki keselarasan dengan tantangan maupun isu yang saat ini sedang menjadi perhatian utama Pemerintah Pusat. Memperhatikan dinamika permasalahan maupun isu strategis kewilayahan dimaksudkan agar rumusan isu strategis pembangunan Provinsi DKI Jakarta dapat selaras dan mengakomodir permasalahan pembangunan yang ditemukan di wilayah kota administrasi maupun kabupaten administrasi. Sedangkan memperhatikan kondisi kewilayahan dan hasil evaluasi, di dalamnya mencangkup kondisi serta posisi DKI Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota Negara serta upaya Provinsi DKI Jakarta mencapai rendah karbon untuk ketahanan iklim.

Sebagaimana telah dijabarkan pada subbab sebelumnya, ke depan Provinsi DKI Jakarta akan berfungsi sebagai simpul utama dalam jaringan ekonomi dunia yang memiliki hubungan mengikat dengan kota-kota lain serta memiliki dampak langsung dan nyata pada urusan sosial ekonomi global. Walaupun demikian, posisi DKI Jakarta saat ini masih belum cukup kompetitif jika dibandingan dengan kota global lainnya. Hal tersebut dikarenakan DKI Jakarta masih memiliki berbagai tantangan besar yang harus diselesaikan, antara lain kepadatan penduduk, kurangnya tenaga kerja terampil, permukiman kumuh, kemacetan, pengelolaan persampahan, akses air bersih, pengelolaan limbah, tingginya risiko bencana alam, polusi udara, serta tantangan perubahan iklim. Oleh karena itu, berbagai kondisi di atas menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan dalam merumuskan isu strategis Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2025.

Tabel 4.8
Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Tantangan Global dan Nasional	Parameter Kota Global	*Gap* Status Menuju Kota Global	Isu Strategis RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Prioritas Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2025
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Perpindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara 2. Perubahan Iklim 3. Konflik Bersenjata di Ukraina dan Palestina 4. Potensi Konflik Bersenjata di Laut Natuna Utara 5. Perlambatan Ekonomi Global 6. Disrupsi Kecerdasan Buatan 7. Ancaman Pandemi Baru 8. Terbatasnya Waktu Bonus Demografi 9. Meningkatnya Populasi	1. Ruang Nyaman untuk Dihuni 2. Lingkungan yang Bersih, Nyaman, dan Berkelanjutan 3. Aksesibilitas yang Terkoneksi Secara Intra dan Inter Kota	1. Rendahnya penggunaan transportasi publik 2. Panjangnya waktu tempuh akibat kemacetan 3. Konektivitas menuju bandara belum optimal 4. Rendahnya konektivitas Jakarta terhadap kota-kota dunia lainnya 5. Belum optimalnya penerapan ekonomi hijau di Jakarta 6. Belum baiknya kualitas lingkungan hidup di wilayah Jakarta 7. Sistem pengelolaan sampah yang di Jakarta yang belum efisien untuk menopang pembangunan berkelanjutan 8. Belum maksimalnya	Ketahanan Terhadap Bencana	1. Tingginya tingkat urbanisasi. 2. Meningkatnya tingkat kemacetan menimbulkan pola pergerakan yang tidak efisien. 3. Pembangunan kota yang *car-oriented*. 4. Masih terdapat warga miskin/rentan miskin yang belum mendapatkan akses kebutuhan dasar dan kesempatan kehidupan yang layak (akses air bersih, permukiman dan sanitasi layak, serta bayi miskin dan rentan miskin belum memperoleh nutrisi yang cukup). 5. Belum optimalnya pelaksanaan naturalisasi dan normalisasi sumber daya alam seperti danau dan sungai. 6. Banjir yang disebabkan oleh alih fungsi lahan, penyempitan serta pendangkalan saluran pembuangan air, penataan sungai, serta pembuatan sumur resapan. 7. Perda tentang RDTR belum dapat menangani permasalahan banjir, macet, dan hunian bangunan.	**Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota** Fokus utama: 1. Kualitas Layanan Transportasi Publik 2. Banjir 3. Kualitas Lingkungan 4. Sampah 5. Energi Baru Terbarukan 6. Air Bersih dan Air Minum 7. Bencana 8. Kualitas Udara 9. Akses Hunian Layak

Tantangan Global dan Nasional	Parameter Kota Global	*Gap* Status Menuju Kota Global	Isu Strategis RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Prioritas Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2025
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		pengelolaan energi yang berkelanjutan 9. Belum menyeluruhnya sistem pengelolaan air bersih di Jakarta 10. Terbatasnya pengelolaan sanitasi dan pengelolaan air limbah		8. Menurunnya kualitas udara ambien akibat emisi kendaraan bermotor dan cerobong industri, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca pada sektor energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik. 9. Belum maraknya transformasi ke kendaraan ramah lingkungan (elektrifikasi) moda pribadi maupun massal. 10. Masih rendahnya kinerja pengaturan mitigasi banjir. 11. Penurunan muka tanah di beberapa kawasan. 12. Masih rendahnya kinerja pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh. 13. Belum optimalnya edukasi masyarakat terkait perubahan iklim dan pencemaran. 14. Perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan 15. Masih minimnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah atau *Reuse, Reduce* dan *Recycle* (3R). 16. Belum optimalnya pendekatan cara penanganan sampah terutama dalam hal penyediaan kapasitas fasilitas pengangkutan.	

Tantangan Global dan Nasional	Parameter Kota Global	*Gap* Status Menuju Kota Global	Isu Strategis RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Prioritas Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2025
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas	1. Belum meratanya fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda di setiap ruas jalan. 2. Masih terbatasnya lebar jalan yang disediakan untuk pejalan kaki dan jalur sepeda. 3. Belum maksimalnya sinkronisasi pelaksanaan pembangunan fasilitas pejalan kaki dan jaringan utilitas. 4. Pengembangan hunian yang belum mempertimbangkan aksesibilitas. 5. Belum optimalnya integrasi fasilitas transportasi seperti fisik, tiket, dan waktu. 6. Ketersediaan dan pelayanan transportasi laut ke wilayah Kepulauan Seribu masih terbatas untuk melayani pergerakan orang dan barang, sehingga mengurangi aksesibilitas dan konektivitas dengan Kota Jakarta. 7. Belum adanya kebijakan-kebijakan baik pada level pusat dan daerah yang saling mendukung satu sama lain untuk dapat menjadi insentif dan disinsentif bagi pengguna transportasi umum dan	

Tantangan Global dan Nasional	Parameter Kota Global	*Gap* Status Menuju Kota Global	Isu Strategis RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Prioritas Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2025
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				kendaraan pribadi, seperti regulasi yang mengatur kepemilikan kendaraan pribadi baik di Jakarta dan di area penyangganya.	
	1. Ekonomi yang Mapan dan Terkoneksi Secara Global 2. Kapasitas Riset dan Inovasi yang Baik dan Menerus 3. Menarik Wisatawan untuk Berkunjung	1. Produktivitas ekonomi di Jakarta belum cukup bersaing dengan kota-kota global lainnya di dunia 2. Iklim usaha dan investasi di Jakarta belum kondusif dibandingkan dengan kota-kota global lainnya 3. Kualitas pendidikan tinggi sebagai pintu gerbang riset dan inovasi belum berdaya saing 4. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya riset Jakarta 5. Iklim riset belum optimal dalam mendukung penciptaan inovasi dan pengembangan bisnia	Ketahanan Ekonomi Inklusif	1. Masih rendahnya peran kelompok penduduk dengan pendapatan rendah dalam pembentukan total pendapatan yang diterima penduduk DKI Jakarta. 2. Indeks Rasio Gini DKI Jakarta sampai dengan Maret 2023 masih berada di angka 0,431. 3. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2023 (4,96%) lebih rendah dibanding tahun 2022 (5,25%). 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih berfluktuatif dan belum kembali pada capaian sebelum Pandemi COVID-19. 5. Kurangnya kemampuan angkatan kerja untuk membuat usaha mandiri. 6. Belum optimalnya penyediaan lapangan kerja dalam upaya mendorong tingkat kemudahan berbisnis. 7. Masih rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, yaitu kualitas kompetensi yang dimiliki	**Pertumbuhan Ekonomi** Fokus utama: 1. Transformasi Ekonomi (*Green Economy, Blue Economy, Gig Economy, Digitalization*) 2. Daya Saing Ekonomi 3. Investasi Daerah 4. Daya Tarik Pariwisata 5. Kesempatan Kerja

Tantangan Global dan Nasional	Parameter Kota Global	*Gap* Status Menuju Kota Global	Isu Strategis RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Prioritas Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2025
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. 8. Belum memadainya keberadaan sentra ekonomi UKM dan industri kreatif baik secara *offline* - *online*. 9. Belum optimalnya pelaksanaan kajian dan penelitian dalam sisi perencanaan. 10. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan riset dalam perencanaan dan pembangunan daerah. 11. Belum optimalnya peran serta perangkat daerah dalam penelitian dan pembangunan daerah.	
			Pemerataan Pembangunan	1. Pengembangan destinasi yang belum maksimal di Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) 2. Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) khususnya. 3. Masih ditemukan ketimpangan antar wilayah di DKI Jakarta, baik dari sisi tingkat kemiskinan maupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	**Kesejahteraan Masyarakat** Fokus utama: 1. Partisipasi Pendidikan Tinggi 2. Stunting 3. Kemiskinan 4. Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial 5. Layanan Pendidikan 6. Ketahanan Pangan

Tantangan Global dan Nasional	Parameter Kota Global	*Gap* Status Menuju Kota Global	Isu Strategis RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Prioritas Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2025
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				4. Belum meratanya distribusi sarana prasarana Kesehatan dan sumber daya manusia Kesehatan. a. Belum optimalnya tingkat kemandirian alat kesehatan dan farmasi b. Masih terdapat kelurahan yang belum memiliki Puskesmas mandiri (status kepemilikannya masih kontrak) 5. Belum optimalnya penyediaan fasilitas ramah disabilitas. 6. Tingginya ketergantungan konsumsi masyarakat pada satu jenis bahan pangan pokok yaitu beras. 7. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pola makan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). 8. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya berfluktuatif di setiap tahunnya. 9. Terbatasnya Puskesmas yang memiliki layanan Psikolog dan koordinasi dengan satuan pendidikan.	

Tantangan Global dan Nasional	Parameter Kota Global	*Gap* Status Menuju Kota Global	Isu Strategis RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Prioritas Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2025
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1. Ekonomi yang Mapan dan Terkoneksi Secara Global 2. Kapasitas Riset dan Inovasi yang Baik dan Menerus 3. Ruang Nyaman untuk Dihuni	1. Kualitas SDM yang masih rendah 2. Kesejahteraan masyarakat belum merata seluruhnya 3. Kualitas pendidikan yang tidak berdaya saing.	Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara	1. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan masih tingginya angka perkawinan anak yang berdampak pada tingginya prevalensi stunting dan penyiapan kehidupan berkeluarga yang belum optimal. 2. Masih tingginya angka pernikahan di DKI Jakarta dalam satu tahun dan kehamilan di tahun pertama pernikahan. 3. Masih rendahnya tingkat kedisiplinan orang tua terkait kesehatan dan tumbuh kembang anak saat usia dini. 4. Masih ditemukan kasus prevalensi stunting. 5. Masih minimnya total kelurahan yang menjadi kawasan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Sampai dengan tahun 2022, total kelurahan yang sudah menjadi kawasan STBM yaitu baru 9 Kelurahan. 6. Menurunnya capaian indikator persentase OPD yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.	

Tantangan Global dan Nasional	Parameter Kota Global	*Gap* Status Menuju Kota Global	Isu Strategis RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Prioritas Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2025
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				7. Belum optimalnya tahap verifikasi dan validasi data DTKS, khususnya dalam hal pemberian bantuan sosial. 8. Menurunnya angka penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 9. Menurunnya jumlah sarana sosial (panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah, dll). 10. Belum optimalnya pengintegrasian data untuk program kependudukan.	
	1. Ekonomi yang Mapan dan Terkoneksi Secara Global 2. Kapasitas Riset dan Inovasi yang Baik dan Menerus 3. Ruang Nyaman untuk Dihuni 4. Menarik Wisatawan untuk Berkunjung 5. Lingkungan yang Bersih, Nyaman, dan Berkelanjutan 6. Aksesibilitas yang Terkoneksi Secara Intra dan Inter Kota	1. Masih rendahnya pembangunan dan kualitas sumber daya manusia akibat *missmatch* keterampilan dan minimnya keahlian berdaya saing global	Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Belum tercapainya budaya kerja yang mengutamakan profesionalisme dan akuntabilitas bagi seluruh aparat pemerintah secara terpadu dan berkesinambungan. 2. Belum optimalnya kolaborasi swasta-publik untuk memaksimalkan dampak positif dari *platform digital* untuk industri dan masyarakat. 3. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi. 4. Tidak adanya peraturan khusus yang mengatur hubungan antar	**Tata Kelola Pemerintahan** Fokus utama: 1. Transformasi dan Digitalisasi 2. Layanan Publik 3. Penggunaan TIK 4. Iklim Riset dan Inovasi

Tantangan Global dan Nasional	Parameter Kota Global	*Gap* Status Menuju Kota Global	Isu Strategis RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Prioritas Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2025
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				lembaga, serta pengawasan secara *whistleblowing* oleh para pemangku kepentingan terkait terutama masyarakat. 5. Masih ditemukan ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai jaminan profesionalisme ASN. 6. Adanya tuntutan Revolusi Industri 4.0 akan PNS yang mampu melayani Masyarakat dengan cepat menggunakan sarana digital. 7. Adanya tuntutan regulasi akan aparatur yang memenuhi standar kompetensi manajerial, sosial kultural dan teknis serta pemerintahan.	

Sumber: 1. RKP Tahun 2025, 2024 (diolah)
2. RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045, 2024 (diolah)
3. RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, 2024 (diolah)

Sebagaimana tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2025, terumuskan 4 (empat) isu strategis pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

a. Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota
b. Pertumbuhan Ekonomi
c. Kesejahteraan Masyarakat
d. Tata Kelola Pemerintahan

Isu strategis pembangunan tersebut merupakan bagian dari isu strategis Provinsi DKI Jakarta untuk jangka menengah (lima tahun) sebagaimana tercantum dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Adapun penjelasan terhadap masing-masing isu strategis pembangunan dan pemfokusannya di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota

Pembangunan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dalam pelaksanaannya, suatu pembangunan harus memperhatikan berbagai aspek mulai dari potensi yang dimiliki wilayah setempat sampai kepada kondisi lingkungan yang ada, baik fisik (tanah, air, udara), biotik (flora, fauna), maupun kultur (budaya, interaksi antarmanusia). Kota Berkelanjutan merupakan konsep pembangunan wilayah yang saat ini dijadikan sebagai landasan dasar pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Kota berkelanjutan itu sendiri merupakan kota yang dalam pembangunan dan pengelolaannya telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan baik fisik, sosial, ekonomi, budaya, keuangan, ketahanan, dan lainnya. Pilar utama yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah terkait kualitas lingkungan serta infrastruktur kota. Oleh karena itu, kualitas lingkungan dan infrastruktur kota menjadi isu strategis utama Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025 yang berfokus pada beberapa hal, yaitu: (1) Akses Hunian Layak; (2) Kualitas Layanan Transportasi Publik; (3) Kualitas Udara; (4) Kualitas Lingkungan; (5) Bencana; (6) Banjir; (7) Sampah; (8) Air Bersih dan Air Minum; dan (9) Energi Baru Terbarukan.

Saat ini hampir setengah dari populasi dunia tinggal di kawasan perkotaan. Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu kota megapolitan sampai dengan saat ini masih memiliki pekerjaan rumah untuk memenuhi standar infrastruktur dan layanan dasar agar dapat berdiri sejajar dengan kota global lainnya. Infrastruktur dan layanan dasar perkotaan berkualitas yang dimaksud antara lain mencakup akses air bersih dan permukiman layak huni. Upaya konservasi dan pengelolaan air secara berkelanjutan dilakukan dengan merehabilitasi sumber daya air, meminimalkan kebocoran air, mendorong penggunaan kembali air, serta menambah tempat penyimpanan dan penampungan air sebagai alternatif sumber air baku, dengan mempertimbangkan siklus air. Pada tahun 2023 akses layanan sumber air minum layak di DKI Jakarta telah mencapai 99,42%, namun demikian, untuk akses air minum perpipaan baru mencapai 65,85%, dengan tingkat kebocoran sebesar 46,67% *Non Revenue Water* (NRW). Tingkat kebocoran air tersebut memberikan gambaran bahwa dalam kurun waktu satu tahun, Provinsi DKI Jakarta telah kehilangan sebanyak 46,67% air. Selain itu, memberikan gambaran pula bahwa DKI Jakarta masih memerlukan upaya penanganan yang cukup banyak untuk mencapai tingkat akses air minum perpipaan sebesar 89,02% dan tingkat kebocoran NRW menjadi 40% di tahun 2026.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta yang semakin bertambah di setiap tahunnya, menjadikan kebutuhan akan perumahan dan permukiman juga semakin meningkat, yang mana hingga saat ini peruntukan lahan untuk perumahan dan permukiman sudah menduduki proporsi terbesar di DKI Jakarta. Namun, dalam kenyataannya tingginya permintaan terhadap perumahan dan permukiman tersebut, tidak disertai dengan pertambahan jumlah perumahan dan permukiman, sehingga mengakibatkan adanya *backlog* (kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat). Berdasarkan data yang ada, DKI Jakarta merupakan provinsi kedua dengan *backlog* perumahan terbesar di Indonesia, yang mana persentase kepemilikan rumah di DKI Jakarta hanya sebesar 56,6%. Persentase ini menggambarkan bahwa sekitar 2,78 juta rumah tangga di DKI Jakarta, sebanyak 63% atau

sekitar 1,77 juta rumah tangga belum memiliki rumah sendiri atau rumah yang sehat dan layak huni. Adapun yang menjadi persoalan utama dalam upaya Pemerintah untuk menyediakan hunian adalah keterbatasan lahan dan tingginya harga lahan. Kondisi demikian menjadikan tidak hanya masyarakat berpenghasilan rendah saja yang mengalami kesulitan memperoleh hunian, namun, juga para pekerja dan kelas menengah.

Selain berdampak pada peningkatan kebutuhan akan perumahan dan permukiman, penambahan jumlah penduduk juga berdampak pada meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Berdasarkan data, jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan, yang mana hingga November 2024 jumlah kendaraan bermotor telah mencapai 23,3 (dua puluh tiga koma tiga) juta unit. Padahal, sampai dengan saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk bisa mengurangi jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta, khususnya untuk kendaraan yang difungsikan sebagai kendaraan pribadi, dikarenakan semakin bertambahnya jumlah penggunaan kendaraan pribadi, maka tingkat kemacetan akan semakin buruk. Kondisi kemacetan di DKI Jakarta dapat tergambar salah satunya melalui data yang dikeluarkan oleh Lembaga TomTom *Traffic Indeks*, yang mana disebutkan bahwa pada tahun 2024 DKI Jakarta menempati urutan ke-90 sebagai kota termacet di dunia. Sepanjang tahun 2024, rata-rata waktu bepergian di Jakarta per 10 km memakan waktu 25 menit 31 detik, sedangkan waktu yang hilang per tahun karena macet adalah sebesar 108 jam. Merespon hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mengembangkan transportasi publik guna mengurangi tingkat kemacetan, walaupun sampai dengan Januari 2024, penggunaan transportasi publik (*public transport mode-share*) di Provinsi DKI Jakarta masih terbilang minim, yaitu baru sebanyak 34.175.182 orang. Kondisi demikian memberikan gambaran bahwa transportasi publik belum menjadi transportasi utama atau andalan bagi masyarakat DKI Jakarta.

Tingkat kemacetan yang semakin meningkat sebagaimana penjabaran di atas, menjadi salah satu penyumbang utama buruknya kualitas udara di DKI Jakarta. Hal tersebut didukung oleh data sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Eksekutif Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, bahwa dari tujuh parameter penting emisi udara (SO2, NOx, CO, PM10, PM2.5, BC, dan NMVOCs) di antaranya dominan berasal dari sektor transportasi. Beban emisi terbesar dari sektor transportasi meliputi CO sebanyak 287.317 ton, NMVOCs sebanyak 198.936 ton, NOx sebanyak 76.793 ton, PM2.5 sebanyak 5.257 ton, PM10 sebanyak 5.113 ton, dan BC sebanyak 5.048 ton. Walaupun telah ada kebijakan uji emisi dan kebijakan ganjil genap, namun, realitanya pada jam-jam berangkat maupun pulang kerja kendaraan pribadi masih mendominasi jalanan di DKI Jakarta. Dominasi kendaraan tersebut telah menyumbang emisi mencapai 81,17 juta kg CO2e. Penurunan tingkat kualitas udara di DKI Jakarta selain disebabkan oleh emisi kendaraan, disebabkan pula oleh kegiatan pembakaran sampah secara terbuka sebagaimana hasil kajian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Apabila melihat total produksi sampah yang dihasilkan masyarakat DKI Jakarta, berdasarkan data yang ada, volume sampah selalu meningkat di setiap periodenya (angka timbulan sampah diperkirakan 8.000 ton/hari. Tingginya volume sampah tersebut, sampai dengan saat ini masih belum diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk daur ulang sampah atau *Reuse, Reduce* dan *Recycle* (3R), sehingga masih banyak ditemukan masyarakat yang melakukan pembakaran sampah untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkannya.

Kegiatan pembakaran sampah sebagaimana dimaksud berdasarkan hasil kajian yang ada, telah menghasilkan emisi karbondioksida sebesar 12.627 gigagram per tahun atau hampir setara dengan pembakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan pada tahun 2021 yang mencapai 14.280 gigagram per tahun. Pelaku pembakaran sampah di DKI Jakarta berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh *Waste4Change* bersama Yayasan Bicara Udara terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu pelaku perorangan yang membakar sampah atas kemauan sendiri, pelaku perorangan yang disuruh untuk membakar, dan pelaku bisnis. Lebih lanjut, diketahui bahwa sebanyak 61,5% aktivitas pembakaran

sampah di DKI Jakarta didominasi oleh perempuan, 36% di antaranya merupakan ibu rumah tangga. Hasil kajian yang ada juga menunjukkan bahwa sebesar 31% aktivitas pembakaran sampah sudah menjadi kebiasaan di lingkungan warga setempat, dikarenakan pelaku tidak ingin mengeluarkan biaya untuk iuran pengangkutan sampah. Padahal telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang secara tegas menetapkan sanksi administratif berupa uang paksa sebesar Rp.500.000 bagi siapa saja yang salah mengelola sampah, salah satunya dengan membakar sampah. Namun, hal tersebut masih belum menjadikan masyarakat DKI Jakarta tertib dalam melakukan pengolahan sampah.

Berbagai kondisi di atas, memberikan gambaran bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, masih cukup banyak tantangan serta isu yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun kemudian perubahan iklim juga merupakan salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian, baik oleh masyarakat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana seperti kekeringan, banjir dan longsor, kegagalan panen, kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, serta wabah penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Tingkat urbanisasi yang cukup tinggi di DKI Jakarta diyakini menjadi salah satu pemicu terjadinya perubahan iklim. Hal tersebut dikarenakan sebagai salah satu kota dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, perkembangan dan pembangunan di DKI Jakarta tumbuh sangat pesat di setiap tahunnya. Perkembangan dan pembangunan dalam bentuk kegiatan konstruksi berskala besar, serta terjadinya alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman menyebabkan berkurangnya luas daerah resapan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, ditambah pula dengan kondisi dimana sebagian besar tanah sudah menjadi hak milik perseorangan, kian mempersulit penataan kota dalam membangun infrastruktur pengendali banjir, drainase kota, maupun pembangunan sumur resapan.

Sepanjang tahun 2024, terdapat 1.810 kejadian bencana (yang memberikan dampak signifikan) di Provinsi DKI Jakarta. Bencana tersebut terdiri atas 788 kejadian kebakaran pada gedung dan permukiman, 435 kejadian pohon tumbang, 257 kejadian jalan tergenang, 131 kejadian banjir, 37 kejadian tanah longsor, 13 kejadian angin kencang, serta 149 kejadian bencana atau peristiwa lainnya. Kejadian tersebut menimbulkan dampak kepada 10.632 orang yang mengungsi, 87 meninggal dunia, 302 luka-luka, dan 3 hilang. Selain itu, dampak kerusakan terjadi pada 1.593 rumah tinggal, 487 bangunan semi permanen, 441 kios dan ruko, 139 kendaraan, serta 106 gedung dan gudang. Total kerugian yang diakibatkan dari berbagai kejadian bencana tersebut diperkirakan mencapai Rp442.193.643.628. Kejadian bencana tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 1.258 kejadian dengan total kerugian mencapai Rp272.337.749.995. Dari jumlah kejadian bencana tersebut, peristiwa kebakaran tetap mendominasi bencana di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah faktor iklim, seperti pengaruh El Nino dan IOD Positif yang terjadi pada tahun 2023 meskipun telah mereda pada tahun 2024. Selain itu, terdapat faktor sosial seperti kepadatan pemukiman yang membuat api cepat menyebar, penggunaan instalasi listrik tidak sesuai standar, pembakaran sampah, serta kelalaian dalam penggunaan api terbuka dan rokok.

Mendasari beberapa kondisi di atas, maka 'kualitas lingkungan dan infrastruktur kota' dijadikan sebagai isu strategis pembangunan Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2025. Isu sebagaimana dimaksud, memiliki keselarasan dengan isu jangka menengah (lima tahunan) sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, yaitu isu Ketahanan Terhadap Bencana serta isu Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas.

b. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Dalam dua dekade terakhir, sebagaimana penjabaran pada bagian sebelumnya, baik, pada level nasional maupun regional, Pemerintah Indonesia tidak terkecuali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil mengantisipasi dan memitigasi tantangan yang datang silih berganti. Sebagaimana diketahui, pada periode tersebut, eskalasi tensi

geopolitik dan perang dagang telah menimbulkan fragmentasi global serta disrupsi rantai pasok. Kemudian, pandemi COVID-19 dan perubahan iklim telah mengancam kemanusiaan serta menimbulkan dampak ekonomi yang sangat besar. Di sisi lain, volatilitas harga komoditas dan dinamika sektor keuangan memunculkan tekanan pada pertumbuhan global. Di tengah berbagai guncangan tersebut, Pemerintah melalui instrumen fiskal dan berbagai strategi kebijakan mampu menopang kinerja perekonomian. Kondisi tersebut terbukti dari perekonomian Provinsi DKI Jakarta yang terus tumbuh dalam kurun waktu 15 tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan 5,4% setiap tahunnya. Adapun untuk menghadapi tantangan jangka panjang dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Maju 2045, kebijakan fiskal DKI Jakarta di tahun 2025 akan diarahkan untuk melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan fokus utamanya adalah sebagai berikut: (1) Transformasi Ekonomi; (2) Daya Saing Ekonomi; (3) Investasi Daerah; (4) Daya Tarik Pariwisata; dan (5) Kesempatan Kerja.

Indonesia, melalui Kementerian PPN/Bappenas, dalam arah kebijakan pembangunan tahun 2025 menekankan pentingnya transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai pondasi utama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Pembangunan ekonomi inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mendorong ekspansi PDB, tetapi juga membuka akses dan kesempatan luas bagi seluruh masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. *World Economic Forum* (WEF) sendiri mendefinisikan ekonomi inklusif sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat. Sehingga, transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan akan menjadi perhatian utama Pemerintah, tidak terkecuali DKI Jakarta dalam perencanaan pembangunan ke depan. Transformasi ekonomi yang inklusif pada hakekatnya sejalan dengan prinsip "*Leave No One Behind*" dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang semakin relevan di tengah tingginya ketimpangan ekonomi dan digital. Sementara itu, transformasi ekonomi berkelanjutan diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mampu memperbaiki kerusakan lingkungan dan menjaga kualitas sumber daya alam untuk generasi mendatang, seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap krisis iklim dan degradasi lingkungan.

Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sangat berkaitan erat dengan konsep *Green Economy, Blue Economy,* serta *Gig Economy* yang menjadi semakin penting dan harus terintegrasi dalam kebijakan daerah. *Green Economy* atau ekonomi hijau secara sederhana dipandang sebagai ekonomi yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan bersifat inklusif secara sosial. *Blue Economy* atau ekonomi biru berkaitan dengan pembangunan yang terdiri atas berbagai sektor ekonomi dan kebijakan terkait yang memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Dapat disimpulkan bahwa *Green Economy* menjadi solusi dalam mendorong dekarbonisasi dan efisiensi energi, sedangkan *Blue Economy* relevan bagi pengelolaan wilayah pesisir Jakarta secara berkelanjutan. Berbeda halnya dengan *Green Economy* dan *Blue Economy* yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam untuk mencapai keberlanjutan, *Gig Economy* berfokus pada individu atau pekerja, yang mana *Gig Economy* disebut sebagai sistem ekonomi yang menunjukkan kondisi di mana seseorang dapat bekerja dengan bebas secara independen dan fleksibel, yang semakin berkembang di era digitalisasi. Ketiga konsep perekonomian di atas, ke depan perlu menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hal ini disebabkan oleh kondisi dimana *gap* antara realisasi dan potensi ekonomi di DKI Jakarta masih cukup besar, utamanya *Gig Economy* yang mempunyai potensi ekonomi yang tinggi namun sampai saat ini pelaksanaannya belum terakomodasi dalam payung hukum.

Selanjutnya, Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas juga telah mengeluarkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif yang dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan pembangunan dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Indeks sebagaimana dimaksud memuat tiga pilar utama, yaitu: (1) pertumbuhan

ekonomi tinggi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; serta (3) perluasan akses dan kesempatan. Dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi DKI Jakarta mengalami sedikit perlambatan dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 yang sebesar 4,96% menjadi 4,90% di tahun 2024. Perekonomian DKI Jakarta apabila dilihat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai Rp 3.679,36 triliun dan atas dasar harga konstan (2010) mencapai Rp 2.151,04 triliun. Kedepannya, walaupun perekonomian DKI Jakarta dalam beberapa periode terus mengalami pertumbuhan, namun kondisi ekonomi global masih terus diwarnai berbagai gejolak serta tantangan berat yang harus dimitigasi. Selain itu, untuk menjadi kota global, DKI Jakarta juga perlu melakukan akselerasi terobosan mengingat kondisi perekonomian DKI Jakarta yang masih relatif tertinggal dibandingkan kota-kota bisnis global lainnya.

Dari sisi ketimpangan ekonomi yang diukur melalui rasio Gini, sampai dengan tahun 2024 rasio gini Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 0,423. Adapun kemudian, jika dilihat berdasarkan nilai indeks, ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam kategori sedang, dikarenakan nilainya berada pada rentang 0,4-0,5. Namun demikian, naiknya angka ini juga patut menjadi perhatian dikarenakan semakin banyak penduduk yang pengeluarannya masuk ke kelompok 40 persen terbawah. Masuknya pendatang ke Ibu Kota diyakini menjadi salah satu penyebab meningkatnya rasio Gini, utamanya jika pendatang tersebut baru berproses untuk mencari kerja. Selain kondisi ketimpangan ekonomi, tingkat kemiskinan juga terus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dikarenakan ketahanan ekonomi inklusif juga berkorelasi erat dengan tingkat kemiskinan yang dalam implementasinya berkorelasi erat dengan aspek kehidupan lainnya (kesehatan, pendidikan, kualitas hidup masyarakat). Sebagaimana diketahui, tingkat kemiskinan DKI Jakarta mengalami penurunan menjadi sebesar 4,30% pada 2024. Walaupun demikian, capaian tersebut masih cukup jauh apabila dibandingkan dengan target kemiskinan DKI Jakarta untuk tahun 2024, yaitu 3,79%. Oleh karena itu, diperlukan upaya khusus dalam perbaikan kualitas kehidupan masyarakat DKI Jakarta, salah satunya melalui program peningkatan pendapatan masyarakat dan jaring pengaman sosial.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat serta dalam rangka mewujudkan Kota Jakarta yang berdaya saing adalah melalui pemberian kemudahan dalam berbisnis. Untuk mencapainya, DKI Jakarta perlu membenahi beberapa hal, salah satunya adalah terkait perizinan yang menjadi indikator Tingkat Kemudahan Berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB). Sampai dengan Agustus 2024, penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama di DKI Jakarta masih didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai sebesar 59,90%. Walaupun penduduk bekerja dengan status berusaha bukan menjadi status pekerjaan dengan persentase terendah, namun, *gap* besaran persentase dengan total penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai cukup besar. Kondisi tersebut dikarenakan belum optimalnya penyediaan lapangan kerja dan tingkat kemudahan berbisnis di DKI Jakarta. Padahal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyederhanakan proses dan prosedur perizinan dengan menghapus izin yang tidak lagi relevan sehingga berhasil mengurangi jenis izin/non izin untuk mendongkrak Tingkat Kemudahan Berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB), namun demikian hal tersebut masih belum memperlihatkan hasil yang maksimal.

Selain kemudahan dalam berbisnis, pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat juga penting untuk diperhatikan. Kondisi tersebut mengingat bahwa prospek kewirausahaan di DKI Jakarta cukup baik dan pengembangannya akan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Dalam menghadapi situasi ekonomi yang sangat kompetitif, sektor UKM dan industri kreatif dituntut lebih aktif dan dinamis sebagai mesin pertumbuhan ekonomi sosial. Sampai dengan saat ini, daya saing khususnya di sektor UKM masih ditemukan kerentanan dalam menghadapi tantangan pasar utamanya, yaittu berkaitan dengan potensi sumber daya manusia, kemampuan teknologi, serta akses keuangan. Perhatian khusus harus diberikan dalam sektor industri kreatif maupun UMKM, dikarenakan sektor industri kreatif maupun UMKM menjadi salah satu kontributor utama

untuk pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Keberadaan sentra ekonomi UKM dan industri kreatif juga perlu didukung dengan pasar yang memadai baik *offline* maupun *online*. Melalui keberpihakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui unit kerja pada urusan UMKM dan pariwisata, selain merevitalisasi sarana prasarana usaha UKM/Pedagang, juga perlu menciptakan *platform* sentra ekonomi berbasis digital dan/atau berkolaborasi dengan *unicorn marketplace* yang sudah ada, integrasi dengan pihak ketiga melalui kerjasama produk pariwisata, serta peningkatan kualitas dan kapasitas pelaku usaha untuk mendorong kreativitas dan menciptakan inovasi bisnis yang mumpuni.

Sektor pariwisata urban juga merupakan aspek strategis yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan dan investasi yang efektif. Pengembangan wisata konvensi di Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini dinilai belum optimal, karena Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki gedung konferensi dengan kapasitas besar dan bertaraf Internasional. Satu-satunya gedung dengan kapasitas besar yang tersedia adalah Jakarta *Convention Centre* (JCC). Selain wisata konvensi, wisata lain yang memiliki potensi cukup baik adalah wisata kuliner. Hal ini tidak terlepas dari keberagaman budaya yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta dan tidak ditemukan di daerah lain, namun, sampai dengan saat ini pusat-pusat kuliner di Provinsi DKI Jakarta masih sangat terbatas. Selain itu, mayoritas festival makanan yang ada juga masih diselenggarakan oleh swasta dan bukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mendasari beberapa kondisi di atas, maka 'akselerasi pertumbuhan ekonomi' dijadikan sebagai isu strategis pembangunan Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2025. Isu sebagaimana dimaksud, memiliki keselarasan dengan isu jangka menengah (lima tahunan) sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, yaitu isu Ketahanan Ekonomi Inklusif.

c. Kesejahteraan Masyarakat

Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan menjadi tolak ukur penting dalam sebuah pembangunan, adapun dalam implementasinya, kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui pemerataan pembangunan di berbagai sektor kehidupan. Pemerataan pembangunan itu sendiri pada hakekatnya menjadi salah satu tuntutan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dikarenakan strategi kebijakan pembangunan yang berpihak kepada pemerataan secara langsung dapat meningkatkan daya saing menuju kemakmuran yang berkeadilan. Kemakmuran yang berkeadilan sejatinya merupakan jawaban terhadap berbagai masalah ketimpangan yang sampai dengan saat ini masih menjadi tantangan besar bangsa Indonesia tidak terkecuali DKI Jakarta. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat menjadi isu strategis utama Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025 yang akan difokuskan pada beberapa hal, yaitu: (1) Kemiskinan; (2) Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial; (3) Layanan Pendidikan; (4) Partisipasi Pendidikan Tinggi; (5) Stunting; dan (6) Ketahanan Pangan.

Ketimpangan antar wilayah yang dalam hal ini dilihat berdasarkan persentase penduduk miskin masih ditemukan di DKI Jakarta. Sampai dengan Maret 2024 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (13,13%) dan wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara (6,78%) menjadi 2 (dua) wilayah dengan persentase penduduk miskin terbesar dibandingkan wilayah lainnya, bahkan persentase tersebut melampaui persentase penduduk miskin provinsi (4,44%). Disparitas lainnya yang memperlihatkan masih adanya ketimpangan antar wilayah di DKI Jakarta adalah nilai IPM antar wilayah. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menjadi satu-satunya wilayah dengan nilai IPM yang masih berada pada kisaran 70, yaitu sebesar 76,69 di tahun 2024. Begitu pula dengan Kota Administrasi Jakarta Utara, walaupun sudah mencapai angka 80, namun, besaran nilai IPM-nya masih berada di bawah IPM Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 82,13 di tahun 2024. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan bahwa konteks pemerataan masih

menjadi isu utama DKI Jakarta sampai dengan tahun 2025. Hal ini dikarenakan pemerataan pembangunan dianggap dapat menjadi jawaban dari permasalahan ketimpangan antar wilayah. Idealnya, pembangunan suatu wilayah sudah dianggap merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya apabila aksesibilitas terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur, serta pengembangan potensi sebagai bagian dari aktivitas ekonomi sudah terpenuhi dengan baik.

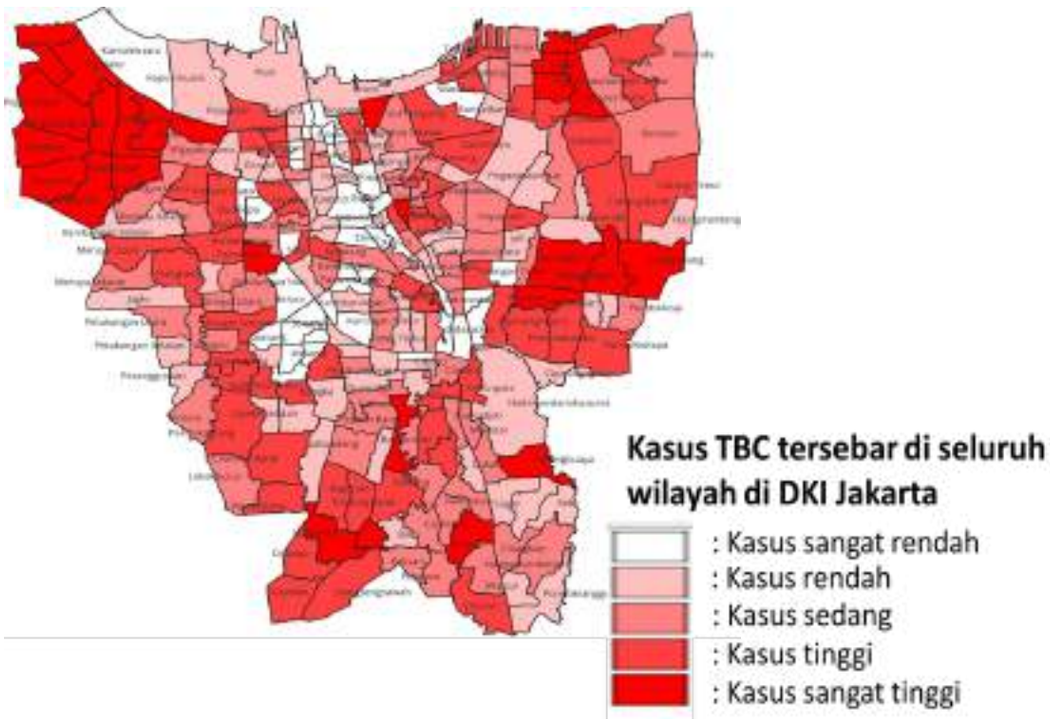
Sebagaimana diketahui, berbagai upaya sudah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menuntaskan masalah ketimpangan antar wilayah di Provinsi DKI Jakarta, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur berupa akses jalan yang merupakan bagian dari pemenuhan akan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur berupa akses jalan diyakini memiliki peran penting diantaranya sebagai katalisator antara proses produksi, pasar, dan konsumsi akhir serta memiliki peranan sebagai *social overhead capital* yang berkontribusi terhadap pertumbuan ekonomi. Akses jalan sebagaimana dimaksud telah diterapkan secara maksimal oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, disamping itu semua masih ditemukan bahwa infrastruktur berupa transportasi laut ke wilayah Kepulauan Seribu masih sangat terbatas utamanya untuk melayani pergerakan orang dan barang, sehingga mengurangi aksesibilitas dan konektivitas dengan kota lain di Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut terlihat dari data keadaan transportasi di Kepulauan Seribu yang tidak banyak berubah selama lima tahun terakhir, yang mana hingga saat ini Kep. Seribu hanya memiliki 40 kapal kayu, 21 kapal milik pemerintah, dan 9 kapal penumpang reguler.

Pemenuhan layanan dasar masyarakat seperti fasilitas pendidikan juga masih menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Masih ditemukan berbagai permasalahan khususnya dalam hal pemenuhan fasilitas pendidikan di DKI Jakarta sebagaimana sudah dijelaskan pada Tabel 4.8 di atas, antara lain belum terpenuhinya sebagian sarana prasarana pendidikan khususnya untuk sekolah-sekolah pinggiran, belum optimalnya ketersediaan, distribusi, dan kualitas tenaga pendidik (guru), dan belum meratanya ketersediaan sarana prasarana pendidikan khususnya untuk pendidikan informal. Pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan terjangkau oleh seluruh penduduk juga menjadi salah satu indikator dalam pemerataan pembangunan suatu wilayah. Sampai dengan tahun 2024, PPH Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 91,31 dari 100 (masih di bawah angka nasional yaitu 93,48 poin). Skor tersebut menunjukkan bahwa kualitas konsumsi masyarakat Provinsi DKI Jakarta masih belum beragam, atau yang dalam hal ini masih bergantung pada 1 (satu) jenis bahan pokok.

Selanjutnya, dengan segala keunggulan sumber daya manusia yang dimiliki dibandingkan dengan daerah lain, DKI Jakarta mampu menjadi *Center of Human Development* bagi Indonesia yang membawa kontribusi positif bagi daerah lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, kualitas sumber daya manusia tentunya menjadi hal yang penting untuk dikejar dan dijadikan sebagai fokus pembangunan. Salah satu aspek yang dapat menciptakan manusia sehat, berdaya saing, dan setara adalah pelayanan kesehatan. Perbaikan pelayanan kesehatan perkotaan dikembangkan secara menyeluruh sebagai suatu sistem yang tangguh, berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya baik fisik maupun non fisik. Dalam rangka menciptakan generasi emas sebagaimana dimaksud, diperlukan intervensi dalam meningkatkan derajat kesehatan pada berbagai siklus kehidupan. Dimulai dari pencegahan dan pengendalian penyakit menular, kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin, sampai kepada periode seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) yang merupakan simpul kritis sebagai awal terjadinya pertumbuhan stunting.

Penyakit menular yang saat ini menjadi perhatian khusus adalah tuberkulosis dan HIV/AIDS. Tuberkulosis (TB) saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat baik di Indonesia maupun internasional sehingga menjadi salah satu tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs).

Gambar 4.5
Kasus Tuberkulosis di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023



Sumber: Data TB SITB per 7 Maret 2024

TB merupakan salah satu dari 20 penyebab utama kematian di seluruh dunia. Tuberkulosis menyerang semua kalangan usia termasuk didalamnya balita yang akan berdampak pada gangguan tumbuh kembang anak yaitu stunting. Berdasarkan data pada Global TB Report 2023, Indonesia menempati peringkat kedua di dunia yang memiliki estimasi kasus TB baru sebanyak 1.060.000 kasus dengan kematian mencapai 134.000 per tahun, meningkat dibanding tahun 2022. Angka kematian TB di Indonesia pada tahun 2022 yaitu sebanyak 34 per 100.000 penduduk, sedangkan di Provinsi DKI Jakarta jumlah kematian akibat TB pada tahun 2022 sebesar 947 orang, mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 850 orang.

Selanjutnya, di tahun 2023 penemuan kasus TB secara keseluruhan di DKI Jakarta meningkat dibanding tahun 2022 dari 45.005 menjadi sebesar 60.420 kasus yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta (Gambar 4.5) menunjukan adanya insiden TB 535 per 100.000 penduduk. Angka tersebut berada di atas target penemuan kasus yang ditetapkan Kementerian Kesehatan sebesar 44.953 kasus. Berdasarkan data persebaran kasus TB tahun 2023, sebanyak 60.420 kasus di DKI Jakarta terdiri dari TB resisten obat sebanyak 1.203 kasus (2%), TB sensitif obat sebanyak 59.217 kasus (98%), TB anak sebanyak 9.684 kasus (16%), dan TB HIV sebanyak 1.765 kasus (3%). Tren peningkatan kematian TB disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah efek pandemi dimana banyak kasus TB yang tidak terobati atau terlaporkan dan baru muncul pasca pandemi berakhir. Kebutuhan untuk mengendalikan faktor risiko utama dalam menurunkan beban penyakit menular harus dipantau melalui pengawasan atau surveilans yang efektif secara rutin dan terkoordinasi, mengingat inisiasi/memulai pengobatan TB (*enrollment*) tahun 2023 masih di angka 86%, sementara angka keberhasilan pengobatan (*success rate*) TB di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 adalah sebesar 81%. Angka ini belum memenuhi sasaran nasional yaitu 90% maupun capaian nasional yaitu 86%.

Berbeda halnya dengan TB, *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) merupakan virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan kekebalan sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sedangkan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) merupakan sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Orang yang terinfeksi HIV memerlukan

pengobatan *Antiretroviral* (ARV) untuk menekan jumlah virus HIV di dalam tubuh. Tren jumlah kasus HIV positif yang dilaporkan dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2022 dilaporkan terdapat sebanyak 52.955 kasus di tingkat nasional dan 5.982 kasus berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Namun, tren jumlah kasus AIDS cenderung menurun. Pada tahun 2022 dilaporkan sebanyak 9.901 kasus di tingkat nasional dan 103 kasus berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan angka ini, DKI Jakarta menempati peringkat ke-7 provinsi terbanyak penderita AIDS nasional. Pada HIV dan AIDS, proporsi kasus kelompok laki-laki lebih besar dibandingkan pada kelompok perempuan, dimana laki-laki sebanyak 4.848 kasus HIV positif dan perempuan sebanyak 1.134 kasus. Sedangkan pada AIDS, kasus pada laki-laki sebanyak 93 dan perempuan sebanyak 10 kasus di tahun 2022. Adapun kemudian, sebagian besar sebaran kasus HIV dan AIDS terdapat pada kelompok umur produktif 15-49 tahun. Sementara itu masih ditemukan kasus HIV pada kelompok usia dibawah 4 tahun yang menunjukkan penularan HIV dari ibu ke anak.

Kasus kesehatan lainnya, yang sampai dengan saat ini masih menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah stunting. Stunting merupakan kondisi di mana tinggi badan anak lebih pendek daripada standar usianya akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil menurunkan angka stunting, yaitu dari total kasus stunting di seluruh wilayah yaitu berjumlah 22.000 kasus, 9.000 kasus di antaranya sudah dituntaskan. Walaupun sudah terdapat penurunan jumlah kasus stunting, namun angka tersebut masih memberikan gambaran bahwa masih terdapat kasus stunting di Provinsi DKI Jakarta. Adapun cita-cita besar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah prevalensi kasus stunting dapat mencapai 0%. Untuk mengentaskan stunting di DKI Jakarta, pemerintah akan mengawal dengan serius terkait faktor sensitif berupa lingkungan, tingkat disiplin orang tua, dan jarak antar kelahiran, mengingat dalam satu tahun terdapat 158 ribu pernikahan di DKI Jakarta, yang kemudian dari jumlah tersebut sebanyak 75 ribu pasangan dipastikan hamil pada tahun pertama pernikahan. Selain itu, sampai dengan saat ini pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi masih terhitung rendah, kondisi tersebut juga menyebabkan tingginya angka perkawinan anak yang kemudian berdampak pada tingginya prevalensi stunting. Tingkat kedisiplinan orang tua dalam memantau kesehatan dan tumbuh kembang anak saat dalam usia dini juga menjadi penting. PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mendapati bahwa dalam kurun waktu satu jam, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap 15 anak, 3 diantaranya sudah masuk ke dalam kategori stunting.

Mendasari beberapa kondisi di atas, maka 'kesejahteraan masyarakat' dijadikan sebagai isu strategis pembangunan Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2025. Isu sebagaimana dimaksud, memiliki keselarasan dengan isu jangka menengah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, yaitu isu Pemerataan Pembangunan dan isu Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara.

d. Tata Kelola Pemerintahan

Adaptive Governance atau tata kelola pemerintahan yang adaptif merupakan suatu model pemerintahan yang berusaha untuk menyesuaikan dan merespon perubahan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sederhananya, *adaptive governance* merupakan model pemerintahan yang mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, yang mana model pemerintahan ini mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan efisien. Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu aspek yang perlu untuk diperhatikan dan ditingkatkan dalam rangka tata kelola pemerintahan yang adaptif. Pelayanan publik itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik harus selalu diupayakan dan diwujudkan. Oleh karena itu, inovasi pelayanan publik menjadi hal penting pada saat ini guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih maksimal.

Pemerintahan dinamis (*dynamic governance*) menjadi sangat penting dalam pemenuhan pelayanan publik. Konsep pemerintahan dinamis merupakan konsep yang menekankan pada kebijakan, institusi dan struktur yang mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, konsep pemerintahan dinamis perlu didukung oleh pola pikir penyelenggara pelayanan publik yang sejatinya dituntut untuk lebih dinamis (melalui jalur maupun kebijakan yang adaptif), sehingga dapat terwujud pelayanan publik yang prima dan berkualitas sebagaimana diharapkan oleh seluruh masyarakat. Pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berkualitas. Reformasi birokrasi secara berkesinambungan menjadi mutlak untuk dilakukan yang mana itu dapat terwujud jika pemerintah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur serta tata laksana dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Adapun permasalahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang sampai saat ini masih ditemukan di Provinsi DKI Jakarta, yaitu masih perlunya penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi, serta pembenahan birokrasi terkait perubahan budaya kerja (profesionalisme dan akuntabilitas). Selain itu, masih diperlukan pula upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyesuaian struktur organisasi, dan jumlah pegawai untuk mewujudkan organisasi tepat ukuran dan fungsi yang lebih optimal dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya, sampai dengan tahun 2023, masih ditemukan berbagai permasalahan pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta itu sendiri, yaitu:

(1) Waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan keluhan masih terhitung lama, hal tersebut dikarenakan proses validasi yang cukup panjang dan memakan waktu.
(2) Nomor telepon *online* (pengaduan) yang disediakan tidak bisa dihubungi.
(3) Pungutan uang jasa yang diminta masih terhitung besar.
(4) Masih kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan, pemberian bimbingan, pengawasan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan terkait layanan publik.
(5) Meningkatnya indeks kerawanan keamanan yang disebabkan oleh konflik antar masyarakat dan kriminalitas.

Oleh karena itu, untuk merespon permasalahan pelayanan publik tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu dituntut untuk terus berjalan secara dinamis (pemerintah yang bertindak progresif dan adaptif) dan ditantang untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat juga menjadi potensi kekuatan atau tantangan dalam pembangunan di DKI Jakarta. DKI Jakarta pasca pemindahan ibukota akan dikembangkan menjadi kota ekonomi-bisnis berskala global yang mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mewujudkan kebahagiaan bagi warganya. Konsep Jakarta 4.0 merupakan langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku *collaborator* dan masyarakat selaku *co-creator* bersama-sama saling berkolaborasi untuk menghasilkan inovasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan kota dan meningkatkan kualitas kehidupan. Dalam langkah menuju Jakarta 4.0, kebutuhan akan data yang akuntabel, berkualitas, dan mudah diakses merupakan hal mendesak yang diperlukan bagi seluruh pelaksana dan mitra pembangunan di instansi pusat maupun daerah dalam mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan berbasis bukti *(evidence-based policy)*. Perbaikan tata kelola data pemerintah penting untuk mendukung Transformasi Digital dalam bentuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Sistem Statistik Nasional (SSN) sesuai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam menghadapi tantangan di era disrupsi. Semangat inilah yang mendasari penetapan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Gambar 4.6
Keterhubungan Ruang Lingkup SPBE dengan Ruang Lingkup SDI



Sumber: Perpres Nomor 39 Tahun 2019, (2024)

Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, dijelaskan bahwa terdapat empat tujuan utama ditetapkannya Kebijakan Satu Data Indonesia. Pertama, Kebijakan Satu Data Indonesia memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data. Satu Data Indonesia juga diharapkan dapat mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Satu Data Indonesia dapat mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data, serta kebijakan Satu Data Indonesia ditetapkan untuk mendukung Sistem Statistik Nasional. Dalam mewujudkan tersedianya data yang berkualitas, penyelenggaraan Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan empat prinsip Satu Data Indonesia, meliputi;

a. Data harus memenuhi Standar Data, meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan;
b. Data harus memiliki Metadata, yaitu informasi terstruktur yang digunakan untuk menjelaskan isi dan sumber data untuk mempermudah pencarian, penggunaan, dan pengelolaan;
c. Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, yaitu memiliki kemampuan dipertukar atau bagi-pakaikan antar instansi dan sistem yang saling berinteraksi; dan
d. Data harus menggunakan Kode Referensi, yaitu rujukan identitas data yang bersifat unik, dan/atau Data Induk, yaitu data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah.

Berdasarkan amanat pada Pasal 21 ayat (5), dan Pasal 22 ayat (21 dan Pasal 24 ayal (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamanatkan penyusunan regulasi di seluruh Pemerintah Daerah baik tingkat Povinsi/ Kabupaten/ Kota berupa instrumen Peraturan, berupa Peraturan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di lingkup Instansi Daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki instrumen Peraturan berupa Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi. Selain diterbitkan pula Keputusan Gubernur yang menetapkan Daftar Data Daerah untuk menjamin ketersediaan data Pemerintah yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan baik

oleh Instansi Pemerintah, akademisi maupun masyarakat umum. Penyelenggara SDI Tingkat Provinsi DKI Jakarta terdiri dari pembina data, walidata, walidata pendukung dan produsen data. Dalam mendukung komunikasi dan koordinasi penyelenggara SDI tingkat provinsi dibentuk forum SDI tingkat provinsi. Forum SDI terdiri dari pembina data, walidata dan walidata pendukung, serta dalam menjalankan tugasnya dapat menyertakan produsen data. Forum SDI tingkat provinsi berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesiakan permasalahan terkait penyelenggaran SDI tingkat provinsi dan melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.

Berdasakan berbagai kondisi dan tantangan di atas, tata kelola pemerintahan dijadikan sebagai isu strategis utama Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025 dengan fokus utama, yaitu: (1) Transformasi dan Digitalisasi; (2) Layanan Publik; (3) Penggunaan TIK; serta (4) Iklim Riset dan Inovasi.

4.4.3 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan reses. Hal ini sesuai dengan Pasal 348 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa DPRD berhak untuk memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikirannya untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat. Pokok-pokok pikiran DPRD itu sendiri dalam proses perencanaan pembangunan bertujuan untuk:

a. Memberikan bahan, arahan dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
b. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA OPD, dan RAPBD;
c. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi melalui perencanaan dan penganggaran APBD;
d. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD;
e. Menjamin terwujudnya aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD; dan
f. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan prioritas pembangunan tahun 2025. Adapun penjabaran pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan isu prioritas RPD 2023-2026 dan isu prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 4.9
Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta

Isu Prioritas RPD Tahun 2023-2026	Isu Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
(1)	(2)	(3)
Ketahanan Terhadap Bencana	Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota	1. Permohonan pembangunan saluran air (drainase), khususnya untuk daerah yang belum memiliki saluran air dan kawasan yang berpotensi tinggi banjir. 2. Permohonan Pemeliharaan saluran air (drainase), khususnya pada saluran air yang tersumbat dan rusak berat untuk penanggulangan banjir. 3. Permohonan pembangunan dan peningkatan tanggul, turap, dan *sheet pile*
Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas		

Isu Prioritas RPD Tahun 2023-2026	Isu Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
(1)	(2)	(3)
		pada aliran sungai untuk mencegah luapan sungai yang dapat mengakibatkan potensi banjir. 4. Permohonan pembangunan dan peningkatan situ, waduk, dan embung sebagai salah satu infrastruktur penampungan limbahan air sungai untuk pencegahan luapan sungai yang dapat mengakibatkan potensi banjir; 5. Permohonan penyediaan peralatan dan perlengkapan untuk mengurangi dampak bencana banjir. 6. Permohonan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan jalan; 7. Peningkatan pelayanan transportasi publik untuk mengurangi ketergantungan mobilitas dengan kendaraan pribadi; 8. Permohonan pemasangan rambu lalu lintas untuk memberikan kenyamanan berkendara dan mengurangi kemacetan; 9. Penertiban parkir liar kendaraan yang menghambat mobilitas perjalanan.
Ketahanan Ekonomi Inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	1. Permohonan bantuan dana untuk kegiatan UMKM yang berdampak pada akselerasi pertumbuhan dan kemandirian ekonomi masyarakat; 2. Permohonan pengembangan koperasi dan UMKM sebagai wadah masyarakat berusaha yang dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat; 3. Permohonan pengembangan kawasan wisata tematik untuk daya Tarik pariwisata lokal untuk peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif; 4. Permohonan pelaksanaan pelatihan dan pendampingan UMKM untuk menciptakan produk unggul dan berdaya saing;
Pemerataan Pembangunan Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara	Kesejahteraan Masyarakat	1. Permohonan pemerataan bantuan pendidikan dan bantuan jaminan sosial kepada masyarakat miskin untuk mengurangi beban pengeluaran pokok masyarakat; 2. Permohonan untuk membuat sistem bantuan sosial yang lebih tepat sasaran kepada masyarakat miskin yang membutuhkan; 3. Permohonan pemerataan pelatihan kerja bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan daya saing kerja yang berdampak kepada pendapatan masyarakat;

Isu Prioritas RPD Tahun 2023-2026	Isu Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
(1)	(2)	(3)
		4. Permohonan keterbukaan akses informasi terkait lowongan pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat; 5. Permohonan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarga miskin di setiap wilayah sebagai upaya penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan; 6. Permohonan pemerataan program pasar murah di setiap wilayah untuk menurunkan beban pengeluaran pokok masyarakat; 7. Permohonan penyediaan peralatan dan perlengkapan layanan Kesehatan sebagai respons cepat penanganan stunting; 8. Permohonan pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan serta sarana prasarana penunjang untuk mempermudah layanan kesehatan sebagai upaya percepatan penurunan stunting melalui infrastruktur; 9. Permohonan bantuan obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk penanganan stunting dan pemenuhan gizi anak; 10. Permohonan kemudahan akses kesehatan dengan mengakomodasikan BPJS sebagai sarana jaminan kesehatan untuk penurunan stunting; 11. Peningkatan kebutuhan ambulans sebagai layanan kesehatan keliling untuk percepatan penurunan stunting.
Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	1. Permohonan untuk melakukan transparansi pada setiap program kerja khususnya pada aspek sosial sehingga menciptakan kebijakan yang akuntabel dan tepat sasaran; 2. Permohonan kemudahan pembuatan sertifikat lahan menggunakan sistem digitalisasi; 3. Perluasan sosialisasi KTP digital untuk menunjang kemudahan administrasi masyarakat; 4. Permohonan kemudahan layanan pengajuan kartu kuning yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan sebagai tanda masyarakat pencari kerja menggunakan teknologi digital.

Sumber: Penelaahan Hasil Reses DPRD Tahun 2023 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa aspirasi masyarakat yang terangkum dalam pokok-pokok pikiran DPRD memiliki keselarasan dengan isu prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa isu prioritas pembangunan yang sampai dengan tahun 2025 masih menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga masih menjadi isu yang diprioritaskan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025, pokok-pokok pikiran DPRD, selanjutnya akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam merumuskan prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 beserta fokus pembangunan dan program pendukung.

4.5 Prioritas Pembangunan Tahun 2025

4.5.1 Prioritas Pembangunan Wilayah dalam RKP Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan gerbang menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita luhur untuk membangun bangsa yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Salah satu tujuan utama pembangunan nasional yaitu mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia. Untuk mencapai tujuan pengurangan kesenjangan antarwilayah, kebijakan pembangunan kewilayahan difokuskan pada pengembangan wilayah menjadi lebih merata dan berkeadilan, termasuk keselarasan pembangunan perkotaan sebagai pusat aglomerasi serta perdesaan sebagai lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam berkelanjutan. Hal ini didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Dalam upaya pemerataan pembangunan kewilayahan, dibutuhkan pula intervensi kebijakan berbasis pulau melalui penyiapan tema pembangunan wilayah sesuai dengan keunggulan daerahnya masing-masing. Kebijakan tersebut kemudian didetailkan sampai level provinsi dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan wilayah melalui pelaksanaan delapan Prioritas Nasional. Implementasi Prioritas Nasional didukung pula oleh penerapan beberapa kebijakan umum yang berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah, serta Pemenuhan Infrastruktur dan Layanan Dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Selain itu, sebagai upaya mengurangi kesenjangan wilayah yang memiliki keterbatasan aksesibilitas terhadap sumber daya pembangunan, prioritas intervensi diarahkan berbasis pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi sesuai karakteristik wilayah. Selain itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat regional hingga nasional, peningkatan pengelolaan urbanisasi dalam rangka mewujudkan perkotaan yang berkelanjutan jugamenjadi prioritas intervensi. Adapun berbagai kebijakan umum dalam mendukung implementasi Prioritas Nasional di tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.10
Kebijakan Umum yang Mendukung Implementasi Prioritas Nasional Tahun 2025

Kebijakan Umum	Keterangan
(1)	(2)
Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah	a. Penuntasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di semua hierarki (Nasional, Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) serta integrasi Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dengan sistem *Online Single Submission.* b. Pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. c. Penataan otonomi daerah menyasar pada penguatan harmonisasi regulasi pusat-daerah dan kebijakan kerja sama multiaktor; peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah. Selain itu, diperlukan optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah). d. Penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang lengkap, akurat, serta didukung dengan penguatan tata kelola untuk meningkatkan akses dan pemanfaatannya. e. Penguatan fondasi keuangan daerah melalui intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, akses pemanfaatan pendanaan alternatif, serta tata kelola dan transparansi keuangan daerah. f. Percepatan reforma agraria, penuntasan sertipikasi tanah menuju sistem pendaftaran tanah stelsel positif, dan percepatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital.

Kebijakan Umum	Keterangan
(1)	(2)
Infrastruktur dan Layanan Dasar	a. Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang mencakup 1 tahun pra-sekolah (TK/RA/BA) serta 12 tahun 12 tahun pendidikan dasar dan menengah, terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah. b. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, serta penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola. c. Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan. d. Penuntasan pemerataan pelayanan ketenagalistrikan rendah karbon termasuk melalui pengembangan infrastruktur, serta penyediaan bantuan dan subsidi tenaga listrik tepat sasaran e. Pengembangan konektivitas dasar (komersial dan non komersial) serta fasilitas keselamatan keamanan transportasi termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM transportasi f. Peningkatan ketahanan sumber daya air berbasis alam (*nature-based solution*) melalui peningkatan infrastruktur tampungan air, penyediaan pasokan air, dan pengelolaan risiko daya rusak air. g. Penguatan sarana dan prasarana publik dan hunian berketahanan bencana. h. Penuntasan konektivitas digital, perluasan jangkauan layanan komunikasi, dan peningkatan literasi digital. i. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir menuju ekonomi sirkular. j. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim.
Pembangunan Perdesaan dan Daerah Afirmasi	a. Peningkatan kemandirian perdesaan berkelanjutan melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan ketahanan sosial, pelestarian lingkungan, pengembangan SDM, penguatan tata kelola, serta pembangunan kawasan perdesaan. b. Pembangunan kawasan perbatasan dengan fokus mendorong stabilitas pertahanan dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi tata kelola pemerintahan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. c. Pengembangan kawasan transmigrasi melalui peningkatan produksi dan nilai tambah produk unggulan. d. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang didorong untuk bertransformasi menjadi daerah berkembang, maju, hingga mandiri, dengan fokus pada peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan akses infrastruktur dasar dan konektivitas, penguatan tata kelola pembangunan, serta peningkatan ketahanan pangan, mitigasi bencana, dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
Pengelolaan Pusat Pertumbuhan	a. pengelolaan urbanisasi melalui pengembangan wilayah metropolitan, kota besar dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan yang berkelanjutan dan didukung oleh konektivitas yang memadai dan kelembagaan yang adaptif. b. pengembangan pusat pertumbuhan baru sesuai dengan potensi keunggulan daerah (industri pengolahan sumber daya alam, agropolitan, wisata alam, dan budaya) serta penguatan dan optimalisasi pusat pertumbuhan eksisting. c. penuntasan dan pemanfaatan proyek strategis nasional yang bersifat kawasan melalui percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, evaluasi dan penyiapan *carry over* proyek strategis nasional, serta penguatan kerja sama pengelolaan proyek strategis nasional.

Sumber: RKP Tahun 2025

Selain kebijakan umum sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.10 di atas, serta dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Pulau Jawa di tahun 2025 untuk menjadi pulau "Megapolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan" juga terdapat intervensi-intervensi spesifik yang akan diimplementasikan pada setiap provinsi untuk mendukung setiap prioritas nasional. Adapun intervensi pembangunan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.11
***Highlight* Indikasi Intervensi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025**

Prioritas Nasional	*Highlight* Indikasi Intervensi
(1)	(2)
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1. Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila 2. Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil 3. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pembangunan SPAM kabupaten/kota mendukung Kawasan Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus) 2. Pembangunan jaringan perpipaan SPAM Regional Karian-Serpong Wilayah Jakarta 3. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota di DKI Jakarta (Jakarta *Sewerage Development Project* Zona 1 dan Zona 6) 4. Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfataan ruang laut 5. Pengembangan diversifikasi pangan
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/*New Priok Eastern Access* (NPEA) (BUMN); Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Semanan–Grogol dan Grogol–Kelapa Gadung (BUMN) 2. Penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif, ekosistem film, animasi, video, fesyen, kriya, aplikasi, gim, dan kuliner 3. Penguatan destinasi regeneratif *Greater* Jakarta 4. Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	1. Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang mencakup 1 tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah 2. Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afimarsi melalui Program Indonesia Pintar 3. Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat 4. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal 5. Memperluas kumpulan bakat (*talent pool*) dan memperbaiki mekanisme akuisisi talenta riset dan inovasi 6. Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi 7. Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi 8. Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya

Prioritas Nasional	*Highlight* Indikasi Intervensi
(1)	(2)
	9. Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga 10. Pengembangan tata kelola MTN olahraga 11. Penguatan basis data terpadu MTN dan sinergi pelaksanaan MTN 12. Peningkatan kesetaraan gender, khususnya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan TPPO 13. Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) 14. Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas 15. Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK 16. PIK remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja 17. Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN 18. Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria 19. Pencegahan dan penurunan stunting dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita 20. Layanan survei faktor risiko penyakit TB 21. Pengendalian penyakit kusta 22. Layanan survei faktor risiko penyakit HIV/AIDS 23. Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RS 24. Pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan spesialis 25. Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RS 26. Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna 27. Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah 28. Pembangunan sarana dan prasarana Cibubur *Youth Elite Sport Center* (CYESC) 29. Penataan sarana dan prasarana olahraga 30. Pencegahan perilaku berisiko pemuda 31. Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda 32. Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas 33. Asistensi rehabilitasi sosial lansia
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki) 2. Peningkatan adopsi teknologi, *smart manufactoring*, dan pemanfaatan riset/inovasi di industri alat angkut, elektronik dam digital, serta kimia dan farmasi
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Pengembangan transportasi publik perkotaan Wilayah Metropolitan Jakarta yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan *Transit Oriented Development* (TOD), antara lain melalui perluasan jaringan BRT terintegrasi, peningkatan layanan KA komuter, pengembangan LRT Jakarta, serta pengembangan MRT Jakarta Utara-Selatan dan MRT Timur-Barat 2. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan normalisasi pada Kali Ciliwung

Prioritas Nasional	*Highlight* Indikasi Intervensi
(1)	(2)
	3. Perencanaan kawasan untuk mewujudkan sistem perkotaan nasional 4. Peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan layak huni, inklusif, dan berbudaya 5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan 6. Peningkatan kapasitas tata kelola perkotaan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, cerdas, dan terpadu 7. Penyediaan infrastruktur dan layanan angkutan umum massal 8. Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat 9. KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako 10. Bantuan PSU bidang perumahan 11. Bantuan pembangunan rumah swadaya 12. Pemugaran permukiman kumuh 13. Peningkatan kualitas lingkungan dan ketangguhan bencana untuk mewujudkan perkotaan yang hijau dan tangguh di WM Jakarta
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	1. Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatan PAD 2. Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda 3. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif 4. Penguatan basis data potensi objek PDRD 5. Tata kelola penerimaan SDA migas, non-SDA, SDA nonmigas yang bernilai tambah tinggi 6. Tata kelola pengelolaan aset 7. Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatan kepatuhan 8. Penyediaan peta dasar skala besar 9. Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	1. Pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana

Sumber: RKP Tahun 2025

4.5.2 Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah merupakan tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak pencapaian suatu target pembangunan. Prioritas pembangunan disusun dengan mempertimbangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Rumusan prioritas pembangunan daerah dilengkapi dengan tolok ukur kinerja keluaran setiap kelompok program beserta kebutuhan pembiayaannya. Tolok ukur kinerja dan kebutuhan pembiayaan prioritas pembangunan nantinya akan digunakan sebagai dasar

perhitungan pagu. Oleh karena itu, prioritas pembangunan beserta program pendukungnya, idealnya disusun berdasarkan skala prioritas dengan tetap memperhatikan korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, visi dan misi Kepala Daerah, arah pembangunan daerah di setiap tahunnya, pengembangan sektor/bidang unggulan daerah, serta permasalahan dan isu strategis daerah.

Prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 disusun untuk menjawab 4 (empat) isu strategis pembangunan sebagaimana telah dirumuskan pada bagian sebelumnya, yaitu: (a) kualitas lingkungan dan infrastruktur kota; (b) pertumbuhan ekonomi; (c) kesejahteraan masyarakat; (d) tata kelola pemerintahan. Prioritas pembangunan juga disusun dengan memperhatikan Tema Pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025, yaitu:

"**Mewujudkan Jakarta Kota Global yang Berketahanan, Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan**"

Selanjutnya, setiap prioritas pembangunan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan fokus utama pembangunan di tahun 2025 yang perumusannya selain mempertimbangkan isu strategis pembangunan juga mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2023. Adapun rumusan prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.12
Rumusan Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Isu Prioritas RPD Tahun 2023-2026	Isu Pembangunan Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)
Ketahanan Terhadap Bencana	Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota	**Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota** dengan fokus utama, yaitu: 1. Peningkatan Kualitas dan Cakupan Transportasi Publik 2. Penanggulangan Banjir 3. Perbaikan Kualitas Lingkungan 4. Penanganan Sampah 5. Penerapan Energi Baru Terbarukan 6. Pemenuhan Air Bersih dan Air Minum 7. Ketahanan Bencana 8. Peningkatan Kualitas Udara 9. Peningkatan Akses Hunian Layak
Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas		
Ketahanan Ekonomi Inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi** dengan fokus utama, yaitu: 1. Transformasi Ekonomi (*Green Economy, Blue Economy, Gig Economy, Digitalization*) 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi 3. Peningkatan Investasi Daerah 4. Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Melalui *Cultural Interaction* 5. Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Isu Prioritas RPD Tahun 2023-2026	Isu Pembangunan Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)
Pemerataan Pembangunan	Kesejahteraan Masyarakat	**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat** dengan fokus utama, yaitu: 1. Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi 2. Percepatan Penuntasan dan Pencegahan Stunting 3. Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan 4. Optimalisasi Cakupan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial 5. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan 6. Penguatan Ketahanan Pangan
Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara		
Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan	**Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif** dengan fokus utama, yaitu: 1. Transformasi dan Digitalisasi 2. Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Publik 3. Penggunaan TIK dalam Mendorong Jakarta menjadi Kota Kreatif 4. Penciptaan Iklim Riset dan Inovasi yang Berkualitas

Sumber: Olahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2024

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, 4 (empat) prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025, yaitu:

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota;
b. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi;
c. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; dan
d. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif.

Empat prioritas pembangunan tersebut diharapkan dapat secara langsung menjawab isu prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025. Selain itu, 4 (empat) prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud juga diharapkan dapat mendukung secara langsung ketercapaian 4 (empat) dimensi, 4 (empat) tujuan, dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 untuk periode tahun 2025, serta menjadi langkah awal untuk menuju Jakarta sebagai Kota Global. Selanjutnya, untuk mendukung ketercapaian target dimensi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025, serta sebagai langkah awal menuju Jakarta sebagai Kota Global, setiap prioritas pembangunan memiliki keterkaitan langsung dengan berbagai komponen tersebut. Adapun keterkaitan antara prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 dengan parameter Kota Global, dimensi, tujuan, dan sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut.

Tabel 4.13
Keterkaitan Dimensi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Parameter Kota Global	Dimensi/Tujuan Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Ekonomi yang Mapan dan Terkoneksi Secara Global 2. Kapasitas Riset dan Inovasi yang Baik dan Menerus 3. Ruang yang Nyaman untuk Dihuni 4. Menarik Wisatawan untuk Berkunjung 5. Lingkungan yang Bersih, Nyaman, dan Berkelanjutan 6. Aksesibilitas yang Terkoneksi Secara Intra dan Inter Kota	***Built Environment*** Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	**Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota** dengan fokus utama, yaitu: 1. Peningkatan Kualitas dan Cakupan Transportasi Publik 2. Penanggulangan Banjir 3. Perbaikan Kualitas Lingkungan 4. Penanganan Sampah 5. Penerapan Energi Baru Terbarukan 6. Pemenuhan Air Bersih dan Air Minum 7. Ketahanan Bencana 8. Peningkatan Kualitas Udara 9. Peningkatan Akses Hunian Layak
		Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	
		Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	
		Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	
	Economic Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi** dengan fokus utama, yaitu: 1. Transformasi Ekonomi (*Green Economy, Blue Economy, Gig Economy, Digitalization*) 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi 3. Peningkatan Investasi Daerah 4. Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Melalui *Cultural Interaction* 5. Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja
		Penguatan Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	
		Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	

Parameter Kota Global	Dimensi/Tujuan Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial	**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat** dengan fokus utama, yaitu: 1. Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi 2. Percepatan Penuntasan dan Pencegahan Stunting 3. Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan 4. Optimalisasi Cakupan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial 5. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan 6. Penguatan Ketahanan Pangan
	Human Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	
		Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	
		Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender	
		Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	**Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif** dengan fokus utama, yaitu: 1. Transformasi dan Digitalisasi 2. Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Publik 3. Penggunaan TIK dalam Mendorong Jakarta menjadi Kota Kreatif 4. Penciptaan Iklim Riset dan Inovasi yang Berkualitas
	Governance Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas		

Sumber: Olahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2024

Adapun penjabaran untuk masing-masing prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 adalah sebagai berikut.

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota

Pembangunan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dalam pelaksanaannya, suatu pembangunan harus memperhatikan berbagai aspek mulai dari potensi yang dimiliki wilayah setempat sampai kepada kondisi lingkungan yang ada, baik fisik (tanah, air, udara), biotik (flora, fauna), serta kultur (budaya, interaksi antar manusia). Penelitian dan pengkajian yang mendalam terhadap seluruh aspek yang saling berkaitan

menjadi penting sebelum sebuah pembangunan dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan pembangunan yang tidak memiliki konsep dapat menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan. Kondisi kualitas lingkungan juga akan terus menurun jika sebuah pembangunan tidak diimbangi dengan konsep perencanaan pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh adalah terjadinya perubahan iklim yang sering melanda kota-kota besar. Kondisi tersebut merupakan salah satu dampak dari pembangunan yang kurang terkontrol dan tidak memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan.

Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta saat ini. Hal tersebut dikarenakan tingkat urbanisasi yang cukup tinggi telah menyebabkan perkembangan dan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta tumbuh dengan sangat pesat. Pertumbuhan sebagaimana dimaksud utamanya dalam memenuhi standar infrastruktur dan layanan dasar agar dapat berdiri sejajar dengan kota global lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang lebih inklusif, non-diskriminatif, serta berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan berkualitas yang dimaksud antara lain mencakup akses air bersih, sanitasi layak, dan permukiman layak huni. Upaya konservasi dan pengelolaan air secara berkelanjutan akan dilakukan dengan merehabilitasi sumber daya air, meminimalkan kebocoran air, mendorong penggunaan kembali air, dan menambah tempat penyimpanan dan penampungan air sebagai alternatif sumber air baku dengan mempertimbangkan siklus air. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2023 akses layanan sumber air minum layak di Provinsi DKI Jakarta telah mencapai 99,42%, namun, untuk akses air minum perpipaan baru mencapai 65,85%, dengan tingkat kebocoran sebesar 46,67% NRW (*non-revenue water*). Tingkat kebocoran air tersebut memberikan gambaran bahwa dalam satu tahun, DKI Jakarta telah kehilangan sebanyak 46,67% air.

Berdasarkan kondisi di atas, pada akhir tahun perencanaan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk meningkatkan akses air minum perpipaan hingga 89,02% dan menurunkan tingkat kebocoran NRW menjadi 40%. Diharapkan pada tahun 2030 akses ini dapat mencapai target 100% sebagaimana amanat *Sustainable Development Goals* (SDGs). Upaya yang akan dilaksanakan antara lain melalui:

a. Penurunan NRW baik fisik maupun komersial
b. Pembangunan SPAM Regional (Jatiluhur, Karian- Serpong, Buaran III, dan lainnya)
c. Pembangunan dan peningkatan SPAM komunal (Pesanggrahan, Ciliwung, Cilandak, Hutan Kota, Taman Kota, dan lainnya)
d. Peningkatan tata kelola air di Provinsi DKI Jakarta

Perhatian tersendiri juga diberikan kepada penyediaan cakupan layanan air bersih di daerah krisis air seperti kampung prioritas (diantaranya Rawa Timur, Guji Baru, Kali Sekretaris, Blok Empang, Enceng, dan Kerang Hijau) melalui pemberian subsidi yang memperhatikan keterjangkauan masyarakat dan keuangan daerah. Prioritas peningkatan cakupan layanan air bersih lainnya, yaitu wilayah Kepulauan Seribu, khususnya pulau-pulau berpenduduk yang akan ditingkatkan kapasitas pengolahan air bersihnya dengan teknologi yang tidak terbatas pada teknologi *sea water reverse osmosis* (SWRO), tetapi juga disertai peningkatan tata kelola dan alih kelola SWRO tersebut oleh PAM Jaya.

Selanjutnya, selain ketersediaan air bersih dan air minum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus mengupayakan peningkatan sanitasi layak sebagai bentuk pemenuhan pelayanan dasar melalui peningkatan pengelolaan sektor air limbah dan persampahan. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan cakupan layanan air limbah menjadi 24,176% pada akhir tahun perencanaan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026, diantaranya melalui:

a. Akselerasi penetapan dan implementasi kebijakan pengelolaan limbah domestik
b. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) komunal
c. Peningkatan tata kelola dan alih kelola SPALD komunal dan kepastian tarifnya

d. Subsidi pengolahan air limbah, salah satunya melalui revitalisasi tangki septik dalam rangka pengurangan buang air besar sembarangan (BABS)
e. Penyelesaian pembangunan Jakarta *Sewerage System* (JSS)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mendorong peningkatan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan mengubah sampah menjadi energi alternatif. Belum optimalnya pengurangan sampah di sumber dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah menyebabkan masih tingginya timbulan sampah di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini mengakibatkan volume sampah yang harus diolah TPST Bantargebang melebihi kapasitas tampung. Adapun upaya penyelesaian permasalahan persampahan di Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membaginya ke dalam dua strategi utama, yaitu pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%.

Upaya pengurangan sampah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diantaranya melalui:

a. Peningkatan kampanye Jakarta Sadar Sampah
b. Kolaborasi *pentahelix* pengurangan sampah
c. Optimalisasi penggunaan kantong belanja ramah lingkungan
d. Penyaluran makanan berlebih dari horeka (hotel restoran katering)
e. Monitoring aliran sampah disetiap titik hingga TPS/TPA/TPST
f. Optimalisasi kapasitas sistem penanganan persampahan

Optimalisasi kapasitas sistem penanganan persampahan menjadi salah satu *critical success factor* dalam perencanaan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya pengurangan sampah. Optimalisasi kapasitas sistem penanganan persampahan tersebut akan dilakukan salah satunya dengan pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui pembentukan *bank sampah* di setiap RW dan reaktivasi seluruh *bank* sampah warga yang tidak aktif. Sedangkan upaya untuk penanganan sampah itu sendiri diantaranya dilakukan melalui:

a. Penanganan sampah rumah tangga terjadwal di seluruh RW
b. Peningkatan penanganan sampah organik di pasar tradisional
c. Pelayanan pengelolaan sampah pada kawasan mandiri sebanyak 80% sampai dengan akhir tahun perencanaan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026
d. Pembangunan dan pengoperasian saringan sampah di perbatasan wilayah Jakarta
e. Optimalisasi TPST Bantargebang melalui implementasi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), *refuse derived fuel* (RDF) *plant* dan *landfill mining* guna meningkatkan usia pakai TPST Bantargebang.

Adapun kemudian, diharapkan sampai akhir tahun 2026 (RPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026) tingkat pengelolaan sampah TPST Bantargebang secara bertahap meningkat menjadi sebesar 2.200 ton/hari, dengan *output landfill mining* berupa kompos termanfaatkan dan terserap sebesar 50%.

Selanjutnya, dalam rangka penyediaan hunian layak sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan serta bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman berbasis kawasan. Hal tersebut merupakan upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan akses bagi semua terkait perumahan yang layak, aman, dan terjangkau, serta mendukung perwujudan hak atas perumahan dengan memperhatikan kebutuhan warga yang berada dalam situasi rentan dan kelompok masyarakat dengan keterbatasan daya beli. Adapun upaya yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam peningkatan hunian layak, diantaranya:

a. Penyediaan hunian layak bagi warga kampung miskin kota, salah satunya melalui gerak cepat penyelesaian Kampung Bayam dan Tanah Merah
b. Peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan permukiman yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan

c. Peningkatan dan pemeliharaan perumahan rakyat beserta sarana prasarananya melalui penguatan rusun untuk warga
d. Pengembangan ruang kota yang diprioritaskan di sekitar sistem pusat pelayanan, yang akan diimplementasikan salah satunya melalui Griya Kecamatan (*Mix Used Development* Kantor Kecamatan/ Pasar Jaya dengan Rumah Susun)
e. Tata kelola rusunawa dan rusunami

Sebagaimana diketahui, saat ini tingkat keterhunian unit rumah susun telah mencapai 85,2% dengan tingkat kepuasan layanan sebesar 80,1%. Pada akhir tahun perencanaan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026, ditargetkan tingkat keterhunian adalah sebesar 98,1% dengan kepuasan layanan sebesar 84%. Maraknya pembangunan di Provinsi DKI Jakarta, utamanya pembangunan untuk permukiman, menjadikan penataan kawasan kumuh perkotaan juga menjadi salah satu isu prioritas terkait permukiman. Pada tahun 2023 masih terdapat 250 RW kumuh di DKI Jakarta. Pada akhir tahun perencanaan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026, persentase luas kawasan permukiman kumuh ditargetkan berkurang menjadi 2,26%.

Tingkat urbanisasi yang tinggi di Provinsi DKI Jakarta juga menjadikan pola pergerakan yang tidak efisien dan pembangunan kota menjadi *car-oriented*, sehingga untuk beraktivitas sehari-hari warga menghabiskan banyak waktu untuk bermobilisasi untuk mencapai pusat-pusat aktivitas. Untuk mengurai kemacetan tersebut Pemerintah menggagas transformasi secara menyeluruh melalui pergeseran paradigma penataan ruang yang lebih berorientasi transit dan selaras dengan rencana pengembangan sistem transportasi, penyediaan infrastruktur transportasi umum terintegrasi yang mudah diakses, aman, terjangkau, dan berkelanjutan untuk semua, serta pembangunan infrastruktur yang mendorong *active mobility* melalui penyediaan fasilitas pejalan kaki, lajur sepeda, pengembangan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT), dan prasarana lainnya yang mendorong warga melakukan perjalanan tanpa menggunakan kendaraan bermotor. Pemerintah juga merestrukturisasi hierarki prioritas pengguna jalan yang menempatkan pejalan kaki dan pesepeda pada prioritas utama, diikuti dengan angkutan umum, kendaraan ramah lingkungan, dan kendaraan pribadi pada prioritas terakhir.

Konsep ruang kota berbasis transit menjadi salah satu tujuan jangka panjang penataan ruang di Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana termuat dalam rancangan RTRW Jakarta 2040 dan penjabarannya dalam RDTR Jakarta 2022-2026 secara berkala akan ditinjau kembali. Secara lebih spesifik tujuan tersebut didukung oleh kebijakan dan strategi di berbagai sektor untuk mencapai 70% pemusatan kegiatan dan penduduk di sekitar titik transit (70% *people near transit*), 55% perjalanan penduduk menggunakan transportasi publik (*public transport mode-share*), dan lebih dari 95% penduduk DKI Jakarta terlayani jangkauan rute angkutan umum yang terintegrasi. Akselerasi perwujudan kota berorientasi transit juga dilaksanakan melalui pengembangan ruang kota yang diprioritaskan di sekitar pusat-pusat pelayanan pada simpul-simpul transportasi yang dapat dikembangkan menjadi titik-titik kawasan transit *oriented development* (TOD). Dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga secara konsisten memonitor dan mengevaluasi pemanfaatan ruang serta implementasi program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Panduan Rancang Kota (PRK) untuk seluruh kawasan TOD dan kawasan prioritas.

Sejalan dengan upaya penataan ruang, pengembangan sistem transportasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan kawasan berorientasi transit. Berdasarkan data Dinas Perhubungan, penggunaan transportasi publik (*public transport mode-share*) baru mencapai 14,76%. Angka ini masih jauh dari target jangka panjang Provinsi DKI Jakarta yang ditargetkan mencapai 23,01% pada akhir tahun perencanaan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026. Dalam upaya mencapai target tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penerapan *transportation demand management* (TDM) melalui *push and pull strategy*. *Push strategy* merupakan kebijakan pembatasan ruang gerak bagi kendaraan pribadi, yang dilakukan dengan pembatasan volume penggunaan kendaraan pribadi melalui pemberlakuan kebijakan

ganjil-genap, rencana operasional jalan berbayar elektronik atau *electronic road pricing* (ERP), dan pemutakhiran regulasi perparkiran serta diiringi dengan pembangunan fasilitas *park and ride* yang terintegrasi dengan moda transportasi publik, serta kolaborasi dengan para pengelola parkir swasta. Sedangkan *pull strategy* merupakan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum yang salah satunya adalah dengan menciptakan layanan transportasi terintegrasi melalui program Jak Lingko. Selain itu, pemberlakuan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui gerakan transportasi aktif bebas emisi serta peningkatan layanan angkutan umum massal, termasuk angkutan perairan untuk warga di Kepulauan Seribu, menjadi fokus utama Pemprov DKI Jakarta. Dalam rangka meningkatkan minat masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum massal, pemerintah akan memberlakukan Gratis Transportasi Umum Massal untuk 15 Golongan Masyarakat, penguatan peran terminal, serta Pengembangan Transportasi Jabodetabek dan Kepulauan.

Maraknya pembangunan dan masih minimnya penggunaan transportasi publik telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta. Perbaikan kualitas lingkungan dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya secara efisien, dengan pengendalian di sektor bangunan memiliki kontribusi yang cukup signifikan, terutama terkait efisiensi konsumsi air dan listrik, penambahan ruang hijau privat, serta manajemen limbah, sampah, dan pengendalian banjir. Hal ini diwujudkan melalui kolaborasi pemerintah dan swasta, yaitu dengan mendorong *retrofitting* bangunan sesuai dengan prinsip bangunan gedung hijau, pemasangan PLTS atap, serta pembentukan kampung iklim, sekaligus pengembangan pusat konsultasi warga untuk memudahkan penyampaian informasi, publikasi, dan *knowledge sharing*. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkomitmen untuk memenuhi kaidah bangunan hijau (*green building*) pada bangunan milik Pemerintah, utamanya gedung kantor, rumah susun, sekolah, rumah sakit, dan bangunan lainnya. Kemudian, sebagaimana diketahui, Provinsi DKI Jakarta memiliki sebuah kawasan yang terletak di antara 2 (dua) kota administrasi (Jakarta Barat dan Jakarta Utara) bernama Kalijodo.

Kalijodo menjadi salah satu kawasan yang mendapatkan perhatian besar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saat ini, Kalijodo memiliki 2 (dua) area yang berbeda pengelolaannya. Area pertama dikelola langsung oleh kelurahan dan masih aktif digunakan oleh anak-anak untuk bermain. Sedangkan area satu lagi adalah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang dibangun pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Wagub Djarot Saiful Hidayat, namun saat ini kondisinya tidak lagi optimal. Adapun ke depan, dalam rangka partisipasi terhadap peningkatan kualitas lingkungan melalui peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), sarana prasarana dan tutupan hijau yang sesuai dengan rencana induk RTH, Gubernur DKI Jakarta (Pramono Anung) akan melakukan revitalisasi terhadap Kalijodo. Strategi lain yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan, yaitu melalui sektor energi dan ketenagalistrikan. Upaya tersebut antara lain perluasan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) melalui PLTS dan PLTSa, efisiensi energi serta penggantian bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, konversi transportasi dari BBM ke kendaraan listrik, audit energi pada bangunan gedung Pemerintah, serta menyiapkan sarana dan prasarana kendaraan listrik. Perluasan EBT ini juga akan berkontribusi langsung terhadap pengurangan emisi karbon di Provinsi DKI Jakarta.

Peningkatan peran aktif masyarakat dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan menjadi hal yang penting untuk ditingkatkan pula. Dalam upaya peningkatan peran aktif masyarakat tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyelenggarakan Anugerah Benyamin S (BErsih NYAMan INdah dan Sejahtera) *Award* untuk Peningkatan Daya Tarik Kota sebagai bagian dari program pembangunan dan pembinaan kelurahan hingga kota administrasi. Benyamin S *Award* itu sendiri merupakan lomba antar kelurahan, kecamatan, dan kota administratif yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan wilayah. Kompetisi ini akan dinilai berdasarkan kebersihan, kenyamanan, keindahan, dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, dengan kondisi Provinsi DKI Jakarta merupakan dataran rendah yang sebagian kawasannya memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut, berada pada muara daerah aliran sungai, serta dilalui oleh 17 sungai, menjadikan Provinsi DKI Jakarta sampai dengan saat ini masih terus dihadapkan pada kerentanan kebencanaan yang kompleks, seperti banjir, penurunan muka tanah, gempa bumi, kebakaran, dan kerawanan sosial lainnya. Dengan berbagai kerentanan tersebut, maka stabilitas dan ketahanan kota menjadi perlu untuk diwujudkan. Ketahanan kota dapat diartikan sebagai siapnya kapasitas individu, komunitas, swasta dan sistem di dalam kota untuk bersiap, beradaptasi, bertahan, dan menjadi lebih kuat menghadapi berbagai jenis tekanan dan guncangan yang dialami. Untuk mengurangi potensi dampak dan meningkatkan ketahanan Provinsi DKI Jakarta terhadap bencana, upaya-upaya pengelolaan pengurangan risiko bencana menjadi fokus utama dalam hal ini. Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2008, pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan pengenalan dan pemantauan risiko, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana, dan penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Dalam hal penanganan banjir di Provinsi DKI Jakarta, tidak lagi hanya membuat atau meluruskan aliran sungai-sungai dengan konstruksi beton atau *sheetpile*. Air yang mengalir dari selatan Jakarta ke muara utara Jakarta dapat ditahan lebih lama melalui pembangunan waduk-waduk dan memperbanyak sumur resapan di daerah selatan Jakarta. Fungsi waduk kedepan juga bukan hanya sekadar sebagai waduk pengendali banjir atau waduk retensi saja, namun akan dimanfaatkan atau dikelola menjadi sumber air baku ataupun menjadi sumber energi baru untuk kepentingan masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Mengefektifkan berbagai upaya perbaikan sistem sungai dan saluran, pintu air, situ dan waduk juga dijadikan sebagai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan banjir. Selain itu, peningkatan ekosistem pengendalian banjir serta Peningkatan keanekaragaman hayati untuk keberlanjutan ekosistem dan ketahanan terhadap musibah lingkungan, melalui Gerakan Menanam *Mangrove* dan Vegetasi Pengendali Polusi menjadi 2 (dua) cara lain yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pengendalian banjir.

Selanjutnya, dalam hal pengendalian penurunan muka tanah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mengendalikan dan mengurangi ekstraksi air tanah melalui program konservasi air tanah dan mitigasi penurunan muka tanah. Adapun upaya yang dilakukan antara lain dengan mengimplementasikan zona bebas air tanah, mengendalikan penggunaan air tanah melalui instrumen pajak, perizinan dan penegakan hukum, penerapan kebijakan terkait sistem monitoring penggunaan air tanah, serta menyediakan alat pemantau penurunan muka tanah untuk memudahkan pengukuran dan evaluasi. Kemudian, selain kondisi geografis, kepadatan penduduk menjadi faktor dengan pengaruh besar terhadap terjadinya bencana. Tingginya jumlah kepadatan penduduk di Jakarta menimbulkan berbagai potensi permasalahan seperti kebakaran dan kegagalan teknologi berupa runtuhnya bangunan. Bencana kebakaran umumnya terjadi di permukiman padat dengan kondisi bangunan yang tidak tertata dengan baik. Banyak permukiman yang dibangun dengan desain dan material yang tidak memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan, sehingga berpotensi menimbulkan kebakaran.

Penyebab utama kebakaran yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta biasanya berasal dari arus pendek listrik, ledakan kompor, kelalaian peralatan penerangan yang mudah terbakar, dan api rokok. Oleh karena itu, dalam rangka mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan seluruh *stakeholders* dalam menghadapi bencana, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengimplementasikan Gerakan Masyarakat Punya APAR (GEMPAR). Selanjutnya, kepadatan penduduk juga memengaruhi munculnya epidemi penyakit dan konflik sosial di Provinsi DKI Jakarta. Penduduk yang padat akan menimbulkan tingginya frekuensi interaksi dan mobilitas antar individu pada suatu wilayah, sehingga sangat memengaruhi penyebaran penyakit. Kepadatan penduduk juga mempengaruhi penyebaran informasi yang dapat memprovokasi terjadinya konflik sosial.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mendukung prioritas pembangunan terkait "Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota" dirumuskan berbagai program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025 sebagai berikut:

1) Program Penyelenggaraan Jalan.
2) Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
3) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
4) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
5) Program Pengelolaan Pelayaran.
6) Program Pengelolaan Perkeretaapian.
7) Program Pengelolaan Persampahan.
8) Program Penatagunaan Tanah.
9) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
10) Program Kawasan Permukiman.
11) Program Pengembangan Perumahan.
12) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
13) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
14) Program Penataan Bangunan Gedung.
15) Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
16) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
17) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
18) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
19) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
20) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
21) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
22) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
23) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
24) Program Pengelolaan Hutan.
25) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
26) Program Pengelolaan Energi Terbarukan.
27) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.
28) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
29) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
30) Program Penanggulangan Bencana.
31) Program Penanganan Bencana.
32) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
33) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian.

b. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan pembangunan perkotaan harus mampu menciptakan peluang ekonomi serta dapat memberikan pemasukan bagi daerah. Kawasan perkotaan memiliki potensi untuk mewujudkan produktivitas yang tinggi, efisiensi sumber daya, kegiatan yang bernilai tambah, menggerakan ekonomi lokal, dan memperhatikan kontribusi ekonomi informal, sekaligus mendukung transisi berkelanjutan menuju ekonomi formal. Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu pusat ekonomi dan bisnis global memiliki peluang mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dengan kebijakan pengembangan sektor

usaha yang tepat. Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, Pemerintah DKI Jakarta berkomitmen membangun praktik industri berkelanjutan dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular, perdagangan yang kompetitif, serta menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pengembangan bisnis dan inovasi berbasis pengalaman dan nilai tambah seperti sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sektor perindustrian menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi Provinsi DKI Jakarta, dikarenakan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah dan lapangan kerja, serta peningkatan PDRB. Sektor industri pengolahan sampai dengan triwulan IV tahun 2024 mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,35% (*yoy*). Meskipun kenaikannya relatif kecil, kenaikan ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan masih mengalami ekspansi di tengah berbagai tantangan global maupun domestik. Adapun pada tahun 2024, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB adalah sekitar 18,26%. Sektor ini, bersama dengan pertambangan dan penggalian, menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian Provinsi DKI Jakarta. Sasaran pembangunan industri di Provinsi DKI Jakarta, yaitu meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri, meningkatkan ekspor produk industri, afirmasi kepada industri kecil dan industri menengah, serta menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan melalui pembangunan industri hijau (*green industry*). Strategi industri hijau yang dapat diterapkan antara lain regulasi *eco product*, pemakaian energi terbarukan, dan bahan baku ramah lingkungan. Peningkatan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui pelatihan serta peningkatan omset IKM melalui pendampingan, pemasaran, dan pendaftaran sertifikasi halal dan HKI juga menjadi salah satu komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mengembangkan IKM. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melaksanakan pengendalian izin usaha industri yang diselenggarakan dalam rangka mendorong pelaku industri untuk tertib perizinan.

Selain sektor perindustrian, stabilitas laju perekonomian Provinsi DKI Jakarta juga sangat didukung oleh peran sektor perdagangan. Sebagai pusat perdagangan di Indonesia, sektor ini merupakan kontributor terbesar selanjutnya terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 18,01% pada triwulan tahun 2024. Pemerintah memberikan perhatian khusus untuk terus memaksimalkan potensi perdagangan dengan langkah-langkah diantaranya memastikan keterjangkauan kebutuhan barang pokok dan barang penting melalui pengendalian harga, meningkatkan operasi pasar dan pemantauan serta pelaporan harga, pengembangan ekspor produk dalam negeri baik melalui pelatihan maupun fasilitasi pada kegiatan promosi dagang, dan perlindungan konsumen melalui pengawasan barang dan jasa beredar serta tertib niaga. Sedangkan untuk meningkatkan pertumbuhan perniagaan, upaya yang dilaksanakan antara lain, yaitu alih perdagangan konvensional menjadi perdagangan elektronik melalui pemanfaatan teknologi dan peningkatan perdagangan komoditi yang memiliki nilai komponen lokal tinggi.

Pada sektor pertanian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong pertumbuhan praktik pertanian perkotaan atau urban agriculture yang bertujuan selain memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sehari-hari, juga memberikan manfaat lainnya seperti ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan sosial. Berdasarkan Desain Besar Pertanian Perkotaan Tahun 2008-2030, pengembangan pertanian bukan hanya berbasis lahan seperti sawah dan kebun tetapi juga berbasis ruang yang meliputi lahan-lahan kosong yang belum terpakai, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pekarangan rumah, gang, gedung, lahan rumah susun, lahan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), sekolah, lahan laut, dan lainnya. Pada akhir tahun perencanaan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 diharapkan terwujud 25% ruang terbuka hijau produktif, 25% peningkatan hasil produksi, sertifikasi 700 produk, dan pusat pembelajaran pertanian di 5 wilayah. Selain sektor pertanian, potensi basis komoditas dan produk unggulan sektor peternakan dapat juga meningkatkan komoditas pangan sekaligus nilai tambah ekonomi. Terdapat beberapa langkah besar untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan di Provinsi DKI Jakarta, yaitu melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan peternak, pengembangan sektor komplemen peternakan (agroindustri,

teknologi melalui penyuluhan, dan pasar), penyediaan informasi dan data, pengembangan inovasi dan teknologi, serta perluasan jaringan pasar untuk peternak. Upaya pada sektor pertanian dan peternakan tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan ekonomi, tetapi juga membuka peluang kerja baru yang perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada hakekatnya memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pembangunan suatu wilayah. Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membawa perubahan terhadap proporsi kebutuhan SDM di setiap sektor pekerjaan. Sehingga untuk meminimalkan disrupsi tersebut, dibutuhkan tenaga kerja terampil dengan produktivitas dan adaptabilitas yang tinggi untuk dapat bersaing dalam pasar kerja yang kompetitif. Tantangan utama dunia ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta saat ini yaitu adanya bonus demografi penduduk usia produktif yang jumlahnya lebih besar dari penduduk usia tidak produktif, dampak pandemi yang mengakibatkan gelombang PHK, permintaan dan produksi barang yang turun, dan otomasi pekerjaan. Dalam rangka menjawab tantangan yang ada, sekaligus peningkatan kesempatan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja, upaya yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain: (1) Mengembangkan Ekosistem Digital Ketenagakerjaan; (2) Transformasi Pusat Pelatihan Kerja; (3) *Link and Match* Ketenagakerjaan; (4) Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja; (5) Pengembangan Talenta Muda; (6) Perluasan Pasar Kerja Dalam Negeri; dan (7) Reformasi Pengawasan.

Sebagai bentuk pendekatan layanan ketenagakerjaan yang lebih merata dan inklusif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperluas jangkauan program hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah padat penduduk dan akses terbatas, memiliki peluang yang setara dalam mengakses informasi dan layanan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Jakarta *Job Fair* di tingkat kecamatan. Kegiatan ini menjadi sarana strategis dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi pasar kerja, mempertemukan pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja secara langsung, sekaligus mengurangi hambatan geografis dan biaya transportasi yang selama ini menjadi kendala bagi sebagian warga. Di tingkat kelurahan, pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) juga terus didorong untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan perubahan kebutuhan industri. Pelatihan diselenggarakan secara aplikatif melalui *Mobile Training Unit* (MTU), yang memungkinkan layanan keterampilan menjangkau langsung masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu mengatasi mismatch skill dan meningkatkan kesiapan tenaga kerja lokal secara lebih efektif.

Selain produktivitas dan adaptasi tenaga kerja, untuk mengurangi potensi peningkatan pengangguran terbuka, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah melalui program kewirausahaan. Adapun fokus kebijakan pada tahun 2025, yaitu melanjutkan penciptaan wirausaha yang kreatif dan produktif melalui pengembangan kewirausahaan terpadu (PKT), yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat dan/atau pihak lainnya. Selanjutnya, dalam rangka mendukung ekosistem PKT secara berkelanjutan, maka perlu dikembangkan ruang-ruang usaha untuk mempromosikan dan memasarkan produk yang dihasilkan. Dengan semakin tingginya aktivitas sosial dan kegiatan masyarakat di area publik, menimbulkan *demand* akan pemenuhan kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh produk UMKM. Untuk memfasilitasi hal tersebut dilaksanakan pendirian ruang usaha di area publik sesuai dengan standar yang berlaku, revitalisasi lokasi binaan dan lokasi sementara dengan menerapkan CHSE, dan penataan pedagang kaki lima (PKL) berdasarkan *Masterplan* Penataan PKL di Provinsi DKI Jakarta. Dengan pola pengaturan dan pengelolaan yang profesional nilai dari ruang dimaksud dapat ditingkatkan menjadi kawasan UMKM yang tidak hanya bernilai ekonomi, namun juga bernilai estetis..

Disamping UMKM, pengembangan koperasi juga menjadi komitmen dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkokoh ekonomi kerakyatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Dalam rangka memperkuat

kemandirian masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan, serta mewujudkan prinsip ekonomi kerakyatan, Presiden RI melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan menginstruksikan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Melalui Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah menargetkan percepatan pembentukan 80.000 koperasi di tahun 2025 di seluruh desa/kelurahan di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini sejalan dengan beberapa PN (Asta Cita), yaitu: (a) Prioritas Nasional 2, yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan; (b) Prioritas Nasional 3, yaitu melakukan pengembangan industri agro-maritim yang melibatkan koperasi secara aktif; serta (c) Prioritas Nasional 6, yaitu melakukan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi nasional. Adapun kemudian, *output* utama dari Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di setiap daerah, tidak terkecuali Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Rancangan RKP Tahun 2026, yaitu:

a. Peningkatan kapasitas usaha koperasi
b. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi

Dalam mendukung ketercapaian *output* dari Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025 akan fokus pada pembentukan Koperasi Merah Putih di 267 kelurahan.

Selain terfokus pada pembentukan Koperasi Merah Putih di 267 kelurahan, upaya lain yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkokoh ekonomi kerakyatan, di sektor perkoperasian diantaranya adalah: (1) penyuluhan koperasi kepada masyarakat; (2) pembinaan koperasi; (3) fasilitasi pameran bagi anggota koperasi; (4) fasilitasi akta pendirian koperasi; (5) revitalisasi koperasi binaan provinsi; (6) fasilitasi klinik konsultasi koperasi; (7) peningkatan kapasitas SDM koperasi melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian; (8) peningkatan kepatuhan koperasi melalui pengawasan dan pemeriksaan koperasi; (9) pemberdayaan dan perlindungan koperasi guna terciptanya peningkatan volume usaha koperasi; (10) perluasan usaha koperasi; serta (11) transformasi koperasi konvensional menjadi koperasi digital. Untuk mendukung berbagai upaya di atas, Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan daya saingnya tehadap kota-kota lain di Indonesia. Salah satu cara untuk meningkatkan *competitiveness* dan menyelesaikan permasalahan perkotaan adalah melalui kegiatan penelitian, kajian ataupun pengembangan.

Penelitian dan pengembangan (*research and development*) mempunyai peran penting dalam mendorong kemajuan suatu wilayah dan negara. Hasil litbang yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat direkomendasikan untuk mengatasi masalah di berbagai sektor. Oleh karena itu, kegiatan kajian dan litbang sangat penting dilakukan sebelum merumuskan, membuat, dan menetapkan suatu kebijakan. Kemajuan teknologi dan inovasi daerah perlu diimbangi dengan pemanfaatan *local wisdom*, yang akan memperkaya dan memberi jiwa kepada kebijakan prioritas yang akan dilaksanakan. Pelestarian *local wisdom* yang relevan dengan kebutuhan perkotaan juga dapat dimaksimalkan melalui sektor pariwisata untuk mendorong peningkatan daya tarik Jakarta sebagai kota global.

Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal menjadi salah satu cara untuk membentuk karakter kawasan perkotaan yang berkelanjutan. Namun, sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya, Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara akibat belum optimalnya daya tarik pariwisata yang dimiliki. Oleh karena itu, pengembangan sektor pariwisata di Provinsi DKI Jakarta difokuskan untuk penguatan wisata MICE, pemasaran pariwisata baik di dalam maupun luar negeri melalui promosi budaya betawi, pengembangan destinasi wisata urban, peningkatan akses wisata edukatif seperti museum bagi kalangan pelajar. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan ekonomi kreatif, yaitu melalui penyusunan *Grand Design* Ekonomi Kreatif, membangun zona

ekonomi kreatif Jakarta, direktori ekonomi kreatif, penyelenggaraan inkubator industri pariwisata, penyelenggaraan *event* kemitraan dan *event* binaan, serta fasilitasi pendaftaran HKI. Strategi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif juga perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis *big data*. Salah satu kawasan yang telah menunjukkan potensi besar dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif adalah Blok M. Dengan dukungan M-Bloc yang kini telah dikenal luas sebagai ruang ekspresi kreatif dan budaya anak muda, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong kawasan ini menjadi Sentra ASEAN yang merepresentasikan keterbukaan, kolaborasi, dan inovasi. Sehingga, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu diiringi dengan aktivasi kawasan perkotaan yang mendukung ekosistem budaya secara lebih menyeluruh.

Aktivasi kawasan perkotaan antara lain dapat dilakukan dengan revitalisasi, aktivasi, dan pengembangan pusat seni dan budaya baru Jakarta, baik yang melestarikan seni budaya lokal betawi atau yang memfasilitasi seni dan budaya lainnya. Salah satunya adalah dengan perayaan perjalanan Jakarta menuju usia ke-500 tahun (Road to Jakarta 500) yang menjadi momentum strategis untuk menampilkan kekayaan budaya, mendorong partisipasi masyarakat, serta memperkuat posisi Jakarta sebagai etalase budaya nasional. Selanjutnya sebagai cermin dari identitas Jakarta sebagai *melting pot* kebudayaan nasional, pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menghadirkan pusat-pusat kesenian yang merupakan perwakilan dari berbagai jenis kebudayaan yang ada di Indonesia. Upaya pendayagunaan dan apresiasi terhadap warisan budaya secara berkelanjutan juga dilaksanakan melalui revitalisasi dan aktivasi cagar budaya. Perbaikan infrastruktur kebudayaan kemudian perlu dilanjutkan dengan pemberian dukungan terhadap acara atau festival, utamanya karena Jakarta merupakan pusat penyelenggaraan *event-event* kelas dunia. Pemanfaatan ruang publik juga perlu didukung dengan aktivasi komunitas lokal, seperti melalui Balai Rakyat bersama Karang Taruna, agar menjadi ruang yang hidup, inklusif, dan mencerminkan identitas sosial-budaya masyarakat. Selain itu, pemanfaatan Taman Ismail Marzuki (TIM) sebagai wadah pelestarian, pengembangan, dan aktualisasi nilai-nilai budaya Betawi melalui berbagai pertunjukan seni, pameran, pelatihan, hingga festival tematik.

Adapun berdasarkan uraian di atas, untuk mendukung prioritas pembangunan terkait "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi" dirumuskan berbagai program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025 sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
2) Program Pemasaran Pariwisata.
3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
5) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
6) Program Penyuluhan Pertanian.
7) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
8) Program Pengembangan Ekspor.
9) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
10) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
11) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
12) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
13) Program Penempatan Tenaga Kerja.
14) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.
15) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
16) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).
17) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
18) Program Promosi Penanaman Modal.

19) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
20) Program Pengembangan Kebudayaan.
21) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
22) Program Pengelolaan Permuseuman.
23) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
24) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
25) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
26) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

c. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mengakhiri segala bentuk dan dimensi kemiskinan, yang dapat dimulai dengan memastikan bahwa setiap orang tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi, mempunyai hak yang sama untuk tinggal di kota guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Pemerintah juga berkomitmen untuk menjadikan Jakarta kota inklusif, dengan menurunkan ketimpangan yang diukur melalui perhitungan gini rasio. Sejak tahun 2013, rasio gini di Provinsi DKI Jakarta cenderung menurun sampai dengan tahun 2019 di angka 0,391. Memasuki periode pandemi COVID-19, gini rasio di Provinsi DKI Jakarta kembali meningkat sehingga pada tahun 2021 menjadi 0,411. Namun demikian, sesuai dengan kategori Bank Dunia, angka tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta masih berada pada kategori rendah. Ketimpangan pengeluaran penduduk juga tidak terlepas dari persentase penduduk miskin yang ada di DKI Jakarta yang ditunjukkan oleh tingkat kemiskinan.

Selama sepuluh tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta sempat berada pada titik terendah yaitu 3,47 di tahun 2019. Memasuki periode pandemi pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta sempat melonjak cukup jauh yaitu sebesar 4,72. Namun, per September 2021 tingkat kemiskinan DKI Jakarta akhirnya perlahan turun menjadi 4,67. Penurunan tingkat kemiskinan sebagaimana dimaksud juga menjadi sinyal atas pemulihan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta. Upaya Pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, yaitu dengan memberikan perlindungan dan jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar melalui berbagai program seperti pemberian bantuan tunai/non-tunai serta bantuan pengembangan ekonomi sehingga tingkat konsumsi penduduk miskin dapat terjaga stabilitasnya. Adapun pendanaan program tersebut dapat bersumber dari APBD serta non-APBD melalui kolaborasi dan skema pembiayaan lainnya. Korelasi antara ketimpangan yang meningkat dan tingkat kemiskinan yang perlahan mulai turun perlu menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan ketimpangan yang terus meningkat, artinya *gap* antara pendapatan penduduk pada kelas bawah dan kelas atas semakin tinggi.

Mengurangi pendapatan pada masyarakat kelas atas bukan menjadi solusi yang benar untuk dilakukan, namun sangat dimungkinkan untuk menjaga masyarakat kelas bawah/kelompok miskin dan rentan untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan berbagai program pemerintah dan/atau program yang melibatkan swasta. Membangun skema perlindungan sosial yang lebih baik dan bersifat universal menjadi salah satu tantangan bagi Jakarta. Tujuan utama dari perlindungan sosial adalah: (a) mencegah risiko yang dialami penduduk sehingga terhindar dari kesengsaraan yang berkepanjangan; (b) meningkatkan kemampuan kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi; dan (c) memungkinkan kelompok miskin dan rentan untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Adapun, dalam rangka perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, beberapa upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

a. Mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data utama dalam pemberian program bantuan dan jaminan sosial dengan metode yang tepat guna, lebih detail menggunakan variabel khas daerah dan dengan mengintegrasikan

hasil pendataan keluarga, data kependudukan (NIK) dan data akun warga

b. Memutakhirkan DTKS secara berkala untuk dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan program-program perlindungan sosial
c. Melakukan integrasi data sasaran program dan bantuan sosial melalui sistem informasi, untuk membantu Pemerintah mengidentifikasi dan mengevaluasi ketepatan sasaran penerima dan kebermanfaatan program perlindungan sosial
d. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang terdiri atas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, dan penyuluh sosial dalam memberikan pelayanan sosial dan melakukan pemberdayaan sosial yang optimal terhadap masyarakat di sekitarnya untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, melalui peningkatan partisipasi dan peran aktif tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi standar pelayanan baik dari rekrutmen, pendataan, peningkatan kompetensi dan kapasitas, proses sertifikasi dan akreditasi, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, salah satu kebutuhan dasar yang sangat mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah adalah kebutuhan akan pangan. Sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Berdasarkan definisi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menjamin ketersediaan pangan hingga tingkat perseorangan, yang mencakup kuantitas dan kualitas pangan. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/pemasaran. Pengamanan akan ketersediaan pangan ini akan dilakukan melalui beberapa hal, diantaranya penjaminan *supply* pangan melalui *contract farming* serta pengendalian inflasi pangan menjelang idul fitri.

Pengawasan untuk menjamin keamanan pangan dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan juga menjadi salah satu fokus Pemprov DKI Jakarta dalam menjamin ketersediaan pangan. Melalui peningkatan dan pengawasan mutu pangan, diyakini hasil tanaman pangan dan hortikultura 90% baik/aman konsumsi, hasil perikanan diyakini 95% baik/aman konsumsi dan produk hewan (kesmavet) diyakini 95% baik aman konsumsi. Adapun upaya-upaya peningkatan ketahanan pangan lain yang akan dilakukan yaitu menyusun peta jalan pangan Provinsi DKI Jakarta, pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan, pengawasan keamanan pangan terpadu dengan melibatkan berbagai *stakeholder,* peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petani, nelayan dan peternak binaan, dan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang unit usahanya bergerak di bidang pangan untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga pangan.

Selain mengakhiri segala bentuk dan dimensi kemiskinan, untuk menjadi kota inklusif dalam rangka mencapai Jakarta sebagai Kota Global, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkomitmen untuk menjamin pemerataan ketersediaan pelayanan publik bagi setiap masyarakat. Pelayanan publik sebagaimana dimaksud utamanya dilakukan dengan menjamin edukasi pembelajaran sepanjang hayat serta perbaikan kesehatan perkotaan. Pembangunan pendidikan merupakan pilar utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan kesempatan pendidikan bagi semua warganya tanpa terkecuali dengan setara, berkualitas, dan berkelanjutan. Pendidikan yang berkelanjutan adalah sebuah konsep *life-long learning* yang tidak hanya berhenti pada pendidikan formal, namun merupakan proses pembelajaran yang dapat dilakukan sepanjang hidup tanpa dibatasi oleh usia. Adapun konsep pendidikan berkelanjutan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui beberapa upaya, yaitu peningkatan akses pendidikan di

semua jenjang melalui KJP Plus dan KJMU, rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana pendidikan, penguatan pendidikan vokasi berbasis kerjasama dunia usaha dan dunia industri, peningkatan profesional pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan akses pendidikan usia dini, serta penyelenggaraan sekolah kolaborasi yang didukung dengan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel.

Sebagaimana diketahui, sampai dengan saat ini program pemberian KJP maupun KJMU di Provinsi DKI Jakarta belum terbilang optimal, utamanya berkaitan dengan pemutakhiran data penerima. Selain itu, permasalahan terkait penahanan ijazah juga masih menjadi isu krusial di Provinsi DKI Jakarta, terutama bagi keluarga yang kesulitan membayar tunggakan sekolah. Oleh karena itu, untuk mengatasi dua permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang melalui pemutakhiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sinkronisasi menuju Program Sekolah Gratis, serta peningkatan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel melalui program pemutihan ijazah yang ditujukan bagi lulusan sekolah swasta di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki KTP DKI Jakarta, berdomisili di DKI Jakarta, dan termasuk dalam kategori keluarga tidak mampu atau tidak bekerja formal.

Selanjutnya, perbaikan kesehatan perkotaan akan dikembangkan melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya kota, baik fisik maupun non fisik. Dalam rangka pengembangan kualitas layanan kesehatan perkotaan, akses universal terhadap layanan kesehatan yang holistik, berkualitas, dan berkelanjutan ditingkatkan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang komprehensif dengan pendekatan siklus kehidupan. Untuk menciptakan generasi emas sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan intervensi dalam meningkatkan derajat kesehatan pada berbagai siklus kehidupan. Di mulai dari remaja putri yang sehat bebas anemia, skrining kesehatan bagi calon pengantin, kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin, sampai pada periode seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) yang merupakan simpul kritis sebagai awal terjadinya pertumbuhan stunting, yang akan berdampak jangka panjang hingga berulang dalam siklus kehidupan. Intervensi dalam rangka percepatan penurunan stunting berupa intervensi sensitif (70%) dari sektor di luar kesehatan dan spesifik (30%) dari sektor kesehatan. Pada tahun 2023, prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) DKI Jakarta mencapai 17,6%. Ditargetkan pada akhir tahun perencanaan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026, prevalensi *stunting* pada balita dapat turun menjadi sebesar 12,2%. Adapun salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan dan pencegahan stunting adalah dengan peningkatan layanan kesehatan primer melalui pengadaan Kantin Sehat Jakarta Cerdas Berkelanjutan

Berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya dalam pengendalian penyakit sebagai upaya dalam meningkatkan derajat kesehatannya. Peta jalan eliminasi TB di Indonesia, sesuai dengan kesepakatan global, Pemerintah menetapkan target insiden TB turun 50% pada tahun 2025 (165 per 100.000 penduduk) menjadi 80% pada tahun 2030 (65 per 100.000 penduduk). Untuk mencapai eliminasi TB pada tahun 2030, ada beberapa target yang harus dicapai seperti angka penemuan kasus yang diprediksi masih akan meningkat hingga 2025 dan target *enrollment* 100% serta keberhasilan pengobatan di atas 90%. Upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan capaian tersebut, yaitu:

a. Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah untuk mendukung percepatan eliminasi TB
b. Peningkatan akses layanan TB bermutu dan berpihak pada pasien
c. Optimalisasi upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TB serta pengendalian infeksi
d. Pemanfaatan hasil riset dan teknologi skrining, diagnosis, dan tatalaksana TB
e. Peningkatan peran serta komunitas, mitra, dan multi-sektor lain dalam eliminasi TB
f. Penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan.

Sedangkan, untuk mengendalikan penyakit menular yang ada di Provinsi DKI Jakarta, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah penjangkauan populasi beresiko melalui koordinasi lintas sektor dan program, serta edukasi aktif tentang HIV dan AIDS kepada masyarakat. Di samping itu, penguatan program pengendalian HIV dan AIDS juga terus dilakukan dengan tujuan untuk: 1) Menurunkan hingga meniadakan infeksi baru; 2) Menurunkan hingga meniadakan kematian terkait AIDS; 3) Menurunkan stigma dan diskriminasi.

Terobosan dalam pengembangan layanan kesehatan juga diperlukan guna meningkatkan kualitas dan harapan hidup warga Jakarta, di antaranya melalui transformasi pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, digitalisasi pelayanan kesehatan (e-kesehatan), serta peningkatan layanan promotif dan preventif, tanpa mengabaikan layanan kuratif dan rehabilitatif. Upaya perbaikan kesehatan perkotaan perlu didukung oleh penguatan sektor penunjang lain seperti peningkatan peran dan fungsi keluarga, pembangunan kepemudaan, serta penyediaan fasilitas dan aktivitas yang dapat membangun pola hidup masyarakat lebih sehat. Peningkatan layanan kesehatan primer menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peningkatan sebagaimana dimaksud salah satunya akan diimplementasikan melalui peningkatan kelas di RSUD agar menjadi Rumah Sakit dengan layanan berstandar internasional.

Dalam upaya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan berketahanan, telah dirancang penyelenggaraan pelayanan keluarga satu pintu yang dioperasionalisasikan melalui Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA), yang merupakan pusat informasi dan koordinasi layanan kesejahteraan dan ketahanan keluarga berbasis digital yang dilengkapi dukungan data yang dikumpulkan oleh Tim Penggerak PKK melalui kader Dasa Wisma. Melalui PUSPA, masyarakat dapat mengakses data, informasi, dan edukasi digital yang terintegrasi, serta pilihan konten lokal dan aktivitas virtual yang ramah anak dan keluarga. Pusat Pelayanan Keluarga juga akan menghadirkan sarana konseling secara *online* dan *offline* bagi keluarga (ibu, balita, remaja, lansia) maupun korban kekerasan dalam rumah tangga. Upaya perbaikan kesehatan perkotaan perlu didukung oleh penguatan sektor lain yang dapat menunjang, seperti peningkatan peran dan fungsi keluarga, pembangunan kepemudaan, serta penyediaan fasilitas dan aktivitas yang dapat membangun pola hidup masyarakat yang lebih sehat. Adapun kemudian, dalam meningkatkan kualitas layanan untuk lansia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berfokus pada penguatan pelayanan ramah lansia dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia salah satunya melalui *home service* untuk lansia Jakarta (Pasukan Putih).

Pembangunan responsif gender menjadi bagian tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pembangunan responsif gender merupakan pembangunan yang menciptakan keadilan dan pemerataan bagi seluruh penduduk. Sampai saat ini masih dijumpai kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini terlihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jakarta yang berada di angka 95,56 di tahun 2024. Meskipun berada di atas rata- rata nasional tetapi masih memunjukkan bahwa manfaat dan hasil pembangunan untuk perempuan masih di bawah dari laki-laki. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan, dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Selain itu kesenjangan berbasis gender juga dapat terlihat dari isu kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Jakarta yang layaknya fenomena gunung es. Kesetaraan gender dalam relasi keluarga merupakan salah satu pondasi mewujudkan ketahanan keluarga masa kini. Untuk mewujudkan keluarga yang berketahanan diperlukan adanya kolaborasi secara berkelanjutan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat, media massa, dan dunia usaha.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mendukung prioritas pembangunan terkait "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat" dirumuskan berbagai program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025 sebagai berikut:

1) Program Rehabilitasi Sosial.
2) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
3) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
4) Program Pengawasan Keamanan Pangan.
5) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
6) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
7) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
8) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
9) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
10) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
11) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).
12) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
13) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
14) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
15) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan.
16) Program Pengelolaan Pendidikan.
17) Program Pembinaan Perpustakaan.

d. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif

Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian negara, merefleksikan bangsa Indonesia yang multi etnik, multi agama, multi ras, dan multi golongan. Kondisi ini menjadikan Provinsi DKI Jakarta rentan terhadap konflik. Dalam upaya menjaga kebhinekaan serta proses demokrasi yang kondusif di Provinsi DKI Jakarta, diperlukan suatu penguatan nilai-nilai demokrasi, kebangsaan dan kebhinekaan untuk masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya membangun toleransi dan kerukunan masyarakat multikultural melalui pembinaan ideologi, pembinaan kerukunan kemasyarakatan dan pembinaan kewaspadaan sehingga terwujud masyarakat yang tenteram dan bebas dari segala ancaman. Pembinaan ideologi, pembinaan kerukunan kemasyarakatan dan kewaspadaan masyarakat dilakukan dalam bentuk penyampaian materi kepada masyarakat dengan target 80.000 orang mendapatkan pemahaman dengan tingkat pemahaman meningkat menjadi 52% yang ditargetkan pada akhir tahun perencanaan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 .

Dalam mengelola situasi keagamaan yang sangat beragam, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki peran besar dalam upaya memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dan akan terus berupaya mewujudkan interaksi antar umat beragama yang harmonis melalui serangkaian tugas pembinaan dan pengawasan bidang mental spiritual, memberikan perhatian dan kesempatan yang sama kepada seluruh lembaga keagamaan yang mengurusi rumah ibadah dengan mengedepankan asas keadilan, pemberian hibah untuk bantuan operasional termasuk insentif dan fasilitasi perizinan tempat ibadah, dengan tetap berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan Provinsi DKI Jakarta sebagai kota heterogen, inklusif, rukun, dan damai, Pemerintah juga memfasilitasi pelaksanaan festival keagamaan sebagai perayaan simpul persaudaraan antar umat beragama.

Kemudian, dalam rangka penguatan kapasitas legislatif dalam meneruskan aspirasi masyarakat Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong pengesahan peraturan perundangan yang telah menjadi prioritas baik di pusat maupun provinsi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan yang diukur melalui prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPR/DPD/DPRD Provinsi (RDP umum, seminar, uji publik, sosialisasi, kunjungan kerja,

dan lainnya). Aspirasi pada kebijakan eksekutif maupun masukan pada pembentukan peraturan perundang-undangan ditargetkan menjadi sebesar 63,73 persen pada akhir tahun perencanaan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026. Pada akhirnya diharapkan hasil penilaian terhadap Indeks Demokrasi yang menggambarkan tingkat perkembangan demokrasi di Provinsi DKI Jakarta di akhir tahun perencanaan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 dapat meningkat menjadi 77,57.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga menjadi penilaian yang cukup penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dikarenakan IPM menjadi salah satu tolok ukur bagi instansi pemerintah dalam melakukan evaluasi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Seluruh instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan publik kepada masyarakat menjadikan nilai IKM sebagai parameter untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Pengukuran yang berkesinambungan untuk mengetahui kinerja pelayanan dan untuk memperoleh aspek pelayanan mana yang dianggap perlu oleh masyarakat dan menjadi prioritas guna memperbaiki kualitas layanan. Upaya peningkatan pelayanan publik tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diwujudkan dengan membangun sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan dan manajemen pemerintahan. Selain itu, beberapa upaya lainnya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta, adalah sebagai berikut:

a. Penguatan dan pemanfaatan aplikasi Jaki sebagai *SuperApps* Pelayanan Publik
b. Peningkatan peran dan kualitas layanan petugas pelayanan publik
c. Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, diantaranya melalui kegiatan PPSU, RT, RW, LMK dan FKDM
d. Optimalisasi waktu operasional taman dalam mendukung aktivitas warga dan sosial ekonomi
e. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga pendidikan

Khusus untuk pelayanan dalam pengurusan perizinan dan non perizinan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyederhanakan prosedur perizinan, melakukan percepatan waktu proses perizinan, sampai melakukan automasi (elektronifikasi) perizinan maupun non perizinan. Seluruh perizinan ditargetkan 100% berbasis elektronik (*online*) yang didalamnya mencakup penyederhanaan persyaratan, prosedur, dan birokrasi menjadi lebih ringkas sampai izin diterbitkan.

Terkait pelayanan administrasi kependudukan, meliputi dokumen pendaftaran penduduk (KTP-el, KK, KIA) dan dokumen pencatatan sipil (Akte Kelahiran, Akta Kematian, Akte Perkawinan, Akta Perceraian), pelayanan administrasi kependudukan telah dilaksanakan secara *online* melalui aplikasi Alpukat Betawi untuk memudahkan warga dalam mengakses layanan tersebut. Di masa yang akan datang, pelayanan dengan menggunakan aplikasi *online* akan lebih ditingkatkan. Selain itu, penggunaan mobil keliling untuk pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP dan pelaporan kelahiran akan tetap dilaksanakan. Berikut layanan administrasi kependudukan lainnya yang akan tetap dilaksanakan kedepannya, antara lain: 1) SIMPATIK DUKCAPIL (Pelayanan Terintegrasi Dokumen Kependudukan 3 Instansi, yaitu: Dinas Dukcapil, Rumah Sakit dan BPJS Kesehatan), 2) Pelayanan Pencatatan Kawin Massal, 3) Layanan PeDeKaTe (Layanan Pencatatan Perkawinan bekerja sama dengan rumah ibadah), 4) Layanan administrasi kependudukan melalui *Whatsapp, drive-thru*, dan jemput bola. Oleh karena itu, peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui pemuktakhiran data warga ber-KTP dan tinggal di Jakarta terus menjadi fokus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Akuntabilitas adalah salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara yang juga penting untuk diperhatikan oleh pemerintah selain transformasi layanan publik. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), merupakan hal yang mutlak

dikedepankan utamanya untuk dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. AKIP juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen pemerintahan diharapkan fokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Pada akhir tahun perencanaan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026, Pemerintah Provinsi DKI menargetkan nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebesar 90,5 atau mendapat predikat AA. Untuk terus mempertahankan nilai AKIP, Pemerintah Provinsi DKI juga memberikan fokusnya terhadap kesejahteraan serta kenyamanan para pekerja. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan fleksibiltas kerja dan cuti melahirkan, serta fasilitas tempat kerja yang mendukung ibu pekerja.

Selanjutnya, salah satu transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah yang sehat, transparan dan akuntabel ditandai dengan laporan keuangan daerah yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Opini Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil audit oleh BPK RI selama lima tahun berturut-turut. Sejalan dengan capaian tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk tetap mempertahankan predikat WTP di tahun 2023-2026 mendatang. Adapun kemudian, dalam hal pendanaan pembangunan itu sendiri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus berupaya dalam mengembangkan alternatif pendanaan pembangunan, yang salah satunya dilakukan melalui program Jakarta *Collaboration Fund*.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mendukung prioritas pembangunan terkait "Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif" dirumuskan berbagai program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025 sebagai berikut:

1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
6) Program Pendaftaran Penduduk.
7) Program Pencatatan Sipil.
8) Program Pelayanan Penanaman Modal.
9) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
10) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
11) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
12) Program Penanggulangan Bencana.
13) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
14) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
15) Program Penataan Organisasi.
16) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
17) Program Perekonomian dan Pembangunan.
18) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
19) Program Penyelenggaraan Pengawasan.
20) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa.

21) Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
22) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
23) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
24) Program Kepegawaian Daerah.
25) Program Penataan Bangunan Gedung.
26) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Tabel 4.14
Sasaran dan Strategi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Ekonomi yang Mapan dan Terkoneksi Secara Global 2. Kapasitas Riset dan Inovasi yang Baik dan Menerus 3. Ruang yang Nyaman untuk Dihuni 4. Lingkungan yang Bersih, Nyaman, dan Berkelanjutan 5. Aksesibilitas yang Terkoneksi Secara Intra dan Inter Kota 6. Menarik Wisatawan untuk Berkunjung	***Built Environment*** Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	1. Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	1.1 Optimalisasi kapasitas sistem penanganan persampahan 1.2 Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan rencana induk ruang terbuka hijau 1.3 Evaluasi tata ruang dalam mencapai tertib pertanahan 1.4 Peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan permukiman yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan 1.5 Peningkatan dan pemeliharaan perumahan rakyat beserta sarana prasarananya 1.6 Penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air limbah 1.7 Penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air minum	**Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota** dengan fokus utama, yaitu: • Peningkatan Kualitas dan Cakupan Transportasi Publik • Penanggulangan Banjir • Perbaikan Kualitas Lingkungan • Penanganan Sampah • Penerapan Energi Baru Terbarukan • Pemenuhan Air Bersih dan Air Minum • Ketahanan Bencana • Peningkatan Kualitas Udara • Peningkatan Akses Hunian Layak
		2. Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	2.1 Pembangunan yang berorientasi pada pembangunan hijau dan ramah disabilitas 2.2 Pengintegrasian upaya pencegahan pencemaran lingkungan melalui kebijakan dan aturan 2.3 Penurunan beban pencemaran lingkungan 2.4 Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau 2.5 Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi 2.6 Peningkatan ketaatan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh kegiatan usaha	

Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2.7 Peningkatan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 2.8 Peningkatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem laut, pesisir dan pulau pulau kecil serta peningkatan pemberdayaan masyarakat 2.9 Pengembangan perikanan budidaya dan tangkap 2.10 Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penegakan aturan hukum terkait pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan 2.11 Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 2.12 Pembangunan / Penataan / Penghijauan Hutan 2.13 Inventarisasi dan tindak lanjut laporan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku 2.14 Pemberian pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan tentang kehutanan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan SDM Dinas 2.15 Inventarisasi dan koordinasi terkait standarisasi pengelolaan DAS 2.16 Pengembangan penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan 2.17 Peningkatan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota	

Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3. Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	3.1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 3.2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 3.3 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 3.4 Program Penanggulangan Bencana 3.5 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 3.6 Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	
		4. Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	4.1 Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur bina marga 4.2 Peningkatan kualitas penataan ruang 4.3 Peningkatan pelayanan angkutan umum dan pemberlakuan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi 4.4 Peningkatan pelayanan terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) dan pengawasan badan usaha angkutan perairan 4.5 Perumusan kebijakan dan memberikan rekomendasi terkait penyelenggaraan perkeretaapian	
	Economic Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	5. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	5.1 Peningkatan daya saing tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja 5.2 Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi 5.3 Penguatan SDM pengelola dan pengawas koperasi 5.4 Pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan dan kewirausahaan, pelaksanaan	**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi** dengan fokus utama, yaitu: • Transformasi Ekonomi (*Green Economy, Blue Economy, Gig Economy, Digitalization*)

Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	• Peningkatan Daya Saing Ekonomi • Peningkatan Investasi Daerah • Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Melalui *Cultural Interaction* • Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja
		6. Penguatan Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	6.1 Pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal 6.2 Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal 6.3 Pengendalian pelaksanaan penanaman modal 6.4 Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif 6.5 Penguatan kerja sama dalam rangka pemanfaatan cagar budaya 6.6 Penguatan peran dan tata kelola permuseuman 6.7 Peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan budaya literasi 6.8 Pendataan, pengolahan, preservasi, pengalihmediaan, dan/atau akuisisi naskah kuno 6.9 Penguatan kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha 6.10 Penguatan tata kelola inovasi daerah	

Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		7. Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	7.1 Peningkatan kualitas pengelolaan, pelayanan produk, dan daya tarik pariwisata 7.2 Peningkatan pemasaran dan informasi pariwisata secara sinergis, intensif, inovatif, dan interaktif 7.3 Peningkatan kerja sama kelembagaan secara profesional, efektif, efisien, produktif, serta pemberdayaan, penguatan dukungan, dan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif 7.4 Pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif 7.5 Peningkatan produksi pertanian, peternakan,susu, daging, olahan hasil pertanian peternakan dan pelayanan kesehatan hewan serta pengembangan pertanian perkotaan/urban farming 7.6 Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan melalui *Online Single Submission Risk Based Approached* (OSS-RBA) 7.7 Pelaksanaan operasi pasar, pemantauan dan pelaporan harga 7.8 Peningkatan ekspor dan pengendalian impor 7.9 Peningkatan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga 7.10 Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 7.11 Peningkatan produktivitas industri dan IKM	

Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		8. Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial	8.1 Peningkatan kualitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia penyelenggara kesejahteraan sosial 8.2 Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 8.3 Pemberian Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tepat sasaran kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 8.4 Penanganan bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi korban bencana alam dan sosial 8.5 Peningkatan jumlah kecamatan yang tahan pangan 8.6 Pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/ pemasaran 8.7 Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan, hasil pertanian, perikanan dan peternakan 8.8 Peningkatan partisipasi masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan kewirausahaan terpadu (Jakpreneur)	**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat** dengan fokus utama, yaitu: • Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi • Percepatan Penuntasan dan Pencegahan Stunting • Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan • Optimalisasi Cakupan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial • Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan • Penguatan Ketahanan Pangan

Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Human Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan	9. Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	9.1 Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang	
		10. Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	10.1 Implementasi transformasi pelayanan kesehatan yang adaptif dan terintegrasi 10.2 Pemenuhan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan dan optimalisasi implementasi *hospitality* 10.3 Pemenuhan dan peningkatan kualitas produk sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta pengawasan keamanan makanan dan minuman 10.4 Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk 10.5 Penyediaan dukungan sarana, prasarana, dan tenaga pelayanan keluarga berencana yang berkualitas dan memadai 10.6 Penguatan pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan masyarakat 10.7 Peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan 10.8 Peningkatan daya saing olahraga 10.9 Pembentukan anggota pramuka yang berjiwa patriotik, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup melalui peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan organisasi kepramukaan	
		11. Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	11.1 Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 11.2 Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk TPPO	

Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			11.3 Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak 11.4 Peningkatan pengelolaan sistem data gender dan anak yang berkualitas, mutakhir dan terpadu 11.5 Peningkatan advokasi dan koordinasi tentang pemenuhan hak anak pada lembaga/ organisasi/ kelompok/ *stakeholder* 11.6 Peningkatan advokasi dan koordinasi tentang perlindungan bagi kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	
	Governance Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas	12. Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	12.1 Peningkatan kualitas layanan kepada anggota dewan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 12.2 Penguatan ideologi pancasila 12.3 Peningkatan kesadaran politik dan demokrasi 12.4 Peningkatan pemberdayaan ormas 12.5 Pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama 12.6 Peningkatan pemahaman masyarakat terkait pencegahan dan penanganan konflik sosial di masyarakat	**Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif** dengan fokus utama, yaitu: • Transformasi dan Digitalisasi • Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Publik • Penggunaan TIK dalam Mendorong Jakarta menjadi Kota Kreatif • Penciptaan Iklim Riset dan Inovasi yang Berkualitas
		13. Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	13.1 Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk peningkatan cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil 13.2 Peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan penyajian profil kependudukan 13.3 Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan	
		14. Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	14.1 Peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan informasi dan komunikasi publik	

Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			14.2 Peningkatan kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi 14.3 Peningkatan penggunaan data dalam proses perencanaan pembangunan di daerah 14.4 Peningkatan manajemen keamanan informasi	
		15. Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	15.1 Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 15.2 Peningkatan kualitas dan efektivitas penataan Peraturan Perundang-Undangan dan advokasi hukum 15.3 Persentase pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan 15.4 Percepatan penyelesaian rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal (BPK RI) 15.5 Peningkatan kebijakan, pendampingan dan asistensi dalam mewujudkan kapabilitas APIP lv 4	
		16. Terkelolanya Keuangan Daerah Yang Sehat, Transparan dan Akuntabel	16.1 Pengembangan sistem informasi serta perbaikan standar pelayanan pengadaan barang/jasa 16.2 Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 16.3 Peningkatan penyusunan dan pengelolaan standar harga satuan barang milik daerah 16.4 Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah	
		17. Tercapainya Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	17.1 Peningkatan kualitas sistem manajemen ASN 17.2 Peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusia	

Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 (diolah)

4.5.3 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerah Tahun 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (SP4N), proses perencanaan dan penganggaran diharapkan memiliki sinergitas, baik Pusat, Daerah, maupun Pusat dengan Daerah. Sinergitas sebagaimana dimaksud mengandung arti bahwa Prioritas Pembangunan perlu dijabarkan ke dalam perencanaan menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir yang dilaksanakan melalui keterpaduan para pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah. Adapun upaya untuk membangun sinergitas tersebut, didasarkan pada 2 (dua) pendekatan, yaitu sinergitas horizontal dan sinergitas vertikal. Sinergitas horizontal merupakan keterpaduan antara upaya peningkatan daya beli, partisipasi sekolah, dan kesehatan. Sedangkan, sinergitas vertikal merupakan keterpaduan strategis antara kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran harus mempersiapkan pelaksanaan dan menyinergikan capaian prioritas sasaran nasional dengan program-program pembangunan daerah serta melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

4.5.3.1 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Dokumen Rancangan RKP Tahun 2025 merupakan salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Dijadikannya acuan dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta memberikan makna bahwa perlu adanya penyelarasan sasaran, prioritas, dan program prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta dengan agenda, sasaran, fokus utama pengembangan wilayah, serta kebijakan nasional lainnya. Sebagaimana diketahui Provinsi DKI Jakarta memiliki 17 sasaran pembangunan untuk jangka menengah yang akan dilaksanakan di setiap tahunnya. Adapun penjelasan keterkaitan antara sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan sasaran prioritas nasional (asta cita), diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.15
Keterkaitan Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2025 dengan Sasaran RPD Tahun 2023-2026 Provinsi DKI Jakarta

Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran RPD DKI Jakarta 2023-2026	
(1)	(2)	(3)	
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Indeks Demokrasi Indonesia	12.	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat
		8.	Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,	*Asia Power Index* (*Military Capability*)		-
	Asia Power Index (*Diplomatic Influence*)[a)]		-
	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	12.	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	5.	Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial

Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran RPD DKI Jakarta 2023-2026	
(1)	(2)	(3)	
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Indeks Ketahanan Energi	1.	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas
	Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	1.	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas
	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	1.	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas.
		5.	Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial.
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	1.	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas.
		5.	Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial.
	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	14.	Akselerasi Transformasi Digital dan Pengembangan Manajemen Kota Cerdas
	Indeks Ekonomi Hijau	1.	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas.
		2.	Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon.
	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	1.	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas.
		2.	Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon.
	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	1.	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas
	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1,	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1,	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas
	Persentase Penurunan Emisi GRK • Tahunan (%) • Kumulatif (%)	3.	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah.
		7.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.
	Rasio Kewirausahaan (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah.
		7.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.

Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran RPD DKI Jakarta 2023-2026	
(1)	(2)	(3)	
serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah.
		7.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.
	Rasio PDB Pariwisata (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah.
		7.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.
	Devisa Pariwisata (miliar USD)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah.
		7.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.
	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah.
		7.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.
		8.	Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi.
	Aset Perbankan/PDB (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
	Aset Asuransi/PDB (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
	Total Kredit/PDB (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
	Inklusi Keuangan (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Hasil Pembelajaran		
	Rata-Rata Nilai PISA • Membaca • Matematika • Sains	9.	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat
	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (tahun)	9.	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat
	Harapan Lama Sekolah (tahun)	9.	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	9.	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat

Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran RPD DKI Jakarta 2023-2026	
(1)	(2)	(3)	
	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	9.	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat
	Tingkat Penguasaan Iptek: Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) Peringkat Indeks Inovasi Global	8.	Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah.
		7.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah.
		7.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.
	Usia Harapan Hidup (tahun)	10.	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan
	Kesehatan Ibu dan Anak Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada Balita (%)	10.	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan
	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	10.	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	10.	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	11.	Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	11.	Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah.
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
	Biaya Logistik (% PDB)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan	Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	5.	Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial.
		7.	Peningkatan Kesempatan Kgerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.

Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran RPD DKI Jakarta 2023-2026	
(1)	(2)	(3)	
Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	5.	Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial.
		7.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.
	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	5.	Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial.
		7.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.
	Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
	Persentase desa mandiri (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	*Return on Asset* (ROA) BUMN (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
	Indeks Integritas Nasional	17.	Tercapainya Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur
	Indeks Materi Hukum	17.	Tercapainya Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur
	Indeks Pelayanan Publik	4.	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit.
		8.	Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi.
		13.	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat.
		14.	Akselerasi Transformasi Digital dan Pengembangan Manajemen Kota Cerdas.
		15.	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah.
		16.	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel.
		17.	Tercapainya Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur.

Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran RPD DKI Jakarta 2023-2026	
(1)	(2)	(3)	
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	13.	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat.
		14.	Akselerasi Transformasi Digital dan Pengembangan Manajemen Kota Cerdas.
	Indeks Persepsi Korupsi	15.	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah.
		16.	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel.
		17.	Tercapainya Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur.
	Indeks Pembangunan Hukum	12.	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat
	Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
	Tingkat Inflasi (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	12.	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat.
		8.	Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi,
	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	12.	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat.
		8.	Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi,
	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	3.	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota.
		5.	Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial.

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2025; RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026, (2023) diolah kembali

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan antara Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2025 dengan 17 (tujuh belas) Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Selain keterkaitan antara sasaran pembangunan, prioritas pembangunan daerah juga diharapkan dapat dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional pada periode yang sama.

Tabel 4.16
Keterkaitan Antara Prioritas Nasional Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi/ Tujuan	Isu Strategis RPD Tahun 2023-2026	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan	1. Ekonomi yang Mapan dan Terkoneksi Secara Global 2. Kapasitas Riset dan Inovasi yang Baik dan Menerus 3. Ruang yang Nyaman untuk Dihuni 4. Lingkungan yang Bersih, Nyaman, dan Berkelanjuta 5. Aksesibilitas yang Terkoneksi Secara Intra dan Inter Kota 6. Menarik Wisatawan untuk Berkunjung	***Built Environment*** Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	Ketahanan Terhadap Bencana Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas	Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota dengan fokus utama, yaitu: 1. Penanganan Kemacetan 2. Penanggulangan Banjir 3. Peningkatan Layanan Transportasi Publik 4. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (*Net Zero Emission*) 5. Tata Kelola Air Bersih dan Air Minum 6. Ketahanan Bencana 7. Pengelolaan Limbah dan Sampah 8. Peningkatan Kualitas Udara 9. Akses Rumah Tangga terhadap Hunian Layak
		Economic Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Ketahanan Ekonomi Inklusif	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dengan fokus utama, yaitu: 1. Transformasi Ekonomi (*Green Economy, Blue Economy, Gig Economy, Digitalization*) 2. Pengembangan Riset dan Inovasi 3. Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Melalui *Cultural Interaction* 4. Peningkatan Daya Tarik Iklim Investasi 5. Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja
			Pemerataan Pembangunan	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan fokus utama, yaitu:

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi/ Tujuan	Isu Strategis RPD Tahun 2023-2026	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		***Human*** Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan	Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara	1. Percepatan Penuntasan dan Pencegahan Stunting 2. Optimalisasi Upaya Penanggulangan Kemiskinan 3. Optimalisasi Cakupan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial 4. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan 5. Penguatan Ketahanan Pangan
		Governance Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas	Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dengan fokus utama, yaitu: 1. Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik 2. Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Publik 3. Penggunaan TIK dalam Mendorong Jakarta menjadi Kota Kreatif

Sumber: Dokumen RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029; Olahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2024

Sebagaimana tabel 4.13 di atas, dapat terlihat bahwa prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 memiliki keterhubungan dengan Prioritas Nasional sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rancangan RKP Tahun 2025. Adapun kemudian, teterkaitan antara Prioritas Nasional Tahun 2025, Parameter Kota Global, dengan Dimensi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Prioritas, dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 terlihat pada tabel 4.25 di bawah.

Tabel 4.17
Keterkaitan antara Prioritas Nasional Tahun 2025, Parameter Kota Global, dengan Dimensi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Prioritas, dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Ekonomi yang Mapan dan Terkoneksi secara Global	***Economic*** Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	-	-	Program Penempatan Tenaga Kerja
					-	Program Hubungan Industrial
		Human Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan	Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	-	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	b. Ekonomi yang Mapan dan Terkoneksi secara Global c. Ruang yang Nyaman untuk Dihuni d. Lingkungan yang Bersih, Nyaman, dan Berkelanjutan	***Built Environment*** Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota	Penanganan Sampah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
						Program Pengelolaan Persampahan
					Pemenuhan Air Bersih dan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi		Perbaikan Kualitas Lingkungan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pembangunan Rendah Karbon		Penanganan Sampah	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
					Penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Program Pengelolaan Energi Terbarukan
					Peningkatan Kualitas Udara	Program Penataan Bangunan Gedung
						Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
						Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Transformasi Ekonomi (*Green Economy, Blue Economy, Gig Economy, Digitalization*)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
					-	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
				Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Percepatan Penuntasan dan Pencegahan Stunting	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
				-	-	Program Penataan Bangunan Gedung

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota	Pemenuhan Air Bersih dan Air Minum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Economic Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah		Perbaikan Kualitas Lingkungan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
				Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing Ekonomi	Program Penyuluhan Pertanian
						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
						Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
					-	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Penguatan Ketahanan Pangan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
				-	-	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				-	-	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Penguatan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat		Program Pengawasan Keamanan Pangan
				-	-	Program Pengawasan Keamanan Pangan
			Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Investasi Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
						Program Promosi Penanaman Modal
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
				-	-	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan	1. Ekonomi yang Mapan dan Terkoneksi secara Global 2. Menarik Wisatawan untuk Berkunjung 3. Aksesibilitas yang Terkoneksi secara Intra dan Inter Kota	***Built Environment*** Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota	Peningkatan Kualitas dan Cakupan Transportasi Publik	Program Penyelenggaraan Jalan
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi						Program Pengelolaan Pelayaran
						Program Pengelolaan Perkeretaapian
					-	Program Penyelenggaraan Jalan
					-	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
					-	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon		Penanggulangan Banjir	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
				Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Transformasi Ekonomi (*Green Economy, Blue Economy, Gig Economy, Digitalization*)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
					Peningkatan Daya Saing Ekonomi	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
						Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
						Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
					-	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				-	-	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota	Penanggulangan Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
					Pemenuhan Air Bersih dan Air Minum	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
		Economic Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing Ekonomi	Program Pengembangan Ekspor
						Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
						Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
					Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Melalui *Cultural Interaction*	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
						Program Pemasaran Pariwisata
						Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja		Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
						Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
				-	-	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan,	1. Ekonomi yang Mapan dan Terkoneksi Secara Global 2. Kapasitas Riset dan Inovasi Baik dan Menerus 3. Ruang yang Nyaman untuk Dihuni	***Economic*** Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja
						Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
				-	-	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
				-	-	Program Penempatan Tenaga Kerja

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas			Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
				-	-	Program Rehabilitasi Sosial
				-	-	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
			Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	Program Pembinaan Perpustakaan
		Human Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat			Program Pengelolaan Pendidikan
					Percepatan Penuntasan dan Pencegahan Stunting	Program Pengelolaan Pendidikan
			Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
						Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
						Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
					Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
					Optimalisasi Cakupan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
						Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
					-	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				-	-	Program Pengendalian Penduduk
				-	-	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
				-	-	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
				-	-	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
			Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	-	-	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
				-	-	Program Perlindungan Perempuan
				-	-	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
				-	-	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
				-	-	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
				-	-	Program Perlindungan Khusus Anak

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Ekonomi yang Mapan dan Terkoneksi secara Global	***Economic*** Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing Ekonomi	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Ekonomi yang Mapan dan Terkoneksi Secara Global 2. Ruang yang Nyaman untuk Dihuni	***Built Environment*** Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota	Peningkatan Akses Hunian Layak	Program Penatagunaan Tanah
						Program Pengembangan Perumahan
						Program Kawasan Permukiman
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		Economic Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Percepatan Penuntasan dan Pencegahan Stunting	Program Rehabilitasi Sosial
					Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
						Program Rehabilitasi Sosial
				-	-	Program Rehabilitasi Sosial

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				-	-	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Ekonomi yang Mapan dan Terkoneksi secara Global	***Built Environment*** Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon		-	Program Penataan Bangunan Gedung
			Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota		Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Publik	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				-	-	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Human Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan	Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Publik	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
					-	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
					-	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
					-	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		Governance Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat		Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik	Program Pendaftaran Penduduk
						Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
					Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Publik	Program Pendaftaran Penduduk
						Program Pencatatan Sipil
						Program Pelayanan Penanaman Modal

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas		Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
					Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Publik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
					Penggunaan TIK dalam Mendorong Jakarta menjadi Kota Kreatif	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
				-	-	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
				-	-	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
				-	-	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
				-	-	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Publik	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
						Program Penyelenggaraan Pengawasan
					-	Program Penataan Organisasi
					-	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
					-	Program Perekonomian dan Pembangunan
				-	-	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
				-	-	Program Penataan Organisasi
				-	-	Program Penyelenggaraan Pengawasan
				-	-	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
			Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat,		Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Transparan, dan Akuntabel	Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	Kemudahan Layanan Publik	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
						Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
					-	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
				-	-	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
				-	-	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
				-	-	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
			Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	-	Program Kepegawaian Daerah

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	1. Menarik Wisatawan untuk Berkunjung 2. Lingkungan yang Bersih, Nyaman, dan Berkelanjutan	***Built Environment*** Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota	Peningkatan Kualitas dan Cakupan Transportasi Publik	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
					Perbaikan Kualitas Lingkungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon			Program Perencanaan Lingkungan Hidup
						Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
						Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
						Program Pengelolaan Hutan
			Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota		Ketahanan Bencana	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
						Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
						Program Penanggulangan Bencana
				Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik	Program Penanggulangan Bencana

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Publik	Program Penanggulangan Bencana
				-	-	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Economic Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota	Ketahanan Bencana	Program Penanganan Bencana
			Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Melalui *Cultural Interaction*	Program Pengembangan Kebudayaan
						Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
						Program Pengelolaan Permuseuman
				-	-	Program Pengembangan Kebudayaan
				-	-	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				-	-	Program Pengelolaan Permuseuman
				-	-	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
		Human Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan	Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	-	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Sumber: 1. RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, 2025 (diolah)
2. Dokumen RKP Tahun 2025, 2025 (diolah)
3. Hasil Kajian Bappeda Provinsi DKI Jakarta terhadap Kota Global, 2025 (diolah)

4.5.3.2 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Pengarusutamaan Pembangunan Nasional dengan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

a. Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkesetaraan gender dan inklusif dengan memberikan kesempatan kepada perempuan dan laki-laki, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan akses dan kontrol agar mampu berpartisipasi secara bermakna, dan memperoleh manfaat dari hasil pelaksanaan pembangunan sebagaimana telah dimandatkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Komitmen tersebut dilaksanakan melalui pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (PUGIS). PUGIS merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender dan inklusi sosial melalui integrasi perspektif gender dan perspektif inklusi sosial ke dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.

Strategi PUGIS juga menjadi bagian penting dari penerapan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, Spasial (THIS) dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan secara sistematis berdasarkan kerangka kerja logis, di mana perspektif gender dan perspektif inklusi sosial diintegrasikan ke dalam Prioritas Nasional, serta terefleksi dalam berbagai program/kegiatan/rincian output di kementerian/lembaga terkait. Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dilaksanakan sejalan dengan etika, moral, nilai budaya yang positif, serta norma agama, yang berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian target dan indikator penurunan ketimpangan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan dari kekerasan, setiap kementerian/lembaga mengintegrasikan perspektif gender dengan mengacu pada program kerja terkait serta menyusun *Gender Action Budget* (GAB) dan melakukan penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG) secara konsisten. Hal tersebut juga dilakukan untuk pencapaian target dan indikator peningkatan kualitas penyandang disabilitas dan lanjut usia, serta kelompok rentan lainnya di setiap kementerian/lembaga.

b. Pengarusutamaan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Pemerintah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dengan mengintegrasikan 124 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kegiatan pencapaian target TPB tersebut secara khusus dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2029. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan pelokalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mengarusutamakan dan menggunakan sasaran dan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 serta menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2029.

Pemerintah baik pusat dan daerah mendorong, memfasilitasi dan bekerja sama dengan aktor nonpemerintah yaitu masyarakat sipil, mitra pembangunan, filantropi, pelaku usaha, dan perguruan tinggi untuk menerapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah mengembangkan dan membentuk *platform* SDGs *centers*, menciptakan SDGs taksonomi, adopsi pelaporan hijau, rancang bangun dan piloting antarkota/kabupaten dengan kota mitra negara lain, advokasi, publikasi dan berbagi pengetahuan, dan keterlibatan inisiatif global dan regional. Pendanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tidak hanya oleh pemerintah, namun didukung oleh nonpemerintah dengan membentuk dan meningkatkan mekanisme pendanaan inovatif, yaitu pendanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berasal dari nonpemerintah, maupun pendanaan gabungan dari pemerintah dan nonpemerintah. Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melibatkan masyarakat sipil, filantropi, pelaku usaha, dan akademisi. Penguatan data memanfaatkan

sistem satu data dan penguatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk menyelaraskan rencana Pembangunan daerah dengan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Adapun kemudian, percepatan capaian target TPB dapat terlaksana apabila terdapat komitmen dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memformulasikan kebijakan yang terarah. Komitmen sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan adanya Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah, rencana aksi tersebut menjadi landasan utama untuk koordinasi di tingkat pusat dengan para *stakeholders* nasional maupun daerah. Dokumen Rencana Aksi Daerah dijadikan sebagai salah satu pedoman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menentukan prioritas pembangunan di setiap tahunnya. Keterkaitan antara beberapa target TPB dengan program prioritas DKI Jakarta tahun 2025 tersampaikan pada tabel di bawah.

Tabel 4.18
Sandingan Program Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Arah Kebijakan Pengarusutamaan (*Mainstreaming*) Pembangunan Nasional Tahun 2025

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
(1)	(2)
Pengarusutamaan Gender & Inklusi Sosial	
Memberikan kesempatan kepada perempuan dan laki-laki, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya dalam meningkatkan akses dan kontrol agar mampu berpartisipasi secara bermakna, dan memperoleh manfaat dari hasil pelaksanaan pembangunan.	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. 2. Program Perlindungan Perempuan. 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga. 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak. 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA). 6. Program Perlindungan Khusus Anak. 7. Program Pemberdayaan Sosial. 8. Program Rehabilitasi Sosial. 9. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. 10. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	
Goal 1 Tanpa Kemiskinan Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 1.1** Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar amerika per hari**.** • **Target 1.2** Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi. • **Target 1.3** Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. 2. Program Pengelolaan Kota Administrasi. 3. Program Penempatan Tenaga Kerja. 4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). 5. Program Pengelolaan Pendidikan. 6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM). 7. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. 8. Program Pengendalian Penduduk. 9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB). 10. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
(1)	(2)
yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. • **Target 1.4** Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. • **Target 1.5** Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Masyarakat. 11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. 12. Program Rehabilitasi Sosial. 13. Program Hubungan Industrial. 14. Program Pengembangan Perumahan. 15. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). 16. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 17. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. 18. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian. 19. Program Perlindungan Perempuan. 20. Program Penanganan Bencana. 21. Program Penanggulangan Bencana. 22. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. 23. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. 24. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
Goal 2 Tanpa Kelaparan Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 2.1** Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. • **Target 2.2** Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. • **Target 2.3** Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk	1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB). 2. Program Penanganan Kerawanan Pangan. 3. Program Pengendalian Penduduk. 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. 5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. 7. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. 8. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. 9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). 10. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. 11. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. 12. Program Penyuluhan Pertanian. 13. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
(1)	(2)
melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian. • **Target 2.4** Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan. • **Target 2.5** Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan di anekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pertanian. • **Target 2.c** Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.	14. Program Pengawasan Keamanan Pangan.
Goal 3 Kehidupan Sehat & Sejahtera Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia . Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 3.1** Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. • **Target 3.2** Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. • **Target 3.3** Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan	1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. 4. Program Pengendalian Penduduk. 5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB). 6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 7. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. 8. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
(1)	(2)
memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. • **Target 3.4** Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. • **Target 3.5** Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan. • **Target 3.7** Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. • **Target 3.8** Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. • **Target 3.b** Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai t*he Doha Declaration* tentang *the TRIPS Agreement and Public Health*, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua. • **Target 3.c** Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
(1)	(2)
Goal 4 Pendidikan Berkualitas Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 4.1** Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. • **Target 4.2** Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. • **Target 4.3** Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. • **Target 4.4** Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. • **Target 4.5** Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. • **Target 4.6** Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. • **Target 4.a** Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	1. Program Pengelolaan Pendidikan. 2. Program Pengendalian Penduduk. 3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. 4. Program Pembinaan Perpustakaan. 5. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno. 6. Program Pengelolaan Arsip. 7. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
(1)	(2)
• **Target 4.c** Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	
Goal 5 Kesetaraan Gender Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 5.3** Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. • **Target 5.5** Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. • **Target 5.6** Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut. • **Target 5.a** Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional. • **Target 5.b** Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	1. Program Perlindungan Perempuan. 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB). 3. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. 4. Program Perlindungan Khusus Anak. 5. Program Peningkatan Kualitas Keluarga. 6. Program Pengembangan Perumahan. 7. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian. 8. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. 9. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. 10. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak. 11. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
Goal 6 Air Bersih & Sanitasi Layak Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 6.1** Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
(1)	(2)
minum yang aman dan terjangkau bagi semua. • **Target 6.2** Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. • **Target 6.6** Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	4. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian. 5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup. 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). 7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. 8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. 9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase. 10. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). 11. Program Pengelolaan Hutan. 12. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Goal 7 Energi Bersih & Terjangkau Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 7.1** Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan. 2. Program Pengelolaan Energi Terbarukan.
Goal 8 Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 8.1** Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. • **Target 8.2** Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya. • **Target 8.3** Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan	1. Program Pengembangan Ekspor. 2. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. 3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM). 4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. 5. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. 6. Program Pemasaran Pariwisata. 7. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. 8. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. 9. Program Perekonomian dan Pembangunan. 10. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. 11. Program Perencanaan Tenaga Kerja.

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
(1)	(2)
inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. • **Target 8.5** Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. • **Target 8.6** Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan. • **Target 8.7** Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya. • **Target 8.9** Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	12. Program Penempatan Tenaga Kerja. 13. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 14. Program Hubungan Industrial. 15. Program Pengawasan Ketenagakerjaan. 16. Program Pengelolaan Pelayaran. 17. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. 18. Program Promosi Penanaman Modal. 19. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 20. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen. 21. Program Pelayanan Penanaman Modal. 22. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. 23. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi. 24. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. 25. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan. 26. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.
Goal 9 Industri, Inovasi & Infrastruktur Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 9.1** Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. • **Target 9.2** Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). 2. Program Pengelolaan Pelayaran. 3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. 4. Program Pengendalian Izin Usaha Industri. 5. Program Penyelenggaraan Jalan. 6. Program Pengelolaan Perkeretaapian.
Goal 10 Berkurangnya Kesenjangan	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. 2. Program Pemberdayaan Usaha

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
(1)	(2)
Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 10.1** Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM). 3. Program Penempatan Tenaga Kerja. 4. Program Hubungan Industrial. 5. Program Pengelolaan Kota Administrasi. 6. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. 7. Program Rehabilitasi Sosial. 8. Program Perlindungan Perempuan. 9. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum. 10. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan. 11. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
Goal 11 Kota & Permukiman Yang Berkelanjutan Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 11.1** Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. • **Target 11.2** Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua. • **Target 11.4** Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. • **Target 11.5** Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. • **Target 11.6** Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan	1. Program Pengembangan Perumahan. 2. Program Kawasan Permukiman. 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). 4. Program Penyelenggaraan Jalan. 5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). 6. Program Pengelolaan Pelayaran. 7. Program Pengembangan Kebudayaan. 8. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. 9. Program Pengelolaan Permuseuman. 10. Program Penanggulangan Bencana. 11. Program Penanganan Bencana. 12. Program Pengelolaan Kecamatan. 13. Program Rehabilitasi Sosial. 14. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. 15. Program Pengelolaan Persampahan. 16. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). 17. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. 18. Program Penataan Bangunan Gedung. 19. Program Pengelolaan Perkeretaapian. 20. Program Penatagunaan Tanah.

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
(1)	(2)
memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. • **Target 11.7** Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas. • **Target 11.a** Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah. • **Target 11.b** Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* 2015-2030. • **Target 11.c** Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memfaatkan bahan lokal.	
Goal 12 Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 12.4** Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. • **Target 12.5** Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah	1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). 2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat. 3. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. 4. Program Pengelolaan Persampahan. 5. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
(1)	(2)
melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. • **Target 12.8** Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	
Goal 13 Penanganan Perubahan Iklim Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 13.1** Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. • **Target 13.2** Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional. • **Target 13.3** Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.	1. Program Penanggulangan Bencana. 2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 3. Program Rehabilitasi Sosial. 4. Program Penanganan Bencana. 5. Program Pengembangan Perumahan. 6. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. 7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat. 8. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
Goal 14 Ekosistem Lautan Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 14.5** Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. • **Target 14.6** Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada *the World Trade Organization*.	1. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. 3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. 4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. 6. Program Perencanaan Lingkungan Hidup. 7. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
(1)	(2)
• **Target 14.b** Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (*small-scale artisanal fishers*) terhadap sumber daya laut dan pasar.	
Goal 15 Ekosistem Daratan Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 15.1** Pada tahun 2020, menjamin kelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	1. Program Pengelolaan Hutan. 2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
Goal 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 16.1** Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. • **Target 16.2** Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. • **Target 16.3** Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. • **Target 16.5** Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. • **Target 16.6** Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat • **Target 16.7** Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. 2. Program Perlindungan Khusus Anak. 3. Program Perlindungan Perempuan. 4. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. 5. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. 6. Program Penyelenggaraan Pengawasan. 7. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. 8. Program Pengelolaan Kota Administrasi. 9. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan. 10. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. 11. Program Penataan Organisasi. 12. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. 13. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik. 14. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 15. Program Pendaftaran Penduduk. 16. Program Pencatatan Sipil.

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
(1)	(2)
• **Target 16.9** Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. • **Target 16.10** Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional. • **Target 16.b** Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	17. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. 18. Program Pengelolaan Profil Kependudukan. 19. Program Pengendalian Penduduk. 20. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. 21. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.
Goal 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 17.1** Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. • **Target 17.11** Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020. • **Target 17.17** Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama. • **Target 17.19** Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Program Pengembangan Ekspor. 4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. 5. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah. 6. Program Pendaftaran Penduduk. 7. Program Pencatatan Sipil. 8. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. 9. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Sumber: Hasil Olahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2025

4.6 Prioritas Pembangunan Kewilayahan

Provinsi DKI Jakarta, terdiri dari 5 (lima) wilayah Kota dan 1 (satu) Kabupaten. Masing-masing wilayah tersebut memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda. Daya saing kota/ kabupaten dapat optimal jika masing-masing wilayah fokus membangun pada potensi keunggulannya. Selain itu, keberhasilan pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 yang diturunkan ke dalam 4 (empat) prioritas pembangunan, akan optimal apabila setiap wilayah secara langsung mendukung prioritas pembangunan tersebut.

a. Jakarta Barat

Prioritas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dalam rangka mendukung tema pembangunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota
   (a) Rekayasa Lalu Lintas
      (1) Sistem satu arah/ pengalihan jalan alternatif dari Jl. Puri Kencana melalui Jl. Kencana Indah dan Jl. Kembang Indah ke arah Meruya, Kembangan
      (2) Pengaturan arus lalu lintas dari utara dan selatan karena penyempitan jalan (*bottleneck*) di Kembang Kerep Kuku Macan, Kecamatan Kembangan.
   (b) Penertiban Parkir Liar
   (c) Penyesuaian Trase Jalan
   (d) Pembukaan Portal
   (e) Pembangunan/Revitalisasi JPO di Slipi Petamburan
   (f) Revitalisasi Sarpras Pengendali Banjir
      (1) Penambahan Kapasitas Kolam Olakan Pompa Phb. Bojong – Rawa Buaya
      (2) Revitalisasi Pompa Mobile menjadi Pompa Stasioner di Tanjung Duren
      (3) Revitalisasi Pompa Mobile menjadi Pompa Stasioner di Jl. Pedongkelan Raya (pertemuan Kali Apuran dengan Cengkareng Drain)
      (4) Perkuatan tebing kali/ *sheet pile* Kali Sekretaris (Jl. Gili Sampeng – Jl. Arjuna Selatan) sepanjang 200m.
   (g) Normalisasi Saluran
      (1) Normalisasi Kali Semongol
      (2) Normalisasi Kali Anak Flamboyan
      (3) Pembuatan Sodetan Kali Gendong
   (h) Pemeliharaan Rutin Kali/ Saluran
   (i) Perbaikan Saluran
   (j) Refungsi Saluran
   (k) Penanganan Sampah Kali
   (l) Implementasi Pergub Nomor 77 Tahun 2020 dengan pembentukan dan pendampingan bank sampah sebanyak 1.080 BSU
   (m) Peningkatan pengurangan sampah di sumber sebesar 30% (sesuai Pergub Nomor 108 Tahun 2019)
   (n) Peningkatan TPS yang berkonsep 3R sebanyak 4 lokasi antara lain Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kelurahan Kalideres, Kelurahan Tegal Alur, dan Kelurahan Sukabumi Selatan dan Pembangunan TPS 3R di Pesakih Rusun Daan Mogot.
   (o) Bekerja sama dengan pihak swasta untuk menjadikan wilayah Jakart Barat bebas dari buang air sembarangan.
   (p) Pelaksanaan *Collaborative Implementation Program* (CIP) di 17 Lokasi RW Kumuh antara Lain:
      (1) Kelurahan Kamal 4 RW
      (2) Kelurahan Tegal Alur 1 RW
      (3) Kelurahan Semanan 2 RW

(4) Kelurahan Cengkareng Timur 2 RW
(5) Kelurahan Cengkateng Barat 4 RW
(6) Kelurahan Rawa Buaya 2 RW
(7) Kelurahan Kota Bambu Selatan 1 RW
(8) Kelurahan Kapuk 1 RW

(p) Pembangunan RTH sebanyak 3 lokasi antara lain Taman Ratu Kamboja, Taman Hutan Kota Nusantara (THKN) dan Taman Sensori sisi Selatan
(q) Penghijauan di lokasi Penataan Kawasan wilayah Jakarta Barat

2. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi
   (a) Pelaksanaan pelatihan dengan memprioritaskan masyarakat miskin menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
   (b) Pelatihan Softskill dan Pelatihan Hardskill, antara lain:
      (1) Pelatihan Manajemen usaha dan pemasaran dengan professional
      (2) Pelatihan bidang Kuliner, Fashion; Kerajinan; Tata Rias;
   (c) Service AC; Ekonomi Kreatif; Olahan Hasil Perikanan, Pertanian, Peternakan; Budidaya Perikanan dan Budidaya pertanian perkotaan; serta pelatihan mengemudi dan satpam
   (d) Peningkatan akses pasar dan literasi digital bagi pelaku UMKM
   (e) Peningkatan promosi pariwisata dengan penyelenggaraan atraksi ruang publik, kolaborasi media dan influencer.
3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
   (a) Alokasi revitalisasi tangki septik dan MCK komunal
   (b) Peningkatan Pelayanan Posyandu dan Pemberian Makanan Tambahan Balita
   (c) Pembangunan IPAL
   (d) Melanjutkan Penanaman cabai dan *urban farming*
   (e) Fasilitasi penyediaan sembako murah
   (f) Pemberian bibit ikan kepada Masyarakat dan Gerakan Makan Ikan
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif
   (a) Penguatan jaringan internet (bandwidth) serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi
   (b) Peningkatan kualitas SDM (aparatur, RT/RW dan Masyarakat) dalam literasi digital
   (c) Kolaborasi dengan pihak swasta (CSR).

b. Jakarta Utara

Prioritas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam rangka mendukung tema pembangunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota
   (a) Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD dalam rangka penanggulangan banjir rob di pesisir utara Jakarta
   (b) Pembangunan Turap Kali Cakung Lama, Pegangsaan Dua dalam rangka penanggulangan banjir di Kelapa Gading dan Cilincing
   (c) Perbaikan Jalan di sepanjang jalan akses Marunda
2. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi
   (a) Pembangunan Ikon Pengembangan Kawasan Bersejarah dalam rangka peningkatan daya tarik wisata
3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
   (a) Perluasan ruang beberapa Puskesmas Kecamatan
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif
   (a) Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara di Jalan Yos Sudarso.

c. Jakarta Pusat

Prioritas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam rangka mendukung tema pembangunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota
   (a) Penanggulangan Banjir
      (1) Pembangunan saluran drainase di 22 lokasi
      (2) Pembangunan 5 (lima) unit pintu air
      (3) Pemeliharaan rutin saluran dan drainase
      (4) Pemeliharaan dan perbaikan pompa stasioner
      (5) Penempatan pompa mobile di lokasi rawan genangan
      (6) Pengerukan Kali Sentiong, Kali Banjir Kanal Barat, dan Anak Kali Ciliwung
      (7) Penanganan jaringan utilitas (kabel) di dalam saluran yang menjadi penyebab genangan/banjir di Jalan Medan Merdeka Selatan
   (b) Peningkatan Pengelolaan Sampah
      (1) Pengelolaan Sampah Kawasan Mandiri di 135 lokasi
      (2) Pembatasan Timbulan Sampah
      (3) Pengelolaan Sampah RW sebanyak 195 BPS RW
      (4) TPS 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) di 4 (empat) lokasi
      (5) Bank Sampah, terdiri dari 385 Bank Sampah dan 1 (satu) Bank Sampah Induk
      (6) Program Kampung Iklim di 84 RW
      (7) Program Adiwiyata di 98 sekolah
   (c) Peningkatan program penghijauan kota
   (d) Pembangunan dan/atau pemeliharaan fasum dan fasos di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran (eks Bandar Udara Kemayoran)
2. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi
   (a) Revitalisasi Pasar Serdang dan Pasar Gardu Asem
   (b) Pengembangan Ekonomi Kreatif
      (1) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kemitraan seperti kompetisi musik dan lomba short film
      (2) Pembinaan kewirausahaan peserta *Jakpreneur* dan UKM (pelatihan *softskill* bersama kolaborator)
      (3) Pelatihan ekonomi kreatif seperti pelatihan pembuatan logo dan desain kemasan
      (4) Pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif di ruang publik dan destinasi wisata
      (5) Fasilitasi pendaftaran sertifikat halal, izin edar MD BPOM, desain kemasan, dan Hak Merk
   (c) Pengembangan Pariwisata
      (1) Pengembangan Kawasan Juanda-Pecenongan-Pasar Baru sebagai Kawasan Wisata Heritage-Religi, Kuliner, dan Belanja
      (2) Penyelenggaraan Green Tourism Festival
      (3) Promosi destinasi wisata unggulan dengan melibatkan media dan influencer
      (4) Promosi pariwisata melalui penyelenggaraan atraksi di ruang publik, kalender event, dan kemitraan dengan pelaku/komunitas seni
      (5) Peningkatan kualitas layanan pariwisata melalui pembinaan kelompok sadar wisata
3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
   (a) Penurunan Stunting
      (1) Pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi, terutama di kelurahan yang menjadi lokus utama
      (2) Pelaksanaan program Jakarta Beraksi dengan mengikutsertakan dunia usaha/lembaga melalui CSR

(b) Peningkatan Layanan Kesehatan
   (1) Pengadaan lahan Puskesmas Kelurahan Gunung Sahari Selatan
   (2) Pembangunan 10 Puskesmas Pembantu
(c) Penanggulangan Kemiskinan
   (1) Peningkatan pendapatan dan produktivitas masyarakat
   (2) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat
   (3) Peningkatan kualitas permukiman kumuh

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif
(a) Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Publik
   (1) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, cepat, dan mudah
   (2) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM
   (3) Penyediaan sarana prasarana gedung pelayanan publik yang nyaman dan aman sesuai standar
   (4) Kolaborasi dengan pihak swasta/masyarakat melalui CSR.

d. Jakarta Selatan

Prioritas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam rangka mendukung tema pembangunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota
(a) Penanganan Genangan/Banjir
   (1) Pembangunan Embung Dharmajaya di Kemang Utara IX
   (2) Peninggian Turap di sisi samping SDN 01 Petukangan Selatan
   (3) Pembuatan *Jacking* Cilandak KKO menuju Kali Krukut
   (4) Pembuatan *Connecting* Saluran di gang Asem dan depan Depdikbud ke *Jacking*
   (5) Normalisasi dan Penurapan Kali Mati dan Kali Kalibata serta Penurapan lanjutan Kali Mampang
   (6) Penataan Kawasan Rawa Lindung
   (7) Penurapan dan Pembangunan Rumah Pompa di Komplek Pondok Karya
   (8) Pembuatan Saluran Air di Jalan Haji Nawi Raya dan Fatmawati Raya
   (9) Pembebasan lahan untuk Pembuatan Embung Kali Uangan
(b) Pembangunan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau
   (1) Pembangunan RTH Taman RC Veteran Kelurahan Bintaro dan RTH Taman Jalan Wika Kelurahan Srengseng Sawah
   (2) Penataan RTH Taman Tanjung Kelurahan Tanjung Barat dan RTH Taman Bendi Kelurahan Kebayoran Lama Selatan
   (3) Penataan RTH Taman Walikota, Bangka Raya, dan Taman Barat Bintaro
(c) Penataan Kawasan
   (1) Revitalisasi Kawasan Blok M
   (2) Penataan Kawasan Hijau Terpadu Srengseng Sawah
   (3) Penataan Trotoar sepanjang koridor Jalan RC Veteran Bintaro
   (4) Penataan Trotoar di Jalan Wijaya II dan Jalan Darmawangsa Raya
   (5) Penataan Totoar di Jalan Iskandar Muda dan Jalan Ciputat Raya
   (6) Pemeliharaan Trotoar di Jalan Kahfi II
   (7) Penataan Kawasan sepanjang Jalan Tebet Barat Dalam Raya
   (8) Penataan Kawasan Jalan Senayan Kelurahan Rawa Barat
(d) Penanganan Kemacetan
   (1) Pelebaran Jalan Ciledug Raya di depan Universitas Budi Luhur
   (2) Pelebaran jalan dan perbaikan radius tikung di Jalan Tunda Bara, Cilandak Barat
   (3) Pembuatan Laybay di depan Taman Komplek Brimob Pasar Minggu, Pejaten Barat

(4) Pembuatan JPO di depan SMK Al Falah Jalan Mampang Prapatan Raya
(5) Penyusunan Kajian Jalan Layang Non Tol Mampang (Koridor Kuningan-Ragunan)

2. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi
3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
   (a) Penanganan Stunting
      (1) Kelas pemberian makanan bayi dan anak
      (2) Pemberian TTD Rematri dan pemeriksaan HB
      (3) Pemberian kolam gizi (bak fiber)
      (4) Kampung gizi dengan YMB PLN
      (5) Dashat X Jakber
      (6) Kunjungan balita stunting
      (7) Gerakan Gemar Makan Ikan
      (8) Peningkatan Sanitasi Lingkungan
      (9) Kelompok Peduli Gizi
   (b) Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan
      (1) Pembangunan Puskesmas Pembantu Kebon Baru, Karet Kuningan, Cipete Utara, Kebayoran Lama Selatan, dan Jati Padang
      (2) Rehab Total Puskesmas Pembantu Menteng Dalam
      (3) Rehab Total Puskesmas Pembantu Pondok Pinang
      (4) Pembangunan Puskesmas Kebayoran Lama dan Puskesmas Pembantu Cipedak
      (5) Pemindahan lokasi Puskesmas Pembantu Cilandak Barat
   (c) Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan
      (1) Rehab Total Gedung SDN Cipulir 11, Cilandak Barat 08, Gandaria Selatan 03 Pagi, Lebak Bulus 04, Cipete Utara 01, Tebet Timur 07, dan Setiabudi 01
      (2) Rehab Total Gedung SMPN 115, SMPN 15, dan SMPN 58
      (3) Rehab Total Gedung SMKN 37
      (4) Pembangunan SMP Negeri di Kelurahan Pasar Minggu
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif
   (a) Pembuatan Pos Pemadam Kebakaran Kelurahan Lenteng Agung
   (b) Relokasi Kantor Lurah Tegal Parang.

e. Jakarta Timur

Prioritas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam rangka mendukung tema pembangunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota
   (a) Pengendalian Banjir
      (1) Pembangunan Waduk Dato Tonggara Kecamatan Kramat Jati
      (2) Pembangunan Waduk Giri Kencana Kecamatan Cipayung
      (3) Pembangunan Embung Mini, Normalisasi Kali Mati, dan Pembuatan Pintu Air Kali Mati di RW 11 Kelurahan Bidara Cina
      (4) Pembangunan Embung di Gang Akom RW 05 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas
      (5) Penurapan Kali Cipinang Jalan Puskesmas RW 01 dan RW 03 Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas
      (6) Penurapan Kali Baru di HEK dan Jalan Haji Hanjun Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Kramat Jati
      (7) Pengerukan berkala waduk/setu/embung
      (8) Pembangunan saluran Phb dan saluran mikro
      (9) Pembangunan/peningkatan pintu air, rumah poma, dan unit pompa
      (10) Pembangunan sumur resapan

(11) Optimalisasi ruang biru pada RTH dengan membangun bioswale dan *rain garden*

(b) Penataan Kawasan
   (1) Penataan fungsi koridor jalan dan mempertegas batas GSJ dan GSB
   (2) Peningkatan estetika kawasan dengan penambahan *street furniture*

(c) Revitalisasi Terminal Bus Pinang Ranti

(d) Pembangunan 4 (empat) JPO di Jalan H. Bokir bin Djiun, Travoy Hub, Stasiun LRT Taman Mini, dan Asrama Haji

2. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

(a) Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
   (1) Pelaksanaan Job Fair
   (2) Pelatihan keterampilan kerja
   (3) Pelatihan kerja berbasis kompetensi
   (4) Pelatihan bagi peserta Jakpreneur
   (5) Pelatihan bagi pelaku industri kecil dan menengah
   (6) Pendampingan bagi Tenaga Kerja Mandiri
   (7) Optimalisasi promosi dan pemasaran produk unggulan daerah

(b) Penambahan Rute JakLingko dari Pondok Ranggon sampai halte bus Pinang Ranti melewati RSUD Cipayung

3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

(a) Pembangunan Sarana Prasarana Kesehatan
   (1) Pembangunan Puskesmas Pembantu Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit
   (2) Pembangunan Puskesmas Pembantu Cipayung

(b) Pembangunan Sarana Prasaran Pendidikan
   (1) Pembangunan SMPN di Kelurahan Jatinegara Kaum
   (2) Pembangunan SMPN di Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan Pulo Gadung
   (3) Pembangunan SMPN di Kelurahan Makasar Kecamatan Makasar
   (4) Pembangunan SMPN dan SMAN di Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung

(c) Percepatan Penuntasan Stunting
   (1) Pelaksanaan 8 aksi konvergensi stunting
   (2) Memaksimalkan fungsi Posyandu dalam deteksi dini tumbuh kembang balita
   (3) Peningkatan wawasan kepada remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, pekerja wanita, dan ibu menyusui
   (4) Peningkatan peran Orang Tua Asuh Stunting
   (5) Penyediaan PMT-AS SD dan TK/PAUD
   (6) Mendorong rujukan ke Rumah Sakit bagi balita stunting
   (7) Penataan RW kumuh dan pembuatan WC komunal

(d) Penguatan Ketahanan Pangan
   (1) Menggiatkan kelompok-kelompok tani skala kelurahan
   (2) Pengembangan pangan lokal
   (3) Penebaran bibit ikan
   (4) Peningkatan *urban farming*
   (5) Penanaman cabai dan bawang di lahan-lahan fasos fasum, kantor kelurahan dan kecamatan, rumah warga, serta tempat ibadah

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif

f. Kepulauan Seribu

Prioritas Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam rangka mendukung tema pembangunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 adalah:

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota

(a) Peningkatan sarana prasarana transportasi laut

(1) Reavitalisasi pelabuhan dan dermaga
(2) Pemenuhan kebutuhan angkutan perairan antar pulau

(b) Pembangunan Rumah Susun di Area Hexagon Pulau Panggang
(c) Peningkatan kapasitas dan kualitas produksi SWRO
(d) Penanganan Sampah
(1) Pengadaan Kapal Conveyor
(2) Pembangunan TPS dan pengolahan sampah non konvensional
(3) Pengembangan pulau khusus penanganan sampah

2. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi
(a) Perikanan dan Kelautan
(1) Pembangunan tempat pelelangan ikan terpadu
(2) Revitalisasi Pulau Tidung Kecil menjadi Eko Agro Mina Wisata
(b) Pembangunan jaringan kabel laut di pulau-pulau resort
(c) Pembangunan/Penyediaan SPBU di Kepulauan Seribu
(d) Pariwisata
(1) Pengembangan spot wisata di setiap pulau permukiman
(2) Pengembangan obyek wisata cagar budaya

3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
(a) Peningkatan Layanan Kesehatan
(1) Peningkatan status RSUD Tipe D ke Tipe C
(2) Optimalisasi Rumah Sakit Kelupauan Seribu, khususnya peningkatan layanan kamar operasi serta ICU dan NICCU
(3) Pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di RSUD Kepulauan Seribu
(4) Pembangunan Poskes di Pulau Pari
(b) Peningkatan Layanan Pendidikan
(1) Pembentukan jurusan SMK sesuai kebutuhan
(2) Pengadaan tempat praktik docking kapal sebagai sarana pelatihan SMKN 61
(c) Penyediaan lahan pemakaman di Pulau Panjang dan Pulau Karya
(d) Penguatan Ketahanan Pangan (*Food Security*) melalui riset dan teknologi
(e) Pemuda dan Olahraga
(1) Pembangunan GOR di Pulau Panjang dan Pulau Tidung Kecil
(2) Pembangunan Floating Sports Tourism

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 5

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH



Foto: Dokumentasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pada bagian ini dijelaskan mengenai **rencana kerja dan pendanaan daerah Provinsi DKI Jakarta** yang membahas kebijakan perubahan rencana kerja dan pendanaan daerah serta penyesuaian rencana kerja dan pendanaan daerah.

5.1 Kebijakan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2025 sebagaimana disampaikan dalam Bab II berdampak pada penyesuaian rencana kerja dan pendanaan daerah. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi.

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/ atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Kebijakan perubahan dimaksud mengacu pada Surat Edaran Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0002/SE/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Kriteria Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, meliputi:

a. pemenuhan belanja wajib dan mengikat, yaitu pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah;
b. menunjang pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan sosial;
c. menjaga optimalisasi layanan pada instansi yang menerapkan skema Badan Layanan Umum Daerah;
d. penyelesaian prioritas pembangunan daerah tahun 2025, antara lain.
    1) Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota, dengan fokus utama:
        a) Peningkatan Kualitas dan Cakupan Transportasi Publik
        b) Penanggulangan Banjir
        c) Perbaikan Kualitas Lingkungan
        d) Penanganan Sampah
        e) Penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT)
        f) Pemenuhan Air Bersih dan Air Minum
        g) Ketahanan Bencana
        h) Peningkatan Kualitas Udara
        i) Peningkatan Akses Hunian Layak
    2) Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, dengan fokus utama:
        a) Transformasi Ekonomi (*Green Economy, Blue Economy, Gig Economy, Digitalization*)
        b) Peningkatan Daya Saing Ekonomi
        c) Peningkatan Investasi Daerah
        d) Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Melalui Cultural Interaction
        e) Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja
    3) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, dengan fokus utama:
        a) Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi
        b) Percepatan Penuntasan dan Pencegahan Stunting
        c) Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan
        d) Optimalisasi Cakupan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial
        e) Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan
        f) Penguatan Ketahanan Pangan
    4) Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, dengan fokus utama:
        a) Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik

b) Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Publik
c) Penggunaan TIK dalam Mendorong Jakarta menjadi Kota Kreatif
d) Penciptaan Iklim Riset dan Inovasi yang Berkualitas

e. kegiatan tahun jamak yang menjadi prioritas untuk diselesaikan pada tahun 2025; dan
f. kegiatan yang pendanaannya bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, antara lain dana alokasi khusus dan belanja wajib yang didanai oleh dana bagi hasil.

Selain itu, perubahan rencana kerja dan pendanaan daerah juga tetap memperhatikan.

a. pencapaian target RPD, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) perangkat daerah dan pemenuhan target kegiatan strategis daerah;
b. penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program Asta Cita sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain.
    1) Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
    2) Program Makan Bergizi Gratis;
    3) Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
    4) Pengendalian inflasi;
    5) Peningkatan pertumbuhan ekonomi;
    6) Dukungan swasembada pangan; dan
    7) Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM);
c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun 2025;
d. Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Efisiensi dan Penyesuaian Belanja Tahun Anggaran 2025;
e. penyelarasan program Gubernur dan Wakil Gubernur;
f. kemampuan keuangan daerah dan proyeksi penyerapan anggaran hingga akhir tahun;
g. pemenuhan kebijakan Pemerintah Pusat, arahan tertulis Gubernur, dan Sekretaris Daerah;
h. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 ditetapkan;
i. pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga (utang daerah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan masuk dalam neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
j. tindak lanjut hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.

5.2 Penyesuaian Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, serta prioritas pembangunan tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pembangunan melalui 103 program prioritas. Pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menjaga konsistensi terhadap program prioritas yang dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025.

Adapun rincian rencana kerja program prioritas yang dilaksanakan di tahun 2025 beserta pagu indikatif dan target kinerja disampaikan pada Tabel 5.1 di bawah.

Tabel 5.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Program Prioritas Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program	Indikator Kinerja		RKPD Tahun 2025		Penetapan APBD Tahun 2025		Pergeseran II APBD Tahun 2025		Perubahan RKPD Tahun 2025		PD
				Indikator	satuan	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	**Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan**			**Indeks Kota Layak Huni**	**Indeks**	**67**		**71**		**71**		**71**		
1.1.	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas			Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan	%	69,84		77,25		77,25		77,25		
		1	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
		1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	Penyediaan dan Peningkatan akses pelayanan air minum	1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah kapasitas pengolahan air minum yang beroperasi	liter/ detik	24285	25.496.962.460	24285	38.405.891.243	24285	38.405.891.243	24285	38.686.522.815	Dinas SDA
	Penyediaan dan Peningkatan akses pelayanan air limbah	1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah debit air limbah yang terolah	m3/hari	2800	747.742.342.014	2800	700.628.067.610	2800	700.628.067.610	2800	662.036.622.229	Dinas SDA
		1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman											
	Terbangunnya Unit Hunian Layak	1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	% Unit Hunian Layak yang Terbangun	%	1,35	418.683.085.253	1,35	669.265.211.493	1,35	547.692.430.633	1,35	550.555.260.473	Dinas PRKP
	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Terselenggara	1.04.03	Program Kawasan Permukiman	% Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Terselenggara	%	84,04	36.495.567.748	84,04	7.851.552.493	84,04	4.556.932.723	84,04	3.658.714.965	Dinas PRKP
	Meningkatnya PSU Kawasan Permukiman	1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	% PSU Kawasan Permukiman yang ditingkatkan	%	12,38	397.227.034.344	12,38	417.061.559.225	12,38	416.319.141.291	12,38	398.690.976.606	Dinas PRKP

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program	Indikator Kinerja		RKPD Tahun 2025		Penetapan APBD Tahun 2025		Pergeseran II APBD Tahun 2025		Perubahan RKPD Tahun 2025		PD
				Indikator	satuan	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Terkait Pelayanan Dasar											
		2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan											
	Meningkatnya bidang tanah milik masyarakat yang terinventarisasi dan terfasilitasi dalam rangka perencanaan penggunaan tanah untuk mendukung peningkatan sertifikasi di kawasan permukiman	2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase bidang tanah milik masyarakat yang terinventarisasi dan terfasilitasi dalam rangka perencanaan penggunaan tanah untuk mendukung peningkatan sertifikasi di kawasan pemukiman	%	20	1.574.100.000	20	1.565.359.343	20	1.451.083.503	20	1.262.983.503	Dinas CKTRP
		2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup											
	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Peningkatan kapasitas sistem penanganan persampahan	ton/hari	3209	2.173.200.533.691	3209	2.414.214.683.171	3209	2.380.554.905.016	3209	2.408.436.746.322	DLH
				Persentase rumah tangga yang melakukan pemilahan	%	11		11		11		11		
1.2	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit			Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	Persen	21,87		23,01		23,01		23,01		
		1	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
		1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program	Indikator Kinerja		RKPD Tahun 2025		Penetapan APBD Tahun 2025		Pergeseran II APBD Tahun 2025		Perubahan RKPD Tahun 2025		PD
				Indikator	satuan	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan	1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan	Indeks	4	2.425.973.105.278	4	2.866.743.834.960	4	2.672.864.966.149	4	2.666.483.032.392	DBM
	Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan Lingkup Kabupaten Administrasi	Indeks	4	6.644.342.060	4	3.566.043.954	4	3.566.043.954	4	3.743.860.412	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
	Indeks Kepuasan Pelayanan laboratorium di bidang Ke Bina Margaan	1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Indeks Kepuasan Pelayanan laboratorium di bidang Ke Bina Margaan	Indeks	4	611.743.888	4	1.047.848.775	4	1.047.848.775	4	1.047.848.775	DBM
	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang pada kawasan berorientasi transit	1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian panduan rancang kota sistem pusat pelayanan dengan pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit	%	92	124.059.600.356	92	115.063.234.693	92	102.165.807.319	92	102.165.807.319	Dinas CKTRP
				Persentase pelanggaran penyelenggaraan ruang dan bangunan yang terselesaikan tepat waktu	%	97,5		97,5		97,5		97,5		
		2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Terkait Pelayanan Dasar											
		2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan											
	Terlaksananya program penyelenggaraan	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu	Jumlah penumpang angkutan umum	Penumpang per hari	4150860	5.528.905.071.004	4150860	6.046.893.062.692	4150860	6.097.919.743.368	4150860	6.825.342.073.423	Dishub

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program	Indikator Kinerja		RKPD Tahun 2025		Penetapan APBD Tahun 2025		Pergeseran II APBD Tahun 2025		Perubahan RKPD Tahun 2025		PD
				Indikator	satuan	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	yang terlayani per hari										
				Indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum per tahun	Indeks	1,37		1,37		1,37		1,37		
				Kecepatan rata-rata di ruas jalan yang dikenakan kebijakan pembatasan lalu lintas pada jam sibuk	km/jam	28		28		28		28		
	Terlaksananya program pengelolaan pelayaran	2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima	Pelabuhan	9	194.972.475.842	9	194.972.469.411	9	194.965.732.634	9	193.863.935.668	Dishub
				Persentase badan usaha angkutan perairan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	60,95		60,95		60,95		60,95		
	Terlaksananya program pengelolaan perkeretaapian	2.15.05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan perkeretaapian provinsi	Rekomendasi	2	2.283.631.600	2	4.292.551.050	2	4.292.551.050	2	4.289.867.050	Dishub
1.3	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	55,93		56,4		56,4		56,4		
				Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	20,5		25,9		25,9		25,9		
		1	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
		1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	Meningkatnya pelaksanaan	1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase penyelenggaraan	%	100	890.575.127.345	100	537.424.853.239	100	482.342.493.312	100	593.919.695.658	Dinas CKTRP

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program	Indikator Kinerja		RKPD Tahun 2025		Penetapan APBD Tahun 2025		Pergeseran II APBD Tahun 2025		Perubahan RKPD Tahun 2025		PD
				Indikator	satuan	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	penyelenggaraan bangunan gedung pemda yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan			bangunan gedung yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan										
		2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Terkait Pelayanan Dasar											
		2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup											
	Terlaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup	2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen pelaporan pengelolaan lingkungan hidup yang disampaikan ke Pemerintah Pusat dengan tepat waktu	%	100	1.835.277.900	100	3.122.749.500	100	3.120.474.500	100	3.219.818.500	DLH
	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase parameter yang memenuhi baku mutu	%	77	70.273.529.596	77	71.748.641.032	77	67.915.631.402	77	67.498.969.317	DLH
	Terselenggaranya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	%	100	1.099.306.502.383	100	1.095.490.933.739	100	1.088.023.308.338	100	1.136.131.732.051	Distamhut
	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kabupaten Administrasi	%	100	26.699.939.220	100	25.606.145.945	100	25.606.145.945	100	25.749.958.583	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program	Indikator Kinerja		RKPD Tahun 2025		Penetapan APBD Tahun 2025		Pergeseran II APBD Tahun 2025		Perubahan RKPD Tahun 2025		PD
				Indikator	satuan	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terlaksananya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Limbah B3 Rumah Tangga yang dikelola	ton	72	4.070.091.680	72	4.530.968.830	72	3.684.567.176	72	3.684.567.176	DLH
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	%	15	6.237.843.758	15	6.224.840.976	15	6.109.250.775	15	6.059.800.956	DLH
	Tercapainya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional	Lokasi	54	12.125.838.226	54	15.393.914.669	54	15.132.523.019	54	15.132.523.019	DLH
	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan	%	100	565.102.847	100	521.843.685	100	476.294.949	100	439.530.756	DLH
		3	Urusan Pilihan											
		3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan											
	Bertambahnya luas ekosistem pesisir dan laut yang dikonservasi dan direhabilitasi serta tercapainya	3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Kawasan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Ruang Laut	%	18,52	6.245.947.595	18,52	6.242.280.819	18,52	5.692.466.897	18,52	5.692.466.897	Dinas KPKP

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program	Indikator Kinerja		RKPD Tahun 2025		Penetapan APBD Tahun 2025		Pergeseran II APBD Tahun 2025		Perubahan RKPD Tahun 2025		PD
				Indikator	satuan	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	masyarakat peduli ekosistem pesisir dan laut													
	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	181352	13.840.747.416	181352	30.792.003.005	181352	30.280.008.378	181352	30.385.555.665	Dinas KPKP
	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	4983	12.147.653.460	4983	12.116.404.446	4983	11.547.844.650	4983	11.853.873.455	Dinas KPKP
	Meningkatnya tingkat kepatuhan pada pengguna sumber daya kelautan dan perikanan	3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	75	1.604.733.500	75	1.604.671.035	75	1.074.251.309	75	1.074.251.309	Dinas KPKP
	Tercapainya Produk Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan serta Angka Konsumsi Ikan	3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi dan pemasaran produk olahan hasil perikanan	Ton	24839	11.043.385.520	24839	11.004.683.259	24839	10.852.953.982	24839	10.852.953.982	Dinas KPKP
				Angka konsumsi ikan	Kg/ Kapita/ Tahun	48,61		48,61		48,61		48,61		
		3.28	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan											
	Terselenggarany a Pengelolaan Hutan	3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	Persentase luas hutan yang dikelola	%	100	40.579.615.330	100	43.284.231.559	100	43.206.772.306	100	45.011.045.890	Distamhut
	Terselenggarany a Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	3.28.06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Jumlah DAS di Provinsi DKI Jakarta yang telah dikelola sesuai standar	Lokasi	3	400.345.982	3	400.345.978	3	366.275.578	3	366.275.578	Distamhut
		3.29	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral											
	Tercapainya Pengurangan Emisi sebagai Dampak dari Pembangunan PLTS	3.29.05	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Jumlah pengurangan emisi sebagai dampak dari pembangunan PLTS	Ton CO2	1400	23.029.079.366	1400	27.780.519.751	1400	25.598.972.551	1400	25.598.972.551	Dinas TKTE

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program	Indikator Kinerja		RKPD Tahun 2025		Penetapan APBD Tahun 2025		Pergeseran II APBD Tahun 2025		Perubahan RKPD Tahun 2025		PD
				Indikator	satuan	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Meningkatnya Akses dan Infrastruktur Ketenagalistrikan	3.29.06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi di Kepulauan Seribu	%	100	20.596.208.207	100	22.699.728.101	100	21.954.137.701	100	22.365.193.885	Dinas TKTE
				Persentase Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik	%	30		30		30		30		
				Presentase pembangkit dan instalasi ketenagalistrikan yang izinnya dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta yang memiliki Sertifikat Laik Operasi	%	107		107		107		107		
1.4	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota			Indeks Risiko Bencana	Skor	59,16		59,16		59,16		59,16		
		1	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
		1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	Pengurangan dampak banjir melalui peningkatan tampungan, penataan kali/sungai serta pembangunan tanggul pantai	1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan kapasitas tampungan air	m3	1683600	2.831.877.462.084	1683600	3.270.499.161.977	1683600	3.212.515.492.904	1683600	3.433.953.777.233	Dinas SDA
				Persentase luas kawasan/sistem polder yang tertangani	%	10,87		10,87		10,87		10,87		
				Persentase Pantai di Kepulauan Seribu yang bebas dari abrasi	%	65		65		65		65		
				Persentase pembangunan tanggul kritis di muara kali dan pantai Jakarta	%	93		93		93		93		
	Pengurangan genangan melalui peningkatan kapasitas dan	1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam	%	88	951.523.595.557	88	1.032.723.349.554	88	1.032.570.656.178	88	1.051.357.073.306	Dinas SDA

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program	Indikator Kinerja		RKPD Tahun 2025		Penetapan APBD Tahun 2025		Pergeseran II APBD Tahun 2025		Perubahan RKPD Tahun 2025		PD
				Indikator	satuan	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pembangunan saluran drainase													
		1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat											
	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi DKI Jakarta	1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	95	290.024.932.051	95	236.873.899.362	95	232.382.160.844	95	289.513.701.940	Satpol PP
	Mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan kolaborasi	1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	%	1	56.664.241.437	1	150.100.573.164	1	150.121.304.441	1	136.836.747.861	BPBD
				Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	%	100		100		100		100		
				Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam	%	100		100		100		100		
	Meningkatnya keberhasilan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan	1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Berhasil	%	62	290.098.669.996	62	503.882.350.755	62	499.361.107.806	62	514.738.330.228	Dinas Gulkarmat
		3	Urusan Pilihan											
		3.29	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral											
	Pengawasan dan pemantauan pemanfaatan air tanah dalam upaya	3.29.02	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase pemantauan pemanfaatan air tanah	%	100	37.599.983.984	100	37.599.968.442	100	32.330.000.214	100	32.330.000.214	Dinas SDA

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program	Indikator Kinerja		RKPD Tahun 2025		Penetapan APBD Tahun 2025		Pergeseran II APBD Tahun 2025		Perubahan RKPD Tahun 2025		PD
				Indikator	satuan	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pengendalian penurunan Muka Tanah													
2.	**Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan**			**Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif**	**Indeks**	**7,93**		**8,2**		**8,2**		**8,2**		
2.1	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah			Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,98-5,23		5,6-6,4		5,6-6,4		5,6-6,4		
		3	Urusan Pilihan											
		3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata											
	Meningkatnya minat kunjungan wisatawan ke Jakarta	3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang memiliki perizinan	Usaha pariwisata	18735	137.129.650.084	18735	166.846.987.905	18735	175.446.562.329	18735	207.681.202.184	Dinas Parekraf
				Jumlah pengunjung event	Orang	6830166		6830166		6830166		6830166		
				Nilai kepuasan pengunjung objek wisata	Nilai	85,65		85,65		85,65		85,65		
	Meningkatnya Jumlah Wisatawan melalui Penyelenggaraan Event MICE yang Berkualitas dan Penyebaran Informasi Pariwisata yang Tepat Sasaran	3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah pengunjung e-tourism	Pengunjung website dan medsos	8810929	88.712.225.053	8810929	112.697.705.458	8810929	111.478.567.209	8810929	124.407.636.670	Dinas Parekraf
				Nilai ketertarikan masyarakat terhadap pariwisata DKI Jakarta	Nilai	93,3		93,3		93,3		93,3		
	Meningkatnya Usaha Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah produk/jasa ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya	produk	650	52.997.710.128	650	81.393.983.603	650	99.867.677.817	650	153.970.141.787	Dinas Parekraf
	Meningkatnya Usaha Kreatif melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi	orang	6288	8.753.293.725	6288	6.131.135.602	6288	4.687.641.727	6288	4.707.801.727	Dinas Parekraf

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program	Indikator Kinerja		RKPD Tahun 2025		Penetapan APBD Tahun 2025		Pergeseran II APBD Tahun 2025		Perubahan RKPD Tahun 2025		PD
				Indikator	satuan	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian											
	Tercapainya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan sarana pertanian	%	69,2	10.685.408.430	69,2	10.968.178.372	69,2	10.967.472.772	69,2	11.358.496.145	Dinas KPKP
	Tercapainya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana perternakan dalam kondisi baik	%	60	20.466.403.683	60	24.038.089.956	60	18.866.415.896	60	18.567.503.291	Dinas KPKP
				Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	%	90		90		90		90		
	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (rabies)	%	100	8.836.946.836	100	9.405.736.580	100	9.142.443.560	100	10.410.901.141	Dinas KPKP
				Persentase pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	%	88,6		88,6		88,6		88,6		
				Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	14,2		14,2		14,2		14,2		
	Meningkatnya Produksi dan Pemasaran Produk Pertanian dan Peternakan	3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan produksi dan pemasaran produk pertanian dan peternakan	%	3,35	10.689.893.767	3,35	10.727.976.305	3,35	10.522.384.723	3,35	10.350.928.641	Dinas KPKP
				Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya	%	100		100		100		100		
		3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan											
	Terciptanya stabilitas harga barang	3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Nilai	14	243.806.232	14	243.619.989	14	243.099.989	14	210.944.117	Dinas PPKUKM

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program	Indikator Kinerja		RKPD Tahun 2025		Penetapan APBD Tahun 2025		Pergeseran II APBD Tahun 2025		Perubahan RKPD Tahun 2025		PD
				Indikator	satuan	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	kebutuhan pokok													
	Meningkatnya nilai ekspor non migas DKI Jakarta	3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor non migas DKI Jakarta	USD	12085560000	11.904.175.401	12085560000	11.904.094.269	12085560000	11.900.880.269	120855600000	11.814.270.669	Dinas PPKUKM
	Meningkatnya Keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti	3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti	%	100	24.141.032.850	100	23.962.376.657	100	14.119.240.721	100	15.584.093.912	Dinas PPKUKM
				Persentase produk hasil uji yang sesuai syarat mutu SNI atau syarat teknis lainnya	%	95,24		95,24		95,24		95,24		
				Persentase alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	%	100		100		100		100		
	Meningkatnya pelaku usaha terfasilitasi dalam pemasaran produk dalam negeri yang meningkat omsetnya	3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha terfasilitasi dalam pemasaran produk dalam negeri yang meningkat omsetnya	%	56	43.973.729.533	56	51.515.501.188	56	50.965.175.667	56	72.698.360.863	Dinas PPKUKM
		3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian											
	Meningkatnya Omzet Industri Kecil dan Menengah	3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan omzet industri kecil dan menengah	%	9,503	54.894.554.628	9,503	86.411.251.877	9,503	85.221.002.201	9,503	81.581.343.214	Dinas PPKUKM
				Persentase pelaku usaha IKM yang meningkat kapasitasnya	%	83,72		83,72		83,72		83,72		
2.2	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja			Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus)	Persen	5,54-6,40		6,1		6,1		6,1		
		2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan											

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program	Indikator Kinerja		RKPD Tahun 2025		Penetapan APBD Tahun 2025		Pergeseran II APBD Tahun 2025		Perubahan RKPD Tahun 2025		PD
				Indikator	satuan	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Dasar Terkait Pelayanan Dasar											
		2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja											
	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	%	90,92	137.282.418.259	90,92	177.977.007.928	90,92	171.149.126.927	90,92	194.594.772.692	Dinas TKTE
				Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rupiah	407748366		407748366		407748366		407748366		
	Tercapainya Penempatan Tenaga Kerja Formal dan Mandiri	2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja formal yang ditempatkan	%	93	32.058.139.398	93	43.867.355.551	93	42.701.211.651	93	42.620.430.811	Dinas TKTE
				Presentase tenaga kerja mandiri yang berwira usaha, berdaya saing dan berkelanjutan.	%	90		90		90		90		
		2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah											
	Meningkatnya kompetensi, pemahaman dan pengetahuan di bidang perkoperasian bagi pengurus/pengelola koperasi yang keanggotaannya di Provinsi DKI Jakarta	2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM koperasi yang meningkat kapasitasnya	%	80	817.661.917	80	817.661.917	80	816.581.917	80	1.366.863.573	Dinas PPKUKM
	Meningkatnya persentase volume usaha/ omset koperasi	2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	%	4,62	787.883.278	4,62	787.883.278	4,62	725.979.051	4,62	1.473.674.051	Dinas PPKUKM
				Persentase koperasi konvensional yang bertransformasi digital (modern)	%	0,595		0,595		0,595		0,595		

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program	Indikator Kinerja		RKPD Tahun 2025		Penetapan APBD Tahun 2025		Pergeseran II APBD Tahun 2025		Perubahan RKPD Tahun 2025		PD
				Indikator	satuan	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Meningkatnya jumlah pelaku wirausaha baru yang tangguh dan mandiri melalui proses pembinaan kewirausahaan terpadu	2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase wirausaha baru yang tangguh dan mandiri	%	3,5	67.961.479.816	3,5	101.096.695.522	3,5	99.415.867.522	3,5	101.114.780.576	Dinas PPKUKM
2.3	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial			Tingkat Kemiskinan	Persen	3,55-3,85		3,25		3,25		3,25		
				Rasio Gini	Koefisien	0,425-0,430		0,41		0,41		0,41		
				Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persen	0,83		0,35		0,35		0,35		
		1	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
		1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial											
	Terlaksananya Program Rehabilitasi Sosial	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Indeks pencapaian SPM rehabilitasi sosial	Indeks	100	353.626.843.929	100	310.821.577.164	100	295.797.215.647	100	304.731.423.669	Dinsos
	Terlaksananya Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial penerima layanan perlindungan dan jaminan sosial yang tepat sasaran	%	100	863.398.299.450	100	861.577.472.023	100	860.202.903.087	100	864.525.708.648	Dinsos
	Terlaksananya Program Penanganan Bencana	1.06.06	Program Penanganan Bencana	Indeks pencapaian SPM penanganan bencana	Indeks	100	26.027.916.633	100	41.700.038.097	100	39.857.598.320	100	43.397.425.776	Dinsos
	Meningkatnya Layanan Penanganan Bencana Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Lingkup Kabupaten Administrasi	%	100	212.011.886	100	212.011.545	100	212.011.545	100	212.011.545	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
		2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan											

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program	Indikator Kinerja		RKPD Tahun 2025		Penetapan APBD Tahun 2025		Pergeseran II APBD Tahun 2025		Perubahan RKPD Tahun 2025		PD
				Indikator	satuan	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Dasar Terkait Pelayanan Dasar											
		2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan											
	Tersedianya Stok Kebutuhan Pangan	2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan	%	100	795.137.291.363	100	826.866.257.018	100	826.847.734.018	100	1.026.923.197.388	Dinas KPKP
	Terawasinya Pangan Segar yang Bebas Bahan Berbahaya	2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan yang Bebas Bahan Berbahaya	%	99,8	2.484.316.951	99,8	2.445.299.554	99,8	2.003.247.564	99,8	1.995.647.444	Dinas KPKP
		2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	95,5	472.576.489.547	95,5	481.179.200.370	95,5	479.042.136.625	95,5	554.577.004.139	Dinas PPAPP
2.4	Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi			Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	4,01		4,01		4,01		4,01		
		2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Terkait Pelayanan Dasar											
		2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal											
	Terwujudnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal untuk Memberikan Kemudahan Investasi	2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai kemudahan investasi	Nilai	77,5	5.309.947.694	77,5	5.911.798.530	77,5	5.456.538.844	77,5	5.456.538.844	Dinas PMPTSP
	Terlaksananya Penguatan Kegiatan Promosi Penanaman	2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD, dan Swasta	100	100	11.378.016.079	100	11.377.966.967	100	10.946.489.357	100	10.727.914.357	Dinas PMPTSP

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program	Indikator Kinerja		RKPD Tahun 2025		Penetapan APBD Tahun 2025		Pergeseran II APBD Tahun 2025		Perubahan RKPD Tahun 2025		PD
				Indikator	satuan	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Modal DKI Jakarta			Persentase penguatan kegiatan promosi penanaman modal DKI Jakarta	%	100		100		100		100		
	'Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	50	85	3.959.957.987	85	4.798.771.652	85	3.965.055.523	85	3.965.055.523	Dinas PMPTSP
		2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan											
	Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Karya Budaya yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Benda dan Tak Benda (WBTB) yang merupakan Intagible Culture Assets menurut UNESCO	%	9,43	108.184.880.314	9,43	142.088.501.836	9,43	144.003.127.854	9,43	159.906.789.205	Disbud
	Meningkatnya jumlah objek cagar budaya yang telah ditetapkan dibandingkan jumlah seluruh objek diduga cagar budaya yang ada di DKI Jakarta	2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Objek diduga Cagar Budaya yang ditetapkan menjadi Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta	%	47,6	6.244.074.436	47,6	5.844.025.168	47,6	4.222.507.182	47,6	4.222.507.182	Disbud
	Meningkatkan Partisipasi penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan bersejarah dan museum lainnya	2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan museum lainnya	%	24,99	56.327.165.433	24,99	92.207.276.145	24,99	86.645.188.184	24,99	86.912.987.092	Disbud
		2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan											
	Meningkatnya pemanfaatan	2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Tingkat kemanfaatan	%	34,8	76.374.533.438	34,8	89.364.107.092	34,8	84.771.674.865	34,8	94.145.382.757	Dispusip

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program	Indikator Kinerja		RKPD Tahun 2025		Penetapan APBD Tahun 2025		Pergeseran II APBD Tahun 2025		Perubahan RKPD Tahun 2025		PD
				Indikator	satuan	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	perpustakaan oleh masyarakat			perpustakaan oleh masyarakat										
				Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	0,067		0,067		0,067		0,067		
				Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Rasio	0,001		0,001		0,001		0,001		
				Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar	%	12,4		12,4		12,4		12,4		
				Nilai tingkat kegemaran membaca	Nilai	73,21		73,21		73,21		73,21		
	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Kemanfaatan Perpustakaan Lingkup Kabupaten Administrasi	%	16,84	1.609.487.742	16,84	1.623.995.571	16,84	1.623.995.571	16,84	1.836.451.942	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
3.	**Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan**			**Indeks Pembangunan Manusia**	Indeks	**81,99**		**84,15**		**84,15**		**84,15**		
3.1	Meratanya Kesempatan Pendidikan untuk Semua dan Edukasi terkait Pembelajaran Sepanjang Hayat			Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	12,18		12,52		12,52		12,52		
		1	Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
		1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan											
	Meningkatnya akses pelayanan pendidikan	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Persentase	91,58	9.588.592.195.136	92,46	9.491.791.691.322	92,46	10.500.385.689.490	92,46	10.984.389.797.345	Dinas Pendidikan
				Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persentase	100		100		100		100		
				Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam	Persentase	100		100		100		100		

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program	Indikator Kinerja		RKPD Tahun 2025		Penetapan APBD Tahun 2025		Pergeseran II APBD Tahun 2025		Perubahan RKPD Tahun 2025		PD
				Indikator	satuan	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				pendidikan dasar (APS)										
				Persentase guru profesional	Persentase	89,6		89,6		89,6		89,6		
				Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A	Persentase	82,84		84,04		84,04		84,04		
				Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Nilai	81,95		82,98		82,98		82,98		
				Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Nilai	65,24		66,27		66,27		66,27		
				Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	Persentase	100		100		100		100		
				Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persentase	100		100		100		100		
				Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)**	Persentase	100		100		100		100		
3.2	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan			Angka Harapan Hidup	Tahun	73,42		75,99		75,99		75,99		
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	15,8		15,8		15,8		15,8		
		1	Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program	Indikator Kinerja		RKPD Tahun 2025		Penetapan APBD Tahun 2025		Pergeseran II APBD Tahun 2025		Perubahan RKPD Tahun 2025		PD
				Indikator	satuan	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan											
	Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	%	100	2.852.110.564.608	100	2.926.491.287.514	100	2.899.073.508.934	100	3.716.411.729.328	Dinkes
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar	%	100		100		100		100		
				Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	100		100		100		100		
				Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks	0,61		0,61		0,61		0,61		
				Angka Kematian Ibu (AKI)	Rate	43,56		43,56		43,56		43,56		
				Angka Kematian Neonatal (AKN)	Rate	1,29		1,29		1,29		1,29		
				Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	%	100		100		100		100		
				Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan	%	105		100		100		100		
				Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan	%	96,33		96,33		96,33		96,33		

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program	Indikator Kinerja		RKPD Tahun 2025		Penetapan APBD Tahun 2025		Pergeseran II APBD Tahun 2025		Perubahan RKPD Tahun 2025		PD
				Indikator	satuan	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				di Rumah Sakit Daerah (RSD)										
				Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya	%	100		100		100		100		
				Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	98,56		98,56		98,56		98,56		
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase implementasi hospitality dalam pelayanan	%	100	1.633.951.873.351	100	1.619.647.659.833	100	1.621.109.739.867	100	1.586.595.655.382	Dinkes
				Rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)	%	82,84		82,84		82,84		82,84		
				Persentase pemenuhan jumlah dan jenis tenaga kesehatan sesuai standar di Puskesmas Kecamatan	%	100		100		100		100		
				Persentase pemenuhan kriteria penyelenggara pelatihan bidang kesehatan berskala nasional	%	70		70		70		70		

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program	Indikator Kinerja		RKPD Tahun 2025		Penetapan APBD Tahun 2025		Pergeseran II APBD Tahun 2025		Perubahan RKPD Tahun 2025		PD
				Indikator	satuan	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terpenuhinya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian yang memenuhi standar	%	50	289.175.494	50	274.163.454	50		50	224.999.864	Dinkes
				Persentase sarana alat kesehatan yang memenuhi ketentuan cara pengelolaan dan distribusi alat kesehatan yang baIk	%	50		50		50		50		
				Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	%	80,3		80,3		80,3		80,3		
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) aktif	%	94,88	4.423.959.923	94,88	4.743.860.916	94,88	3.082.940.764	94,88	2.931.177.250	Dinkes
				Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) melaksanakan revitalisasi pelayanan	Unit	132		132		132		132		
		2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Terkait Pelayanan Dasar											
		2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
	Meningkatnya kesertaan keluarga dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase masyarakat (keluarga) yang memperoleh informasi program Bangga Kencana dengan cara memperoleh/mendengar/melihat pesan/informasi	%	61,1	5.825.381.595	61,1	15.984.994.263	61,1	14.033.033.015	61,1	12.966.425.685	Dinas PPAPP

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program	Indikator Kinerja		RKPD Tahun 2025		Penetapan APBD Tahun 2025		Pergeseran II APBD Tahun 2025		Perubahan RKPD Tahun 2025		PD
				Indikator	satuan	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui media dan petugas.										
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	11,4		11,4		11,4		11,4		
				Angka prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	61,1		61,1		61,1		61,1		
				Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	12		12		12		12		
	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	tahun	22,9	2.907.612.802	22,9	4.407.115.274	22,9	3.757.341.343	22,9	3.731.993.348	Dinas PPAPP
		2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga											
	Meningkatnya Partisipasi aktif dan Kapasitas Pemuda	2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda hasil binaan yang berprestasi dalam bidang yang ditentukan	%	50	29.411.369.401	50	31.698.001.646	50	28.907.935.778	50	27.480.405.871	Dispora
	Meningkatnya Prestasi melalui Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi, Penyelenggaraan Event Olahraga dan Pemenuhan	2.19.03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	%	96,3	721.781.487.563	91	864.248.505.137	91	858.451.141.447	91	856.935.328.050	Dispora

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program	Indikator Kinerja		RKPD Tahun 2025		Penetapan APBD Tahun 2025		Pergeseran II APBD Tahun 2025		Perubahan RKPD Tahun 2025		PD
				Indikator	satuan	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Prasarana dan Sarana													
	Meningkatnya Daya Saing Keolahragaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	2.19.03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi Lingkup Kabupaten Administrasi	%	85	1.029.831.616	85	1.000.505.299	85	1.000.505.299	85	856.935.328.050	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
3.3	Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender			Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,24		96,4		96,4		96,4		
3.4	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat			Indeks Demokrasi	Indeks	83,00-87,30		84,57		84,57		84,57		
		4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan											
		4.02	Sekretariat DPRD											
	Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	Indeks	4	446.198.738.849	4	538.285.439.803	4	504.301.337.091	4	684.367.968.434	Sekretariat DPRD
		8	Unsur Pemerintahan Umum											
		8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik											
	Meningkatnya Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase tingkat pemahaman masyarakat terkait ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	51,5	19.646.946.950	51,5	21.638.657.333	51,5	21.632.679.581	51,5	22.359.080.155	Bakesbangpol
	Meningkatnya Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan	8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase tingkat pemahaman masyarakat terkait pendidikan politik, etika dan budaya politik serta peningkatan peran partai politik	%	51,5	49.038.647.118	51,5	48.484.238.828	51,5	48.145.683.970	51,5	46.811.682.659	Bakesbangpol

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program	Indikator Kinerja		RKPD Tahun 2025		Penetapan APBD Tahun 2025		Pergeseran II APBD Tahun 2025		Perubahan RKPD Tahun 2025		PD
				Indikator	satuan	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Peran Partai Politik													
	Meningkatnya Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase tingkat pemahaman masyarakat terkait ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	51,5	2.945.061.583	51,5	19.787.411.162	51,5	19.787.411.162	51,5	19.922.673.486	Bakesbangpol
	Meningkatnya Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing	8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase tingkat pemahaman masyarakat terkait kewaspadaan dini, penanganan konflik, dan pemantauan orang asing	%	51,5	9.472.481.927	51,5	675.964.781.294	51,5	675.964.781.294	51,5	675.339.861.415	Bakesbangpol
4.	**Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas**			**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**84**		**84**		**84**		**84**		
4.1	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,7		93,36		93,36		93,36		
		2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Terkait Pelayanan Dasar											
		2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
	Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	99	85.760.042.693	99	84.965.883.862	99	83.516.465.950	99	88.399.579.902	Dinas Dukcapil
	Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	99,8	7.688.311.249	99,8	6.680.701.913	99,8	6.604.956.913	99,8	6.138.417.472	Dinas Dukcapil

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program	Indikator Kinerja		RKPD Tahun 2025		Penetapan APBD Tahun 2025		Pergeseran II APBD Tahun 2025		Perubahan RKPD Tahun 2025		PD
				Indikator	satuan	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal											
	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penerbitan izin tepat waktu	%	100	146.859.359.389	100	145.472.044.258	100	144.090.251.176	100	143.548.427.098	Dinas PMPTSP
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan berbasis Digital	2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Indeks kepuasan layanan pengelolaan sarana prasarana teknologi informasi serta sistem data dan informasi perizinan dan nonperizinan	Indeks	92,29	15.051.746.787	92,29	21.560.243.207	92,29	21.500.311.207	92,29	21.500.311.207	Dinas PMPTSP
4.2	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4,25		4,46		4,46		4,46		
		2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Terkait Pelayanan Dasar											
		2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika											
	Peningkatan Kualitas Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik	%	100	72.974.508.475	100	74.760.216.154	100	73.145.223.373	100	76.184.601.162	Diskominfotik
	Peningkatan Kualitas Pemenuhan Layanan Teknologi Informatika dan Komunikasi	2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah pemenuhan layanan teknologi informatika dan komunikasi	Perangkat Daerah	51	629.387.113.666	51	859.074.150.747	51	852.289.066.648	51	851.056.523.141	Diskominfotik
4.3	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah			Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	87		87		87		87		

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program	Indikator Kinerja		RKPD Tahun 2025		Penetapan APBD Tahun 2025		Pergeseran II APBD Tahun 2025		Perubahan RKPD Tahun 2025		PD
				Indikator	satuan	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	80		80		80		80		
		4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan											
		4.01	Sekretariat Daerah											
	Peningkatan Kualitas Layanan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	4.01.02	Program Penataan Organisasi	Persentase Kerjasama Luar Negeri yang Terimplementasi	Persentase	100	35.748.560.323	100	36.628.475.897	100	37.510.265.235	100	37.289.192.735	Biro KSD
	Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Keuangan Perjalanan Dinas dan Peningkatan Kualitas Implementasi Kerjasama Dalam Negeri	4.01.03	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi dan Keuangan Perjalanan Dinas	Indeks	4	83.683.386.726	4	70.100.001.327	4	53.617.479.304	4	59.645.781.034	Biro KSD
				Persentase Kerjasama Dalam Negeri yang Terimplementasi	Persentase	100		100		100		100		
		5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan											
		5.01	Perencanaan											
	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan lingkup provinsi	5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai komponen perencanaan pembangunan lingkup provinsi pada indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai	97,22	13.122.405.505	97,22	20.508.823.571	97,22	19.987.172.073	97,22	18.670.146.153	Bappeda
				Nilai komponen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan pada indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai	88,46		88,46		88,46		88,46		

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program	Indikator Kinerja		RKPD Tahun 2025		Penetapan APBD Tahun 2025		Pergeseran II APBD Tahun 2025		Perubahan RKPD Tahun 2025		PD
				Indikator	satuan	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan											
		6.01	Inspektorat Daerah											
	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian TL LHP internal dan eksternal	%	93	144.241.355.200	93	173.246.454.328	93	98.305.661.248	93	97.434.361.248	Inspektorat
4.4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel			Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP		WTP		WTP		WTP		
		4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan											
		4.01	Sekretariat Daerah											
	Meningkatnya kualitas kinerja BUMD dan PT Patungan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta	4.01.06	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rata-rata nilai ROE	Nilai	9	6.670.402.373	9	8.932.036.741	9	7.593.979.461	9	18.715.370.687	BPBUMD
				Pertumbuhan Laba Bersih	Persen	14		14		14		14		
				Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Persen	12		12		12		12		
	Terlaksananya Perbaikan Kualitas Standar Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.07	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu	%	90	4.334.065.581	90	6.824.072.978	90	6.030.736.766	90	6.000.253.543	BPPBJ
		5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan											
		5.02	Keuangan											
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku	5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase akurasi dan penyelesaian dokumen APBD	%	100	1.764.359.113.090	100	2.614.464.262.128	100	2.732.530.381.725	100	3.376.113.670.410	BPKD
				Persentase pengelolaan pelaksanaan APBD	%	100		100		100		100		
				Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan tepat waktu	%	100		100		100		100		
	Terselesaikanny a Penyusunan Standar Belanja tepat waktu	5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyelesaian penyusunan standar harga tepat waktu	%	100	2.095.992.000	100	2.293.895.000	100	2.039.964.000	100	1.841.836.000	BPKD

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program	Indikator Kinerja		RKPD Tahun 2025		Penetapan APBD Tahun 2025		Pergeseran II APBD Tahun 2025		Perubahan RKPD Tahun 2025		PD
				Indikator	satuan	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terlaksananya Pengelolaan BMD Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pemanfaatan BMD	%	29,84	94.227.854.801	29,84	115.345.832.243	29,84	112.808.161.364	29,84	110.109.038.904	BPAD
				Indeks kepatuhan tertib aset	Indeks	4		4		4		4		
				Persentase aset daerah yang teridentifikasi dan tercatat dalam e-aset	%	100		100		100		100		
	Meningkatnya Pengelolaan dan Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	%	100	260.530.623.689	100	431.205.169.877	100	422.614.381.360	100	419.065.130.631	Bapenda
				Persentase realisasi penerimaan retribusi daerah	%	100		100		100		100		
4.5	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur			Indeks Sistem Merit	Indeks	335,5		350,5		350,5		350,5		
		5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan											
		5.03	Kepegawaian											
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Berbasis Sistem Merit	5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Nilai aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, sistem informasi serta perlindungan dan pelayanan pada indeks sistem merit	Nilai	110	38.077.233.967	110	43.362.844.755	110	37.183.267.148	110	35.795.483.309	BKD
				Nilai aspek promosi dan mutasi pada indeks sistem merit	Nilai	37,5		37,5		37,5		37,5		
				Nilai aspek pengembangan karir pada indeks sistem merit	Nilai	59,53		59,53		59,53		59,53		
				Nilai aspek manajemen kinerja serta penggajian, penghargaan dan disiplin pada indeks sistem merit	Nilai	112,5		112,5		112,5		112,5		

Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2025 (diolah)

5.3 Penyesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Penyusunan Renja PD dilaksanakan sesuai ketentuan dan tahapan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mana saat ini berada pada tahap penyusunan Rancangan Akhir.

Perubahan Renja PD Tahun 2025 berpedoman pada Surat Edaran Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0002/SE/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Adapun rekapitulasi anggaran belanja indikatif pada Rancangan Renja PD Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 5.2.

Berdasarkan tabel 5.2, Dinas Pendidikan beserta jajarannya memiliki belanja indikatif tertinggi, yaitu Rp 19.791.536.957.863,- (23,03%) yang di dalamnya memuat kebutuhan belanja untuk gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan biaya personil peserta didik, dan penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik. Dinas Kesehatan beserta jajaran menempati urutan kedua yaitu Rp 11.439.477.829.796,- (13,31%) yang mencakup penyediaan pelayanan kesehatan pada RSUD/RSKD dan seluruh Puskesmas di mana salah satu penyesuaiannya berupa penambahan tenaga layanan pendamping kesehatan warga dan Jakcare. Dinas Perhubungan menempati urutan ke-3 yaitu Rp. 8.023.754.820.302,- (9,34%) di mana salah satu perubahannya berupa penambahan subsidi transportasi yang sangat penting dalam penanganan isu kemacetan yang selalu menjadi isu utama di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 5.2
Rekapitulasi Anggaran Belanja Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	RKPD Tahun 2025			Penetapan APBD Tahun 2025			Pergeseran II APBD Tahun 2025			Perubahan RKPD Tahun 2025		
		Jumlah Program	Anggaran	Proporsi	Jumlah Program	Anggaran	Proporsi	Jumlah Program	Anggaran	Proporsi	Jumlah Program	Anggaran	Proporsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Inspektorat	3	349.214.662.054	0,46%	3	432.128.052.861	0,52%	3	320.750.400.443	0,39%	3	318.634.185.651	0,37%
2	Badan Kepegawaian Daerah	2	209.158.460.975	0,28%	2	260.569.532.423	0,32%	2	227.835.300.024	0,28%	2	220.947.237.254	0,26%
3	Badan Kesatuan bangsa dan Politik	6	156.356.974.255	0,21%	6	837.430.709.909	1,01%	6	837.080.271.343	1,01%	6	836.103.283.000	0,97%
4	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	2	103.889.631.161	0,14%	2	115.293.253.893	0,14%	2	114.350.142.089	0,14%	2	114.363.981.405	0,13%
5	Badan Pembinaan badan usaha Milik Daerah	2	41.657.269.007	0,06%	2	46.636.350.416	0,06%	2	44.467.295.834	0,05%	2	61.476.029.852	0,07%
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	96.958.251.474	0,13%	2	193.091.655.771	0,23%	2	191.390.664.208	0,23%	2	175.415.906.496	0,20%
7	Badan Pendapatan Daerah	2	1.436.796.445.111	1,90%	2	1.637.361.950.038	1,98%	2	1.623.331.325.517	1,96%	2	1.611.504.839.421	1,87%
8	Badan Pengelolaan Aset Daerah	2	334.045.651.493	0,44%	2	371.059.842.771	0,45%	2	365.672.002.917	0,44%	2	362.026.394.845	0,42%
9	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	3	1.899.884.005.770	2,52%	3	2.760.050.512.739	3,34%	3	2.877.433.540.378	3,48%	3	3.520.663.802.621	4,10%
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	142.577.737.103	0,19%	3	134.529.220.965	0,16%	3	133.872.312.331	0,16%	3	121.682.516.756	0,14%
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	200.046.954.485	0,26%	4	250.604.990.333	0,30%	4	243.686.920.743	0,29%	4	235.751.210.519	0,27%
12	Dinas Bina Marga	3	3.114.606.841.538	4,12%	3	3.592.521.753.311	4,35%	3	3.397.401.884.111	4,11%	3	3.394.761.173.440	3,95%
13	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	4	1.262.219.457.991	1,67%	4	929.404.160.170	1,12%	4	855.499.189.107	1,03%	4	962.943.246.003	1,12%
14	Dinas Kebudayaan	4	474.030.775.586	0,63%	4	559.999.919.055	0,68%	4	551.736.062.618	0,67%	4	568.581.454.592	0,66%
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	391.382.260.797	0,52%	5	393.691.293.818	0,48%	5	390.230.222.754	0,47%	5	385.646.184.645	0,45%
16	Dinas Kesehatan	5	10.607.041.735.334	14,05%	5	10.936.674.687.597	13,23%	5	10.895.963.293.003	13,18%	5	11.439.477.829.796	13,31%
17	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	14	1.129.251.431.827	1,50%	14	1.192.831.199.172	1,44%	14	1.183.282.666.234	1,43%	14	1.377.497.246.327	1,60%
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5	852.191.466.730	1,13%	5	1.125.675.681.484	1,36%	5	1.116.955.427.089	1,35%	5	1.118.671.528.296	1,30%
19	Dinas Lingkungan Hidup	8	3.475.943.703.372	4,60%	8	3.800.927.272.668	4,60%	8	3.758.503.287.248	4,55%	8	3.785.762.996.606	4,40%

No.	Perangkat Daerah	RKPD Tahun 2025			Penetapan APBD Tahun 2025			Pergeseran II APBD Tahun 2025			Perubahan RKPD Tahun 2025		
		Jumlah Program	Anggaran	Proporsi	Jumlah Program	Anggaran	Proporsi	Jumlah Program	Anggaran	Proporsi	Jumlah Program	Anggaran	Proporsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
20	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5	489.014.819.302	0,65%	5	578.119.675.242	0,70%	5	599.938.880.127	0,73%	5	701.126.642.047	0,82%
21	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	11	712.512.068.079	0,94%	11	749.904.025.671	0,91%	11	740.223.907.548	0,90%	11	808.061.868.526	0,94%
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	4	1.100.692.779.715	1,46%	4	1.258.734.981.400	1,52%	4	1.243.511.257.259	1,50%	4	1.256.176.157.654	1,46%
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	822.333.381.965	1,09%	6	882.077.952.232	1,07%	6	878.541.913.850	1,06%	6	881.038.839.023	1,03%
24	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	2	1.288.954.479.535	1,71%	2	1.553.770.586.545	1,88%	2	1.548.161.338.734	1,87%	2	1.556.972.790.719	1,81%
25	Dinas Pendidikan	2	17.604.005.565.855	23,31%	2	18.493.298.285.286	22,37%	2	19.479.262.354.625	23,56%	2	19.791.536.957.863	23,03%
26	Dinas Perhubungan	4	6.572.974.051.065	8,70%	4	7.242.090.472.166	8,76%	4	7.278.380.524.202	8,80%	4	8.023.754.820.302	9,34%
27	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	13	394.867.424.856	0,52%	12	482.783.233.450	0,58%	12	466.769.783.117	0,56%	12	477.720.915.622	0,56%
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	261.012.262.534	0,35%	4	321.334.548.872	0,39%	4	308.461.758.003	0,37%	4	327.965.817.207	0,38%
29	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	6	1.561.493.026.034	2,07%	6	1.572.829.827.643	1,90%	6	1.556.276.950.580	1,88%	6	1.605.904.883.295	1,87%
30	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4	1.502.986.313.857	1,99%	4	1.796.844.362.722	2,17%	4	1.657.631.462.662	2,01%	4	1.644.349.207.154	1,91%
31	Dinas Sosial	5	1.638.048.515.379	2,17%	5	1.681.633.472.510	2,03%	5	1.628.080.224.528	1,97%	5	1.648.702.696.080	1,92%
32	Dinas Sumber Daya Air	6	5.390.381.540.821	7,14%	6	6.027.906.412.197	7,29%	6	5.846.234.243.578	7,07%	6	6.067.488.052.734	7,06%
33	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi	8	510.499.530.914	0,68%	8	697.081.999.100	0,84%	8	683.003.617.246	0,83%	8	711.229.113.080	0,83%
34	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	16	240.593.735.706	0,32%	15	240.969.170.578	0,29%	15	239.445.082.273	0,29%	15	235.732.325.212	0,27%
35	Kota Administrasi Jakarta Barat	5	1.120.531.121.741	1,48%	5	1.120.401.639.592	1,36%	5	1.111.463.521.043	1,34%	5	1.126.038.423.469	1,31%
36	Kota Administrasi Jakarta Pusat	5	850.338.239.219	1,13%	5	881.236.863.945	1,07%	5	873.522.706.086	1,06%	5	885.545.526.365	1,03%
37	Kota Administrasi Jakarta Selatan	5	1.255.214.562.716	1,66%	5	1.282.355.646.830	1,55%	5	1.271.548.151.762	1,54%	5	1.300.166.558.337	1,51%

No.	Perangkat Daerah	RKPD Tahun 2025			Penetapan APBD Tahun 2025			Pergeseran II APBD Tahun 2025			Perubahan RKPD Tahun 2025		
		Jumlah Program	Anggaran	Proporsi	Jumlah Program	Anggaran	Proporsi	Jumlah Program	Anggaran	Proporsi	Jumlah Program	Anggaran	Proporsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
38	Kota Administrasi Jakarta Timur	5	1.357.604.063.278	1,80%	5	1.370.258.598.610	1,66%	5	1.358.588.732.431	1,64%	5	1.389.583.564.195	1,62%
39	Kota Administrasi Jakarta Utara	5	918.344.120.591	1,22%	5	950.764.748.374	1,15%	5	942.516.566.575	1,14%	5	938.908.485.633	1,09%
40	Satuan Polisi Pamong Praja	2	1.430.233.306.698	1,89%	2	1.485.559.841.426	1,80%	2	1.479.652.068.738	1,79%	2	1.343.214.016.358	1,56%
41	Sekretariat Daerah	7	1.428.688.981.545	1,89%	7	1.414.262.848.648	1,71%	7	1.384.371.952.100	1,67%	7	1.442.423.956.075	1,68%
42	Sekretariat DPRD	2	785.706.285.753	1,04%	2	1.008.361.385.351	1,22%	2	958.501.070.726	1,16%	2	1.173.475.548.553	1,37%
TOTAL BELANJA		211	75.514.283.893.221	**100%**	209	82.663.062.617.784	**100%**	209	82.663.530.275.784	**100%**	209	85.949.028.213.028	**100%**

Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2025 (diolah)

BAB 6

PENUTUP



Pada bagian ini berisikan kesimpulan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 didasari oleh perubahan dinamika baik dalam tataran global, nasional, maupun regional, yang secara langsung maupun tidak langsung memberi dampak bagi pembangunan di DKI Jakarta. Seiring dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden serta Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025–2029, kebijakan nasional maupun daerah juga mengalami penyesuaian yang perlu diakomodasi dalam dokumen perencanaan. Selain itu, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 serta kondisi terkini ekonomi daerah pada tahun 2025 juga menjadi pertimbangan dilakukannya Perubahan RKPD Tahun 2025.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menjaga konsistensi dalam mewujudkan tujuan pembangunan tahun 2025 yang sejalan dengan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Konsistensi sebagaimana dimaksud terlihat dari beberapa hal. Pertama, perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 tetap disusun dengan berorientasi pada pendekatan *money follow program* melalui pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) yang diimplementasikan melalui beberapa hal:

a. Menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 4 (empat) tujuan, 17 (tujuh belas) sasaran, dan 108 (seratus delapan) strategi utama pembangunan daerah yang ada dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.
b. Menerapkan prioritas sesuai dengan arah kebijakan pembangunan, diantaranya yaitu pencapaian target indikator makro pembangunan yang belum terselesaikan pada tahun 2024, penyelesaian isu-isu komprehensif seperti kemiskinan dan stunting, dan penyelesaian isu strategis serta isu kewilayahan.
c. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan provinsi dengan pendekatan penganggaran berbasis program, serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.
d. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain APBN, APBD Provinsi, CSR, KPBU, hibah, maupun sumber pendanaan lain yang sah untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah.
e. Melibatkan secara aktif *stakeholders* di luar pemerintahan (lima *stakeholders* utama, yaitu masyarakat, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan media) dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan menerapkan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah.
f. Memaksimalkan penerapan sistem informasi baik yang terkoneksi dengan Pemerintah Pusat maupun milik internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kedua, perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 tetap berfokus pada penyelesaian 4 (empat) Isu Strategis Pembangunan, yaitu:

a. Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota
b. Pertumbuhan Ekonomi
c. Kesejahteraan Masyarakat
d. Tata Kelola Pemerintahan

Mempertimbangkan 4 (empat) Isu Strategis Pembangunan serta Tema Pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025, yaitu "**Mewujudkan Jakarta Kota Global yang Berketahanan, Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan**" yang dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 tidak mengalami perubahan, maka perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta di Perubahan RKPD Tahun 2025 juga tetap berfokus pada 4 (empat) Prioritas Pembangunan. Dalam pelaksanaannya, setiap Prioritas Pembangunan akan didukung dengan Fokus Prioritas Pembangunan yang dalam perumusannya juga mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2023. Penjabaran untuk setiap Prioritas Pembangunan dan Fokus Prioritas Pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota, dengan fokus utama:
   (1) Peningkatan Kualitas dan Cakupan Transportasi Publik

(2) Penanggulangan Banjir
(3) Perbaikan Kualitas Lingkungan
(4) Penanganan Sampah
(5) Penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT)
(6) Pemenuhan Air Bersih dan Air Minum
(7) Ketahanan Bencana
(8) Peningkatan Kualitas Udara
(9) Peningkatan Akses Hunian Layak

b. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, dengan fokus utama:
(1) Transformasi Ekonomi (*Green Economy, Blue Economy, Gig Economy, Digitalization*)
(2) Peningkatan Daya Saing Ekonomi
(3) Peningkatan Investasi Daerah
(4) Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Melalui *Cultural Interaction*
(5) Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja

c. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, dengan fokus utama:
(1) Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi
(2) Percepatan Penuntasan dan Pencegahan Stunting
(3) Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan
(4) Optimalisasi Cakupan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial
(5) Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan
(6) Penguatan Ketahanan Pangan

d. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, dengan fokus utama:
(1) Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik
(2) Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Publik
(3) Penggunaan TIK dalam Mendorong Jakarta menjadi Kota Kreatif
(4) Penciptaan Iklim Riset dan Inovasi yang Berkualitas

Adapun setiap pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan Fokus Prioritas Pembangunan akan dilengkapi dengan Program Prioritas Pembangunan.

Ketiga, perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 juga tetap melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (SP4N), yaitu proses perencanaan dan penganggaran diharapkan memiliki sinergitas, baik Pusat, Daerah, maupun Pusat dengan Daerah. Sinergitas sebagaimana dimaksud salah satunya terlihat dari Program Prioritas Pembangunan yang memiliki sinkronisasi dengan 8 (delapan) Prioritas Nasional (Asta Cita), dengan rincian sebagai berikut:

a. Prioritas Nasional 1: 3 program
b. Prioritas Nasional 2: 29 program
c. Prioritas Nasional 3: 29 program
d. Prioritas Nasional 4: 31 program
e. Prioritas Nasional 5: 1 program
f. Prioritas Nasional 6: 9 program
g. Prioritas Nasional 7: 39 program
h. Prioritas Nasional 8: 24 program

Mempertimbangkan berbagai kondisi di atas, dalam rangka pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Dalam menuju Jakarta menjadi Kota Global, Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi wadah untuk meletakkan fondasi awal, sehingga perlu difokuskan untuk membenahi hal-hal fundamental, terutama pelayanan dasar dan penyelesaian isu strategis perkotaan;

b. Rancangan kegiatan dengan standar kota global perlu dilakukan telaah mendalam, sehingga benar-benar selektif dan *output* yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi;
c. Sinergi multipihak dan koordinasi efektif, antar pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pelaku bisnis, masyarakat, dan media menjadi hal penting yang perlu untuk diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan untuk percepatan pembangunan di berbagai sektor;
d. Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025;
e. Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025;
f. Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, sehingga mempunyai nilai manfaat tinggi bagi masyarakat DKI Jakarta; dan
g. Pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan serta didukung oleh pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat.

Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 menunjukkan respons daerah terhadap perkembangan kebijakan pusat serta komitmen Jakarta dalam menjaga efektivitas perencanaan dan penganggaran. Selain itu, komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan, serta mewujudkan pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan Jakarta Kota Global yang Berketahanan, Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan di tahun 2025.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Halaman ini sengaja dikosongkan



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA

bappeda.jakarta.go.id

sekretariat.bappeda@jakarta.go.id

Bappeda Provinsi DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8–9, Grha Ali Sadikin
Lantai 2, Jakarta Pusat, 10110